



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2016 – 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016-2021

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Maksud dan Tujuan	I - 4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan	I - 4
1.4 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 6
1.5 Sistematika Penulisan.....	I - 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1 Aspek Geografi	II - 1
2.2 Aspek Demografi	II - 19
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 24
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II - 54
2.5 Aspek Daya Saing Daerah	II- 138
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 8
3.3 Kerangka Pendanaan	III - 14
BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS	IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV - 1
4.2 Isu – Isu Strategis	IV – 10
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V - 1
5.1 Visi	V - 1
5.2 Misi	V - 2
5.3 Tujuan dan Sasaran.....	V – 3
5.4 Indikator Kinerja Misi	V - 8

BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI - 1
	6.1 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi	VI - 1
	6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI - 27
	6.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Tahunan	VI - 29
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII - 1
	7.1 Kebijakan Umum Pembangunan	VII - 1
	7.2 Program Pembangunan Daerah	VII - 3
	7.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah	VII -56
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII - 1
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX - 1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN	X - 1
	10.1 ..Pedoman Transisi	X - 1
	10.2..Kaidah Pelaksanaan	X - 2
BAB XI	PENUTUP.....	XI - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Konsistensi Misi RPJPD Kabupaten Semarang dengan Misi RPJMD Kabupaten Semarang	I - 8
Tabel 1.2	Konsistensi RPJMD Kabupaten Semarang dengan RPJMN	I - 9
Tabel 1.3	Konsistensi RPJMD Kabupaten Semarang Dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	I - 10
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan ..	II - 1
Tabel 2.2	Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 4
Tabel 2.3	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Semarang Tahun 2015*)	II - 7
Tabel 2.4	Kejadian Bencana di Kabupaten Semarang.....	II - 9
Tabel 2.5	Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya	II - 9
Tabel 2.6	Kebijakan Ruang Kabupaten Semarang.....	II - 12
Tabel 2.7	Perkembangan Industri di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 13
Tabel 2.8	Obyek Wisata di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2015..	II - 16
Tabel 2.9	Data Desa Wisata Tahun 2015 Kabupaten Semarang	II - 17
Tabel 2.10	Banyaknya Hotel dan Kamar Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 18
Tabel 2.11	Banyaknya Tamu yang Menginap di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 18
Tabel 2.12	Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015.....	II - 19
Tabel 2.13	Data Penduduk Tahun 2013-2015	II - 20
Tabel 2.14	Sebaran Penduduk dan Kepadatannya per Kecamatan Tahun 2015	II - 20
Tabel 2.15	Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 22
Tabel 2.16	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 23
Tabel 2.17	Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 23
Tabel 2.18	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang Kurun Waktu Tahun 2010-2015*) (dalam juta Rp).....	II - 25
Tabel 2.19	Perkembangan PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2015*) (Juta Rupiah)	II - 26
Tabel 2.20	Perkembangan PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2015*) (Juta Rupiah)	II - 27
Tabel 2.21	Distribusi PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2015*) (Persen)	II - 28
Tabel 2.22	Distribusi PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Angka Konstan Tahun 2010-2015*) (Persen).....	II - 28
Tabel 2.23	Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015* (Persen).....	II - 30

Tabel 2.24	Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015*)(Persen).....	II - 31
Tabel 2.25	Pertumbuhan Ekonomi, Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015*).....	II - 33
Tabel 2.26	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang dengan Kabupaten/Kota	II - 33
Tabel 2.27	PDRB Perkapita Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Semarang Dalam Kurun Waktu 2010-2015*) (Juta Rupiah)	II - 34
Tabel 2.28	PDRB Perkapita Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Semarang Dalam Kurun Waktu 2010-2015*) (Juta Rupiah)	II - 34
Tabel 2.29	Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Semarang Dalam Kurun Waktu 2010-2014*).....	II - 35
Tabel 2.30	Laju Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kota Sekitar Tahun 2010-2015	II - 36
Tabel 2.31	Indeks Gini Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014	II - 36
Tabel 2.32	Pemerataan Pendapatan Penduduk versi Bank Dunia, Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014	II - 37
Tabel 2.33	Indeks Williamson Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014	II - 38
Tabel 2.34	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015*).....	II - 38
Tabel 2.35	Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014	II - 39
Tabel 2.36	Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Semarang	II - 40
Tabel 2.37	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015*)	II - 47
Tabel 2.38	Perkembangan APK dan APM Tahun 2010-2015 di Kabupaten Semarang (%)	II - 48
Tabel 2.39	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2010-2015 (%)	II - 48
Tabel 2.40	Angka Kematian Bayi Tahun 2010-2015	II - 49
Tabel 2.41	Angka Harapan Hidup (Tahun) Menggunakan Metode Baru	II - 49
Tabel 2.42	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH).....	II - 50
Tabel 2.43	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2010-2015.....	II - 51
Tabel 2.44	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 51
Tabel 2.45	Jumlah Grup Kesenian di Kab.Semarang Tahun 2010-2015	II - 52

Tabel 2.46	Jumlah Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 52
Tabel 2.47	Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 53
Tabel 2.48	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Semarang dan Daerah Sekitar Tahun 2010-2015	II - 53
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Wajib Tahun 2010-2015.....	II - 54
Tabel 2.50	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 (%)	II - 63
Tabel 2.51	Perkembangan Ketersediaan Sekolah/Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 63
Tabel 2.52	Perkembangan Rasio Guru/Murid Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 63
Tabel 2.53	Perkembangan Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015.....	II - 64
Tabel 2.54	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2010-2015 (%).....	II - 64
Tabel 2.55	Perkembangan Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015.....	II - 65
Tabel 2.56	Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 65
Tabel 2.57	Perkembangan Sekolah Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 (%).....	II - 65
Tabel 2.58	Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Kabupaten Semarang) Tahun 2010-2015 (%).....	II - 66
Tabel 2.59	Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal, Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Tahun 2015	II - 67
Tabel 2.60	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Semarang Tahun 2013-2015 (%).....	II - 69
Tabel 2.61	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 (%).....	II - 74
Tabel 2.62	Status dan Kewenangan Jalan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 75
Tabel 2.63	Kondisi Jalan yang Menjadi Wewenang Kabupaten Tahun 2010-2015	II - 76
Tabel 2.64	Jenis, Jumlah Jaringan Irigasi, Panjang Saluran dan Areal Sawah Irigasi di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 76
Tabel 2.65	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Semarang (%)	II - 78
Tabel 2.66	Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 82
Tabel 2.67	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Kabupaten Semarang.....	II - 83

Tabel 2.68	Penggunaan Lahan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	II - 84
Tabel 2.69	Rasio Luas Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB Tahun 2010-2015	II - 84
Tabel 2.70	RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015.....	II - 85
Tabel 2.71	Jaringan Trayek dan Kebutuhan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Semarang Tahun 2015	II - 86
Tabel 2.72	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan Kabupaten Semarang Tahun 2013-2015 (%).....	II - 87
Tabel 2.73	Penanganan Persampahan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 89
Tabel 2.74	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015.....	II - 89
Tabel 2.75	Luas Permukiman Tertata di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 90
Tabel 2.76	Indeks Kualitas Air Sungai.....	II - 91
Tabel 2.77	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Tahun 2013-2015 (%).....	II - 94
Tabel 2.78	Realisasi Penerbitan Dokumen Kependudukan Tahun 2010-2015 (lembar)	II - 97
Tabel 2.79	Database Kependudukan Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 97
Tabel 2.80	Jumlah Kepemilikan KTP dan KK Tahun 2010-2015	II - 98
Tabel 2.81	Jumlah Perekaman KTP –el Tahun 2012-2014	II - 98
Tabel 2.82	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta Tahun 2010-2015.....	II - 98
Tabel 2.83	Rasio KDRT Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 99
Tabel 2.84	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2001-2015	II -100
Tabel 2.85	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2010-2015..	II -100
Tabel 2,86	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Tahun 2010-2015.....	II -101
Tabel 2.87	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Semarang Tahun 2013-2015 (%).....	II -102
Tabel 2.88	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2010-2015 ...	II -103
Tabel 2.89	Rasio Akseptor KB Tahun 2010-2015	II -103
Tabel 2.90	Cakupan Peserta Aktif Tahun 2010-2015	II -104
Tabel 2.91	Warga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Tahun 2010-2015	II -105
Tabel 2.92	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang Tahun 2013-2015 (%)	II -106
Tabel 2.93	Penanganan PMKS Tahun 2010-2015	II -106
Tabel 2.94	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan PMKS Tahun 2010-2015	II-108

Tabel 2.95	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 (%).....	II -110
Tabel 2.96	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010-2015	II -111
Tabel 2.97	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2010-2015.....	II -111
Tabel 2.98	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010-2015.....	II -112
Tabel 2.99	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Kabupaten Semarang Tahun 2013-2015 (%).....	II -113
Tabel 2.100	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian Kabupaten Semarang Tahun 2013-2015 (%).....	II -115
Tabel 2.101	Jumlah Sekdes dan Perangkat Desa	II -120
Tabel 2.102	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Semarang Tahun 2013-2015 (%)	II -122
Tabel 2.103	Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2012-2015	II -123
Tabel 2.104	Kelompok Binaan LPM Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II -124
Tabel 2.105	Capaian Urusan Statistik Tahun 2010-2015.....	II -124
Tabel 2.106	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2013-2015 (%)	II -125
Tabel 2.107	Capaian Indikator Kinerja Fokus Pelayanan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II -127
Tabel 2.108	Cakupan Bina Kelompok Tani Perkembangan Kelas Kelompok Ternak di Kabupaten Semarang	II -131
Tabel 2.109	Potensi Hutan Tahun 2010-2015.....	II -134
Tabel 2.110	Perkembangan Produksi Perikanan	II -135
Tabel 2.111	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014(Rp Milyar).....	II -138
Tabel 2.112	Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014 (%)	II -139
Tabel 2.113	Nilai Tukar Petani Kabupaten Semarang Tahun 2012-2015	II -140
Tabel 2.114	Jumlah Lembaga Keuangan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II -142
Tabel 2.115	Jumlah Restoran, Penginapan/Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II -143
Tabel 2.116	Jumlah Demo dan Kriminalitas di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II -143
Tabel 2.117	Standar Waktu Penyusunan Perijinan	II -144
Tabel 2.118	Jumlah Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II -145
Tabel 2.119	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II -148
Tabel 2,120	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Semarang Tahun 2013-2015	II -149

Tabel 2.121	Rasio Ketergantungan Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015	II - 149
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 (Rupiah)	III - 2
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015	III - 5
Tabel 3.3	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah).....	III - 6
Tabel 3.4	Neraca Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)	III - 7
Tabel 3.5	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015	III - 10
Tabel 3.6	Rasio Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 (%).....	III - 11
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Semarang Tahun 2012-2015 (Milyar Rupiah) ...	III - 12
Tabel 3.8	Surplus (Defisit) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 (Rp Milyar)	III - 13
Tabel 3.9	Penutup Defisit Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 (Rp Milyar)	III - 14
Tabel 3.10	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 (Rp Milyar).....	III - 14
Tabel 3.11	Pengolahan wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Semarang Tahun 2012-2015 (Rp Milyar).....	III - 15
Tabel 3.12	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2016-2021 (RP Milyar)	III - 16
Tabel 3.13	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021	III - 18
Tabel 3.14	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Rp Milyar).....	III - 20
Tabel 3.15	Proyeksi Penutup Defisit Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021(RP Milyar).....	III - 21
Tabel 3.16	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Rp Milyar).....	III - 22
Tabel 3.17	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Rp Milyar)	III - 23
Tabel 3.18	Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, Prioritas II dan III Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021	III - 24
Tabel 4.1	Capaian RPJPD Dilihat Dari RPJMD Tahun 2010-2015	IV - 2
Tabel 4.2	Identifikasi Permasalahan dan Target RPJPD Tahap III	IV - 16
Tabel 4.3	Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya	IV - 31
Tabel 4.4	Kebijakan Ruang Kabupaten Semarang	IV - 33
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Target Kinerjanya	

	Berdasarkan Misi RPJMD Tahun 2016-2021	V - 9
Tabel 6.1	Kleterkaitan Visi, Isu Strategis dan Strategi	VI - 33
Tabel 7.1	Hubungan Keterkaitan Antara Program Pembangunan Dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Tiap-Tiap Misi RPJMD	VII - 12
Tabel 7.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021	VII - 56
Tabel 7.3	Keterkaitan Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021	VII - 61
Tabel 8.1	Program Prioritas Pembangunan (Prioritas II) Tahun 2016-2021 dan Kebutuhan Pendanaannya	VIII - 2
Tabel 8.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan.....	VIII - 6
Tabel 9.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021	XI - 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD	I - 3
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 7
Gambar 2.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Semarang	II - 1
Gambar 2.2	Peta Rawan Bencana Kabupaten Semarang	II - 8
Gambar 2.3	Peta Pola Ruang.....	II - 11
Gambar 2.4	Kepadatan dan Sebaran Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2015.....	II - 21
Gambar 2.5	Distribusi Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) Tahun 2015	II - 30
Gambar 2.6	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015.....	II - 32
Gambar 2.7	Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015	II - 47
Gambar 2.8	Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2010-2015	II - 50
Gambar 2.9	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	II - 95
Gambar 2.10	Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah (%).....	II - 95
Gambar 2.11	Kepemilikan KTP (orang)	II - 96
Gambar 2.12	Tingkatan Prestasi Olah Raga Kabupaten Semarang Tahun 2014-2015.....	II - 116
Gambar 2.13	Sebaran Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2012-2015.....	II - 137
Gambar 4.1	Peta Pola Ruang	IV - 33
Gambar 5.1	Bangunan Maju MATRA	V - 7



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 -2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 – 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2018.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/ kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
21. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
22. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
25. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan SKPD.
26. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
28. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

29. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.
30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
31. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
32. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
33. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
- d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
- f. BAB VI : Strategi Dan Arah Kebijakan
- g. BAB VII : Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
- h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- j. BAB X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
- k. BAB XI : Penutup

Pasal 4

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2016.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan RPJMN.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman :

- a. Penetapan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan RKPD Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- c. instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2016-2021.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. Pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. Pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda;
- (5) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.

Pasal 9

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat RPJMD Tahun 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2016) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 16 – 8 - 2016

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 16 – 8 – 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

TTD

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN SEMARANG



SUKATON PURTOMO PRIYATMO

Bappeda Kab. Semarang (2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 –
2021

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati sesuai Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, dan misi Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah; memuat visi, misi, arah dan kebijakan keuangan daerah; isu – isu strategis pembangunan daerah; kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif .

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan perundang – undangan,yang berlaku.

RPJMD akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ Pemangku Kepentingan “ adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain unsur – unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai politik, LSM/ORMAS kabupaten, serta desa/kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 15

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

Bappeda Kab. Semarang (2016)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pelaksanaan pembangunan yang meliputi berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek infrastruktur dan aspek lainnya.

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu pada setiap Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Dalam ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Terpilihnya Dr. H. MUNDJIRIN E.S, Sp. OG dan NGESTI NUGRAHA, SH. Sebagai Bupati Semarang dan Wakil Bupati Semarang periode 2016-2021 dan pelantikannya pada tanggal 17 Februari 2016, menjadi momentum dimulainya penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Semarang merupakan pelaksanaan tahap III (2015-2019) dan tahap IV (2020-2024) RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025. Arah pembangunan Tahap III RPJPD adalah mengembangkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan upaya pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Sedangkan arah pembangunan Tahap IV RPJPD adalah upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Semarang yang adil, mandiri dan sejahtera melalui pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Kabupaten Semarang yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021 dan untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, Kabupaten Semarang menyusun RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran Visi - Misi Kepala Daerah terpilih setelah disesuaikan dengan RPJPD, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, dan bagi PD dalam menyusun Renstra. Disamping itu RPJMD juga digunakan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* di Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.

Proses penyusunan RPJMD pada dasarnya terbagi dalam 5 (lima) tahap yaitu penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan Musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD dan penetapan RPJMD. Proses-proses tersebut memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratis diterapkan melalui penggunaan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

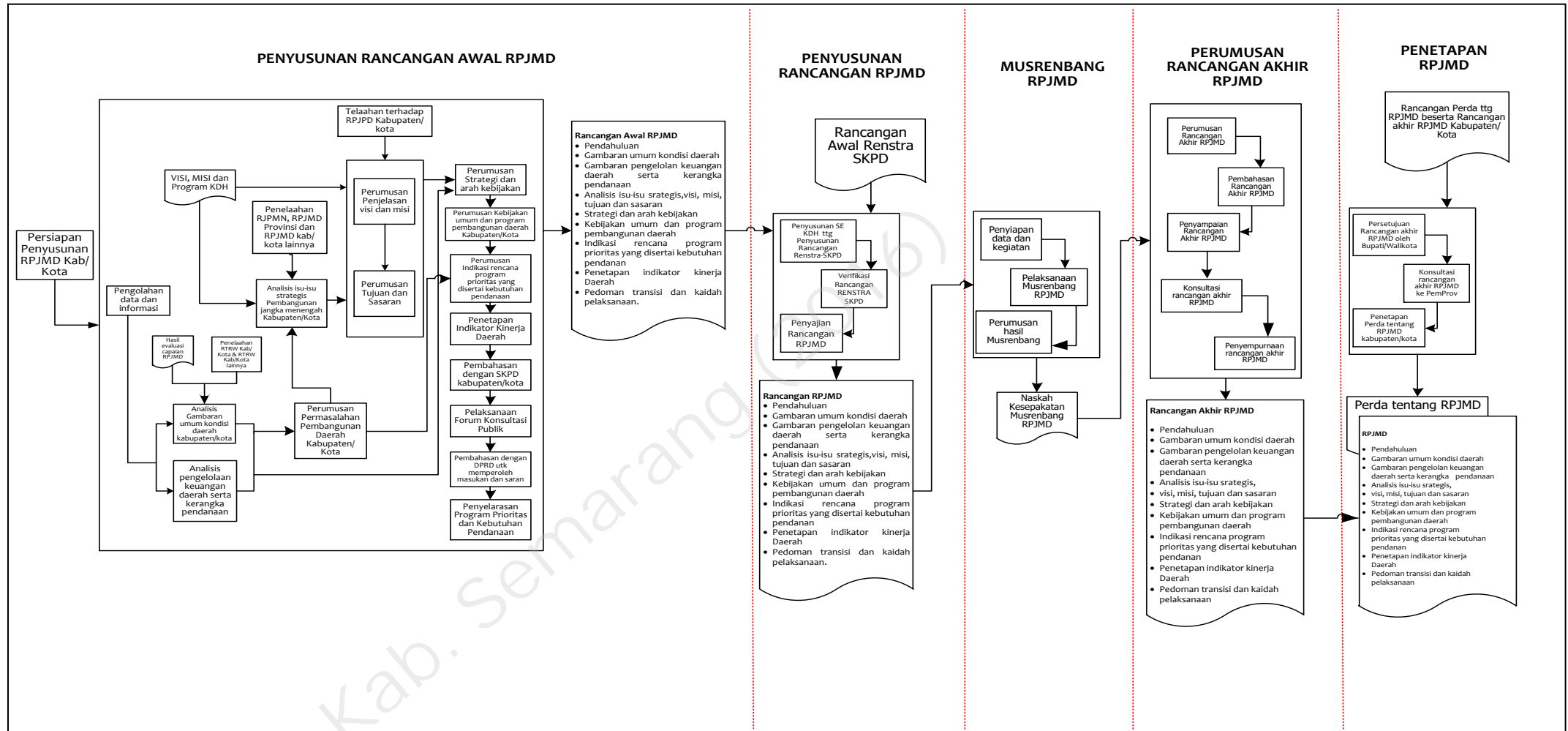
Pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melalui konsultasi publik dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Secara rinci proses penyusunan RPJMD dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1
Proses Penyusunan RPJMD



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, prioritas program dan proyeksi indikatif pendanaan. Dokumen ini menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD, penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah yaitu RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya RKPD menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Maksud disusunnya RPJMD adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholder* pembangunan daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sejalan dengan tujuan nasional dan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Tujuan disusunnya RPJMD adalah agar seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan dapat berjalan secara terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya, dalam satu kesatuan pola sikap serta pola tindak, sehingga penggunaan sumberdaya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1).

1.4 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang terencana, sinergis dan berkesinambungan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran, yaitu: RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

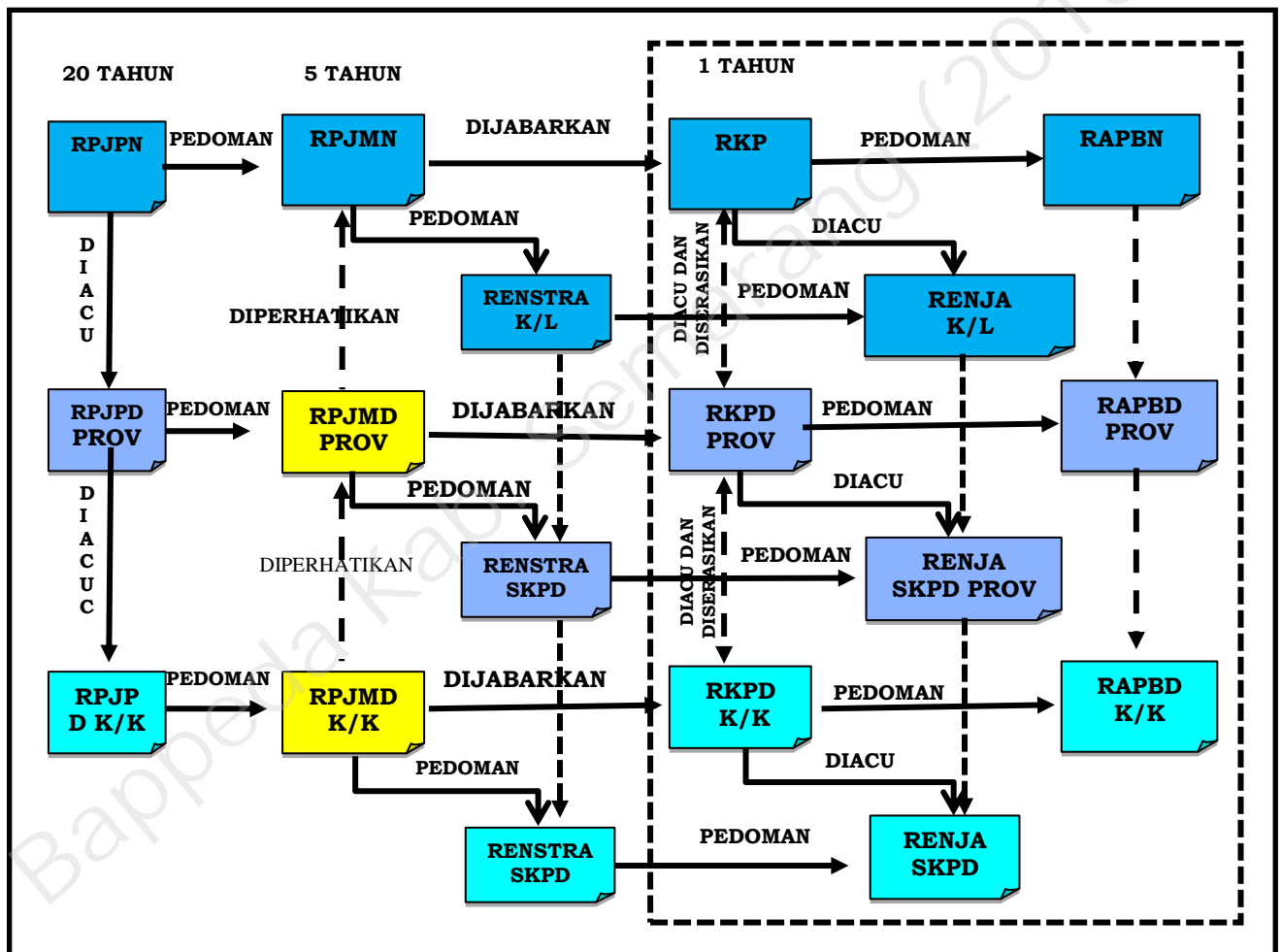
RPJMD Kabupaten Semarang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya perpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Semarang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yakni RKPD sekaligus menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra PD. Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. RKPD dan RKA PD inilah yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan APBD.

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkhis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi acuan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek. Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih tinggi menjadi rujukan bagi pemerintah dibawahnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RPJMD merupakan satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJMD Tahun 2016–2021 disusun mengacu pada RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 serta RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031.

Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana Gambar 1.2 :

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4.1 KONSISTENSI RPJMD KABUPATEN SEMARANG DENGAN RPJPD KABUPATEN SEMARANG

RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2016-2021 disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Semarang tahun 2005-2025. Konsistensi antara RPJMD Kabupaten Semarang dengan RPJPD Kabupaten Semarang dapat dilihat dengan menyandingkan antara, visi dan misi dalam RPJMD dengan visi dan misi dalam RPJPD.

Visi RPJPD : Kabupaten Semarang yang Adil, Mandiri dan Sejahtera

Visi RPJMD : Peneguhan Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera

Sekilas ada sedikit perbedaan, namun sebenarnya ada kesamaan semangat. Visi dalam RPJMD sifatnya melengkapi dan memperkuat visi dalam RPJPD.

Makna kata adil dalam RPJPD sudah tersirat dalam makna sejahtera dalam visi RPJMD, yaitu kemampuan mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama, dapat beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, hidup secara harmonis dan saling toleransi. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra sejahtera, pemenuhan kebutuhan pokok, masyarakat, pangan, sandang dan papan.

Keterkaitan konsistensi misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat sebagaimana tabel 1.1

Tabel 1.1
Konsistensi Misi RPJPD Kabupaten Semarang dengan Misi RPJMD Kabupaten Semarang

NO	MISI RPJPD	MISI RPJMD
1	Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada TuhanYME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada TuhanYME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2	Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.	Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
3	Meningkatkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) demokratis dan bertanggung jawab didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.	Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>good governance</i> didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.
4	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan wilayah, menyediakan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.	Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.
5	Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan	Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan.
6	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya	Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui, bahwa antara RPJMD Kabupaten Semarang dengan RPJPD Kabupaten Semarang sangat erat kaitannya, bahkan hampir 100% misi RPJMD sama dengan misi dalam RPJPD.

1.4.2 KONSISTENSI RPJMD KABUPATEN SEMARANG DENGAN RPJMN

RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 juga memperhatikan sembilan agenda prioritas dalam RPJMN. Konsistensi ini dapat dilihat dari keterkaitan antara delapan tujuan dalam RPJMD dengan Sembilan agenda prioritas dalam RPJMN, sebagaimana tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Konsistensi RPJMD Kabupaten Semarang dengan RPJMN

NO	TUJUAN DALAM RPJMD	AGENDA PRIORITAS DALAM RPJMN
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Butir kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia
2	Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi	Butir kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia
3	Meningkatkan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.	Butir keenam: Menciptakan kesetimbangan dan keberlanjutan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam
4	Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Butir kedua: membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
5	Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi.	Butir kedelapan: Melakukan revolusi karakter bangsa
6	Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa.	Butir ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
7	Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak.	Butir kesembilan: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
8	Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan	Butir kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam merumuskan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Semarang sangat memperhatikan agenda prioritas nasional, meskipun tidak semua agenda dapat diakomodir pada tataran kabupaten.

1.4.3 KONSISTENSI RPJMD KABUPATEN SEMARANG DENGAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018

RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Konsistensi ini dapat dilihat dari keterkaitan antara delapan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Semarang dengan Tujuan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagaimana tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3
Konsistensi RPJMD Kabupaten Semarang
Dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

NO	TUJUAN DALAM RPJMD KABUPATEN SEMARANG	TUJUAN DALAM RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Misi 6)
2	Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan 2. Meningkatkan budaya baca masyarakat (Misi 6)
3	Meningkatkan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.	1. Mengembangkan koperasidan UMKM 2. Meningkatkan kelembagaan ekonomi perdesaan 3. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri (Misi 2)
4	Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	1. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, professional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima 2. Menciptakan system birokrasi yang transparan dan akuntabel (Misi 3)
5	Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi.	1. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi (Misi 2)
6	Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa.	1. Mewujudkan pembangunan berkeadilan (Misi 2) 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

NO	TUJUAN DALAM RPJMD KABUPATEN SEMARANG	TUJUAN DALAM RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH
		3. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas (Misi 6) 4. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi 5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi (Misi 7)
7	Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak.	1. Mewujudkan desa mandiri/ berdikari melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energy (Misi 2) 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 3. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat (Misi 5)
8	Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan	1. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan (Misi 7)

Dari tabel 1.3 diatas diketahui bahwa rumusan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Semarang, semuanya terhubung dengan tujuan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

1.4.4 KONSISTENSI RPJMD KABUPATEN SEMARANG DENGAN RTRW KABUPATEN SEMARANG

Penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai struktur dan pola tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya daerah sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.4.4.1 Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

Sistem pusat pelayanan meliputi:

- a. Pusat pelayanan kegiatan ;
- b. Sistem perwilayahan

Rencana pusat pelayanan kegiatan meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ungaran,
- 2) PKL Perkotaan Ambarawa, Tengaran dan Suruh
- 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Bergas, Pringapus, Bandungan, Sumowono, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Getasan, Pabelan, Susukan, Kaliwungu, Bancak dan Bringin.
- 4) Pusat Pelayanan lingkungan pada setiap desa
- 5) Kawasan agropolitan meliputi kawasan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak

Sedangkan sistem perwilayahan meliputi 3 (tiga): Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), yaitu:

- 1) SWP-1 yaitu kawasan yang ditetapkan menjadi bagian ibukota kabupaten serta kawasan sekitarnya yang termasuk dalam jangkauan pelayannya, meliputi kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas dan Pringapus dengan pusat pengembangan di perkotaan Ungaran;
- 2) SWP-2 yaitu kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari kota Ambarawa, meliputi kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen dan Sumowono dengan pusat pengembangan di perkotaan Ambarawa;
- 3) SWP-3 yaitu kawasan yang berada di daerah selatan meliputi kecamatan Suruh, Tengaran, Getasan, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bancak dan Bringin dengan pusat pengembangan di perkotaan Suruh dan Tengaran

Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

- a. Sistem prasarana utama
- b. Sistem prasarana lainnya

Sistem prasarana utama dilakukan dengan mengembangkan sistem transportasi, yang meliputi jaringan transportasi darat dan jaringan perkeretaapian. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan serta jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Sedangkan rencana pengembangan jaringan perkeretaapian meliputi pengembangan jalur kereta api untuk komuter dan wisata ruas Kedungjati-Bringin- Tuntang-Ambarawa dan ruas Bedono-Jambu-Ambarawa-Tuntang serta pengembangan dan revitalisasi stasiun kereta api di Bedono, Jambu, Ambarawa dan Tuntang

Sistem prasarana lainnya dalam Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

a. Sistem jaringan energi, meliputi:

- 1) Pengembangan pembangkit tenaga listrik dan prasarana kelistrikan
- 2) Pengembangan prasarana energy bahan bakar minyak dan gas

b. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

- 1) pengembangan jaringan telekomunikasi sistem jaringan kabel

- 2) pengembangan jaringan telekomunikasi sistem nirkabel
- c. Sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
- 1) pengelolaan DAS dan sub DAS
 - 2) Pembangunan waduk dan embung
 - 3) Pengembangan jaringan irigasi
 - 4) Pengembangan jaringan air baku untuk air minum, dan
 - 5) Pengembangan sistem pengendali banjir
- d. Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan meliputi:
- 1) Sistem persampahan
 - 2) Sistem sanitasi lingkungan
 - 3) Sistem jaringan air minum, dan
 - 4) Sistem jaringan drainase
- e. Pengembangan jalur evakuasi bencana, meliputi:
- 1) Jalur evakuasi bencana gunung berapi
 - 2) Jalur evakuasi bencana banjir
 - 3) Jalur evakuasi bencana longsor

1.4.4.2 Rencana Pola Ruang Wilayah

Pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pola ruang kawasan lindung meliputi:

- a. Kawasan lindung hutan
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- c. Kawasan perlindungan setempat
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
- e. Kawasan rawan bencana alam
- f. Kawasan lindung geologi

Pola ruang kawasan budidaya, meliputi:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat
- b. Kawasan peruntukan pertanian
- c. Kawasan peruntukan perikanan
- d. Kawasan peruntukan pertambangan
- e. Kawasan peruntukan industri
- f. Kawasan peruntukan pariwisata
- g. Kawasan peruntukan permukiman

1.4.4.3 Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) ditetapkan dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

KSN adalah kawasan Kedungsepur, sedangkan KSP meliputi: KSP bidang pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan perkotaan Kedungsepur, KSP bidang social budaya kawasan candi Gedongsongo, KSP bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan pemanfaatan panas bumi di gunung Ungaran, KSP bidang

perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan taman nasional gunung Merbabu, kawasan Rawa Pening dan kawasan DAS Garang.

KSK terdiri dari:

- a. KSK bidang pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - 1) Kawasan industri di kecamatan Pringapus, Bawen, Tengaran, Susukan dan Kaliwungu
 - 2) Kawasan perkotaan Ungaran, Ambarawa, Suruh dan Tengaran
 - 3) Kawasan cepat berkembang di sekitar jalan tol sepanjang jalan Ungaran-Bawen
 - 4) Kawasan pusat pengembangan pariwisata Bandungan dan Kopeng
- b. KSK bidang sosial dan budaya, di kota bersejarah Ambarawa
- c. KSK bidang pemberdayaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, meliputi:
 - 1) Kawasan pembangkit listrik tenaga air Jelok dan Timo
 - 2) Kawasan pemanfaatan panas bumi di gunung Telomoyo
- d. KSK perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - 1) Kawasan lindung gunung Ungaran dan gunung Telomoyo
 - 2) Kawasan hulu sungai Bodri di Sumowono
- e. KSK bidang pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1) Kawasan militer di Ambarawa
 - 2) Kawasan peruntukan basis militer, daerah latihan militer, daerah uji coba sistem persenjataan di Sumowono, gunung Telomoyo dan gunung Ungaran

Seluruh ketentuan dalam RTRW sebagaimana diuraikan di atas diperhatikan dan dipedomani dalam menyusun program-program pembangunan dalam RPJMD ini.

1.5 KONSISTENSI RPJMD KABUPATEN SEMARANG DENGAN KLHS KABUPATEN SEMARANG

RPJMD sudah memperhatikan dokumen KLHS yang disusun dengan mitigasi, identifikasi, dan alternative terhadap kajian visi, misi, kebijakan, arah, tujuan. Sasaran dan program yang termuat pada RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021. Dari 140 program yang termuat pada RPJMD ada 34 program yang berdampak lingkungan dan telah dilakukan mitigasi alternatif dan rekomendasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang terdiri dari 11 (sebelas) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Semarang secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Dalam Bab ini membahas 4 (empat) aspek, yaitu: (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan umum, serta (4) aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yaitu kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016–2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan hubungan antara urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah Kabupaten Semarang dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan tentang RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama kepemimpinan Bupati periode berikutnya, dan kaidah pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.

BAB XI PENUTUP

Bappeda Kab. Semarang (2016)

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada 110°14'54,75" sampai dengan 110°39'3" Bujur Timur dan 7°3'57" sampai dengan 7°30' Lintang Selatan.

Luas Kabupaten Semarang sebesar 95.020,67Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah, secara administratif terdiri 19 wilayah Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan

NO.	KECAMATAN	LUAS (Ha)	%
1	Getasan	6.579,55	6,92
2	Tengaran	4.729,55	4,98
3	Susukan	4.866,60	5,14
4	Kaliwungu	2.995,00	3,15
5	Suruh	6.401,52	6,74
6	Pabelan	4.797,60	5,05
7	Tuntang	5.624,20	5,92
8	Banyubiru	5.441,45	5,73
9	Jambu	5.163,00	5,43
10	Sumowono	5.563,20	5,85
11	Ambarawa	2.822,10	2,97
12	Bandungan	4.823,30	5,08
13	Bawen	4.657,00	4,90
14	Bringin	6.189,10	6,51
15	Bancak	4.384,55	4,61
16	Pringapus	7.834,70	8,25
17	Bergas	4.733,10	4,98
18	Ungaran Barat	3.596,05	3,78
19	Ungaran Timur	3.799,10	4,00
	Jumlah	95.020,67	100

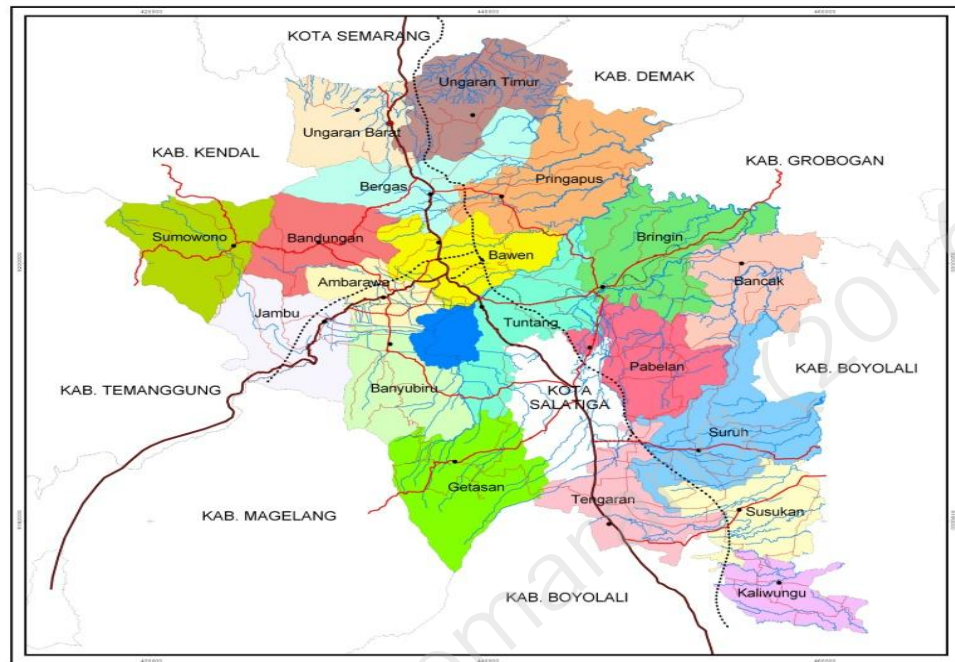
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

Kecamatan Pringapus memiliki luas terbesar yaitu 8,25% dari luas keseluruhan Kabupaten Semarang, diikuti oleh Kecamatan Getasan (6,92%), Kecamatan Suruh (6,74%) dan Kecamatan Bringin (6,51%), sedangkan luas terkecil adalah Kecamatan Ambarawa (2,97%), diikuti Kecamatan Kaliwungu (3,15%) dan Kecamatan Ungaran Barat (3,78%).

Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak di sebelah Utara, dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan di sebelah Timur, dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung di sebelah Barat dan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang di sebelah Selatan, serta dengan Kota Salatiga

yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Semarang. Untuk lebih jelasnya letak Kabupaten Semarang dapat kita lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Semarang



Sumber: Bappeda Kabupaten Semarang Tahun 2011

Posisi Kabupaten Semarang secara geografis sangat strategis karena terletak antara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah yaitu Yogyakarta, Solo dan Semarang (Joglosemar). Kondisi ini membawa Kabupaten Semarang menjadi kawasan yang cepat tumbuh berkembang terutama pada kawasan sekitar outlet-inlet atau di sekitar jalur jalan tol seperti pada Kota Ungaran, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bawen dan wilayah di sekitar Kota Salatiga di Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu.

Distribusi barang/jasa antara ketiga kota besar (Yogyakarta, Solo dan Semarang), juga memberi dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Semarang. Kota Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang juga berperan besar sebagai *hinterland* (daerah penyangga) bagi kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, baik sebagai tempat permukiman, pertanian maupun aktivitas industri, antara lain karena letak Kabupaten Semarang yang tidak jauh dari pelabuhan laut (± 25 km) dan pelabuhan udara (± 23 km). Kawasan perkotaan Ungaran juga berperan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) metropolitan Semarang atau kawasan strategis Kedungsepur.

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Semarang sebagian besar berupa perbukitan dan memiliki relief daerah pegunungan vulkanik serta dataran di bagian tengahnya, secara topografi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Daerah dataran, meliputi daerah yang berada di sekitar Rawa Pening dan sekitarnya, meliputi sebagian Kecamatan Banyubiru dan sebagian Kecamatan Tuntang.
2. Daerah perbukitan-pegunungan, meliputi hampir seluruh wilayah administratif Kabupaten Semarang, dengan penyebaran sampai ke lereng Utara dan Timur Gunung Merbabu

Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.297 Hektar; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.640 Hektar; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.706 Hektar; dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.438 Hektar.

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 318-1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan.

Kabupaten Semarang merupakan bagian dari jajaran pegunungan yang membentang dengan arah relatif Timur Barat, dikenal sebagai Pegunungan Serayu Utara, terhampar dari sebelah Barat Gunung Slamet, Pemalang, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung hingga Ungaran. Rangkaian pegunungan ini memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Puncak-puncak pegunungan ini merupakan kerucut gunung api dan beberapa diantaranya masih aktif. Deretan pegunungan ini merupakan daerah resapan yang potensial bagi ketersediaan air bawah tanah. Bagian Timur dari Pegunungan Serayu Utara, sebelah Timur dari Gunung Ungaran, terdapat deretan Pegunungan Kendeng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Bringin. Diantara kedua pegunungan di atas terdapat daerah lembah yang meliputi Rawa Pening dan sekitarnya, berfungsi sebagai daerah pelepasan air tanah dan mempunyai potensi air tanah yang cukup besar.

Secara stratigrafi, daerah Kabupaten Semarang dan sekitarnya tersusun secara dominan oleh endapan vulkanik beberapa gunung api yang ada di sekitar daerah ini seperti Gunung Ungaran dan Gunung Merbabu. Batuan lain penyusun daerah ini adalah intrusi batuan beku berupa dasit di sekitar Ungaran dan sebelah Barat Ambarawa, napal bagian dari Formasi Kerek, yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng, serta endapan *alluvium* yang tersebar di sekitar Rawa Pening.

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Semarang dan sekitarnya cukup kompleks, terutama pensesaran yang cukup intensif. Perlapisan batuan di daerah ini dijumpai pada daerah sebelah Utara mempunyai kemiringan dengan arah bervariasi, dominan ke arah Selatan hingga Barat. Sesar yang terdapat pada daerah ini adalah sesar-sesar geser dengan arah dominan Utara-Selatan. Sesar-sesar tersebut diantaranya adalah Sesar G. Pobongan-Ungaran, Sesar Ungaran, Sesar Ungaran-Ambarawa serta Sesar G. Tungku Jambu.

Namun demikian perlu dicatat bahwa Kabupaten Semarang memiliki daerah rawan bencana. Untuk tanah longsor adalah Kecamatan Ungaran Barat, Sumowono, Banyubiru, Getasan, Jambu, dan Bringin. Untuk puting beliung adalah Kecamatan Pabelan, Getasan, Bringin, dan Suruh. Daerah rawan banjir adalah Kecamatan Ungaran Timur, Bergas, Pringapus, dan Ambarawa.

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang dan Semarang dan Peta Geologi Lembar Salatiga, batuan yang terdapat di Kabupaten Semarang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu batuan sedimen, batuan gunung api, dan alluvial.

- a. Batuan Sedimen, terdiri dari perselingan antara batu lanau, batu lempung, batu pasir, dan napal dengan sisipam batu gamping yang penyebarannya terdapat di bagian Utara sebelah Timur, breksi gunung api dan tuf di bagian tengah, dan perselingan antara batu pasir, breksi, tuf dan batu lempung di bagian ujung Barat.
- b. Batuan Gunung Api, terdiri dari lava, breksi gunung api, lahar, dan tuf yang merupakan produk dari G. Ungaran di sebelah Utara serta G. Merbabu dan G. Telomoyo di sebelah Selatan. Selain itu terdapat pula batuan intrusi (terobosan) seperti di G. Mergi, G. Sewakul, G. Kendalisodo dan G. Gugon.
- c. Aluvial, terdiri dari lempung, pasir, kerikil, dan kerakal yang penyebarannya terdapat di dalam alur-alur sungai serta dataran di sekitar Rawa Pening.

2.1.1.4 Kondisi Klimatologi

Rata-rata curah hujan di wilayah Kabupaten Semarang selama Tahun 2015 cenderung menurun dibanding Tahun 2014. Tercatat rata-rata curah hujan sebesar 1.565 Mm sedangkan Tahun 2014 mencapai 1.840 Mm, kecamatan bercurah hujan tertinggi adalah Kecamatan Getasan (2.519 Mm) yang terendah adalah Kecamatan Bawen (394 Mm). Suhu udara berkisar antara 16°C-33°C kecepatan angin 2-20 knot dengan kelembaban udara 39,4-97,5%.

Tabel 2.2
Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang
Tahun 2010 - 2015

No.	Kecamatan	Tahun (Mm)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Getasan	5.234	2.061	2.717	3.193	3.554	2.519
2	Tengaran	3.674	1.989	2.093	2.879	2.213	1.719
3	Susukan	3.195	2.515	1.773	2.674	1.950	2.386
4	Kaliwungu	3.222	2.217	-	1.187	1.187	2.386
5	Suruh	3.420	2.071	1.781	1.791	1.939	2.271
6	Pabelan	3.489	2.061	1.637	2.638	1.955	1.014
7	Tuntang	4.653	2.009	2.461	2.280	2.036	1.405
8	Banyubiru	3.464	2.239	1.741	2.472	1.812	1.003
9	Jambu	3.973	2.089	1.793	2.794	2.172	1.771
10	Sumowono	3.813	2.847	2.632	2.464	598	1.035
11	Ambarawa	2.644	2.268	2.063	2.067	1.561	1.035
12	Bandungan	-	2.224	-	1.311	1.311	1.035
13	Bawen	4.304	2.224	1.701	1.311	348	394
14	Bringin	2.867	1.584	1.450	1.998	1.884	943
15	Bancak	-	1.584	742	742	742	1.619

No.	Kecamatan	Tahun (Mm)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
16	Pringapus	3.589	3.236	2.165	2.436	1.982	1.855
17	Bergas	3.847	3.236	3.123	1.772	2.332	1.380
18	Ungaran Barat	-	2.415	2.286	2.906	2.906	1.945
19	Ungaran Timur	-	2.415	-	2.906	2.484	1.945
	Jumlah	3.643	2.334	2.010	2.201	1.840	1.565

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang, 2015

2.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Semarang tercermin dari sifat fisik batuan yang berpengaruh terhadap besaran keserasangan (*porositas*) dan kelulusan (*Permeabilitas*), serta terkait dengan system aliran air tanah yang terjadi. Kondisi hidrogeologi Kabupaten Semarang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu air permukaan dan air tanah.

a. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang berada di atas muka tanah, seperti air sungai, danau, waduk dan air yang menggenang lainnya. Beberapa sungai besar antara lain: S. Tuntang, S. Garang, S. Senjoyo, S. Gobag dan S. Dersi. Selain sungai terdapat waduk yang cukup luas, yaitu Rawa Pening yang menjadi muara bagi beberapa sungai yang berhulu di G. Ungaran, G. Telomoyo dan G. Merbabu serta limpasan beberapa mata air seperti mata air Muncul. Air limpasan dari rawa ini adalah S. Tuntang yang merupakan sumber air permukaan yang paling besar dan mengalir sepanjang tahun. Air S. Tuntang telah dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jelok dan Timo di Kecamatan Tuntang.

b. Air Tanah

Air tanah adalah air yang terdapat di bawah muka tanah. Adapun tanah atau batuan yang mengandung air tanah disebut *akuifer*. Berdasarkan jenis batuan yang ada, produktifitas *akuifer* yang terdapat di Kabupaten Semarang dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Daerah Air Tanah Berproduktivitas Tinggi

Daerah ini tersebar di dua tempat, yaitu di sekitar Ungaran dan sekitar Rawa Pening. Pada air tanah bebas/dangkal di sekitar Rawa Pening, kedalaman muka air tanah berkisar antara 0,5–5 m di bawah muka tanah setempat, sedangkan di sekitar Ungaran kedalaman muka air tanah sampai 17 m.

Debit sumur dangkal di daerah sekitar Rawa Pening diperkirakan kurang dari 5 liter/detik, sedangkan daerah lainnya kurang dari 1 liter/detik. Kualitas air tanah umumnya cukup baik, kecuali di sebagian dataran alluvial sekitar Rawa Pening yang terkadang agak keruh dan bau.

Untuk air tanah dalam, akuifernya berupa batuan gunung api yang merupakan produk G.Ungaran Muda, yaitu breksi vulkanik dan lava. Kedalaman akuifer sekitar 30 m sampai lebih dari 100 m dengan debit mencapai lebih dari 25 liter/detik. Sumur bor yang airnya mengalir sendiri

dengan debit 100 liter/detik terdapat di daerah Langensari (Kalidoh) dan telah dimanfaatkan sebagai sumber air bersih Kota Semarang.

2. Daerah Air Tanah Berproduktifitas Sedang

Penyebarannya meliputi daerah di bawah kaki gunung api seperti Sumowono, Bandungan, Bergas, Ungaran Timur, Lerep, Pringapus, Jambu, Getasan, Suruh dan Tenganan. Air tanah dangkal terdapat pada kedalaman antara 4 m dan 20 m dengan debit kurang dari 3 liter/detik. Sedangkan debit air tanah dalam mencapai 10 liter/detik dan kualitasnya baik untuk air minum.

3. Daerah Air Tanah Berproduktifitas Rendah

Penyebarannya meliputi daerah Ungaran Timur Laut sampai ke Leyangan, Wringin Putih, Wonorejo, Jatirunggo, Bawen, Bringin dan daerah sekitar Susukan. Kedalaman muka air tanah ± 15 m dengan debit kurang dari 1 liter/detik.

4. Daerah Air Tanah Langka

Penyebarannya meliputi daerah G. Ungaran, G. Merbabu, G. Telomoyo, G. Butak, G. Puntang, G. Kendalisodo, G. Mergi, G. Payung, dan seluruh daerah di bagian Timur wilayah Kabupaten Semarang mulai dari Kaligawe di sebelah Timur Ungaran sampai ke Dadapayam dan Susukan.

Di Kabupaten Semarang terdapat beberapa mata air besar, antara lain adalah mata air Muncul, Siwarak dan Nyatnyono. Di kompleks mata air Muncul terdapat 2 tempat pemunculan yang saling berdekatan dengan debit masing-masing lebih dari 350 liter/detik. Mata air Siwarak terletak di lereng G. Ungaran, yaitu di Desa Lerep, sebelah Barat Laut Kota Ungaran dengan debit lebih dari 200 liter/detik. Di Desa Nyatnyono muncul mata air Ngablak dengan debit lebih dari 100 liter/detik. Di Kabupaten Semarang terdapat 125 buah mata air dengan kapasitas air 7.331,2 l/dt, tersebar di 15 Kecamatan. Selain itu terdapat 51 sungai, dengan panjang 350 km, debit air 2.668.480 l/dt, terdapat cekungan air tanah dengan produktifitas air sedang dan tinggi serta danau dengan volume air 25-65 juta m³, luas genangan 1.760-2.770 Ha (Profil Tematik Perikanan Tangkap Perairan Umum Darat di Pulau Jawa).

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Semarang, dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu lahan pertanian sawah sekitar 25,17%, lahan pertanian bukan sawah (tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/empang dan sebagainya) sekitar 38,26% dan lahan bukan pertanian (rumah/bangunan, hutan Negara, rawa, jalan, sungai, kuburan dan sebagainya) sekitar 36,56%. Dari tahun ke tahun penggunaan lahan untuk sawah berkurang, hal ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan dari sawah menjadi lahan permukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan (jalan tol dan jalan lingkar). Luas penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Semarang Tahun 2015*)

Jenis Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
1. Pertanian		60.277,10
a.	Sawah	23.918,65
b.	Bukan Sawah	36.358,45
	Tegal	24.188,47
	Perkebunan	6.987,80
	Hutan Rakyat	4.997,49
	Kolam/empang	25,25
	Padang	0
	Lainnya	159,43
2. Bukan Pertanian		34.743,57
	Rumah	20.677,49
	Hutan Negara	8.693,06
	Rawa	2.467,09
	Lainnya (jalan, sungai, kuburan, dll)	2.905,92

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan BPS
Kabupaten Semarang, 2015
*) data 2015 angka sementara

2.1.1.7 Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Potensi bencana suatu kawasan yang tinggi pada dasarnya tidak hanya sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk suatu wilayah, namun merakan kontribusi beberapa permasalahan lain sehingga meningkatkan kerentanan. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dititik-beratkan pada keselamatan jiwa manusia dan menjamin kehidupan dalam lingkungan yang lebih baik (*better life and better living*) serta tertata pada kondisi yang terbebas dari ancaman bencana (Pergub. No. 88/2007 tentang RAD PRB Provinsi Jawa Tengah 2008-2013). Penetapan kawasan rawan bencana memudahkan untuk pengaturan kegiatan di atas kawasan tersebut dan mencegah timbulnya dampak yang tidak diinginkan. Kawasan rawan bencana Alam di Kabupaten Semarang berupa Kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan longsor dan kawasan rawan banjir.

2.1.1.7.1 Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Kawasan rawan letusan gunung api, merupakan daerah yang diperkirakan akan dilalui luncuran awan panas dan lahar maupun jatuhnya material. Kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi kawasan sangat rawan yaitu daerah pada jarak 0 hingga 5 kilometer dari puncak gunung dan kawasan agak rawan yaitu daerah pada jarak lebih dari 5 kilometer dari puncak gunung.

Berdasarkan peta bencana gunung api yang dibuat oleh Direktorat Vulkanologi Bandung, meskipun Gunung Merbabu dan Gunung Ungaran sudah lama tidak aktif namun bahaya gunung api masih berpotensi terjadi pada wilayah ini sehingga daerah yang berada di sekitar puncak Gunung Ungaran sampai ke

Sumowono, Bandungan, Munding dan Gunung Tungku (sebelah atas Nyatnyono) merupakan daerah yang diperkirakan luncuran awan panas dan lahar dan jatuhnya material. Sedang untuk Gunung Merbabu adalah mulai puncaknya gunung sampai Desa Batur.

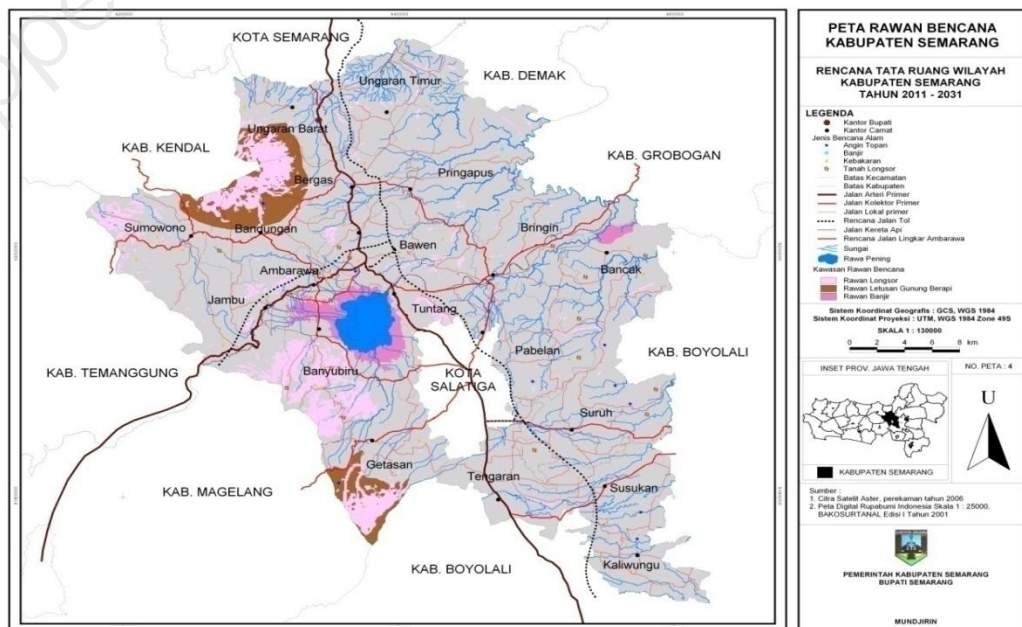
2.1.1.7.2 Kawasan Rawan Tanah Longsor atau Gerakan Tanah

Merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor/bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Di wilayah Kabupaten Semarang penyebaran kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi terutama pada wilayah Kecamatan Sumowono, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bandungan, Bawen, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Ambarawa, Getasan, Bringin, Suruh dan Susukan.

2.1.1.7.3 Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam berupa banjir atau tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan tergenang lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan normal. Di Kabupaten Semarang kawasan perlindungan bahaya banjir terdapat pada dataran sekitar Rawa Pening dan dataran bagian Timur, tepatnya sekitar Desa Boto pada daerah aliran Sungai Bancak. Disamping itu di beberapa wilayah kota juga berpotensi rawan banjir sebagai akibat dari berkembangnya permukiman dan menurunnya kualitas lingkungan.

Gambar 2.2
Peta Rawan Bencana Kabupaten Semarang



Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031

Tabel 2.4
Kejadian Bencana di Kabupaten Semarang

No	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Banjir	30	6	10	5	3	26
2	Tanah Longsor	72	29	43	45	38	132
3	Angin Puting Beliung	21	18	15	12	13	8
4	Kebakaran	24	49	19	55	58	127
5	Gempa Bumi	0	0	0	0	1	0
6	Lainnya	0	0	0	7	0	12
JUMLAH		147	102	87	124	113	305

Sumber: BPBD Kabupaten Semarang, 2015

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang, maka kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang di Kabupaten Semarang diwujudkan berdasarkan:

a. Arahannya pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan meliputi:

PKN Kedungsepur (perkotaan PKL Ungaran), PKL perkotaan Ambarawa, PKLp meliputi perkotaan Tengaran dan Suruh, PPK (perkotaan Bergas, Pringapus, Bandungan, Sumowono, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Getasan, Pabelan, Susukan, Kaliwungu, Bancak dan Bringin), Pusat Pelayanan Lingkungan pada setiap pusat Desa; dan kawasan agropolitan(kawasan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak);

b. Sistem jaringan prasarana wilayah, meliputi SWP-1 (kawasan yang ditetapkan menjadi bagian dari Ibukota Kabupaten serta kawasan sekitarnya dalam jangkauan pelayanan yaitu Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus dengan pusat pengembangan di perkotaan Ungaran), SWP-2 (kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari Kota Ambarawa yaitu Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen, dan Sumowono dengan pusat pengembangan perkotaan Ambarawa), dan SWP-3 (kawasan di daerah Selatan yaitu Kecamatan Suruh, Tengaran, Getasan, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bancak, dan Bringin dengan pusat pengembangan di perkotaan Suruh dan Tengaran).

Tabel 2.5
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	Kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat	Hutan produksi terbatas tersebar di Kecamatan Sumowono, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Pringapus, dan Kecamatan Banyubiru
		Hutan produksi tetap tersebar di Kecamatan Bergas,

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
		<p>Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bringin, dan Kecamatan Bancak</p> <p>Kawasan peruntukan hutan rakyat tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang</p>
2	Kawasan peruntukan pertanian	<p>Kawasan pertanian tanaman pangan tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang</p> <p>Kawasan hortikultura tersebar di seluruh Kecamatan</p> <p>Kawasan perkebunan tersebar di seluruh Kecamatan</p> <p>Kawasan peternakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan peternakan skala besar berlokasi pada seluruh Kecamatan di luar kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku b. Kawasan peternakan skala kecil diarahkan dalam bentuk sentra peternakan di kawasan perdesaan yang diarahkan di seluruh Kecamatan yang dikelola secara terpadu dengan kegiatan pertanian lainnya
3	Kawasan peruntukan perikanan	<p>Kawasan peruntukan budidaya perikanan kolam dapat dilakukan di seluruh Kecamatan</p> <p>Kawasan peruntukan perikanan tangkap berbasis budidaya pada perairan waduk dan sungai diarahkan di perairan Rawa Pening dan sungai di Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru, dan Kecamatan Bawen</p> <p>Kawasan minapolitan diarahkan pada Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Jambu dan Kecamatan Tuntang</p>
4	Kawasan peruntukan pertambangan	<p>Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, terdapat: di kawasan Bakalrejo dan Karangsalam (Kecamatan Susukan); kawasan Gunung Mergi (Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran Timur); kawasan Kandangan dan Polosiri (Kecamatan Bawen); kawasan Delik (Kecamatan Tuntang); kawasan Pucung (Kecamatan Bancak); kawasan sekitar Sungai Senjoyo (Kecamatan Bringin dan Kecamatan Bancak); kawasan sekitar Sungai Gading (Kecamatan Suruh); kawasan Boto dan Plumutan (Kecamatan Bancak); kawasan di seluruh Kecamatan khusus untuk pengambilan material tanah urug dengan ketentuan tidak pada kawasan lindung dan tidak merusak lingkungan; dan kawasan Rawa Pening</p> <p>Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo</p> <p>Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Bringin dan Bancak</p>

Kebijakan ruang dalam RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kebijakan Ruang Kabupaten Semarang

ASPEK	PENJELASAN
Kebijakan struktur tata ruang	- Membagi wilayah menjadi 3 SWP
Arahan pengembangan pemanfaatan ruang	- Mendorong pengembangan ke wilayah Selatan - Membatasi aktifitas industri di wilayah perkotaan Ungaran
Kebijakan pendukung struktur tata ruang	- Meningkatkan pelayanan jaringan infrastruktur di wilayah perbatasan - Mengembangkan jalan alternatif dan/atau pembangunan jalan lingkar

Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031

Selain kebijakan di atas, Kabupaten Semarang juga sudah kawasan strategis yang merupakan wilayah fungsional (*fungsional region*) ataupun wilayah homogen (*homogenous region*) yang mempunyai nilai strategis bagi pembangunan wilayah Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau bahkan pembangunan nasional. RTRW Nasional telah menetapkan adanya beberapa Kawasan Strategis Nasional di Jawa Tengah, dimana yang terkait dengan Kabupaten Semarang adalah Kawasan Strategis Metropolitan Kedungsepur. Selain kawasan tersebut, RTRW Kabupaten Semarang ini menetapkan beberapa lagi kawasan yang dipandang strategis bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Semarang.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri dari:

1. KSK bidang pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. Kawasan industri di Kecamatan Pringapus, Bawen, Tengaran, Susukan dan Kaliwungu
 - b. Kawasan perkotaan strategis pada kawasan perkotaan Ungaran, Ambarawa, Suruh dan Tengaran
 - c. Kawasan cepat berkembang di sekitar jalan Tol Semarang–Solo dan sekitar jalan Ungaran–Bawen
 - d. Kawasan pusat pengembangan pariwisata pada kawasan Bandungan dan kawasan pariwisata Kopeng
2. KSK bidang sosial dan budaya, adalah kawasan Kota bersejarah Ambarawa
3. KSK bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, meliputi:
 - a. Kawasan pembangkit listrik tenaga air Jelok dan Timo Kecamatan Tuntang
 - b. Kawasan pemanfaatan panas bumi di Gunung Telomoyo Kecamatan Getasan
4. KSK perlindungan dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Kawasan lindung Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo
 - b. Kawasan hulu Daerah Aliran Sungai Bodri di Sumowono

5. KSK bidang pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan Negara berdasarkan geostrategik nasional adalah kawasan militer di Kecamatan Ambarawa
 - b. Kawasan peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militer dan daerah uji coba sistem persenjataan adalah kawasan latihan militer di kecamatan Sumowono, Kawasan Gunung Telomoyo dan Kawasan Gunung Ungaran.

Kabupaten Semarang memiliki potensi unggulan terutama dibidang industri, pertanian, dan pariwisata. Hal ini karena faktor-faktor antara lain secara geografis posisi Kabupaten Semarang adalah sebagai Penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah, selain itu juga merupakan bagian kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR dan dilalui jalur lintas nasional Jogja-Solo-Semarang (JOGLOSEMAR) serta Potensi sumberdaya alam melimpah.

Potensi unggulan tersebut juga tergambar dari kontribusi yang telah disumbangkan terhadap PDRB Kabupaten dari tahun ke tahun yaitu berturut-turut sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian.

2.1.2.1 Potensi Industri

Industri di Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah, tenaga kerja yang terserap maupun dari nilai produksinya. Jumlah industri besar pada Tahun 2010 sebanyak 180 unit dengan tenaga kerja sebanyak 71.506 dan nilai produksinya mencapai 2,737 trilyun rupiah. Sedangkan pada Tahun 2015 jumlah industri besar mengalami kenaikan menjadi 193 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 72.387 orang dan nilai produksinya mencapai 3,196 trilyun. Sebaran industri besar mengelompok di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Pringapus dan Bergas.

Industri kecil menengah pada Tahun 2010 berjumlah 1.469 unit mampu menyerap tenaga kerja sejumlah 12.369 orang dengan nilai produksi mencapai 431 milyar rupiah. Sementara pada Tahun 2015 industri kecil menengah sebanyak 1.660 unit, mampu menyerap 13.484 orang tenaga kerja dan nilai produksinya sebanyak 601 milyar rupiah. Sedangkan untuk industri tingkat rumah tangga tercatat sebanyak 9.558 unit dengan tenaga kerja 17.016 orang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel 2.7

Perkembangan Industri di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

No	Jenis Industri	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Industri Rumah Tangga	Unit	9.553	9.290	9.558	9.558	9.558	9.558
	Tenaga Kerja	Orang	17.074	16.503	17.016	17.016	17.016	17.016
	Nilai Produksi	Jutaan	163.190,5	150.596,6	162.812,9	162.812,9	162.812,9	162.812,9
2	Industri Kecil Menengah	Unit	1.469	1.415	1.424	1.462	1.531	1.660
	Tenaga Kerja	Orang	12.369	11.542	12.169	12.352	12.049	13.483
	Nilai Produksi	Jutaan	431.479,6	409.730,8	488.027,6	492.160	449.658	601.999

No	Jenis Industri	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	Industri Besar	Unit	180	175	182	185	189	193
	Tenaga Kerja	Orang	71.506	71.578	71.998	72.135	72.290	72.387
	Nilai Produksi	Jutaan	2.737.615	2.812.531	2.850.038	2.854.699	3.066.829	3.196.628

Sumber: *Dinas Koperasi,UMKM dan Perindag Kabupaten Semarang, 2015*

2.1.2.2 Potensi Pertanian

Kabupaten Semarang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah didukung kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian sehingga terbentuklah sentra-sentra potensi komoditas pertanian dan perkebunan. Sentra komoditas tersebut antara lain padi, hortikultura, biofarmaka, tanaman hias, dan tanaman perkebunan. Potensi-potensi yang ada tersebut mendukung program-program yang dikembangkan disektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan guna menciptakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat didalamnya. Sentra tanaman pertanian dan perkebunan di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1). Tanaman Pangan

- a). Padi : Kecamatan Banyubiru, Suruh, Susukan, Ambarawa, Bringin, dan Pabelan
- b). Jagung : Kecamatan Tengaran, Getasan, Bringin, Sumowono, dan Kaliwungu, Suruh, Pabelan, Pringapus, Susukan
- c). Kedelai : Kecamatan Bringin, Bancak, Susukan, Kaliwungu, dan Pringapus
- d). Kacang tanah : Kecamatan Bancak, Kaliwungu, dan Bringin
- e). Ubi Kayu : Kecamatan Susukan, Kaliwungu, dan Suruh, Tengaran, Ungaran Timur
- f). Ubi jalar : Kecamatan Sumowono, Bergas, dan Bandungan

2). Tanaman Buah-Buahan

- a). Alpukat : Kecamatan Sumowono, Ambarawa, Getasan, Banyubiru Bandungan dan Tengaran
- b). Mangga : Kecamatan Bringin, Susukan, Bergas dan Suruh
- c). Rambutan : Kecamatan Susukan, Ungaran Barat dan Suruh
- d). Durian : Kecamatan Jambu, Banyubiru, Susukan dan Tuntang
- e). Pisang : Kecamatan Ambarawa, Getasan, Susukan, Bandungan dan Sumowono
- f). Salak : Kecamatan Ambarawa, Tengaran, Sumowono dan Banyubiru
- g). Kelengkeng : Kecamatan Jambu, Bergas, Bandungan dan Banyubiru
- h). Manggis : Kecamatan Ungaran Barat, Tuntang, Getasan, Banyubiru dan Tengaran
- i). Nangka : Kecamatan Jambu, Sumowono, Getasan Bandungan dan Banyubiru

- 3). Tanaman Hias
 - a). Gladiol : Kecamatan Bandungan
 - b). Krisan : Kecamatan Ambarawa Bandungan dan Sumowono
 - c). Mawar : Kecamatan Ambarawa dan Sumowono Bandungan
 - d). Sedap malam : Kecamatan Ambarawa dan Bawen
- 4). Tanaman Sayur-Sayuran
 - a). Bawang Daun : Kecamatan Ambarawa, Bawen, Sumowono, Bandungan dan Getasan
 - b). Kentang : Kecamatan Getasan
 - c). Kubis : Kecamatan Getasan, Tengaran, Banyubiru, dan Sumowono
 - d). Petsai/Sawi : Kecamatan Ambarawa, Bawen, Sumowono, Bandungan dan Getasan
 - e). Wortel : Kecamatan Getasan, Bandungan, dan Sumowono
 - f). Cabe Besar : Kecamatan Getasan, Ambarawa, Bandungan dan Sumowono
 - g). Cabe Rawit : Kecamatan Getasan, Ambarawa, Kaliwungu Bandungan dan Sumowono
 - h). Tomat : Kecamatan Getasan, Ambarawa, Sumowono, Bandungan dan Bawen
 - i). Buncis : Kecamatan Bawen, Getasan, Bandungan dan Sumowono
- 5). Tanaman Biofarmaka
 - a). Jahe : Kecamatan Sumowono, Getasan, Susukan, Banyubiru, Tengaran, dan Bandungan
 - b). Temu Lawak : Kecamatan Susukan dan Suruh
 - c). Kencur : Kecamatan Kaliwungu Suruh dan Susukan
 - d). Kunyit : Kecamatan Tengaran, Susukan, Kaliwungu dan Suruh
- 6). Tanaman Perkebunan
 - a). Kelapa : Semua Kecamatan kecuali Sumowono, Ungaran Barat Bandungan, Getasan, dan Pringapus
 - b). Kelapa Deres : Kecamatan Suruh, Pabelan, dan Tengaran
 - c). Kopi : Kecamatan Sumowono, Jambu dan Banyubiru
 - d). Cengkeh : Jambu, Susukan, Banyubiru, Ungaran Barat, Kecamatan Bergas, Getasan, Suruh dan Tengaran
 - e). Aren : Kecamatan Jambu, Banyubiru dan Sumowono
 - f). Kapok : Kecamatan Ungaran Timur dan Bawen,
 - g). Tebu : Kecamatan Suruh Kaliwungu dan Tengaran
 - h). Kakao : Kecamatan Tengaran Kaliwungu, Suruh, dan Sumowono
 - i). Tembakau : Kecamatan Getasan dan Bandungan
 - j). Karet : Kecamatan Tuntang, Bawen, dan Sumowono

2.1.2.3 Potensi Pariwisata

Posisi strategis Kabupaten Semarang sebagai daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kondisi alam bukit dan pegunungan dengan udara sejuk dan panorama alam yang indah memberikan peluang dan kesempatan untuk lebih mengembangkan potensi dibidang pariwisata. Dengan potensi wisata yang

sangat variatif yang terdiri dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, maupun wisata industri dan wisata minat khususnya, menjadikan Kabupaten Semarang sebagai tempat tujuan wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan mengingat letak yang sangat dekat dengan Ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah kunjungan wisata pada Tahun 2010 sebanyak 1.191.118 wisatawan, pada Tahun 2015 meningkat menjadi 2.161.803 wisatawan. Peningkatan ini antara lain karena kegiatan promosi bersama dengan pelaku pariwisata seperti biro perjalanan dan pengelola obyek wisata swasta serta informasi pariwisata melalui media cetak dan media elektronik. Jumlah kunjungan wisata ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah PAD dari retribusi tempat wisata pada Tahun 2010 sebesar Rp1.562.044.880,00 meningkat pada Tahun 2015 menjadi sebesar Rp3.669.328.320,00 atau mengalami kenaikan sebesar 57,43%.

Adapun Obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Semarang dapat kita lihat pada Tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8
OBJEK WISATA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014-2015

NO	Nama Obyek Wisata	NO	Nama Obyek Wisata
1	Candi Gedong songo	27	PT. Jamu Sido Muncul
2	Monumen Palagan Ambarawa	28	PT. Kanasritex
3	Taman Rekreasi Bukit Cinta	29	PT. BatamTex
4	Kolam Renang Muncul	30	Benteng Willem H/ Pendem
5	Museum Kereta Api Ambarawa	31	Makam Gatot Subroto
6	Taman Rekreasi Bandungan Indah	32	Benteng William I
7	Wana Wisata Penggaron	33	Makam Dr. Cipto Mangun Kusuma
8	Air Terjun Semirang	34	Cagar Suroloyo
9	Wana Wisata Umbul Songo	35	Candi Ngempon
10	Pemandian Tirto Agro	36	Candi/Situs Brawijaya
11	T.R Kartika Wisata Kopeng	37	Makam Candi Dukuh
12	TM. Rekreasi Langen Tirto	38	Makam Ki Ageng Alim
13	Taman Rekreasi Rawa Permai	39	Goa Palebur Gongso
14	Agro Wisata Tlogo	40	Air Terjun Curug
15	Air Terjun Kali Pancur	41	Air Terjun Curug Lawe
16	Goa Maria Kerep Ambarawa	42	Candi Klero
17	Pasar Kriya	43	YTC (Yoss Traditional Center)
18	Goa Maria Mustika	44	Kampoeng Kopi Banaran
19	Makam Nyatnyono	45	Fountain Water Resort
20	Sendang Senjoyo	46	Desa Wisata Bejalen
21	Umbul Sido Mukti	47	Batik Gemawang
22	Sendang Kanoman/ Kendalisodo	48	Curug 7 Bidadari
23	Kolam Renang Bu Sri	49	Fountain Water Park
24	Pemancingan Ikan Blater	50	Taman Kelinci
25	Sri Kukus Rejo Gunung Kalong	51	Bukit Irep Indah

NO	Nama Obyek Wisata	NO	Nama Obyek Wisata
26	PT. Coca Cola Amatil Unit Semarang	53	Kampung Cowboy Tenganan
27	PT. Jamu Sido Muncul	52	Balemong

Sumber: Dinas Pemuda, OR dan Pariwisata 2015

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 556/0424/2015 tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Semarang, telah terbentuk 35 desa wisata. Diharapkan hal ini diharapkan akan menambah daya tarik wisata serta meningkatkan ekonomi kerakyatan di pedesaan. Berikut data desa wisata Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.9:

Tabel 2.9
Data Desa Wisata Tahun 2015 Kabupaten Semarang

NO	NAMA DESA	KRITERIA	LOKASI
1	Desa Genting	Andalan	Kecamatan Jambu
2	Desa Gemawang	Andalan	Kecamatan Jambu
3	Desa Keseneng	Andalan	Kecamatan Sumowono
4	Desa Ngrawan (Tanon)	Andalan	Kecamatan Getasan
5	Desa Kemetul	Unggulan	Kecamatan Susukan
6	Desa Nogosaren	Unggulan	Kecamatan Getasan
7	Desa Kemawi	Unggulan	Kecamatan Sumowono
8	Kelurahan Bandungan	Unggulan	Kecamatan Bandungan
9	Desa Tegalwaton	Unggulan	Kecamatan Tenganan
10	Desa Candigaron	Potensial	Kecamatan Sumowono
11	Desa Bejalen	Potensial	Kecamatan Ambarawa
12	Desa Candi	Potensial	Kecamatan Bandungan
13	Desa Lerep	Potensial	Kecamatan Ungaran Barat
14	Desa Gogik	Potensial	Kecamatan Ungaran Barat
15	Desa Keji	Potensial	Kecamatan Ungaran Barat
16	Desa Kopeng	Potensial	Kecamatan Getasan
17	Desa Kebondowo	Potensial	Kecamatan Banyubiru
18	Kelurahan Ngempon	Potensial	Kecamatan Bergas
19	Desa Ujung-ujung	Potensial	Kecamatan Pabelan
20	Desa Brongkol	Potensial	Kecamatan Jambu
21	Desa Plumutan	Potensial	Kecamatan Bringin
22	Desa Diwak	Potensial	Kecamatan Bergas
23	Desa Nyemoh	Potensial	Kecamatan Bancak
24	Desa Gogodalem	Potensial	Kecamatan Bringin
25	Desa Duren	Potensial	Kecamatan Bandungan
26	Desa Asinan	Potensial	Kecamatan Bawen
27	Desa Bener	Potensial	Kecamatan Tenganan
28	Desa Rowoboni	Potensial	Kecamatan Banyubiru
29	Desa Sepakung	Potensial	Kecamatan Banyubiru
30	Desa Samban	Potensial	Kecamatan Bawen
31	Desa Nyatnyono	Potensial	Kecamatan Ungaran Barat

NO	NAMA DESA	KRITERIA	LOKASI
32	Desa Jembrak	Potensial	Kecamatan Pabelan
33	Desa Doplang	Potensial	Kecamatan Bawen
34	Kel. Kupang Tanjungsari	Potensial	Kecamatan Ambarawa
35	Desa Tawang	Potensial	Kecamatan Susukan

Sumber: Dinas Pemuda, OR, dan Pariwisata Tahun 2015

Potensi Pariwisata di Kabupaten Semarang didukung dengan keberadaan Hotel yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Adapun banyaknya Hotel, Kamar Hotel dan Tamu yang menginap dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini :

Tabel 2.10
Banyaknya Hotel dan Kamar Hotel
di Kabupaten Semarang Tahun 2010 - 2015

No	Kecamatan	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Hotel	Kamar	Hotel	Kamar	Hotel	Kamar	Hotel	Kamar	Hotel	Kamar	Hotel	Kamar
1	Getasan	94	691	88	713	87	718	87	718	95	803	95	819
2	Tengaran	1	30	1	25	1	30	1	30	1	30	1	30
3	Tuntang	1	37	1	38	1	37	1	34	1	34	1	44
4	Ambarawa	8	139	8	135	8	151	9	168	9	157	9	191
5	Bandungan	99	2.384	100	2.507	100	2.387	106	2.584	107	2.978	106	2.933
6	Bawen	2	43	2	44	2	113	2	43	2	48	2	48
7	Bergas	8	237	8	270	8	192	8	306	9	304	10	355
8	Ungaran Barat	6	127	6	127	5	107	7	152	8	178	9	226
9	Ungaran Timur	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42
10	Jambu											1	3
	jumlah	220	3.730	215	3.901	213	3.777	222	4.077	233	4.574	235	4.691

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

Tabel 2.11
Banyaknya Tamu yang Menginap
di Kabupaten Semarang Tahun 2010 - 2015

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Getasan	75.804	78.912	105.435	105.435	139.475	145.124
2	Tengaran	4.900	2.648	5.260	5.260	4.550	4.550
3	Tuntang	9.813	9.271	353	11.265	6.682	2.950
4	Ambarawa	62.902	73.323	65.218	65.794	65.098	69.783
5	Bandungan	423.711	456.285	472.551	511.533	578.888	459.460
6	Bawen	7.207	8.648	6.340	9.132	6.480	8.640
7	Bergas	76.607	44.161	27.561	116.271	57.920	69.534

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8	Ungaran Barat	33.202	38.633	36.121	50.850	46.042	55.683
9	Ungaran Timur	4.876	8.640	1.619	1.619	4.118	4.118
10	Jambu	-	-	-	-	-	26
	Jumlah	699.022	720.521	720.458	877.159	909.253	819.868

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

2.2. Aspek Demografi

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Semarang Penduduk Kabupaten Semarang pada akhir Tahun 2010 sebanyak 933.764 jiwa dan pada akhir Tahun 2015 menurut data BPS berjumlah 961.421 jiwa. Dibandingkan dengan kondisi akhir Tahun 2010 terdapat penambahan netto sebanyak 27.657 jiwa atau rata-rata pertahun bertambah 5.531 jiwa.

Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Semarang, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Semarang pada Tahun 2010 sebesar 983 jiwa/km² dan pada Tahun 2015 sebesar 1.012 jiwa/km².

Tabel 2.12

Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

NO	URAIAN	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk	933.764	938.802	944.277	949.815	955.481	961.421
2	Kepala Keluarga	272.243	283.303	287.306	291.008	299.405	307.338
3	Penduduk berdasar jenis kelamin:						
	- Laki-laki	459.771	462.592	465.467	468.328	471.071	473.925
	- Perempuan	473.993	476.210	478.810	481.487	484.410	487.496
4	Mutasi Penduduk						
	- Kelahiran	10.544	10.586	10.812	11.016	10.780	10.587
	- Kematian	4.831	5.694	5.708	5.926	5.883	5.968
5	- Pindah	9.673	10.200	11.125	9.027	9.001	9.220
	- Datang	9.264	10.346	11.496	9.475	9.770	10.541
	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	983	988	994	1.000	1.006	1.012
6	Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,57	0,54	0,58	0,59	0,60	0,60

Sumber: BPS Kab. Semarang 2010-2015

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, penduduk Kabupaten Semarang pada akhir Tahun 2015 berjumlah 996.346 jiwa yang terdiri dari 499.066 laki-laki dan 497.280 perempuan dengan jumlah KK pada Tahun 2015 adalah 315.472 KK, meningkat dibandingkan Tahun 2014 namun menurun 19.791 KK jika dibandingkan Tahun 2013 (335.263 KK). Perkembangan penduduk Kabupaten Semarang

berdasarkan data dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang terlihat pada tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13
Data Penduduk Tahun 2013-2015

NO	URAIAN	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk	1.052.675	1.051.593	992.759	983.529	989.399	996.346
2	Kepala Keluarga	320.122	326.252	300.448	335.263	310.049	315.472
3	Penduduk berdasar kan jenis kelamin:						
	- Laki-laki	526.034	527.487	501.846	497.227	495.791	499.066
	- Perempuan	526.641	524.106	490.913	486.302	493.608	497.280
4	Penerbitan Akta Kematian	1.159	1.249	1.956	2.646	3.957	3.965
5	Kepemilikan Akta Kelahiran	256.968	254.987	255.100	255.718	610.945	631.300
6	Migrasi Keluar	12.876	10.986	11.056	12.046	17.718	13.360
7	Migrasi Masuk	12.675	11.875	12.067	10.980	18.165	12.287
8	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	1.107	1.106	1.044	1.034	1.040	1.048
9	Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2015

Pada Tahun 2012 terjadi penurunan jumlah penduduk dikarenakan ada peralihan regulasi dalam proses pengolahan/pemutakiran data kependudukan dengan menggunakan SIAK (membuang data ganda).

Komposisi jumlah penduduk per kecamatan, persentase dan kepadatan penduduknya dapat dilihat pada Tabel 2.14 sebagai berikut:

Tabel 2.14
Sebaran Penduduk dan Kepadatannya per Kecamatan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	Pria	Wanita	Jumlah	%	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk
1	Getasan	25.632	25.746	51.378	5,16	65,8	781
2	Tengaran	33.825	32.866	66.691	6,69	47,3	b1.410
3	Susukan	24.795	24.354	49.149	4,93	48,87	1.006
4	Suruh	34.183	33.516	67.699	6,79	64,02	1.057
5	Pabelan	21.050	21.170	42.220	4,24	47,97	880
6	Tuntang	32.971	33.303	66.274	6,65	56,24	1.178
7	Banyubiru	22.101	21.876	43.977	4,41	54,41	808
8	Jambu	20.029	19.949	39.978	4,01	51,63	774
9	Sumowono	16.571	16.230	32.801	3,29	55,63	590
10	Ambarawa	30.616	31.104	61.720	6,19	28,98	2.130
11	Bawen	27.254	27.207	54.461	5,47	46,57	1.169

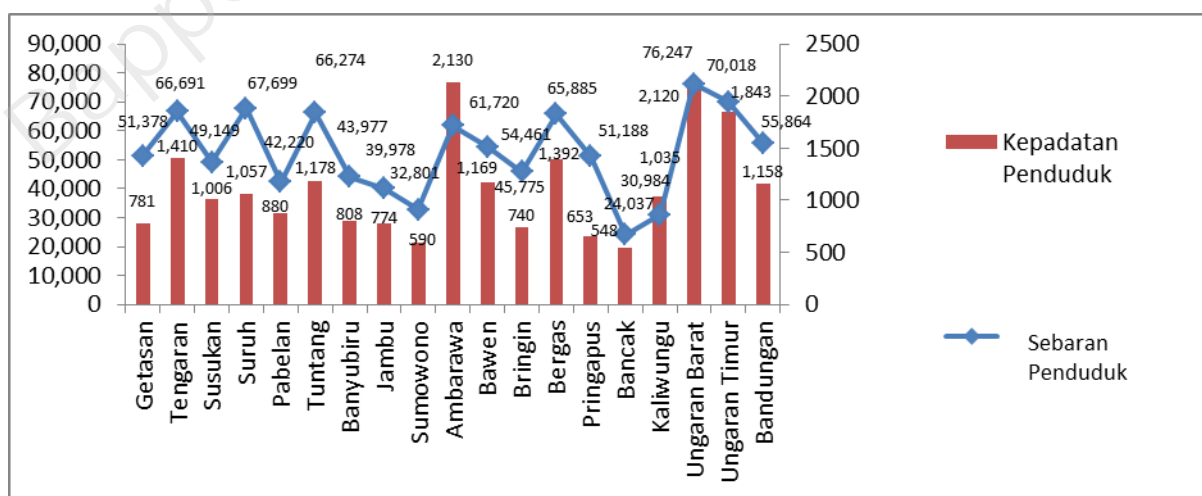
NO	KECAMATAN	Pria	Wanita	Jumlah	%	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk
12	Bringin	22.983	22.792	45.775	4,59	61,89	740
13	Bergas	32.885	33.000	65.885	6,61	47,33	1.392
14	Pringapus	25.640	25.548	51.188	5,14	78,35	653
15	Bancak	11.993	12.044	24.037	2,41	43,85	548
16	Kaliwungu	15.407	15.577	30.984	3,11	29,95	1.035
17	Ungaran Barat	37.925	38.322	76.247	7,65	35,96	2.120
18	Ungaran Timur	35.000	35.018	70.018	7,03	37,99	1.843
19	Bandungan	28.206	27.658	55.864	5,61	48,23	1.158
Jumlah		499.066	497.280	996.346	100	950,57	1.048

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2015

Jika dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Semarang, maka Kecamatan Ungaran Barat merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 76.247 jiwa sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Bancak yakni sebesar 24.037 jiwa. Untuk kepadatan penduduk Kabupaten Semarang pada Tahun 2013 rata-rata sebesar 1.034 jiwa/km², maka pada Tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 1.048 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Ambarawa yakni sebesar 2.130 jiwa/km², kemudian Kecamatan Ungaran Barat sebesar 2.120 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk yang terendah ada di Kecamatan Bancak sebesar 548 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4 pada halaman berikut:

Gambar 2.4

Kepadatan dan Sebaran Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2015



Mata pencaharian utama penduduk dari Tahun 2010 sampai dengan 2015 masih didominasi dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Selanjutnya 3 besar berturut-turut yaitu di sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, sektor dan sektor Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama ditunjukkan pada Tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15

**Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015**

NO	LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	TAHUN						%
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
A	Penduduk Belum /Tidak Bekerja	434.629	436.931	439.457	442.018	444.661	447.434	46,5
B	Penduduk Bekerja	499.135	501.871	504.820	507.797	510.820	513.987	53,5
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	179.145	180.140	181.203	182.275	183.357	184.492	35,89
2	Pertambangan dan Pengalihan	1.398	1.407	1.416	1.425	1.433	1.442	0,28
3	Industri	111.128	111.703	112.342	112.991	113.669	114.383	22,26
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1.446	1.454	1.463	1.472	1.481	1.490	0,29
5	Konstruksi	31.968	32.163	32.362	32.561	32.752	32.950	6,41
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	80.059	80.484	80.950	81.422	81.909	82.419	16,04
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	18.121	18.231	18.344	18.457	18.565	18.677	3,63
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.299	4.324	4.350	4.376	4.402	4.429	0,86
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Peorangan	67.457	67.827	68.227	68.631	69.039	69.466	13,51
10	Lainnya	4.114	4.138	4.163	4.188	4.213	4.239	0,82
	Jumlah	933.764	938.802	944.277	949.815	955.481	961.421	100,0

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

Persentase penduduk Kabupaten Semarang yang bekerja di tiap sektor relatif sama dari Tahun 2010 s.d. 2015, yaitu sebagian besar atau 35,89% bekerja dengan lapangan kerja utama pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Rata-rata 22,26% bekerja di industri dan yang bekerja di lapangan utama perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 16,04%.

Sedangkan komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dari Tahun 2010-2014 sebagian besar didominasi penduduk dengan pendidikan SD/MI/ sederajat kemudian penduduk dengan pendidikan SLPT/MTs/ sederajat. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut:

Tabel 2.16
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang
Tahun 2010-2015

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tidak/Belum pernah sekolah	141.598	142.352	143.182	144.011	144.871	145.774
2	Tidak punya ijazah SD	160.445	161.311	162.252	163.203	164.177	165.198
3	SD/MI/ sederajat	276.633	278.126	279.748	281.391	283.069	284.827
4	SLTP/MTs/ sederajat	166.261	167.160	168.135	169.123	170.132	171.190
5	SLTA/MA/ sederajat	132.987	133.709	134.489	135.281	136.087	136.932
6	SMK	18.810	18.914	19.024	19.138	19.252	19.371
7	Program DI/DII	5.174	5.201	5.231	5.261	5.292	5.325
8	Program DIII/Sarjana Muda	9.781	9.833	9.891	9.948	10.008	10.071
9	Program DIV/S1	20.679	20.792	20.913	21.037	21.163	21.294
10	S2/S3	1.396	1.404	1.412	1.422	1.430	1.439
	Jumlah	933.764	938.802	944.277	949.815	955.481	961.421

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

Perbandingan persentase tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Semarang dari Tahun 2010 hingga 2014 cenderung tetap, dengan sebagian besar, yaitu 29,63% masyarakat dengan tingkat pendidikan SD/MI/ sederajat, sebanyak 17,81% dengan tingkat pendidikan SLTP/MTs/ sederajat, dan 17,18% tidak mempunyai ijazah SD

Sebagian besar penduduk Kabupaten Semarang adalah pemeluk agama Islam, menyusul Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu dan lainnya. Secara terperinci dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.17 dibawah ini :

Tabel 2.17
Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

NO	PEMELUK AGAMA	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Islam	981.683	983.000	928.326	919.564	927.275	934.654
2	Kristen	37.250	36.262	33.790	33.628	32.840	32.854
3	Katholik	27.377	26.066	25.095	24.621	23.747	23.329
4	Hindu	245	247	222	219	200	203
5	Budha	5.523	5.432	4.780	4.957	4.801	4.774
6	Khonghucu	15	13	22	25	24	25
7	Kepercayaan	582	573	524	515	512	507
	Jumlah	1.052.675	1.051.593	992.759	983.529	989.399	996.346

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2015

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil)

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada Tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari Tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan PDRB Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Perkembangan PDRB menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Pemecahan menjadi sub kategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Kondisi perekonomian Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi karena setiap tahunnya Nilai PDRB Kabupaten Semarang Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Semarang dalam kondisi semakin baik walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan dari target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sebesar 6,10% pada Tahun 2015, namun demikian selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Secara rinci pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015*) dapat dilihat pada tabel 2.18:

Tabel 2.18
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang
Kurun Waktu Tahun 2010-2015*)
(dalam juta Rp)

NO	TAHUN	ADHB		ADHK Tahun 2010	
		Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2010	21.572.136,87	12,69	21.572.136,87	5,81
2	2011	24.440.560,48	13,30	22.925.456,80	6,27
3	2012	27.024.981,68	10,57	24.306.718,35	6,03
4	2013	29.789.069,83	10,23	25.758.121,08	5,97
5	2014	33.455.440,90	12,31	27.262.609,09	5,84
6	2015*)	36.795.486,78	9,98	28.743.311,96	5,43

Sumber: Bappeda kerjasama dengan BPS Kabupaten Semarang
**) Angka sementara (Perhitungan PDRB Menggunakan Tahun Dasar 2010)*

Struktur Perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Semarang sampai dengan Tahun 2015 didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 44,18%, Konstruksi sebesar 14,31%, Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebesar 12,24% dan Perdagangan Besar, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 11,71%. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi atau andil terbesar terhadap Total PDRB. Perkembangan PDRB masing-masing kategori dalam kurun waktu 2010-2015*) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.19
Perkembangan PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010– 2015*)
(Juta Rupiah)

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.850.457,42	3.170.849,37	3.403.364,77	3.718.156,44	4.065.606,80	4.503.240,59
	Tanaman Pangan	703.144,02	778.042,90	883.694,69	919.661,30	891.900,02	1.018.834,76
	Tanaman Hortikultura	729.083,39	937.242,82	910.626,75	1.014.994,36	1.214.903,19	1.357.983,77
	Tanaman Perkebunan	452.177,87	407.147,39	449.357,56	499.326,06	589.709,38	616.578,94
	Peternakan	801.734,49	853.177,18	948.955,63	1.041.869,58	1.107.480,66	1.217.155,50
	Perikanan	31.805,21	36.753,18	39.217,46	46.172,46	49.577,42	55.136,92
	Pertanian Lainnya	132.512,44	158.485,88	171.512,67	196.132,67	212.036,14	237.550,70
B	Pertambangan dan Penggalian	63.820,68	69.665,74	66.664,21	69.566,86	82.763,43	99.276,82
C	Industri Pengolahan	8.066.513,72	9.356.770,31	10.606.286,58	11.753.829,42	13.376.892,48	14.782.210,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28.991,90	29.695,98	31.815,35	32.601,29	33.995,93	34.817,88
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.901,61	22.582,91	21.642,96	22.513,19	23.441,10	24.578,26
F	Konstruksi	2.937.398,42	3.200.588,02	3.523.298,25	3.915.242,50	4.429.976,40	4.787.699,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.675.472,87	3.033.349,69	3.139.159,52	3.399.171,98	3.603.418,38	3.917.143,70
H	Transportasi dan Pergudangan	457.152,50	474.681,38	505.821,45	557.252,27	644.766,94	707.741,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	661.233,36	753.619,83	806.076,29	878.426,24	1.025.494,20	1.152.289,18
J	Informasi dan Komunikasi	703.044,86	778.023,99	856.808,13	925.109,26	1.060.486,41	1.123.603,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	708.810,57	791.429,32	910.764,27	997.946,88	1.101.289,38	1.245.480,72
L	Real estate	669.899,48	759.423,11	802.116,29	864.710,62	983.791,07	1.101.950,45
M,N	Jasa Perusahaan	84.718,25	100.607,00	110.711,40	132.087,84	147.286,25	167.122,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	739.019,43	762.865,26	835.873,82	882.494,36	944.833,94	1.034.826,13
P	Jasa Pendidikan	506.275,75	696.472,76	940.141,14	1.120.461,22	1.325.631,76	1.451.760,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	125.307,00	151.541,69	179.057,64	197.139,33	225.088,17	251.884,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	272.110,03	288.394,12	285.379,59	322.360,14	380.678,26	409.859,96
	PDRB	21.572.136,87	24.440.560,48	27.024.981,68	29.789.069,83	33.455.440,90	36.795.486,78

Sumber: Bappeda kerjasama dengan BPS, 2015 *) Angka sementara (Perhitungan PDRB Menggunakan Tahun Dasar 2010)

Tabel 2.20
Perkembangan PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2010–2015*) (Juta Rupiah)

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.850.457,42	2.976.206,60	3.026.515,87	3.080.143,46	3.117.724,29	3.267.347,63
	Tanaman Pangan	703.144,02	716.363,17	738.284,24	735.065,79	685.767,76	747.190,68
	Tanaman Hortikultura	729.083,39	887.632,36	855.001,17	865.441,36	900.718,50	936.307,53
	Tanaman Perkebunan	452.177,87	361.630,66	374.959,10	401.502,71	429.951,20	435.249,59
	Peternakan	801.734,49	832.026,52	872.795,55	877.478,52	896.895,19	937.816,34
	Perikanan	31.805,21	33.801,24	34.615,71	38.719,45	38.284,60	39.681,32
	Pertanian Lainnya	132.512,44	144.752,63	150.860,10	161.935,62	166.107,04	171.102,17
B	Pertambangan dan Penggalian	63.820,68	64.666,03	61.778,13	62.938,70	64.231,96	68.066,73
C	Industri Pengolahan	8.066.513,72	8.570.188,89	9.361.199,35	10.017.554,52	10.699.416,09	11.288.824,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28.991,90	29.482,67	32.127,15	34.779,23	36.206,26	35.203,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.910,61	22.537,69	21.732,80	21.908,16	22.319,48	22.765,87
F	Konstruksi	2.937.398,42	3.039.666,93	3.196.637,98	3.435.216,41	3.633.966,20	3.773.720,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.675.472,87	2.910.476,35	2.942.074,59	3.087.824,22	3.182.060,68	3.346.965,55
H	Transportasi dan Pergudangan	457.152,50	473.739,30	503.601,02	543.766,37	590.697,48	627.641,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	661.233,36	719.147,29	752.976,20	777.140,79	824.383,95	879.115,43
J	Informasi dan Komunikasi	703.044,86	765.250,98	841.542,24	911.006,98	1.052.308,98	1.129.565,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	708.810,57	762.164,34	801.315,16	847.740,07	895.619,72	962.402,77
L	Real estate	669.899,48	715.097,49	751.077,42	801.522,20	861.464,36	919.515,52
M,N	Jasa Perusahaan	84.718,25	93.010,96	97.609,66	110.118,58	119.590,16	129.157,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	739.019,43	748.758,48	749.670,50	767.171,17	772.880,86	815.548,02
P	Jasa Pendidikan	506.275,75	614.273,09	735.841,91	795.574,86	885.286,62	952.500,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	125.307,00	141.528,59	156.274,38	164.537,54	179.597,37	192.069,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya	272.110,03	279.261,12	274.743,99	299.177,82	324.854,62	332.901,24
	PDRB	21.572.136,87	22.925.456,80	24.306.718,35	25.758.121,08	27.262.609,09	28.743.311,96

Sumber: Bappeda kerjasama dengan BPS *) Angka sementara (Perhitungan PDRB Menggunakan Tahun Dasar 2010)

Tabel 2.21
Distribusi PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2010-2015*) (Persen)

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,21	12,97	12,59	12,48	12,15	12,24
	Tanaman Pangan	3,26	3,18	3,27	3,09	2,67	2,77
	Tanaman Hortikultura	3,38	3,83	3,37	3,41	3,63	3,69
	Tanaman Perkebunan	2,10	1,67	1,66	1,68	1,76	1,68
	Peternakan	3,72	3,49	3,51	3,50	3,31	3,31
	Perikanan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Pertanian Lainnya	0,61	0,65	0,63	0,66	0,63	0,65
B	Pertambangan dan Penggalian	0,30	0,29	0,25	0,23	0,25	0,27
C	Industri Pengolahan	37,39	38,28	39,25	39,46	39,98	40,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,12	0,12	0,11	0,10	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
F	Konstruksi	13,62	13,10	13,04	13,14	13,24	13,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,40	12,41	11,62	11,41	10,77	10,65
H	Transportasi dan Pergudangan	2,12	1,94	1,87	1,87	1,93	1,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,07	3,08	2,98	2,95	3,07	3,13
J	Informasi dan Komunikasi	3,26	3,18	3,17	3,11	3,17	3,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,29	3,24	3,37	3,35	3,29	3,38
L	Real estate	3,11	3,11	2,97	2,90	2,94	2,99
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,41	0,41	0,44	0,44	0,45
O	Administrasi Pem-an, Pertanahan & Jaminan Sosial	3,43	3,12	3,09	2,96	2,82	2,81
P	Jasa Pendidikan	2,35	2,85	3,48	3,76	3,96	3,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,58	0,62	0,66	0,66	0,67	0,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,26	1,18	1,06	1,08	1,14	1,11
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappeda kerjasama dengan BPS

*) Angka sementara (Perhitungan PDRB Menggunakan Tahun Dasar 2010)

Tabel 2.22
Distribusi PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori
Atas Dasar Angka Konstan Tahun 2010-2015*) (Persen)

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,21	12,98	12,45	11,96	11,44	11,37
	Tanaman Pangan	3,26	3,12	3,04	2,85	2,52	2,60
	Tanaman Hortikultura	3,38	3,87	3,52	3,36	3,30	3,26
	Tanaman Perkebunan	2,10	1,58	1,54	1,56	1,58	1,51
	Peternakan	3,72	3,63	3,59	3,41	3,29	3,26
	Perikanan	0,15	0,15	0,14	0,15	1,14	0,14
	Pertanian Lainnya	0,61	0,63	0,62	0,63	0,61	0,60

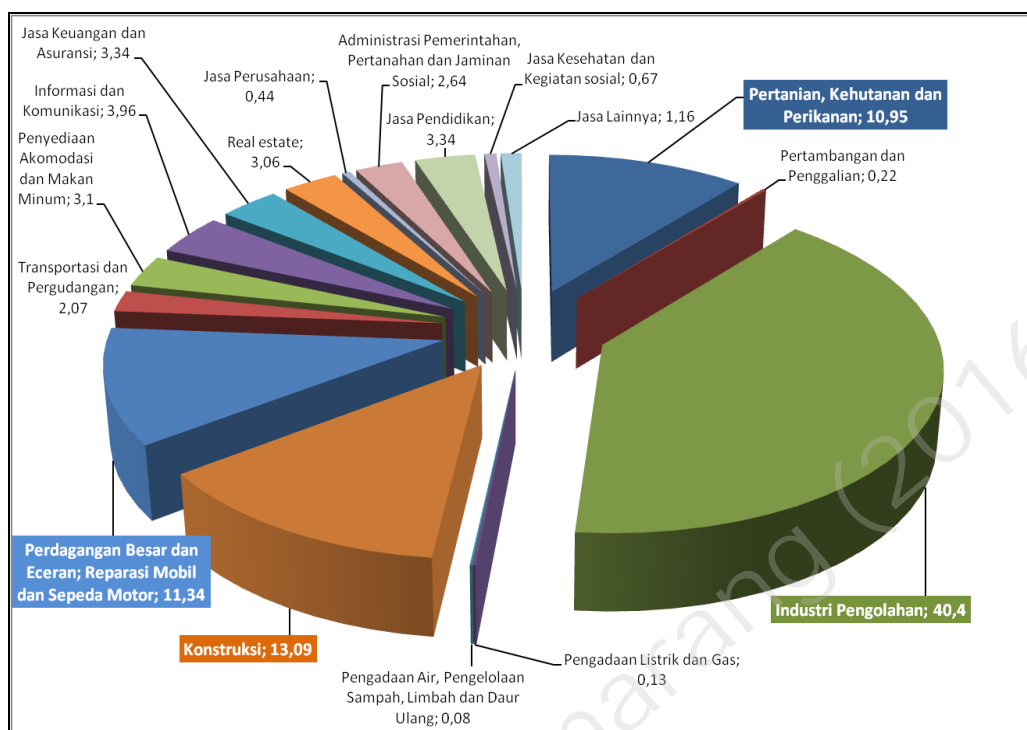
Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
B	Pertambangan dan Penggalian	0,30	0,28	0,25	0,24	0,24	0,24
C	Industri Pengolahan	37,39	37,38	38,51	38,89	39,25	39,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	13,62	13,26	13,15	13,34	13,33	13,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,40	12,70	12,10	11,99	11,67	11,64
H	Transportasi dan Pergudangan	2,12	2,07	2,07	2,11	2,17	2,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,07	3,14	3,10	3,02	3,02	3,06
J	Informasi dan Komunikasi	3,26	3,34	3,46	3,54	3,86	3,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,29	3,32	3,30	3,29	3,29	3,35
L	Real estate	3,11	3,12	3,09	3,11	3,16	3,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,14	0,40	0,43	0,44	0,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	3,43	3,27	3,08	2,98	2,83	2,84
P	Jasa Pendidikan	2,35	2,68	3,03	3,09	3,25	3,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,58	0,62	0,64	0,64	0,66	0,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,26	1,22	1,13	1,16	1,19	1,16
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappeda kerjasama dengan BPS, 2015

*) Angka sementara (Perhitungan PDRB Menggunakan Tahun Dasar 2010)

Gambar 2.5

Distribusi Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) Tahun 2015



Sumber: Bappeda kerjasama dengan BPS

*) Angka sementara (Perhitungan PDRB Menggunakan Tahun Dasar 2010)

Berdasarkan pada tabel dan Gambar diatas, mengenai distribusi PDRB menurut kategori/sub kategori atas dasar harga berlaku dan harga konstan Tahun 2015 menunjukkan bahwa basis perekonomian di Kabupaten Semarang adalah kategori industri pengolahan, kategori konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel 2.23 dan tabel 2.24 menyajikan data pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang pada periode 2010-2015*)

Tabel 2.23
Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015*
(Persen)

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,07	11,24	7,33	9,25	9,34	10,76
	Tanaman Pangan	16,74	10,65	13,58	4,07	-3,02	14,23
	Tanaman Hortikultura	12,09	28,55	-2,84	11,46	19,70	11,78
	Tanaman Perkebunan	6,01	-9,96	10,37	11,12	18,10	4,56
	Peternakan	15,18	6,42	11,23	9,79	6,30	9,90
	Perikanan	12,32	15,56	6,70	17,73	7,37	11,21
	Pertanian Lainnya	13,10	19,60	8,22	14,35	8,11	12,03
B	Pertambangan dan Penggalian	19,38	9,16	-4,31	4,35	18,97	19,95
C	Industri Pengolahan	11,92	16,00	13,35	10,82	13,81	10,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,88	2,43	7,14	2,47	4,28	2,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	-0,24	3,07	-4,16	4,02	4,12	4,85

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
	Ulang						
F	Konstruksi	14,10	8,96	10,08	11,12	13,15	8,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,38	13,38	3,49	8,28	6,01	8,71
H	Transportasi dan Pergudangan	8,91	3,83	6,56	10,17	15,70	9,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,93	13,97	6,96	8,98	16,74	12,36
J	Informasi dan Komunikasi	15,01	10,66	10,13	7,97	14,63	5,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24,86	11,66	15,08	9,57	10,36	13,09
L	Real estate	12,04	13,36	5,62	7,80	13,77	12,01
M,N	Jasa Perusahaan	18,94	18,75	10,04	19,31	11,51	13,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	8,97	3,23	9,57	4,89	7,06	9,52
P	Jasa Pendidikan	22,61	37,57	34,99	19,18	18,31	9,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	10,12	20,94	18,16	10,10	14,18	11,90
R,S,T,U	Jasa Lainnya	13,48	5,98	-1,05	12,96	18,09	7,67
	PDRB	12,69	13,30	10,57	10,23	12,31	9,98

Sumber: Bappeda kerjasama dengan BPS

*) Angka sementara (Perhitungan PDRB Menggunakan Tahun Dasar 2010)

Tabel 2.24
Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015*)
(Persen)

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,98	4,41	1,69	1,77	1,22	4,80
	Tanaman Pangan	4,37	1,88	3,06	-0,44	-6,71	8,96
	Tanaman Hortikultura	3,25	21,75	-3,68	1,22	4,08	3,95
	Tanaman Perkebunan	-0,81	-20,02	3,69	7,08	7,09	1,23
	Peternakan	3,26	3,78	4,90	0,54	2,21	4,56
	Perikanan	6,30	6,28	2,41	11,86	-1,12	3,65
	Pertanian Lainnya	5,21	9,24	4,22	7,34	2,58	3,01
B	Pertambangan dan Penggalian	9,78	1,32	-4,47	1,88	2,05	5,97
C	Industri Pengolahan	5,98	6,24	9,23	7,01	6,81	5,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,36	1,69	8,97	8,25	4,10	-2,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,50	2,86	-3,57	0,18	1,88	2,00
F	Konstruksi	6,73	3,48	5,16	7,46	5,79	3,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,07	8,78	1,09	4,95	3,05	5,18
H	Transportasi dan Pergudangan	4,54	3,63	6,30	7,98	8,63	6,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,41	8,76	4,70	3,21	6,08	6,64
J	Informasi dan Komunikasi	6,85	8,85	9,97	8,25	15,51	7,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,16	7,53	5,14	5,79	5,65	7,46

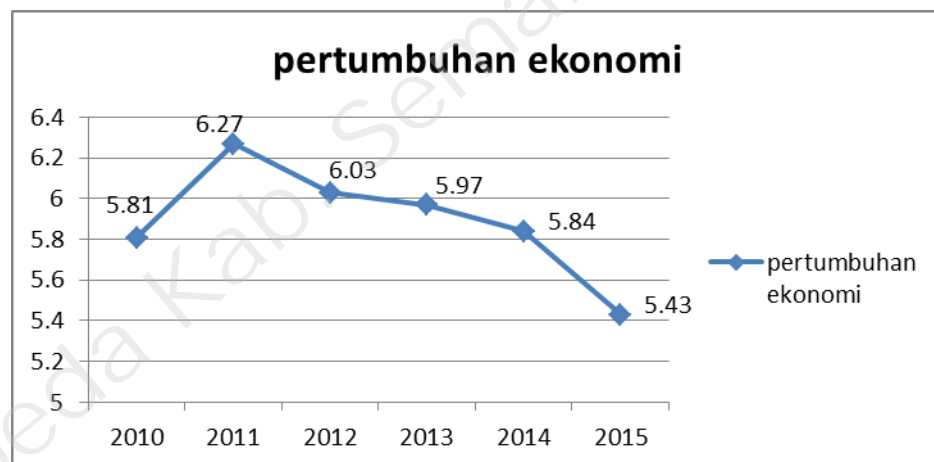
Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
L	Real estate	6,15	6,75	5,03	6,72	7,48	6,74
M,N	Jasa Perusahaan	8,79	9,79	4,94	12,82	8,60	8,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	1,99	1,32	0,12	2,33	0,74	5,52
P	Jasa Pendidikan	10,25	21,33	19,79	8,12	11,28	7,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	8,35	12,95	10,42	5,29	9,15	6,94
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,33	2,63	-1,62	8,89	8,58	2,48
	PDRB	5,81	6,27	6,03	5,97	5,84	5,43

Sumber: Bappeda kerjasama dengan BPS

*) Angka sementara (Perhitungan PDRB Menggunakan Tahun Dasar 2010)

Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.6:

Gambar 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015



Sumber: Bappeda kerjasama dengan BPS

*) Angka sementara (Perhitungan PDRB Menggunakan Tahun Dasar 2010)

Pada Tahun 2010 tercatat persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 5,81% kemudian meningkat pada Tahun 2011 menjadi 6,27%. Pada Tahun 2012 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang sebesar 6,03% kemudian terjadi penurunan kembali pada Tahun 2013 sebesar 5,97% dan sampai dengan Tahun 2015 sebesar 5,43%

Perbandingan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional serta daerah sekitar dapat dilihat pada Tabel 2.25 dan 2.26 sebagai berikut:

Tabel 2.25
Pertumbuhan Ekonomi, Nasional, Jawa Tengah dan
Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015*)

NO	PERTUMBUHAN EKONOMI	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Nasional	6,10	6,17	6,03	5,58	5,02	4,79
2	Jawa Tengah	6,10	5,30	5,34	5,14	5,42	5,40
3	Kabupaten Semarang	5,81	6,27	6,03	5,97	5,84	5,43

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

*) Angka Semenatar

Tabel 2.26
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang dengan
Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2011-2014 *)

NO	PERTUMBUHAN EKONOMI	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kota Semarang	-	6,58	5,97	6,64	5,30
2	Kabupaten Demak	-	5,39	4,46	5,27	4,27
3	Kabupaten Grobogan	-	3,19	5,08	4,55	4,03
4	Kabupaten Boyolali	-	6,34	5,33	5,83	5,04
5	Kabupaten Magelang	-	6,27	6,03	6,87	6,00
6	Kabupaten Temanggung	-	6,09	4,27	6,14	5,15
7	Kabupaten Kendal	-	6,57	5,21	5,93	5,10
8	Kota Salatiga	-	6,58	5,53	6,27	4,80
9	Kabupaten Semarang	5,81	6,27	6,03	5,97	5,84

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2014

*) Angka 2015 belum tersedia

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Demikian juga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang hanya lebih rendah dari Kabupaten Magelang saja.

2.3.1.2 PDRB Per kapita

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada Tahun 2010 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp23,17 Juta, sedangkan pada Tahun 2015 naik mencapai Rp38,40 juta. Sedangkan berdasarkan harga konstan Tahun 2010 mencapai Rp23,17 juta menjadi Rp30,00 juta pada Tahun 2015.

Perkembangan PDRB perkapita dari Tahun 2010-2015 dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.27
PDRB Perkapita Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Semarang Dalam Kurun Waktu 2010-2015*)
(Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,06	3,39	3,62	3,92	4,27	4,70
	Tanaman Pangan	0,76	0,83	0,94	0,97	0,94	1,06
	Tanaman Hortikultura	0,78	1,00	0,97	1,07	1,28	1,42
	Tanaman Perkebunan	0,49	0,43	0,48	0,53	0,62	0,64
	Peternakan	0,86	0,91	1,01	1,10	1,16	1,27
	Perikanan	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
	Pertanian Lainnya	0,14	0,17	0,18	0,21	0,22	0,25
6B	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,10
C	Industri Pengolahan	8,66	10,00	11,27	12,41	14,04	15,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
F	Konstruksi	3,15	3,42	3,74	4,13	4,65	5,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	2,87	3,24	3,33	3,59	3,78	4,09
H	Transportasi dan Pergudangan	0,49	0,51	0,54	0,59	0,68	0,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,71	0,81	0,86	0,93	1,08	1,20
J	Informasi dan Komunikasi	0,76	0,83	0,91	0,98	1,11	1,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,76	0,85	0,97	1,05	1,16	1,30
L	Real estate	0,72	0,81	0,85	0,91	1,03	1,15
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	0,79	0,81	0,89	0,93	0,99	1,08
P	Jasa Pendidikan	0,54	0,74	1,00	1,18	1,39	1,52
Q	Jasa Kesehatan dan Keg. sosial	0,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,29	0,31	0,30	0,34	0,40	0,43
	PDRB	23,17	26,11	28,71	31,45	35,12	38,40

Sumber: Bappeda kerjasama dengan BPS

*) Angka sementara (Perhitungan PDRB Menggunakan Tahun Dasar 2010)

Tabel 2.28
PDRB Perkapita Menurut Kategori/Sub Kategori
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015*)
(Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,06	3,18	3,21	3,25	3,27	3,41
	Tanaman Pangan	0,76	0,77	0,78	0,78	0,72	0,78
	Tanaman Hortikultura	0,78	0,95	0,91	0,91	0,95	0,98
	Tanaman Perkebunan	0,49	0,39	0,40	0,42	0,45	0,45
	Peternakan	0,86	0,89	0,91	0,93	0,94	0,98
	Perikanan	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Pertanian Lainnya	0,14	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18
B	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
C	Industri Pengolahan	8,66	9,16	9,94	10,57	11,23	11,78
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
	Limbah dan Daur Ulang						
F	Konstruksi	3,15	3,25	3,40	3,63	3,81	3,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,87	3,11	3,13	3,26	3,34	3,49
H	Transportasi dan Pergudangan	0,49	0,51	0,53	0,57	0,62	0,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,71	0,77	0,80	0,82	0,87	0,92
J	Informasi dan Komunikasi	0,76	0,82	0,89	0,96	1,10	1,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,76	0,81	0,85	0,89	0,94	1,00
L	Real estate	0,72	0,76	0,80	0,85	0,90	0,96
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0,10	0,10	0,12	0,13	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	0,79	0,80	0,80	0,81	0,81	0,85
P	Jasa Pendidikan	0,54	0,66	0,78	0,84	0,93	0,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,13	0,15	0,17	0,17	0,19	0,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,29	0,30	0,29	0,32	0,34	0,35
	PDRB	23,17	24,49	25,82	27,19	28,62	30,00

Sumber: Bappeda kerjasama dengan BPS, 2015

*) Angka sementara (Perhitungan PDRB Menggunakan Tahun Dasar 2010)

2.3.1.3 Pendapatan Perkapita

Pendapatan Regional adalah PDRB dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung *netto*. Apabila pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka dihasilkan pendapatan regional per kapita. Pendapatan regional perkapita inilah yang biasanya digunakan untuk pendekatan nilai **pendapatan perkapita**. Akan tetapi angka ini masih kasar karena belum memperhitungkan nilai tambah yang diciptakan oleh penduduk Kabupaten Semarang dan nilai tambah yang diciptakan di wilayah Kabupaten Semarang akan tetapi milik penduduk di luar Kabupaten Semarang.

Perkembangan Pendapatan Perkapita penduduk Kabupaten Semarang dari Tahun 2010-2014 dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.29
Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Semarang
Dalam Kurun Waktu 2010–2014*)

TAHUN	Menurut	
	ADHB	ADHK
2010	10.299.214,20	5.188.248,20
2011	11.446.976,50	5.451.823,70
2012	12.769.810,90	5.748.976,40
2013	14.343.051,90	5.962.777,80
2014*)	15.811.248,40	6.227.489,70

Sumber: Bappeda kerjasama dengan BPS, 2015

*) Angka sementara, Data Tahun 2015 belum tersedia

Tabel diatas dapat dikatakan bahwa pendapatan penduduk Kabupaten Semarang menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Pendapatan perkapita Kabupaten Semarang Tahun 2010 atas dasar harga berlaku sebesar Rp10.299.214,20 naik menjadi Rp15.811.248,40 pada Tahun 2014. Sedangkan

berdasarkan harga konstan pada Tahun 2010 sebesar Rp5.188.248,20 diprediksi menjadi Rp6.227.489,70 pada Tahun 2014.

2.3.1.4 Laju Inflasi

Perbandingan Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten/Kota sekitar pada Tahun 2010-2015 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 2.30
Laju Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kota Sekitar Tahun 2010-2015

Uraian	Tingkat Inflasi					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nasional	6,69	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35
Jawa Tengah	6,88	2,68	4,24	7,99	8,22	2,73
Kab. Semarang	7,07	3,29	4,56	8,11	8,63	2,85
Kota Semarang	7,11	2,87	4,85	8,19	8,53	2,56
Kab. Demak	6,87	3,49	4,10	8,22	8,66	2,81
Kab Kendal	5,89	3,48	3,96	8,07	9,04	4,13

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015

Dari Tabel 2.30 terlihat bahwa laju inflasi selama 2010-2015 bersifat flukuatif. Inflasi di Kabupaten Semarang dari Tahun 2010-2015 menurut penggolongannya termasuk infasi ringan, karena masih di bawah 10% setahunnya. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply (cosh push inflation)*, dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampakinflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*) dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

2.3.1.5 Pemerataan Pendapatan Berdasarkan Indeks Gini

Selama kurun waktu Tahun 2010–2014 perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Semarang menunjukkan angka yang cenderung semakin meningkat, hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan antar masyarakat di Kabupaten Semarang semakin melebar walaupun nilainya tidak begitu besar. Indeks Gini pada Tahun 2010 sebesar 0,28 naik menjadi 0,36 pada Tahun 2012 kemudian turun sebesar 0,31 di Tahun 2013 dan 0,31 di Tahun 2014. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2010–2014 dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31
Indeks Gini Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014

Daerah	Indeks Gini				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kabupaten Semarang	0,28	0,33	0,36	0,31	0,31
Jawa Tengah	0,34	0,38	0,38	0,39	0,38

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015

2.3.1.6 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Bank dunia dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan membagi penduduk menjadi 3 kelompok yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40%, dengan kriteria sebagai berikut:

- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12%, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapat rendah antara 12% sampai dengan 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapat rendah lebih besar dari 17% maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

Tabel 2.32
Pemerataan Pendapatan Penduduk versi Bank Dunia
Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 - 2014

Tahun	Kriteria Bank Dunia Kabupaten Semarang			Kriteria Bank Dunia Provinsi Jawa Tengah		
	40% I	40% II	20% III	40% I	40% II	20% III
2010	23,24	38,25	38,51	20,19	36,90	42,91
2011	21,46	36,86	41,68	18,64	34,66	46,70
2012	19,70	33,65	46,65	18,54	34,63	46,83
2013	20,81	38,27	40,92	18,38	34,55	47,07
2014	20,47	38,26	41,27	18,59	35,39	46,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015

Dengan melihat tabel diatas berdasarkan kriteria Bank Dunia kondisi pendapatan di Kabupaten Semarang selama kurun waktu 5 tahun bahwa persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapat rendah lebih besar dari 17% sehingga disimpulkan terdapat ketimpangan pendapatan yang rendah, hal sama yang dengan kondisi pendapatan penduduk di Jawa Tengah.

2.3.1.7 Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson sebagai ukuran untuk menggambarkan ketimpangan/kesenjangan ekonomi antar wilayah dengan memakai perhitungan pendapatan per kapita pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang. Kriteria pengukuran kesenjangan antar wilayah berdasarkan metode Williamson adalah antara 0-1. Jika indeks mendekati nol (0) maka tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah rendah dan pemerataan telah tercapai, begitu

juga sebaliknya jika indeks mendekati satu (1) maka pemerataan belum tercapai di daerah tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel 2.33 berikut ini.

Tabel 2.33
Indeks Williamson Kabupaten Semarang
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014

Daerah	Indeks Williamson				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kabupaten Semarang	0,92	0,92	0,90	0,92	0,91
Jawa Tengah	0,6246	0,6404	0,6725	0,6814	0,6972

Sumber: BPS Kabupaten Semarang; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015

2.3.1.8 Penduduk Miskin

Kondisi kemiskinan suatu daerah pada dasarnya dapat di kategori menjadi dua kategori, *pertama* kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus menerus atau disebut juga sebagai kemiskinan struktural - Fakir Miskin; dan yang *kedua* kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, krisis ekonomi, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial, yang jumlahnya relatif lebih besar dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat dan ekonomi global pada suatu daerah.

Untuk mengetahui kondisi kemiskinan di Kabupaten Semarang digunakan 2 (dua) pendekatan pendataan, yaitu melalui data Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Rumah Tangga Miskin, dengan kriteria yang berbeda.

1. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin dihitung berdasarkan pada hasil Survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan baik pangan maupun non pangan. Garis kemiskinan setara dengan pemenuhan 2100 kkal perkapita.

Berdasarkan kriteria tersebut, selama kurun waktu tahun 2010–2015 terjadi penurunan angka dari 10,50% menjadi 7,89%. Dibanding angka Nasional dan Angka Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang relatif lebih rendah, dimana secara lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.34:

Tabel 2.34
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang
Tahun 2010-2015*)

NO	TINGKAT	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Nasional	13,33	12,36	11,66	11,47	11,25	11,25
2	Provinsi Jawa Tengah	16,11	16,21	14,98	14,44	13,58	13,32
3	Kabupaten Semarang	10,50	10,30	9,40	8,51	8,05	7,89

Sumber: BPS Kabupaten Semarang

*) Angka Sementara

Tabel 2.35
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2014

No	Kota/Kab	Tahun 2013 (%)	No	Kota/Kab	Tahun 2014 (%)
1	Kota Semarang	5,25	1	Kota Semarang	5,04
2	Kota Salatiga	6,40	2	Kota Salatiga	5,93
3	Kota Pekalongan	8,26	3	Kab. Kudus	7,99
4	Kab. Semarang	8,51	4	Kota Pekalongan	8,02
5	Kab. Kudus	8,62	5	Kab. Semarang	8,05
6	Kota Tegal	8,84	6	Kota Tegal	8,54
7	Kab. Jepara	9,23	7	Kab. Jepara	8,55
8	Kota Magelang	9,80	8	Kota Magelang	9,14
9	Kab. Sukoharjo	9,87	9	Kab. Sukoharjo	9,18
10	Kab. Tegal	10,58	10	Kab. Tegal	9,87
11	Kota Surakarta	11,74	11	Kota Surakarta	10,95
12	Kab. Batang	11,96	12	Kab. Batang	11,13
13	Kab. Temanggung	12,42	13	Kab. Temanggung	11,55
14	Kab. Kendal	12,68	14	Kab. Kendal	11,8
15	Kab. Pati	12,94	15	Kab. Pati	12,06
16	Kab. Boyolali	13,27	16	Kab. Boyolali	12,36
17	Kab. Pekalongan	13,51	17	Kab. Pekalongan	12,57
18	Kab. Karanganyar	13,58	18	Kab. Karanganyar	12,62
19	Kab. Magelang	13,96	19	Kab. Magelang	12,98
20	Kab. Wonogiri	14,01	20	Kab. Wonogiri	13,09
21	Kab. Blora	14,64	21	Kab. Blora	13,66
22	Kab. Grobogan	14,87	22	Kab. Grobogan	13,86
23	Kab. Cilacap	15,24	23	Kab. Cilacap	14,21
24	Kab. Purworejo	15,44	24	Kab. Purworejo	14,41
25	Kab. Klaten	15,60	25	Kab. Klaten	14,56
26	Kab. Demak	15,72	26	Kab. Demak	14,6
27	Kab. Sragen	15,93	27	Kab. Sragen	14,87
28	Kab. Banyumas	18,44	28	Kab. Banyumas	17,45
29	Kab. Banjarnegara	18,71	29	Kab. Banjarnegara	17,77
30	Kab. Pemasang	19,27	30	Kab. Pemasang	18,44
31	Kab. Purbalingga	20,53	31	Kab. Rembang	19,5
32	Kab. Brebes	20,82	32	Kab. Purbalingga	19,75
33	Kab. Rembang	20,97	33	Kab. Brebes	20,00
34	Kab. Kebumen	21,32	34	Kab. Kebumen	20,50
35	Kab. Wonosobo	22,08	35	Kab. Wonosobo	21,42

Sumber: TKPKD Provinsi Jawa Tengah 2013-2014

2. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan data kemiskinan secara jelas baik nama, alamat dan permasalahan yang dihadapi oleh suatu kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut data kemiskinan diperoleh dengan menggunakan variabel sebagai berikut:

- a. Status kepemilikan bangunan tempat tinggal
- b. Status kepemilikan lahan tempat tinggal

- c. Jenis lantai terluas
- d. Jenis dinding terluas
- e. Jenis atap terluas
- f. Kualitas dinding terluas
- g. Kualitas atap terluas
- h. Partisipasi sekolah
- i. Kelas tertinggi
- j. Izasah tertinggi
- k. Lapangan usaha dari pekerjaan utama
- l. Status kedudukan dari pekerjaan utama
- m. Sumber air minum
- n. Penggunaan fasilitas buang air besar
- o. Jenis kloset
- p. Tempat pembuangan air tinja
- q. Jenis cacat
- r. Penyakit kronis/menahun
- s. Sumber penerangan utama
- t. Daya listrik terpasang (PLN)
- u. Bahan bakar untuk memasak
- v. Kepemilikan tabung gas 5.5 kg atau lebih
- w. Kepemilikan sambungan telepon (PSTN)
- x. Status kehamilan (wanita 10-48 tahun)
- y. Usia kawin pertama *
- z. Kepesertaan KB
- aa. Jenis kontrasepsi yang digunakan *
- bb. Lama menggunakan kontrasepsi *
- cc. Tempat pelayanan KB yang sering digunakan *
- dd. Keinginan punya anak lagi *
- ee. Alasan tidak mengikuti KB *

Dari variabel tersebut, kondisi jumlah keluarga miskin Kabupaten Semarang tahun 2015 berdasarkan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 dengan menggunakan data status kesejahteraan 40% terendah secara nasional maka status kesejahteraan penduduk Kabupaten Semarang untuk 40% terendah yang dirinci tiap kecamatan yakni dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 2.36
Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga dan Individu
Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Semarang

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	INDIVIDU		KET
		JUMLAH	JUMLAH	
1	KECAMATAN GETASAN			
	KOPENG	633	1.962	
	BATUR	755	2.795	
	TAJUK	431	1.632	
	JETAK	427	1.174	

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	INDIVIDU		KET
		JUMLAH	JUMLAH	
	SAMIRONO	247	933	
	SUMOGAWA	792	3.022	
	POLOBOGO	423	1.504	
	MANGGIHAN	247	885	
	GETASAN	263	835	
	WATES	321	1.225	
	TOLOKAN	311	1.030	
	NGRAWAN	142	507	
	NOGOSAREN	141	459	
	Jumlah Total	5.133	17.963	
2	KECAMATAN TENGARAN			
	TENGARAN	375	1.316	
	TEGALREJO	257	905	
	SRUWEN	601	2.096	
	SUGIHAN	458	1.484	
	DUREN	542	1.932	
	REGUNUNG	385	1.267	
	CUKIL	362	1.223	
	KLERO	358	1.123	
	BUTUH	236	796	
	PATEMON	216	778	
	KARANGDUREN	546	1.972	
	BENER	260	869	
	TEGALWATON	340	1.147	
	BARUKAN	295	1.009	
	NYAMAT	136	403	
	Jumlah Total	5.367	18.320	
3	KECAMATAN SUSUKAN			
	BADRAN	170	463	
	TIMPIK	548	1.848	
	TAWANG	699	1.995	
	BAKALREJO	424	1.376	
	KETAPANG	525	1.767	
	SUSUKAN	129	421	
	SIDOHARJO	240	764	
	GENTAN	611	1.924	
	MUNCAR	302	872	
	NGASINAN	206	647	
	KORIPAN	485	1.561	
	KENTENG	469	1.473	
	KEMETUL	120	382	
	Jumlah Total	4.928	15.493	
4	KECAMATAN KALIWUNGU			
	SIWAL	191	526	
	PAGER	121	405	
	UDANWUH	53	160	
	KENER	63	186	
	PAPRINGAN	247	755	
	KRADENAN	290	905	

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	INDIVIDU		KET
		JUMLAH	JUMLAH	
	KALIWUNGU	474	1.355	
	MUKIRAN	343	1.020	
	PAYUNGAN	336	1.068	
	JETIS	327	1.017	
	ROGOMULYO	491	1.384	
	Jumlah Total	2.936	8.781	
5	KECAMATAN SURUH			
	KEBOWAN	242	675	
	BEJI LOR	242	723	
	JATI REJO	232	764	
	DERSANSARI	277	871	
	PURWOREJO	183	573	
	KETANGGI	281	771	
	MEDAYU	318	1.073	
	BONOMERTO	285	893	
	SUKOREJO	410	1.312	
	KEDUNG RINGIN	744	2.920	
	GUNUNG TUMPENG	302	1.174	
	REKSO SARI	506	1.579	
	SURUH	611	2.063	
	PLUMBON	577	1.823	
	KRANDON LOR	468	1.537	
	CUKILAN	690	2.027	
	DADAP AYAM	655	1.962	
	Jumlah Total	7.023	22.740	
6	KECAMATAN PABELAN			
	UJUNG-UJUNG	308	1.030	
	SUMBER REJO	597	1.975	
	SEGIRI	255	867	
	TERBAN	340	1.141	
	TUKANG	394	1.207	
	SEMOWO	639	1.889	
	BENDUNGAN	227	657	
	KARANGGONDANG	200	615	
	SUKOHARJO	330	953	
	JEMBRAK	267	828	
	GLAWAN	248	839	
	KADIREJO	350	1.158	
	BEJATAN	100	375	
	GILING	226	677	
	PADAAN	296	974	
	KAUMAN LOR	151	479	
	PABELAN	206	684	
	Jumlah Total	5.134	16.348	
7	KECAMATAN TUNTANG			
	KALIBEJI	201	654	
	GEDANGAN	254	888	
	SRATEN	204	711	
	ROWOSARI	241	900	

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	INDIVIDU		KET
		JUMLAH	JUMLAH	
	JOMBOR	130	472	
	CANDIREJO	369	1.331	
	KESONGO	507	1.863	
	WATU AGUNG	249	821	
	LOPAIT	402	1.459	
	TUNTANG	243	833	
	DELIK	321	1.043	
	TLOGO	169	497	
	KR. TENGAH	606	1.774	
	TLOMPAKAN	190	683	
	NGAJARAN	500	1.754	
		4.586	15.683	
8	KECAMATAN BANYUBIRU			
	WIROGOMO	409	1.459	
	KEMAMBANG	165	495	
	SEPAKUNG	533	1.776	
	KEBUMEN	373	1.278	
	GEDONG	200	693	
	ROWOBONI	217	802	
	TEGARON	559	1.773	
	KEBONDOWO	458	1.414	
	BANYUBIRU	408	1.463	
	NGRAPAH	254	769	
	Jumlah Total	3.576	11.922	
9	KECAMATAN JAMBU			
	GEMAWANG	294	903	
	BEDONO	484	1.609	
	KELURAHAN	213	735	
	BRONGKOL	222	673	
	JAMBU	245	714	
	GONDORIYO	210	707	
	KUWARASAN	173	585	
	KEBONDALEM	316	1.041	
	REJOSARI	104	362	
	GENTING	608	2.050	
	Jumlah Total	2.869	9.379	
10	KECAMATAN SUMOWONO			
	KEBONAGUNG	250	870	
	NGADIKERSO	234	733	
	LANJAN	310	1.240	
	CANDIGARON	357	1.038	
	KEMITIR	115	410	
	TRAYU	75	288	
	SUMOWONO	110	359	
	JUBELAN	168	578	
	BUMEN	69	240	
	MENDONGAN	134	518	
	LOSARI	139	531	
	KEMAWI	186	646	

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	INDIVIDU		KET
		JUMLAH	JUMLAH	
	PIYANGGANG	98	345	
	PLEDOKAN	110	365	
	DUREN	129	439	
	KESENENG	200	743	
	Jumlah Total	2.684	9.343	
11	KECAMATAN AMBARAWA			
	NGAMPIN	249	836	
	POJOKSARI	144	423	
	BEJALEN	79	266	
	TAMBAKBOYO	178	581	
	KUPANG	458	1.401	
	LODOYONG	153	435	
	KRANGGAN	112	337	
	PANJANG	165	560	
	PASEKAN	455	1.695	
	BARAN	325	1.124	
	Jumlah Total	2.318	7.658	
12	KECAMATAN BANDUNGAN			
	MLILIR	307	1.034	
	DUREN	296	1.147	
	JETIS	190	661	
	BANDUNGAN	244	758	
	KENTENG	242	871	
	CANDI	291	998	
	BANYUKUNING	581	2.078	
	JIMBARAN	260	833	
	PAKOPEN	282	946	
	SIDOMUKTI	436	1.669	
	Jumlah Total	3.129	10.995	
13	KECAMATAN BAWEN			
	DOPLANG	251	807	
	BAWEN	466	1.565	
	ASINAN	270	810	
	POLOSIRI	287	829	
	KANDANGAN	747	2.572	
	LEMAH IRENG	398	1.338	
	HARJOSARI	307	1.111	
	SAMBAN	220	891	
	PONCORUSO	143	544	
	Jumlah Total	3.089	10.467	
14	KECAMATAN BRINGIN			
	BRINGIN	291	882	
	POPONGAN	117	398	
	PAKIS	350	1.046	
	LEBAK	158	478	
	BANDING	350	1.068	
	TRUKO	394	1.135	
	NYEMOH	246	716	
	TEMPURAN	192	492	

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	INDIVIDU		KET
		JUMLAH	JUMLAH	
	WIRU	419	1.257	
	SENDANG	412	1.315	
	GOGODALEM	472	1.499	
	REMBES	392	1.228	
	KALIKURMO	473	1.661	
	SAMBIREJO	465	1.468	
	KALIJAMBE	369	1.353	
	TANJUNG	105	308	
	Jumlah Total	5.205	16.304	
15	KECAMATAN BANCAK			
	PUCUNG	208	595	
	REJOSARI	469	1.440	
	LEMBU	283	972	
	PLIMUTAN	454	1.422	
	BANTAL	304	751	
	JLUMPANG	141	446	
	BANCAK	452	1.433	
	WONOKERTO	372	1.304	
	BOTO	418	1.496	
	Jumlah Total	3.101	9.859	
16	KECAMATAN PRINGAPUS			
	DEREKAN	102	335	
	KLEPU	360	1.245	
	PRINGAPUS	341	1.214	
	PRINGSARI	199	714	
	JATIRUNGGO	679	2.503	
	WONoyoso	425	1.477	
	WONOREJO	798	3.142	
	CANDIREJO	848	2.678	
	PENAWANGAN	752	2.478	
	Jumlah Total	4.504	15.786	
17	KECAMATAN BERGAS			
	MUNDING	216	877	
	PAGERSARI	240	903	
	GEBUGAN	191	675	
	WUJIL	179	618	
	BERGAS LOR	134	388	
	BERGAS KIDUL	269	1028	
	RANDU GUNTING	55	191	
	JATIJAJAR	229	794	
	DIWAK	32	113	
	NGEMPON	98	336	
	KARANGJATI	144	544	
	WRINGIN PUTIH	380	1266	
	GONDORIYO	671	2.257	
	Jumlah Total	2.838	9.990	
18	KECAMATAN UNGARAN BARAT			
	GOGIK	137	463	
	LANGENSARI	147	600	

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	INDIVIDU		KET
		JUMLAH	JUMLAH	
	CANDIREJO	155	560	
	NYATNYONO	235	885	
	GENUK	103	371	
	UNGARAN	115	391	
	BANDARJO	74	248	
	LEREP	392	1.481	
	KEJI	167	633	
	KALISIDI	264	933	
	BRANJANG	276	1.001	
	Jumlah Total	2.065	7.566	
19	KECAMATAN UNGARAN TIMUR			
	BEJI	136	490	
	LEYANGAN	131	439	
	KALONGAN	536	1.642	
	KAWENGEN	990	3.317	
	KALIKAYEN	343	925	
	MLUWEH	480	1.218	
	SUSUKAN	236	634	
	KALIREJO	83	251	
	SIDOMULYO	51	203	
	GEDANGANAK	124	478	
	Jumlah Total	3.110	9.597	
	TOTAL KABUPATEN	73.595	244.194	

Sumber: Basis Data Terpadu TNP2K, 2016

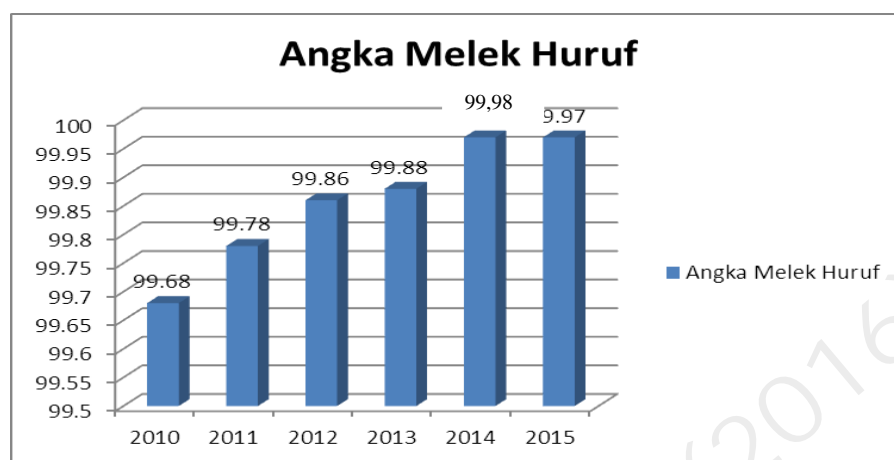
2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.3.2.1 Aspek Pendidikan

2.3.2.1.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf diukur melalui proporsi penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis. Untuk perhitungan indeks pendidikan, batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minimum 0. Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.

Gambar 2.7
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Semarang
Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2015

Menurut indeks perhitungan pendidikan, angka melek huruf di Kabupaten Semarang hampir mencapai 100% yang artinya masyarakat di Kabupaten Semarang hampir semua dapat membaca dan menulis. Terdapat penurunan angka buta aksara mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2015 sebesar 0,30%

2.3.2.1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Metode lama dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk dengan rata-rata hitung dari tiga komponen yaitu kesehatan melalui Angka Harapan Hidup (AHH), pengetahuan melalui Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah *Mean Years of Schooling (MYS)*, serta standard hidup layak (Pengeluaran per kapita disesuaikan). Sejak Tahun 2015, BPS menghitung IPM dengan metode baru melalui tiga komponen yaitu kesehatan (Angka Harapan Hidup), pengetahuan (harapan lama sekolah/ *Expected years of schooling (EYS)*) dan rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling (MYS)*) serta standard hidup layak (pengeluaran per kapita disesuaikan).

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Semarang sampai dengan Tahun 2015 dengan metode penghitungan baru, sebesar 7,34 dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Semarang
Tahun 2010–2015*)

Uraian	Metode Baru					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
Rata-Rata Lama Sekolah	7,12	7,20	7,24	7,28	7,31	7,34

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

*) Angka sementara

2.3.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK disemua jejang pendidikan telah menunjukkan peningkatan sesuai dengan

yang ditargetkan, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, namun untuk capaian di jenjang SMP/MTs masih perlu ditingkatkan karena sampai dengan Tahun 2015 APM baru mencapai 81,81%. Meskipun dalam lima tahun setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Perkembangan APK dan APM Kabupaten Semarang selama kurun waktu 2010-2015 tersaji dalam Tabel 2.38 sebagai berikut

Tabel 2.38
Perkembangan APK dan APM Tahun 2010 – 2015
Di Kabupaten Semarang (%)

Jenjang pendidikan	APK						APM					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI	103.30	105.01	105.01	105.02	105.00	104,51	94.98	95.03	95.05	95.09	95.15	95.16
SMP/MTs/Paket B	95.82	95.87	95.88	95.95	96.00	96,28	81.56	81.63	81.70	81.75	81.80	81.81
APK SMA/SMK/MA / Paket C	47.91	49.23	51.02	57.32	58.64	69,09	39.12	39.35	40.03	40.05	40.10	43,41

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, 2015

2.3.2.1.4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)

APT merupakan persentase jumlah penduduk baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Tabel 2.39 di bawah ini:

Tabel 2.39
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2010 – 2015 (%)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI/SDLB/Paket A	29.27	27.24	26.24	27.45	29,45	30,81
SMP/MTs/SMP/PLB/Paket B	21.18	21.16	21.14	21.35	19,19	23,31
SMA/SMK/MA/Paket C	21.24	18.99	20.49	21.55	20,76	16,10

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

2.3.2.1 Aspek Kesehatan

2.3.2.2.1 Angka Kematian Bayi

Penyebab kematian terbesar dari tahun ke tahun adalah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan *asfiksia* (keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas dengan teratur dan spontan), yang disebabkan karena *prematuritas* sehingga organ belum matang atau belum siap bertahan hidup.

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain memberikan Pemberian Makanan Tambahan kepada ibu hamil KEK agar tidak terlahir bayi dengan kondisi BBLR. Selain itu dilakukan sosialisasi tentang cara perawatan bayi, pemberian ASI eksklusif, dan membentuk Satgas Penurunan AKB serta mengoptimalkan jejaring dan Nomor Telepon/*Call Center*. Penurunan AKB sejak Tahun 2012 sampai dengan 2014 juga dikarenakan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam tata laksana BBLR dan *asfiksia* serta telah dilakukan pelatihan tata laksana *neonatal* bagi dokter, bidan dan perawat. Namun demikianj Angka Kematian Bayi sampai dengan Tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi sebesar 11,18%. Persentase Angka Kematian Bayi selama 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.40 sebagai berikut :

Tabel 2.40
Angka Kematian Bayi

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	10,46	13,37	13,19	11,95	10,25	11,18

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2015

2.3.2.2.2 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat yang dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. AHH di Kabupaten Semarang dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 cenderung meningkat, hal ini menunjukkan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan kesehatan secara umum. Perkembangan AHH selama Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.41 sebagai berikut :

Tabel 2.41
Angka Harapan Hidup (Tahun)
Menggunakan metode baru

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup	75,40	75,42	75,45	75,48	75,50	75,50

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015

2.3.2.2.3 Angka Kematian Ibu

Persentase Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Semarang secara umum masih perlu dilakukan usaha yang lebih keras guna menurunkannya. Peningkatan AKI pada Tahun 2011 dan 2014 disebabkan karena terjadinya peningkatan kasus pendarahan dan *eklampsi* pada ibu hamil serta adanya risiko tinggi ibu hamil seperti penyakit jantung dan hipertensi. AKI pada Tahun 2015 sebesar 120,4% atau sebanyak 17 kasus menurun dibandingkan Tahun 2014 dimana AKI sebesar 144,31% atau sebanyak 20 kasus.

Beberapa program telah dilakukan sebagai usaha menurunkan AKI antara lain terlaksananya program M3 (*Maternal and Infant Mortality Meeting*) dari tingkat Kabupaten sampai desa, upaya jejaring ibu bayi selamat dengan memperbaiki sistem rujukan, upaya deteksi dini ibu hamil dengan program P4K dan ANC (*Ante Natal Care*) terintegrasi, serta peningkatan ketrampilan dan pengetahuan petugas dengan berbagai pelatihan termasuk APN (Asuhan Persalinan Normal) dan PPGDON (Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Obstetric dan Neonatus) serta optimalisasi Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar). Selain itu juga dibentuk SATGAS Penurunan AKI, mengoptimalkan jejaring dan Nomor Telepon *Call Center* untuk penanganan kasus kelahiran. AKI di Kabupaten Semarang selama Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.42 sebagai berikut:

Tabel 2.42
Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)

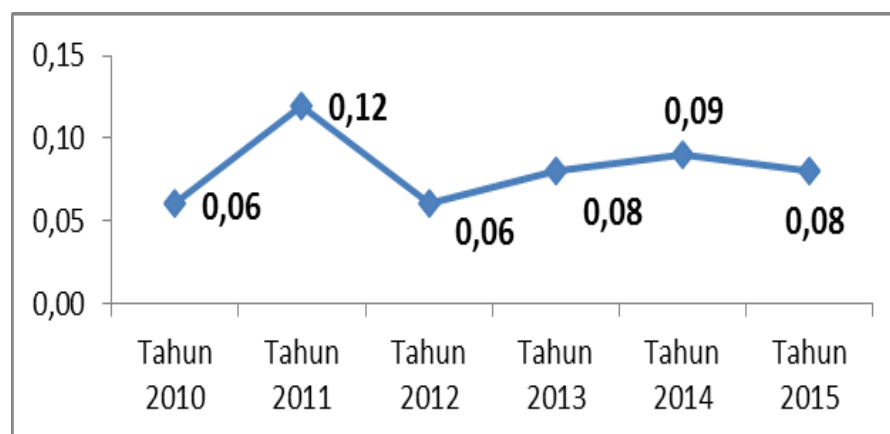
Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	101,92	146,24	78,01	120,20	144,31	120,34

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 2015

2.3.2.2.4. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase Balita Gizi Buruk sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 cenderung naik turun. Pada Tahun 2010 sebesar 0,06%; Tahun 2011 sebesar 0,12%; tahun 2012 sebesar 0,06%; tahun 2013 sebesar 0,08% dan Tahun 2014 sebesar 0,09%, sedangkan pada Tahun 2015 tercapai 0,08% atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 0,11%. Jumlah balita gizi buruk pada Tahun 2015 sebanyak 60 balita menurun dibandingkan Tahun 2014 sebanyak 64 balita. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan kasus gizi buruk pada balita antara lain dengan dilakukannya pemantauan pertumbuhan tiap bulan dan bila terjadi penurunan berat badan 2 kali maka secepatnya dirujuk ke tenaga kesehatan dan dilakukan intervensi berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan minimal 90 hari sehingga balita yang semula berstatus gizi buruk meningkat ke status gizi kurang. Persentase Balita Gizi Buruk dari Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.8 sebagai berikut:

Gambar 2.8
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2015

2.3.2.1.5 Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Capaian Indikator Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Jamkesmas dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 mengalami peningkatan dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan mulai Tahun 2014 bergabung menjadi satu dengan askes di BPJS kesehatan, dimana pasien BPJS kesehatan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pasien PBI (Penerima Bantuan Iuran) yaitu Jamkesmas dan pasien Non PBI (Askes dan peserta mandiri). Pasien PBI pada Tahun 2014 sebesar 15.946 pasien dan pada Tahun 2015 sebanyak 26.594 pasien. Sementara untuk pasien Jamkesda dari Tahun 2010 hingga Tahun 2015 mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.43
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2010-2015

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015 *)
Askes	Pasien	21.550	22.686	23.915	20.525	Menjadi BPJS	
JAMKESMAS	pasien	16.345	14.353	17.077	17.522	Bergabung di BPJS	
BPJS	pasien	masih ASKES				65.841	117.561
- non PBI	pasien					49.895	90.967
- PBI	pasien					15.946	26.594
JAMKESDA	pasien	5242	3836	2.838	5.524	5.108	5.983

Sumber: RSU Ungaran dan RSU Ambarawa, 2015

2.3.2.2 Aspek Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam angkatan kerja yang dapat memberikan gambaran yang jelas sampai berapa jauh sebenarnya penduduk yang termasuk usia kerja (15 tahun ke atas) benar-benar aktif di dalam bekerja maupun tidak aktif bekerja. TPAK di Kabupaten Semarang dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 cenderung fluktuatif dengan rata-rata per tahunnya 75,08%. Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja biasanya dapat disebabkan berbagai hal seperti turunnya jumlah penduduk usia kerja maupun mencari pekerjaan yang tidak tersedia.

Tabel 2.44
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

2010	2011	2012	2013	2014	2015
76,11	96,20	96,83	95,43	75,34	87,40

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

2.3.3 Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Semarang memiliki berbagai peninggalan budaya, yang menjadi potensi wisata budaya di Kabupaten Semarang. Lokasi Kabupaten Semarang yang dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, dan mudahnya aksesibilitas menjadi beberapa keuntungan bagi Kabupaten Semarang, termasuk

bagi pengembangan seni budaya, pemuda dan olahraga. Pembangunan seni budaya, pemuda dan Olahraga tentunya berpengaruh pada kualitas manusia di Kabupaten Semarang.

2.3.3.1 Kebudayaan

Kabupaten Semarang mempunyai potensi yang cukup besar dibidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang berkembang di Kabupaten Semarang seperti upacara adat/merti deso, benda cagar budaya dan kesenian tradisional. Keragaman seni dan budaya tersebut merupakan kekayaan daerah yang perlu terus dikembangkan dan dilestarikan dimasa yang akan. Selain sebagai upaya pelestarian agar bisa menjadi daya tarik wisata baik bagi wisatawan asing maupun domestik.

Jumlah grup kesenian dari target RPJMD mulai Tahun 2010 sampai dengan akhir Tahun 2015 telah memenuhi/melampaui target yang ditetapkan. Jumlah grup kesenian di Kabupaten Semarang dari Tahun 2010-2015 bertambah sejumlah 1.314 grup, sedangkan targetnya sampai Tahun 2015 sebesar 1.200 grup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.45 pada halaman berikut :

Tabel 2.45
Jumlah Grup Kesenian di Kab. Semarang Tahun 2010-2015

No	Jenis Seni	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tari Tradisional	Grup	267	298	445	657	894	904
2	Tari Modern	Grup	-	-	-	61	64	64
3	Pertunjukan Rakyat	Grup	131	142	216	146	194	194
4	Musik Religius	Grup	461	464	566	386	498	501
5	Musik Modern	Grup	150	169	266	227	461	462
6	Teater	Grup	60	65	73	145	194	194
7	Pedalangan	Grup	12	14	22	39	70	70
8	Seni Rupa	Grup	-	-	-	32	35	35

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2015

Sebagai prasarana mengekspresikan diri bagi seniman/seniwati maupun masyarakat di Kabupaten Semarang dalam RPJMD Tahun 2015 ditargetkan Gedung Kesenian sebanyak 1 (buah) dan telah dipenuhi dengan memanfaatkan eks rumah Dinas Camat Ambarawa, Sedangkan jumlah Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Tabel 2.46

Tabel 2.46
Jumlah Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

No	Jenis	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Museum	Buah	2	2	2	2	2	3
2	Benteng	Buah	2	2	2	2	2	2
3	Bangunan Kolonial	Buah	12	12	31	35	35	39
4	Gereja/Masjid	Buah	8	8	33	35	36	43
5	Makam dan Monumen	Buah	10	10	10	10	10	10

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2015

2.3.3.2. Pemuda dan Olahraga

Jumlah organisasi olahraga mengalami peningkatan di Kabupaten Semarang, terlihat dimasing-masing cabang olahraga mencoba mensosialisasikan cabang olahraganya pada berbagai kalangan masyarakat. Jumlah Gedung Olahraga yang ada di Kabupaten Semarang berjumlah 1 (satu) buah, yang dimaksud gedung Olahraga disini adalah Gelanggang Olah Raga atau Sport Centre Pandanaran yang terkenal dengan GOR Wujil terdiri dari 1 (satu) gedung Olahraga indoor dan 1 (satu) gedung Olahraga Outdoor. Jumlah kegiatan Olah Raga dan Pemuda selama Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.47 sebagai berikut:

Tabel 2.47
Kegiatan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang
Tahun 2010 - 2015

Jenis	Satuan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Organisasi Pemuda	Buah	15	25	27	27	21	18
Jumlah Organisasi Olahraga	Buah	75	168	174	198	154	199
Jumlah kegiatan kepemudaan	Keg	10	15	36	30	12	12
	Lokasi	11	20	52	72	13	13
	Org	270	390	806	1.007	300	533
Jumlah Kegiatan Olahraga	Cabang	30	40	28	47	34	34
Jumlah Klub Olahraga	Buah	400	250	225	323	1.173	1.175
Jumlah Gedung Olahraga	Buah	1	1	1	2	1	1

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2015

2.3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat /penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM Kabupaten Semarang dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu 69,58 pada Tahun 2010 menjadi 71,87 pada Tahun 2015, namun bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah terjadi penurunan peringkat, yaitu dari peringkat 8 pada Tahun 2010 menjadi peringkat 11 Tahun 2015. Perkembangan dan peringkat IPM Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Tabel 2.48 sebagai berikut:

Tabel 2.48
Capaian Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Semarang dan Daerah Sekitar Tahun 2010-2015

KABUPATEN/ KOTA	2010		2011		2012		2013		2014		2015		Pertumb 2010- 2015
	IPM	Pering kat	IPM	Pering kat	IPM	Pering kat	IPM	Pering kat	IPM	Pering kat	IPM	Pering kat	
Kota Semarang	76,96	3	77,58	3	78,04	3	78,68	3	79,24	3	80,22	2	3,26
Kota Salatiga	78,35	1	78,76	1	79,10	1	79,37	1	79,98	1	80,96	1	2,61
Kab. Temanggung	63,08	28	64,14	27	64,91	26	65,52	27	65,97	27	67,06	26	3,98
Kab. Semarang	69,58	8	70,35	8	70,88	8	71,29	10	71,65	10	71,87	11	2,29
Kab. Demak	66,02	18	66,84	18	67,55	17	68,38	17	68,95	17	69,78	17	3,76
Kab. Grobogan	64,56	20	65,41	20	66,39	19	67,43	19	67,77	19	68,05	21	3,49
Kab. Boyolali	68,76	12	69,14	12	69,51	12	69,81	13	70,34	13	71,73	12	2,97
Kab. Kendal	66,23	17	66,96	17	67,55	18	67,98	18	68,46	18	69,56	18	3,33

KABUPATEN/ KOTA	2010		2011		2012		2013		2014		2015		Pertumb 2010- 2015
	IPM	Pering kat	IPM	Pering kat	IPM	Pering kat	IPM	Pering kat	IPM	Pering kat	IPM	Pering kat	
Jawa Tengah	66,08	13	66,64	14	67,21	15	68,02	13	68,78	13	69,49	12	3,41
Nasional	66,53		67,09		67,70		68,31		68,90		69,55		

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib

Pelayanan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Semarang dalam kurun waktu Tahun 2010 hingga 2015 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Wajib Tahun 2010-2015

No	Urusan dan Indikator	SAT	Capaian Kinerja						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
A.	PENDIDIKAN								
1	Angka Partisipasi PAUD	%	33,70	35,41	37,13	44,90	47,18	54,92	
2	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	- SD/MI	%	94,98	95,03	95,05	95,09	95,15	95,16	
	- SMP/MTs	%	81,56	81,63	81,70	81,75	81,80	81,81	
	- SMA/SMK/MA	%	39,12	39,35	40,03	40,05	40,10	43,41	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
	- SD/MI	%	103,30	105,01	105,01	105,02	105,00	104,51	
	- SMP/MTs	%	95,82	95,87	95,88	95,95	96,00	96,28	
	- SMA/SMK/MA	%	47,91	49,23	51,02	57,32	58,64	69,09	
4	Angka Kelulusan								
	- SD/MI	%	99,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- SMP/MTs	%	99,40	99,02	99,09	99,91	99,99	100,00	
	- SMA/SMK/MA	%	99,27	99,80	99,83	99,97	99,96	100,00	
5	Angka Putus Sekolah								
	- SD/MI	%	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	
	- SMP/MTs	%	0,66	0,61	0,51	0,51	0,41	0,20	
	- SMA/SMK/MA	%	0,95	0,91	0,91	0,85	0,75	0,68	
6	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah								
	- SD/MI	%	0,74	0,73	0,74	0,74	0,75	0,72	
	- SMP/MTs	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,30	
	- SMA/SMK/MA	%	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15	0,18	
7	Angka Melanjutkan dari SD/Mi ke SMP/MTs	%	90,50	93,33	93,30	92,53	91,66	94,16	
8	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	67,90	70,42	76,26	74,88	75,11	82,61	
9	Angka Melek Huruf usia > 15 th	%	99,68	99,78	99,86	99,88	99,97	99,98	
10	Guru yang berpendidikan S1/D-IV								
	- TK/RA, SD/MI	%	33,09	48,78	52,67	65,14	73,76	80,00	
	- SMP/MTs	%	79,57	84,95	87,04	88,82	90,37	90,39	

No	Urusan dan Indikator	SAT	Capaian Kinerja					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
	- SMA/MA/SMK	%	91,36	92,95	93,51	97,43	97,66	97,70
11	Guru bersertifikat pendidik							
	- SD	%	31,33	38,33	43,06	47,74	60,83	56,10
	- SMP	%	43,91	56,89	58,84	58,95	60,49	61,51
	- SMA/SMK	%	37,48	38,33	38,35	38,46	38,51	35,83
12	Ruang kelas SD/MI sesuai standar	%	60,00	62,80	95,24	95,57	91,18	92,00
13	Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar	%	87,00	79,20	83,53	86,60	97,41	97,44
14	Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar	%	36,00	40,02	42,75	91,14	97,98	98,76
B. KESEHATAN								
1	Angka Harapan Hidup*)	tahun	72,40	72,54	72,61	72,90	72,92	75,55
2	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	10,46	13,37	13,19	11,95	10,25	11,18
3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	101,92	146,24	78,01	120,20	144,31	120,34
4	Angka Kematian Balita	Per 1000 KH	11,96	14,48	14,47	13,44	10,90	12,46
5	Persentase balita gizi buruk	%	0,06	0,12	0,06	0,08	0,09	0,08
6	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000 balita	22,17	22,28	22,17	29,09	22,93	23,20
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 1000 penddk	0,38	0,37	0,37	0,37	0,30	0,32
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1000 penddk	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1000 penddk	0,19	0,24	0,24	0,26	0,34	0,36
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1000 penddk	0,25	0,36	0,37	0,31	0,39	0,41
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	92,90	92,10	94,33	95,46	93,72	99,85
13	Cakupan desa/kel. Universal Child Immunization (UCI)	%	100,00	100,00	99,15	100,00	100,00	100,00
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	25,48	43,87	26,32	15,11	17,87	24,95
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masy miskin							
	- Jamkesmas	pasien	4.679,00	4.559,00	6.241,00	6.685	-	
	- BPJS	pasien					29.221	42.606

No	Urusan dan Indikator	SAT	Capaian Kinerja					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
	- Jamkesda	pasien	1.594,00	861,00	888,00	1.425	944	725
18	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin							
	- Jamkesmas	pasien	11.666,00	9.834,00	10.836,00	10.839,00	-	-
	- BPJS	pasien				-	36.620	74.956,00
	- Jamkesda	pasien	3.560,00	3.016,00	1.950,00	4.099,00	4.746	5.258,00
19	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin							
	- Jamkesmas (gabung dengan BPJS)	% (pasien)				45,72	39,22	49,54
	- Jamkesda	% (pasien)				18,72	30,75	95,97
18	Cakupan kunjungan bayi	%	100,07	97,04	91,86	84,14	93,78	98,12
19	Cakupan puskesmas	%	136,84	136,84	136,84	136,84	136,84	136,84
20	Cakupan pembantu puskesmas	%	28,94	28,94	28,94	28,94	28,94	28,51
C. PEKERJAAN UMUM								
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	28,00	32,87	49,38	52,96	66,00	70,06
2	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	46,49	26,38	26,71	26,71	37,83	44,20
3	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	%	50,00	54,70	100,00	70,00	70,12	72,00
4	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (kecepatan kend> 40 km/jam)	%	42,00	35,74	49,38	52,96	66,00	70,06
5	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (lebar> 1,5 m)	%	15,00	22,49	23,00	23,10	29,56	29,58
6	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	53,00	53,61	61,00	65,00	68,77	69,17
7	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	20,26	35,81	39,94	42,00	37,83	44,20
D. PERUMAHAN								
1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	78,96	80,21	83,85	89,75	89,75	83,38
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	29,35	36,24	42,27	47,60	76,90	85,44
3	Rasio tempat pemukiman umum per satuan penduduk	%	88,08	89,08	89,08	90,00	98,00	98,00
4	Rasio rumah layak huni	%	55,99	61,99	66,94	73,50	75,58	77,72
5	Rasio permukiman layak huni	%	63,25	66,27	69,34	73,50	75,58	77,72
6	Lingkungan permukiman	ha	19.704	19.920	20.325	20.950	20.950	21.376,00
7	Lingkungan permukiman kumuh	ha	1.100	1.007	996	960	940,00	925,00
8	Rumah tangga pengguna listrik	%	69,69	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
E. PENATAAN RUANG								
1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	42,50	50	55,00	57,00	59,00	61,00

No	Urusan dan Indikator	SAT	Capaian Kinerja					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Luas wilayah produktif	Ha	42,780	43,09	43,597	43,485	40.492	40.380
3	Luas Wilayah industry	Ha	1.591,00	1.657	1.677,00	1.705,00	1.721,10	1.736,10
4	Luas wilayah banjir	Ha (Perkotaan)	0,25	0,22	0,60	0,60	0,55	0,53
5	Luas wilayah kekeringan	Ha	4.125,00	4125	4.100,00	4.029,00	4.029,00	3.998,00
6	Luas wilayah perkotaan	Ha	8.404,290	8.524,29	8.560,00 0	8.624,00 0	8.667,00	8.702,00
F. PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA	buku		-	-	-	-	-
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	buku		1	-	-	-	-
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang tlg ditetapkan PERKADA	buku	1,00	1	1	1	2,00	2,00
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd	buku	1,00	1	1	1	2,00	2,00
G. PERHUBUNGAN								
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	8.992.699	8.563.703	5.423.676	5.237.613	5.431.180	7.469.203
2	Rasio ijin trayek	%	1,20	1,20	0,74	0,97	1,17	0,00124
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	2.783	2.749	2.392	16.673	18.045	19.042
4	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	terminal A	1	1	1	-	-	-
		terminal B				1	1	1
		terminal C	4	4	4	6	7	7
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,0054	0,0052	0,0048	1,54	1,54	1,54
6	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang	9.043.167	8.563.703	5.423.676	5.237.613	5.431.180	7.469.203
		Ton	232.502	236.344	125.060	-	-	-
7	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang	9.043.167	8.563.703	5.423.676	5.237.613	5.431.180	7.469.203
		ton	232.502	236.344	125.060	-	-	-
8	Angkutan Darat	%	0,0200	0,02	0,0447	1,46	0,92	0,0148
9	Kepemilikan KIR angkutan umum	Kendaraan	7.425	7.612	4.487	9.247	8.974	8.659,00
10	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	30	35	30	30	30	30,00
11	Pemasangan rambu-rambu	buah	542	248	510	729	979	1.187,00
H. LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase penanganan sampah	%	78,57	78,56	79,26	79,55	80,96	80,72
2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,11	0,13	0,215	0,64	0,66	0,77
3	Persentase penduduk berakses air minum	%	59,73	60,21	71,18	79,29	82,91	83,39
4	Persentase luas permukiman yang tertata	%	39,1	41,1	53,87	55,64	58,74	59,24

No	Urusan dan Indikator	SAT	Capaian Kinerja					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
5	Cakupan Pantauan Pencemaran status mutu air	Titik	24	9,00	19	21	52	20,00
6	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Ha		14,00	14,00	48,50	27,16	-
7	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL	Pelaku Usaha	10,00	20,00	21,00	16,00	25	49
8	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Penegakan hukum lingkungan	Kasus	10,00	12,00	12,00	11,00	10	15
I. PERTANAHAN								
	Kasus tanah terdaftar	Kasus	3	10	3	5	2	14
	Kasus tanah terselesaikan	Kasus	0	10	2	3	2	10
J. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	%	70,00	77,00	86,84	88,00	93,00	95,70
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000/pddk	orang	498	521	569	561	617	631
3	Rasio pasangan ber-akte Nikah	%	52,50	86,71	71,47	80,00	79,00	81,00
4	Rasio bayi berakte kelahiran	%	81,00	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Kepemilikan KTP	orang	515.510	603.031	621.233	666.915	683.053	710.146
6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	90,00	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Angka Pertumbuhan Penduduk	%	0,90	0,50	0,58	0,58	0,60	0,70
K. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	5,36	6,87	7,86	7,460	7,580	7,480
2	Rasio KDRT	%	0,020	0,04	0,047	0,039	0,037	0,020
3	Persentase jumlah naker dibawah umur	%	0,970	0,727	0,712	-	0,140	0,14
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	33,70	2,78	78,80	82,180	36,880	30,385
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	0,013	0,009	19,080	0,008	0,021	0,035
L. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA								
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	3,42	3,40	3,38	3,34	3,37	3,16
2	Rasio akseptor KB	%	103,22	83,29	86,63	83,42	80,09	95,48
3	Keluarga Pra KS	%	27,84	25,21	24,95	22,76	25,63	25,48
	Keluarga KS1	%	16,43	18,54	18,64	24,88	18,63	18,34
4	Cakupan peserta KB aktif	%	81,76	83,29	81,41	80,87	83,17	83,13
M. SOSIAL								

No	Urusan dan Indikator	SAT	Capaian Kinerja					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	buah	33	32	39	42	46	48
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%			11,48	62,70	80,52	49,25
N. KETENAGAKERJAAN								
1	Rasio penduduk yang bekerja	%	51,45	52,19	53,46	65,30	57,27	65,93
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,11	96,20	96,83	95,43	75,34	87,40
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	5,58	8,37	7,10	5,96	3,51	3,99
4	Pencari kerja yang ditempatkan	%	13,02	17,47	83,74	70,69	69,10	82,66
5	Keselamatan dan perlindungan	%	55,00	60,00	60,00	62,65	70,22	75,94
O. KOPERASI DAN UMKM								
1	Bertambahnya jumlah koperasi	unit	622	637,00	657	662	609	548
2	Persentase koperasi aktif	%	88,59	80,06	86,00	69,04	63,21	73,35
3	Peningkatan koperasi aktif	Unit	551	510,00	528	458	385	402
4	Jumlah UKM non BPR/LKMUMKM	Org	25.709	26.569,00	26.719	26.757	63.146	63.146
5	Terbinanya pelaku UMKM	Org	6.221	6.661,00	6.811	7.756	8.302	10.916
6	Jumlah BPR/LKM	Unit	876	936,00	953	662	611	925
7	Kontribusi sektor Lemb. Keu, Jasa & Persewaan terhadap PDRB *)	Rp. (Juta)	465.987,02	535.847,79	590.400,05	670.036,62	761.166,08	834.783,88
8	Usaha mikro dan kecil	%	24,20	25,00	26,00	28,98	13,15	17,29
P. PENANAMAN MODAL								
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	bh	4	7	7	18	44	70
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. milyar	142,58	154,50	259,90	371,048	418,632	377,509
3	Lama proses perijinan	hari	3 s.d. 14	3 s.d. 14	11,00	3 s.d 14	3 s/d 14	3 s.d 14
4	Pameran/ekspo	kl	1	1	2	3	4	5
5	Kenaikan/penurunan nilai Realisasi PMDN	Rp. milyar	82,90	9.924,00	105,40	111,148	303,480	41,122
Q. BUDAYA								
1	Jumlah grup kesenian	Group	1.096	1.152	1.583	1.693	2.410	2.696
2	Jumlah gedung kesenian	buah		-	-	-	1	1
3	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	4	4	5	39	34	34
4	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	5	5	5	5	5	5
5	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	lokasi	34	35	79	85	85	87
J. PEMUDA DAN OLAH RAGA								
1	Jumlah organisasi pemuda	buah	15	25	27	27	21	18

No	Urusan dan Indikator	SAT	Capaian Kinerja					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Jumlah organisasi olahraga	buah	75	168	174	198	154	199
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	keg	10	15	36	30	12	12
		lokasi	11	20	52	72	13	13
		orang	270	390	806	1.007	300	533
4	Jumlah kegiatan olahraga	cabang	30	40	28	47	34	34
5	Jumlah klub olahraga	buah	400	250	225	323	1.173	1175
6	Jumlah gedung olahraga	buah	1	1	1	2	1	1
K. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	52,00	48,00	49,00	48,00	45,00	45,00
2	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk	%	103,38	101,43	101,61	81,41	77,67	72,90
3	Rasio Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	13,481	13,481	13,600	14,60	14,56	13,15
4	Angka kriminalitas	kasus	477	563	558	497	625	604
5	Jumlah demo	Kegiatan	16	11	34	18	20	15
6	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	2	2	2	2	2	2
7	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	Kegiatan		-	-	-	2	1
8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Kegiatan	425	409	470	365	365	365
9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	52,00	69,60	100,00	99,00	95,38	93,18
10	Tingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran wilayah manajemen kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	80,00	86,20	75
11	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	1,030	1,02	1,000	0,814	0,78	0,73
12	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	0,00032	0,00032	0,00032	0,00039	0,00052	0,0000052
13	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kegiatan		1	1	1	0	1
14	Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	Kegiatan		-	-	-	1	1
L. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90	5,15	5,94	5,54	5,31	5,40
2	Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	89,50	89,86	89,90	91,49	91,60	92,11
3	Prosentase Penduduk miskin	%	10,50	10,14	10,10	8,51	8,40	7,89
4	PDRB ADHB	Rp. (Juta)	11.071.609,32	12.614.483,89	13.805.528,69	15.900.709,16	17.454.225,87	19.446.863,58
5	PDRB ADHK	Rp. (Juta)	5.560.551,90	5.846.728,84	6.226.260,31	6.568.214,50	6.921.737,11	7.296.019,30
6	PDRB ADHB per kapita	Rp	11.890.419,00	13.476.033,68	14.662.586,18	14.688.136,00	18.302.319,00	20.295.647,80
7	PDRB ADHK per kapita	Rp	5.971.787,10	6.216.419,30	6.612.791,18	6.042.726,00	7.265.199,40	7.614.463,80

No	Urusan dan Indikator	SAT	Capaian Kinerja					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
8	Sistem informasi Manajemen Pemda	buah	7	9	10	10	11	45
9	Jumlah pajak daerah	Jenis	7	9	9	11	12	11
10	Jumlah retribusi daerah	Jenis	31	29	29	23	2	21
11	Penegakan Perda	kasus	195	696	339	96	607	529
12	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	paket	1	1	1	1	4	1
M. KETAHANAN PANGAN								
1	Ketersediaan pangan utama	%	141,22	167,42	178,93	171,36	176,37	267,90
2	Pola pangan harapan	skor	84,20	82,10	88,10	88,20	90,10	83,4
3	Regulasi ketahanan pangan	Buah		1	-	3	1	-
N. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	org	235	235	235	235	235	235
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Klmpk	8.001	8.001	8.001	8.001	8.903	8.903
3	Jumlah LSM	ormas	9	5	6	21	100	141
4	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masy	Rp (milyar)	6,005	5,275	14,260	8,251	8,303	9,008
5	PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
6	Posyandu aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
7	Cakupan sarpras perkan toran pemerintahan desa yang baik	%	90,50	93,00	95,00	100,00	100,00	100
O. STATISTIK								
1	Buku Statistik	Dok	5	5	5	6	6	6
2	Buku PDRB Kabupaten	Dok	3	3	2	2	2	3
P. KEARSIPAN								
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	%	56	50	56	56	60	60
2	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Keg	2	2	2	0	2	3
Q. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Jumlah jaringan komunikasi	unit	44	76	97	116	131	145
2	Jumlah surat kabar nasional/local	buah	7	15	15	20	11	7
3	Jumlah penyiaran radio/TV local	buah	9	14	14	9	10	10
4	Web Site milik pemerintah daerah	Sub domain	26	30	25	26	27	29
R. PERPUSTAKAAN								
1	Jumlah perpustakaan	unit	976	1.024	1.040	1.082	1.093	1.115
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	83.046	96.705	76.366	118.168	137.673	143.345
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	28.944	29.587	30.361	32.091	35.773	38.786
		Eksemplar	5.750	52.653	52.653	60.167	67.417	73.870

2.4.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Berikut ini diuraikan capaian indikator kinerja bidang pendidikan di Kabupaten Semarang yang secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini tampak dari peningkatan capaian APK dan APM di semua jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan dari Tahun yang lalu dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Peningkatan capaian APK dan APM pada Tahun 2015 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sudah tinggi. Angka kelulusan juga telah melebihi target yang ditetapkan. Demikian juga untuk Angka putus sekolah dari Tahun ke Tahun mengalami penurunan dan angka melanjutkan semakin naik bahkan melebihi target.

Indikator yang belum tercapai dalam urusan Pendidikan adalah capaian SPM SMP yang disebabkan jumlah lulusan SD/MI menurun dan meningkatnya jumlah usia sekolah SMP/MTs, capaian rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah menunjukkan bahwa jumlah sekolah tidak sebanding dengan usia sekolah, dan Guru yang berpendidikan S1/D-IV untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK serta Guru bersertifikat pendidik untuk semua jenjang pendidikan.

Capaian guru yang berpendidikan S1/DIV jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK belum memenuhi target RPJMD, disebabkan karena pemerintah pusat telah menetapkan batasan jumlah peserta (kuota) setiap tahun, sementara jumlah peserta yang telah memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi jauh lebih banyak dari kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah. Namun demikian tenaga pendidik yang belum memperoleh tunjangan sertifikasi tidak berpengaruh terhadap layanan kepada peserta didik dikarenakan bagi yang tidak menerima tunjangan sertifikasi memperoleh tambahan penghasilan profesi. Sebab lainnya, karena faktor usia, dimana untuk guru yang berusia lebih dari 50 Tahun enggan melanjutkan jenjang pendidikan ke D4 atau S1 dengan pertimbangan sudah mendekati pensiun.

Jumlah guru SD, SMP, SMA/SMK yang telah bersertifikat pendidik sebanyak 4.987 guru SD, SMP, SMA dan SMK (53,12%). Dengan perincian jumlah guru SD yang bersertifikasi 3.019 dari jumlah guru 5.381 orang, jumlah guru SMP bersertifikasi sebanyak 1.275 orang dari 2.073 orang dan guru SMA/SMK yang bersertifikasi 693 orang dari 1.934 orang. Selain itu, ruang kelas untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK belum mencapai kinerja 100%. Dengan kondisi-kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran di Kabupaten Semarang belum dapat dikatakan optimal. Demikian juga dengan pendidikan berkarakter dan berkualitas di Kabupaten Semarang belum dapat diwujudkan secara optimal. Selain capaian kinerja yang telah dicapai urusan pendidikan selama kurun 5 tahun, beberapa hal yang mendukung aspek pelayanan umum adalah:

2.4.1.1.1 Pendidikan Dasar

Dilihat dari aspek pelayanan umum, angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun dan penduduk usia 13-15 tahun sudah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan sudah baik, namun untuk penduduk usia 13-15 tahun harus perlu ditingkatkan untuk mencapai wajib belajar sembilan tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.50 pada halaman berikut

Tabel 2.50

**Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Semarang
Tahun 2010-2015 (%)**

Angka Partisipasi Sekolah	2010	2011	2012	2013	2014	2015
APS 7-12 tahun	100	99.81	99.8	100	100	99,20
APS 13-15 tahun	94.83	94.16	89.12	95.08	96,88	97,57

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

Rasio ketersediaan satuan pendidikan SD/MI dengan penduduk usia 7-12 mencapai 0,72 pada Tahun 2015 namun kebutuhan penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 93.600 untuk bersekolah bisa terlayani, dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia sebanyak 4.443 rombel. Sehingga rasio antara jumlah rombel dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun adalah 1: 21, yang artinya bahwa 1 rombongan belajar menampung 21 siswa, sehingga sudah memenuhi SPM

Untuk rasio ketersediaan SMP/MTs dengan penduduk usia 13-15 tahun mencapai 0,3 pada tahun 2015, namun kebutuhan 45.776 penduduk usia 13-15 untuk bersekolah bisa terlayani, dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 1.426 rombel. Sehingga rasio antara jumlah penduduk usia 13-15 tahun dan rombongan belajar tersedia adalah 1: 32, yang artinya bahwa 1 rombongan belajar bisa menampung 32 siswa sehingga sudah memenuhi SPM. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.51 dibawah ini.

**Tabel 2.51
Perkembangan Ketersediaan Sekolah/Penduduk
Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	0.74	0.73	0.74	0.74	0.75	0.72
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTS	0.3	0.3	0.3	0.3	0.28	0.3

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2015

Jumlah rasio guru/murid selama lima tahun terakhir cenderung tetap. yakni selama kurun waktu lima tahun terakhir satu guru mendampingi 15 siswa dan bergeser mendampingi 14 siswa. Kondisi tersebut adalah kondisi yang bagus karena rasio guru/murid tidak melebihi SPM. Jumlah rasio guru/murid SD dan SMP selama Tahun 2010-2015 dapat terlihat pada Tabel 2.52 berikut ini

**Tabel 2.52
Perkembangan Rasio Guru/Murid Kabupaten Semarang
Tahun 2010 - 2015**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Guru/Murid SD	1: 15.40	1: 14.10	1: 14.02	1: 14.08	1: 14.26	1: 14.33
Rasio Guru/Murid SMP	1: 14.75	1: 15.09	1: 15.27	1: 15.59	1: 15.73	1: 15.60

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2015

Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu.

Dari data tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata setiap tahun satu kelas di ajar/dilayani oleh satu orang guru dan setiap kelas terdiri dari 23-24 siswa dan sudah memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang dikdas. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Perkembangan Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata di Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Guru/Murid per kelas/ rata-rata SD	1: 1.36: 20.88	1: 1.63: 23.02	1: 1.59: 22.26	1: 1.58: 22.19	1: 1.54: 21.99	1: 1.53: 21.92
Rasio Guru/Murid per kelas/ rata-rata SMP	1: 2.12: 31.30	1: 2.01: 30.29	1: 2.00: 30.54	1: 1.66: 25.85	1: 1.91: 30	1: 1.91: 29.82

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2015

Belum optimalnya Penuntasan wajar dikdas 9 tahun serta Pengembangan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Semarang, terlihat dari capaian APK SMP/MTs yang belum tercapai 100%, yaitu baru sebesar 96,28% atau masuk kategori tuntas paripurna. Meskipun demikian masih perlu diupayakan pencapaiannya bisa 100%. Sedangkan untuk menuju wajib belajar 12 tahun perlu menjadi perhatian karena capaian APK SMA/SMK baru tercapai 69,09% pada tahun 2015.

Masih terbatasnya ketersediaan dan pelayanan pendidikan non formal, antara lain disebabkan karena:

1. Jumlah lembaga pendidikan non formal belum merata di setiap wilayah Kecamatan (Jumlah LKP di Kabupaten Semarang 33, PKBM 27 lembaga, KBU 33 tersebar di 19 Kecamatan)
2. Kondisi sarana dan prasarana, serta fasilitas yang dimiliki belum sesuai dengan tuntutan dunia kerja

2.4.1.1.2 Pendidikan Menengah

Angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk Kabupaten Semarang belum lulus SMA/ sederajat, sehingga harus terus diupayakan untuk ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Hal ini dapat terlihat dari tabel 2.54 berikut ini.

Tabel 2.54
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2010-2015 (%)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
APS 16-18 tahun	61.35	54.21	69.96	56.1	61,34	59,72

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

Rasio ketersediaan satuan pendidikan SMA/SMK/MA dengan penduduk usia 16-18 mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada Tahun 2010 mencapai 0,13 dan meningkat menjadi 0,18 pada Tahun 2015. Pada tahun 2015 jumlah rombongan belajar di SMA/SMK/MA sebanyak 1.022 rombel dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 44.823 penduduk.

Sehingga rasio antara jumlah penduduk usia 16-18 tahun dan rombongan belajar tersedia adalah 1: 44, artinya 1 rombongan belajar mampu menampung 44 siswa. Perkembangan ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah dapat dilihat pada tabel 2.55 sebagai berikut.

Tabel 2.55
Perkembangan Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ketersediaan Sekolah/Penduduk SMA/SMK/MA	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15	0,18

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2015

Sampai dengan akhir tahun 2015 rasio guru/murid tercapai 1: 13,74. Capaian ini dapat diinterpretasikan bahwa satu orang guru melayani 13-14 siswa. Kondisi tersebut adalah kondisi yang bagus karena rasio guru/murid tidak melebihi SPM.

Tabel 2.56
Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid
Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio guru terhadap murid	1: 13,09	1: 12,88	1: 14,09	1: 14,06	1: 12,97	1: 13,74

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2015

2.4.1.1.3 Fasilitas Pendidikan

Selama lima tahun terakhir jumlah ruang kelas kondisi bangunan baik mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus dan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui bantuan keuangan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.57 berikut ini.

Tabel 2.57
Perkembangan sekolah pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
kondisi bangunan baik di Kabupaten Semarang
Tahun 2010-2015 (%)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	60.00	62.80	95.24	95.57	91.18	92.00
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	87.00	79.20	83.53	86.60	97.41	97.98

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2015

Permasalahan Biaya pendidikan yang relatif mahal yang dimaksud disini adalah mengenai biaya kebutuhan pribadi peserta didik. Menurut PP 48 Tahun 2005 pasal 2 bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa biaya pendidikan terdiri dari:

- a. Biaya satuan pendidikan (biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan dan bea siswa)
- b. Biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan (biaya investasi, biaya operasi)
- c. Biaya pribadi peserta didik

Point a dan b menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah antara lain dengan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bea siswa miskin, pemenuhan sarana dan prasarana di satuan pendidikan. Sedangkan biaya pribadi peserta didik menjadi tanggungjawab orang tua/wali peserta didik (contoh: perlengkapan pribadi siswa seperti tas, sepatu, seragam, transport dan uang saku). Meskipun menjadi tanggung jawab orang tua wali murid kebutuhan pribadi siswa khususnya siswa miskin bisa di danai dari dana BOS.

Menurut Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 bahwa Pendidikan Dasar (SD/SMP) Negeri dilarang melakukan pungutan. Untuk pendidikan dasar (SD/SMP Negeri) biaya pendidikan adalah **Gratis**, operasional biaya pendidikan didukung dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan mahalnnya biaya pendidikan SMA/SMK disebabkan oleh adanya kekurangan pembiayaan operasional SMA/SMK dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Untuk SMA, dasar perhitungan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah BOS SMA sebesar Rp2.537.716,-/siswa/tahun, didanai dari BOS sebesar Rp1.400.000,-
- b. Untuk SMK non Teknologi Rekayasa dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah BOS SMK sebesar Rp2.874.216,-/siswa/tahun, didanai dari BOS sebesar Rp1.400.000,-
- c. Untuk SMK Teknologi Rekayasa dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah BOS SMK sebesar Rp3.500.000,-/siswa/tahun, didanai dari BOS sebesar Rp1.400.000,-

Sehingga kekurangan biaya operasional untuk SMA/SMK tersebut dipenuhi dari Sumbangan Orang Tua (SOT) siswa.

2.4.1.1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka partisipasi kasar penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sampai dengan Tahun 2015 APK-PAUD tercapai sebesar 62,55%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk usia 4-6 tahun belum tertampung pada lembaga pendidikan anak usia dini atau TK/RA/BA. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.58 dan 2.59 berikut ini

Tabel 2.58
Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Semarang 2010 – 2015 (%)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)	52.12	55.96	59.01	59.09	59.20	62.55

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2015

Tabel 2.59
Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal, Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Tahun 2015

KECAMATAN	JUMLAH SISWA TK RA	JUMLAH PENDUDUK USIA 4-6	APK PAUD	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH GURU
GETASAN	1.256	2.205	56,96	33	100
TENGARAN	2.213	3.081	71,83	46	155
SUSUKAN	1.190	2.154	55,25	34	88
SURUH	1.913	2.838	67,41	48	156
PABELAN	1.387	1.975	70,23	33	84
TUNTANG	1.646	2.984	55,16	33	115
BANYUBIRU	1.205	1.997	60,34	20	70
JAMBU	1.038	1.843	56,32	26	72
SUMOWONO	918	1.359	67,55	27	66
AMBARAWA	1.718	2.656	64,68	29	104
BAWEN	1.698	2.508	67,70	29	119
BRINGIN	1.183	2.107	56,15	32	84
BERGAS	2.186	3.378	64,71	26	127
UNGARAN BARAT	2.996	3.710	80,75	24	67
PRINGAPUS	1.434	2.549	56,26	50	223
KALIWUNGU	618	1.252	49,36	19	44
BANCAK	636	1.081	58,83	15	42
UNGARAN TIMUR	1.736	3.399	51,07	35	131
BANDUNGAN	1.619	2.631	61,54	26	87
TOTAL	28.590	45.707	62,55	585	1.934

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2015

Masih adanya disparitas pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD) Formal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi PAUD di Kabupaten Semarang masih menunjukkan adanya kesenjangan atau belum merata antar wilayah Kecamatan.
2. Ketersediaan PAUD dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 4-6 setiap wilayah Kecamatan belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam satu lembaga PAUD (TK) satu rombel maksimal menampung 25 siswa, namun rata-rata PAUD TK di Kabupaten Semarang harus menampung 78 siswa untuk 2 tingkat TK (TK Kecil dan TK Besar), artinya 1 rombel masih harus menampung 36 siswa.
3. Program nasional 1 desa/kelurahan 1 lembaga PAUD di Kabupaten Semarang belum terpenuhi yaitu di Desa Keseneng Kec. Sumowono, Desa di Pucung Kec. Bancak dan Desa Sidoarjo Kec. Susukan
4. Sarana Prasarana di lembaga PAUD belum memenuhi standar.

2.4.1.1.5 Angka Putus Sekolah

Sampai dengan Tahun 2015 jumlah angka putus sekolah jenjang SD/MI tercapai sebesar 0,09. Hal ini dapat diartikan bahwa 0,09% dari jumlah siswa SD/MI di Kabupaten Semarang mengalami putus sekolah. Capaian angka putus sekolah untuk jenjang SMP/MTS sampai dengan Tahun 2015 tercapai sebesar 0,20. Hal ini berarti bahwa sejumlah 0,20% siswa SMP/MTS di Kabupaten Semarang masih mengalami putus sekolah. Untuk angka putus sekolah jenjang

SMA/SMK/MA sampai dengan Tahun 2015 sebesar 0,68. Capaian ini dapat diartikan bahwa 0,68% dari siswa SMA/SMK/MA mengalami putus sekoah.

Angka putus sekolah dari semua jenjang pendidikan ini terus diupayakan untuk ditekan dengan pemberian beasiswa miskin, beasiswa retirvel untuk anak putus sekolah serta pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mewujudkan sekolah murah.

2.4.1.1.6 Angka Kelulusan

Capaian angka kelulusan dari semua jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun awal RPJMD bahkan untuk jenjang SD/MI mencapai 100% karena kriteria kelulusan ditentukan dengan nilai ujian sekolah. Namun secara umum peningkatan angka kelulusan disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat tinggi serta adanya koordinasi yang baik antara sekolah, orang tua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama.

2.4.1.1.7 Angka Melanjutkan (AM)

Terdapat kenaikan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/Mts dari Tahun 2010 ke Tahun 2015 sebesar 3,66 dan angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMA/MA sebesar 14,71, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan cukup tinggi.

2.4.1.1.8 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Ketercapaian indikator ini didukung dengan adanya beasiswa kualifikasi S1/D4 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Namun demikian masih terdapat permasalahan yaitu *masih kurangnya jumlah dan kompetensi pendidik di satuan pendidikan*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa Tahun 2015 semua guru harus sudah berijazah S1/DIV, namun sampai dengan akhir Tahun 2015 belum semua guru memenuhi kualifikasi S1/D4. Jumlah Guru berkualifikasi S1/D4 untuk SD/MI sebanyak 5.775 orang atau baru 84,98%, SMP/MTs sebanyak 2.463 orang atau 88,98%, SMA/SMK/MA sebanyak 2.086 orang atau 94,69%.

Masih kurangnya jumlah kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan terlihat dari jumlah guru yang bersertifikat pendidik. Prosentase guru bersertifikat pendidik di Kabupaten Semarang masih rendah yaitu 56,10% untuk SD, 61,51% untuk SMP, dan 35,83% untuk SMA/SMK.

Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal pendidikan dasar, Berdasarkan Permendikbud 23 tahun 2013 bahwa pada tahun 2015 diharapkan Capaian SPM Bidang Dikdas sudah terpenuhi 100%. Namun sampai dengan tahun 2015 rata-rata capaian SPM Bidang Dikdas untuk SD 59,20% dan SMP mencapai 63,70%. Selengkapny dapat dilihat pada Tabel 2.60 sebagai berikut:

Tabel 2.60
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar
Kabupaten Semarang 2013 – 2015 (%)

NO.	Indikator SPM	Kondisi Capaian SPM			
		Level	2013	2014	2015
1	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SD	100,00	100,00	100,00
		MI	62,11	61,73	64,42
2	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SMP	84,95	86,17	85,42
		MTs	77,50	80,00	85,37
3	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	100,00	73,72	74,76
		MI	80,75	80,86	82,82
4	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	**)	45,75	47,75
		MI	6,83	7,41	15,34
		SMP	64,52	75,53	76,04
		MTs	35,00	35,00	48,78
5	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester;	SD	100,00	100,00	100,00
		MI	62,11	61,73	100,00
		SMP	100,00	100,00	100,00
		MTs	65,00	65,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2015

***) data tidak tersedia

2.4.1.2 Kesehatan

Keberhasilan pembangunan Urusan Kesehatan tercermin pada Capaian target indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai di Tahun 2010 s/d 2015 secara rinci seperti terlihat sebagai berikut:

2.4.1.2.1 Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 Rasio posyandu per satuan balita tersebut sudah memenuhi target dan sesuai dengan standar nasional Kementerian Kesehatan, dimana standarnya adalah 12–50 posyandu per 1.000 balita. Target akhir RPJMD Tahun 2010-2015 sebesar 22,00 per 1000 balita dan pada Tahun 2015 capaiannya sebesar 23,20 per 1.000 Balita. Pencapaian ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan Posyandu sebagai solusi untuk menanggulangi masalah kesehatan dan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

2.4.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Tahun 2010 sampai dengan 2015 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk sudah memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, dimana rasio puskesmas, poklinik dan pustu per satuan penduduk adalah 1 (satu) fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. namun capaian pada Tahun 2015 masih dibawah target yang ditentukan. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 0,38 per 1000 penduduk terealisasi 0,32 per 1000 penduduk. Belum tercapainya target yang ditetapkan antara lain dikarenakan adanya penambahan penduduk yang tidak diiringi dengan penambahan sarana pelayanan kesehatan,

2.4.1.2.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah sakit per satuan penduduk sudah memenuhi target yang ditentukan, jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Semarang pada Tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) unit yang terdiri dari 2 (dua) Rumah Sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dan Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa, serta 1 (satu) Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit Umum Bina Kasih Ambarawa. Sementara pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 rasio Rumah Sakit mengalami peningkatan dikarenakan ada penambahan 1 (satu) Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit Ken Saras.

2.4.1.2.4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk sudah memenuhi target yang ditetapkan, hanya pada Tahun 2010 capaiannya dibawah target. Jumlah dokter di Kabupaten Semarang smpai dengan Tahun 2015 sebanyak 358 orang terdiri dari dokter spesialis 100 orang dan dokter umum 258 orang. Terjadinya peningkatan rasio dokter dari tahun ke tahun dikarenakan adanya penambahan jumlah dokter spesialis dan dokter umum yang bekerja di lingkungan Kabupaten Semarang baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang berstatus dokter praktek swasta.

2.4.1.2.5 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Capaian Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 cenderung naik turun, namun capaian tersebut memenuhi target yang ditetapkan kecuali capaian Tahun 2010 yang tidak memenuhi target yang ditetapkan. Terjadinya kondisi yang naik turun tersebut dikarenakan adanya tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi) yang alih tugas atau melaksanakan tugas/praktek di luar wilayah Kabupaten Semarang, selain itu juga dikarenakan keberadaan dokter *internshif* di Rumah Sakit dan Puskesmas yang jumlahnya tidak sama setiap tahunnya. Dokter *internshif* hanya melaksanakan praktek selama 1 (satu) tahun di Rumah Sakit dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Semarang.

2.4.1.2.6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 capaian Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sudah memenuhi target yang ditetapkan, pencapaian ini dikarenakan kegiatan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi sudah berjalan dengan baik sehingga ibu hamil resiko tinggi tidak terlambat ditangani.

2.4.1.2.7 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Capaian Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 mengalami naik turun, capaian tahun 2014 tidak memenuhi target dikarenakan prosentase cakupan dihitung dengan menggunakan penyebut sasaran ibu hamil (prediksi awal tahun seseuai dengan definisi operasionalnya) sehingga didapat cakupan yang masih kurang dari target, sementara untuk Tahun 2015 sudah melampaui target yang ditetapkan. Target pada Tahun 2015 sebesar 95,00% terealisasi 99,85%. Jumlah persalinan ditolong tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2015 sebanyak 14.146 persalinan. Saat ini jumlah tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Semarang sebanyak 602 orang terdiri dari dokter spesialis kebidanan dan kandungan 10 orang dan bidan 592 orang. Tercapainya target ini dikarenakan meningkatnya kesadaran ibu hamil akan pentingnya melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

2.4.1.2.8 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunizatin (UCI)

Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Semarang yang berjumlah 235 desa/kelurahan pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 telah berhasil mencapai Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunizatin (UCI). Akan tetapi pada Tahun 2012 menurun dan capaian tidak memenuhi target yang ditentukan dikarenakan masih ada cakupan imunisasi bulan Desember 2012 yang belum dilaporkan dan masih ada orang tua murid SD yang tidak mengizinkan anaknya untuk diberikan imunisasi melalui kegiatan BIAS anak sekolah meskipun jumlahnya hanya sedikit. Pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 cakupan desa/kelurahan UCI kembali mencapai target sedangkan untuk cakupan desa/kelurahan UCI Tahun 2015 belum bisa diketahui angkanya. Tercapainya target desa/kelurahan UCI dikarenakan telah dilaksanakannya Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) imunisasi dan terlaksananya sweeping bayi yang belum terimunisasi untuk mengurangi angka drop out. Suatu desa/kelurahan berhasil mencapai UCI bila tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11) bulan, ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar.

2.4.1.2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 capaian Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sudah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini dikarenakan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita telah

dilaksanakan dengan baik tiap bulannya sehingga jika selama pemantauan terjadi penurunan berat badan 2 (dua) kali segera diketahui dan segera dilakukan intervensi berupa PMT pemulihan.

2.4.1.2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA

Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 capaian Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA belum memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan belum optimalnya ketrampilan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanganan kasus TBC, belum semua puskesmas memiliki tenaga analis kesehatan (dari 26 puskesmas masih ada 3 puskesmas yang belum memiliki tenaga analis kesehatan), masih adanya anggapan di masyarakat bahwa penyakit TBC merupakan penyakit yang memalukan keluarga, belum efektifnya kerja jejaring penemuan kasus TB paru di masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan penemuan penderita baru TBC/BTA tersebut antara lain melakukan refreasing penemuan kasus TB BTA bagi petugas analis kesehatan dan programer TB, melakukan *On The Job Training* (OJT) bagi dokter, perawat, bidan dan petugas analis kesehatan ke BKPM Ambarawa, mengadakan penyuluhan tentang penyakit TBC, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan organisasi profesi, serta penambahan tenaga analis kesehatan puskesmas.

Untuk prosentase kesembuhan penderita TBC/BTA dari Tahun 2010 sampai dengan 2015 capaiannya mengalami naik turun. Peningkatan prosentase kesembuhan penderita TBC/BTA bisa tercapai berkat kesadaran masyarakat yang secara konsisten menjalani proses pengobatan sesuai standar pengobatan penyakit TBC dengan pendampingan dari pengawas minum obat (PMO). PMO adalah seseorang yang bertugas untuk mengawasi, memberikan dorongan dan memastikan penderita TBC agar menelan obat Obat Anti TBC (OAT) secara teratur sampai selesai.

2.4.1.2.11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 capaian Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sudah memenuhi target yang ditetapkan, akan tetapi dilihat dari kasus DBD terjadi naik turun dari tahun ke tahun. Peningkatan kasus diakibatkan karena faktor cuaca (musim penghujan berlangsung lebih panjang) dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan jumlah kasus DBD antara lain melakukan penyuluhan pengaktifan kembali PSN, melaksanakan penyuluhan kewaspadaan dini DBD dan melakukan *fogging* untuk menekan jumlah kasus DBD.

Jumlah kematian akibat DBD dari Tahun 2010 sampai dengan 2015 juga mengalami naik turun, masih adanya kematian akibat DBD ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gejala DBD dan adanya keterlambatan penanganan dikarenakan tanda dan gejala tidak khas. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan kasus kematian karena DBD antara

lain dengan mengadakan sosialisasi DBD lewat PKK dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat desa/wisma.

2.4.1.2.12 Cakupan Kunjungan Bayi

Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 capaian Cakupan kunjungan bayi cenderung naik turun, adanya kenaikan kunjungan hal ini disebabkan karena adanya pertemuan dan pembinaan kepada bidan yang dilaksanakan secara berkesinambungan selain meningkatnya kegiatan di posyandu. Walau demikian diperlukan adanya pemahaman yang sama tentang definisi operasional kunjungan bayi, pencatatan dan pelaporan serta pelaksanaan DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang).

2.4.1.2.13 Cakupan Puskesmas

Dari Tahun 2010 sampai dengan 2015 capaian Cakupan puskesmas telah terpenuhi, jumlah puskesmas di Kabupaten Semarang masih tetap 26 (dua puluh enam) puskesmas yang terdiri dari 12 (dua belas) puskesmas perawatan dan 14 (empat belas) puskesmas non perawatan. Dari 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang semuanya sudah terdapat Puskesmas bahkan terdapat 7 (tujuh) Kecamatan yang mempunyai 2 (dua) puskesmas. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa puskesmas harus didirikan pada setiap Kecamatan.

2.4.1.2.14 Cakupan pembantu puskesmas

Dari Tahun 2010 sampai dengan 2015 capaian Cakupan pembantu puskesmas sudah mencapai target yang ditentukan, jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten Semarang dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 masih tetap sebanyak 68 unit. Sedangkan pada Tahun 2015 menurun menjadi 67 unit Pustu. Hal ini disebabkan ada satu unit Pustu di wilayah kerja Puskesmas Sumowono (Pustu Jubelan) ditingkatkan fungsinya menjadi puskesmas.

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang Kesehatan sebagai berikut. Untuk bidang kesehatan, 27,77 persen indikator jenis pelayanan dasar dan sub kegiatan di Kabupaten Semarang hingga Tahun 2015 telah mencapai SPM (100 persen). Indikator-indikator tersebut adalah: (1) cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); (2) cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan; (3) penderita DBD yang ditangani; (4) cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota; (5) cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam; dan (6) cakupan desa siaga aktif.

Sementara itu, beberapa indikator bidang kesehatan yang belum mencapai SPM (100 persen) hingga tahun 2015 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.61
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
Kabupaten Semarang 2010 – 2015 (%)

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	90,70	88,30	89,14	90,70	89,98	90,31
		2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	59,72	79,70	84,30	100,00	104,96	117,84
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	92,90	92,10	94,32	95,46	93,72	99,85
		4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas	58,71	82,04	87,32	85,90	85,15	92,37
		5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	48,69	52,60	52,29	100,00	95,20	112,98
		6. Cakupan kunjungan bayi.	100,84	94,62	87,09	84,33	98,60	83,73
		7. Cakupan pelayanan anak balita.	83,51	84,77	88,72	78,64	79,52	79,19
		8. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	99,85	97,61	99,92	100,00	100,00	96,97
		10. Cakupan peserta KB Aktif	83,35	83,30	78,68	87,21	83,17	83,18
		11. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit						
		A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	2,60	1,78	1,77	3,46	2,68	2,25
		B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	15,50	13,56	10,80	23,61	22,60	27,55
C. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	25,48	26,32	26,20	24,43	17,87	24,95		
D. Penemuan Penderita Diare	44,59	48,64	47,64	56,50	108,50	90,30		
12. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	31,03	32,45	37,02	45,72	39,22	48,13		
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan	13. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	7,36	4,29	0,87	8,73	17,03	5,70

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Semarang, 2015

2.4.1.3 Pekerjaan Umum

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang dicapai dalam kurun Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kenaikan yang paling kecil adalah pada Tahun 2012 ke Tahun 2013 dimana pada Tahun 2013 kondisi iklim di Kabupaten Semarang banyak musim hujan hampir sepanjang tahun. Hal ini mengakibatkan kondisi tanah yang sebagian adalah tanah labil banyak mengalami perubahan, baik longsor maupun ambles. Dampak dari hal tersebut adalah banyaknya badan jalan yang mengalami kerusakan baik kerusakan ambles, lubang karena genangan air maupun longsor.

Berdasarkan atas status kewenangan pengelolaan jalan Kabupaten Semarang mempunyai total panjang jalan 1.588,08 km di Tahun 2015, yang terbagi atas Jalan Nasional sepanjang 54,75 km merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sepanjang 82,51 km merupakan jalan Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan sepanjang 735,825 km merupakan jalan Kabupaten. Serta sisanya merupakan jalan poros desa dan jalan lingkungan sepanjang 715 km.

Tabel 2.62
Status dan Kewenangan Jalan di Kabupaten Semarang

STATUS JALAN	Sat	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jalan Nasional	Km	47,55	47,55	47,55	54,75	54,75	54,75
Jalan Provinsi	Km	82,51	82,51	82,51	82,51	82,51	82,51
Jalan Kabupaten	Km	733,62	733,62	733,62	733,62	735,82	735,82
Jalan Desa	Km	715	715	715	715	715	715
Jumlah	Km	1578,68	1578,68	1578,68	1585,88	1.588,08	1.588,08

Sumber: DPU Kabupaten Semarang, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa panjang jalan dari Tahun 2010-2012 tidak mengalami kenaikan, hal ini disebabkan penanganan yang dilakukan hanya pada peningkatan yang berupa pelebaran jalan dan pemeliharaan jalan, bukan pada pembangunan baru. Pada Tahun 2013 panjang jaringan jalan bertambah menjadi 1.585,88 km. Penambahan panjang jalan tersebut terjadi pada Jalan Nasional, yaitu jalan Lingkar Ambarawa (JLA) sepanjang 7,2 km yang dioperasikan pada Tahun 2013. Sedangkan pada Tahun 2014 dan 2015 panjang jaringan jalan bertambah menjadi 1.588,08 km, yang disebabkan adanya pembangunan Jalan Lingkar Ungaran (JLU) sepanjang 2,2 km pada Tahun 2014.

Dari total panjang jalan bahwa yang menjadi kewenangan Kabupaten dalam hal penyelenggaraan, pembinaan dan pengelolaan adalah jalan Kabupaten. Kondisi jalan Kabupaten dari Tahun 2010-2015 mengalami kenaikan yang signifikan, terutama pada Tahun 2014 terhadap kondisi pada Tahun 2013.

Berikut diuraikan kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2010-2015 pada Tabel berikut:

Tabel 2.63
Kondisi Jalan yang Menjadi Wewenang Kabupaten
Tahun 2010-2015

KONDISI	Sat	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Baik	Km	210,48	278,98	362,23	388,51	485,64	515,07
Sedang	Km	226,32	184,51	262,85	251,65	147,16	132,45
Rusak	Km	296,82	270,13	108,54	93,46	103,02	88,30
Jumlah	Km	733,62	733,62	733,62	733,62	735,82	735,82

Sumber: DPU Kabupaten Semarang, 2015

- b. Jumlah Daerah Irigasi di Kabupaten Semarang tetap pada tahun 2010-2012, sedangkan pada tahun 2013-2015 jumlah Daerah irigasi cenderung menurun sebesar 6,46% yaitu sebanyak 46 buah. Pengurangan jumlah Daerah Irigasi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 37 buah dan pada tahun 2014 sebanyak 9 buah. Panjang Saluran Irigasi di Kabupaten Semarang pada tahun 2010 yaitu 981,05 km dan cenderung menurun pada Tahun 2010-2015 dan pada akhir Tahun 2015 Panjang Saluran Irigasi menjadi 866,18 km. Prosentase total penurunan Panjang Saluran Irigasi dari Tahun 2010-2015 yaitu sebesar 88,29% pada akhir Tahun 2015. Penurunan jumlah Daerah Irigasi, panjang saluran irigasi dan areal sawah yang terairi irigasi, dfaktor penyebab terbesarnya adalah pengalihan fungsi lahan pertanian untuk perumahan dan jalan. Berikut disajikan Jenis, Jumlah Jaringan, Panjang Saluran dan Areal Sawah Irigasi di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015.

Tabel 2.64
Jenis, Jumlah Jaringan irigasi, Panjang Saluran dan Areal Sawah irigasi di
Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

URAIAN	Sat	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Daerah Irigasi	Bh	712	712	712	675	666	666
Panjang Saluran	Km	981,05	919,15	919,15	883,54	866,18	866,18
Areal sawah irigasi	Ha	36.111	34.456	34.456	32.952	32.669	32.669

Sumber: DPU Kabupaten Semarang, 2015

Dari Tabel 2.64 nampak bahwa Daerah irigasi Tahun 2010-2015 yang berupa luas areal sawah, jumlah bangunan irigasi/daerah irigasi cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan pembukaan lahan untuk pembangunan jalan, terutama jalan Tol Semarang-Solo.

- c. Panjang jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) mengalami peningkatan dari 50% menjadi 70,12% pada Tahun 2014. Hal tersebut disebabkan pola penanganan jalan dengan pelebaran dan pembangunan jalan baru di kawasan terisolir baik jalan

maupun jembatan dalam kurun waktu Tahun 2010-2015. Pada Tahun 2014 memang masih terdapat permukiman penduduk yang belum mampu ditempuh dengan Roda 4 khususnya yang melalui wilayah Kabupaten Semarang (sebagai contoh wilayah Sapen Desa Candirejo Kec. Pringapus). Hal ini lebih disebabkan karena adanya penghalang sungai yang lebar dengan kondisi tanah yang labil.

- d. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan 40 km/jam selalu meningkat. Dari yang semula 42% (299,6 km) menjadi 70,08% (515,51 km) pada Tahun 2015. Peningkatan kondisi tersebut terjadi pada kawasan-kawasan perkotaan, daerah pengembangan industri dan jalan alternatif melalui upaya dengan pelebaran dan pelapisan jalan dengan hotmix maupun konstruksi beton.
- e. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m dari Tahun 2010-2015 semakin meningkat, walaupun persentase panjang saluran tersebut masih kecil bila dibandingkan dengan panjang jalan yang ada di Kabupaten Semarang. Hal ini disebabkan, jalan yang mempunyai trotoar dan saluran dengan lebar $\geq 1,5$ meter sebagian besar berada pada jalan nasional dan jalan provinsi, sedangkan pada jalan kabupaten masih relatif kecil.
- f. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat digambarkan wilayah-wilayah banjir yang semakin sedikit. Wilayah yang terkena banjir terutama disekitar jalan, sebagian besar lebih disebabkan pada kapasitas saluran yang kurang memadai, sehingga pada volume dan intensitas air hujan yang besar, daya tampung saluran terlampaui.

Dari total panjang jalan yang ada di Kabupaten Semarang, panjang trotoar yang ada hanya 33,51 km. Prasarana trotoar yang ada saat ini terfokus di jalan-jalan perkotaan, dan ibukota kecamatan yang kepadatan penduduknya tinggi. Khusus di ibukota kecamatan, trotoar hanya ada di depan kantor ibukota kecamatan tersebut. Kuantitas terpanjang yang ada bangunan trotoar adalah jalan-jalan yang mempunyai kepadatan lalu lintas yang tinggi, baik kendaraan maupun pejalan kaki, yaitu di sepanjang jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal primer.

Dilihat dari segi arus kendaraan, kawasan pada jaringan jalan nasional di Kabupaten Semarang merupakan kawasan yang berkontribusi tinggi atas tingkat kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pejalan kaki yang menyeberangi jalan pada jaringan jalan nasional dibutuhkan fasilitas pejalan kaki menyeberangi jalan berupa Zebra Cross, ZOSS (Zona Selamat Sekolah), Halte dan Jembatan Penyeberang Orang (JPO). Di kawasan jaringan jalan nasional tersebut fasilitas pejalan kaki masih banyak yang belum terpenuhi. Dari permintaan sebanyak 55 unit Zebra Cross & ZOSS, sampai dengan tahun 2014 baru dapat terpenuhi sebanyak 36 unit. Halte yang idealnya ada di setiap Kecamatan (19 Unit) baru tersedia sebanyak 7 unit. Jembatan Penyeberangan Orang baru tersedia sebanyak 4 unit (di depan SMAN I Ungaran, Pasar Babadan, SMAN I Bergas dan di depan PT. APAC INTI CORPORA Harjosari)

dari kebutuhan sebanyak 24 unit di wilayah Kabupaten Semarang. Kebutuhan JPO yang perlu segera direalisasikan adalah JPO di Depan Pasar Bandarjo, Pasar Karangjati, Terminal Bawen, Pasar Projo dan Depan Kantor DPRD.

Pada Tahun 2014 terdapat Proyek Peningkatan Jalan Nasional sehingga jalan nasional semakin lebar dan mengurangi resiko kecelakaan jalan. Selain itu dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pengguna jalan diperlukan fasilitas keselamatan jalan (Rambu, Marka, *Flashing Amber*, *Traffic Light*, Cermin Tikungan, Guardrail). Kebutuhan Rambu sebanyak 1.498 unit, sampai dengan 2014 baru terpenuhi sebanyak 1.283 unit, kebutuhan Marka Jalan, Pita Penggaduh & Guardrail sepanjang 13.836m² sampai dengan 2014 baru terpenuhi sepanjang 10.415m².

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut. Target dalam SPM pada tahun 2019 telah disesuaikan dengan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), utamanya terkait target universal access untuk air minum, permukiman kumuh perkotaan dan sanitasi. Untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, hingga tahun 2015, beberapa indikator telah mencapai target nasional, yakni (1) persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (target nasional 2019: 70%, capaian 2015: 104,58%), (2) persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang dalam rangka Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat (target nasional 2019: 60%, capaian 2015: 82,21%), (3) persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (target nasional 2019: 60%, capaian 2015 : 82,27%).

Sementara itu, indikator-indikator bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum mencapai SPM ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2.65
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Semarang (%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM dan Target Nasional	Data yang Diperlukan dan Hasil Perhitungan				
1	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	IK 1 persentase terhu bungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota 100% tahun 2019	Realisasi Panjang jalan penghubung pusat2 kegiatan dan pusat produksi	Target panjang jalan penghu bung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi hingga tahun 2019	Nilai	%	
			2011	863,68	1.084,00	0,80	79,68
			2012	863,68	1.084,00	0,80	79,68
			2013	870,88	1.084,00	0,80	80,34
			2014	890,08	1.084,00	0,82	82,11
2015	890,08	1.084,00	0,82	82,11			
2	Penyediaan air minum	IK 2 persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman target 100% tahun 2019	Jml masyarakat terlayani air minum SPAM ataupun Non SPAM (jiwa)	Jumlah total penduduk seluruh kabupaten/ kota	Jumlah masyar akat belum terlaya ni air	%	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM dan Target Nasional	Data yang Diperlukan dan Hasil Perhitungan				
					minum		
3	Penyediaan sanitasi	IK 3	persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak target 100% pada tahun 2019	jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jiwa)	jumlah total penduduk seluruh kabupaten (jiwa)	Jumlah penduduk yang belum memiliki akses sanitasi layak	%
			2011	728.292	938.802	0,78	77,58
			2012	741.653	944.277	0,79	78,54
			2013	748.480	949.815	0,79	78,80
			2014	787.471	955.481	0,82	82,42
			2015	799.994	961.421	0,83	83,21
		IK 4	persentase penguangan sampah di perkotaan target 20% tahun 2019	jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan penguangan volume sampah (jiwa)	jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)	Nilai	%
			2011	-	372.234	-	-
			2012	-	376.405	-	-
			2013	136.658	379.605	0,36	36,46
			2014	145.062	381.743	0,38	38
			2015	153.553	383.882	0,40	40
		IK 5	persentase pengangkutan sampah target 70% tahun 2019	jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah (jiwa)	jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)	Nilai	%
			2011	145.962	372.234	0,39	39,21
			2012	142.835	376.405	0,38	37,95
			2013	138.403	379.605	0,36	36,46
			2014	145.062	381.743	0,38	38,00
2015	153.553		383.882	0,40	40,00		
IK 6	persentase pengoperasian TPA Target 70% tahun 2019	Koefisien pengoperasian TPA	Koefisien kualitas pengolahan lindi	Koefisien penanganan gas	%		
	2011	0,5	1	0,5	70		
	2012	0,5	1	0,5	70		
	2013	0,5	-	0,5	30		
	2014	0,5	-	1,0	40		
	2015	0,5	0,5	0,5	50		
IK 7	persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun						
	a Tersedianya pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota target 50% Tahun	Jumlah penduduk yang terlayani (A)	Jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota (B)	Nilai	%		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM dan Target Nasional	Data yang Diperlukan dan Hasil Perhitungan				
			2019				
			2011	372.234	938.802	0,40	39,65
			2012	376.405	944.277	0,40	39,86
			2013	379.605	949.815	0,40	39,97
			2014	381.743	955.481	0,40	39,95
			2015	383.882	961.421	0,40	39,93
		b	Pengurangan Luas Genangan target 50% tahun 2019	Luas daerah masih tergenang (A)	Luas daerah rawan genangan (B)	Nilai	%
			2011	-	-	**)	**)
			2012	-	933.764	0	0,00
			2013	-	938.802	0	0,00
			2014	-	944.277	0	0,00
			2015			**)	**)
4	Penataan Bangunan dan Lingkungan	IK 8	persentase jumlah IMB yg diterbitkan target 60% tahun 2019	Σ IMB yang diterbitkan	Σ bangunan gedung di kabupaten/kota	Nilai	%
			2011	350	-	**)	**)
			2012	406	-	**)	**)
			2013	946	-	**)	**)
			2014	1.008	-	**)	**)
			2015	1.142	-	**)	**)
5	Penangan Permukiman Kumuh Perkotaan	IK 9	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan target 0% tahun 2019	Σ kawasan permukiman kumuh yang telah tertangani di Kota A	Σ luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota di Kota A	Nilai	%
			2011	-	-	**)	**)
			2012	-	-	**)	**)
			2013	-	-	**)	**)
			2014	-	477,92*)	-	-
			2015	144,29	477,92	0,30	30,19
6	Informasi Penataan Ruang	IK 10	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital target 100% tahun 2019		Jumlah kumulatif peta analog/digital yang seharusnya tersedia di kabupaten/kota kecamatan, atau kelurahan/desa.	Nilai	%
			2011	1	255	0,0039 21569	0,39
			2012	20	255	0,0784 31373	7,84
			2013	20	255	0,0784 31373	7,84
			2014	20	255	0,0784 31373	7,84
			2015	20	255	0,0784 31373	7,84
7	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	IK 11	persentase tersedianya luasan RTH publik	Jmlh Luasan RTH Publik yang tersedia di	Jumlah Luasan RTH Publik yang seharusnya	Nilai	%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM dan Target Nasional	Data yang Diperlukan dan Hasil Perhitungan				
	Publik	sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan target 50% tahun 2019	akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah RTH publik yang tersedia di wilayah kota atau kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian SPM (Ha)	nya tersedia di wilayah kota atau kawasan perkotaan adalah luasan RTH publik sesuai amanat UU 26/2007 yaitu 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (Ha)			
			2011	501,78	2.067	0,24	24,28
			2012	501,98	2.067	0,24	24,29
			2013	501,61	2.067	0,24	24,27
			2014	529,21	2.067	0,26	25,60
			2015	529,52	2.067	0,26	25,62

Sumber DPU Kabupaten Semarang, 2015

Keterangan : *) data luas permukiman kumuh sesuai SK Bupati Semarang No. 050/0522/2014 tanggal 12 Agustus 2014

**) data tidak tersedia

2.4.1.4 Perumahan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kabupaten Semarang selama periode Tahun 2010-2015 dihitung dari rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Indikator lainnya adalah luas lingkungan permukiman kumuh, rasio rumah layak huni terhadap luas lingkungan permukiman untuk mengetahui derajat kesehatan lingkungan permukiman. Capaian kinerja urusan perumahan yang dicapai dalam kurun Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Semarang dari Tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan adanya program pemerintah melalui program PNPM P2KP, Pamsimas dan kegiatan Penyediaan Air Bersih dari Pemerintah Kabupaten Semarang. Alokasi program Pamsimas dari Tahun 2010-2015 sangat mempengaruhi tingkat capaian rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Semarang. Program Pamsimas selama Tahun 2010-2015 telah dialokasikan di 118 Desa di Kabupaten Semarang, dengan jangkauan total Sambungan Rumah adalah sebanyak 23.905 buah. Tahun 2015 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2014 dikarenakan makin sulitnya mencari sumber air baku yang dapat diakses oleh masyarakat terutama saat musim kemarau.
- b. Persentase rumah tinggal bersanitasi Tahun 2010-2013 naik secara pelan dan pada Tahun 2014-2015 baru terjadi kenaikan secara signifikan, yaitu dari 47,60% pada Tahun 2013 menjadi 76,90% pada Tahun 2014 dan 85,44% pada Tahun 2015. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat. Upaya peningkatan rumah tinggal bersanitasi tetap harus dilaksanakan guna mendukung pencapaian *universal acces* di Tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 100%.

- c. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk mengalami peningkatan dari Tahun 2010 sebesar 88,08% menjadi 98,00% di Tahun 2015. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan lahan untuk pemakaman umum pun ikut meningkat.
- d. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Semarang dari Tahun 2010-2015 semakin meningkat. Pada Tahun 2010 sebesar 55,99% naik menjadi 77,72% pada Tahun 2015, sehingga terjadi kenaikan sebesar 21,73% dalam periode 2010-2015. Hal tersebut disebabkan adanya program pemerintah terhadap peningkatan rumah layak huni, melalui program bedah rumah dan program Rusunawa bagi masyarakat yang kurang mampu. Pada Tahun 2015 terealisasi Pembangunan perumahan tidak layak huni yang dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat yang ditujukan untuk kepentingan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) meliputi 5 Desa di Kecamatan Bringin, yaitu Desa Bringin 130 unit, Desa Pakis 199 unit, Desa Nyemoh 156 unit, Desa Sendang 161 unit, dan Desa Rembes 131 unit.
- e. Rasio permukiman layak huni meningkat dari 63,25% di Tahun 2010 menjadi 77,72% di Tahun 2015. Hal ini didukung adanya kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman baik jalan, drainase dan talud.
- f. Lingkungan permukiman mengalami peningkatan dari 19.704 Ha di Tahun 2010 menjadi 21.376 Ha di Tahun 2015. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga kebutuhan akan permukiman dan perumahan juga mengalami peningkatan.
- g. Lingkungan permukiman kumuh menurun dari 1.100 Ha menjadi 477,92 Ha selama kurun waktu 2010-2015. Hal ini didukung oleh program dan kegiatan pembangunan infrastruktur pada lingkungan-lingkungan kumuh dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan.
- h. Rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Semarang sampai dengan Tahun 2015 adalah sebanyak 99%, yang artinya terdapat 1% Rumah Tangga di Kabupaten Semarang yang belum menggunakan listrik. Jumlah tersebut adalah warga yang sangat miskin dan terpencil yang belum terjangkau aliran listrik, baik dari PLN maupun sumber lain. Berikut disajikan perkembangan rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015:

Tabel 2.66
Rumah Tangga pengguna listrik di Kabupaten Semarang
Tahun 2010-2015

URAIAN	Sat	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah tangga pengguna listrik	KK	269.521	281.178	284.433	288.098	296.570	296.570
Rumah tangga blm menggunakan listrik	KK	2.722	2.840	2.873	2.910	2.996	2.996
JUMLAH	KK	272.243	284.018	287.008	291.008	299.566	299.566

Sumber: DPU Kabupaten Semarang, 2015

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang perumahan sebagai berikut. Untuk bidang perumahan, indikator-indikator yang ada belum menunjukkan SPM yang mencapai 100 persen. Hal tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.67
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan
Kabupaten Semarang 2013 – 2015 (%)

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Tahun		
		2013	2014	2015
Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	75,59	75,60	75,61
	2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau		**)	75,61
Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3. Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	48,94	**)	50,40

Sumber: DPU Kab. Semarang, 2015

**) data tidak tersedia

2.4.1.5 Penataan Ruang

Kegiatan penataan ruang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pola ruang dan struktur ruang Kabupaten Semarang memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampumendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Capaian kinerja urusan penataan ruang yang dicapai dalam kurun Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan meningkat dari 42% menjadi 61% dalam kurun waktu Tahun 2010-2015. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perijinan pendirian bangunan dan semakin membaiknya pelayanan IMB yang diberikan pemerintah daerah, baik pada tingkat Kabupaten maupun Kecamatan.
- b. Luas wilayah produktif mengalami penurunan dari Tahun 2010 sebesar 42.780 Ha menjadi 40.380 Ha di Tahun 2015. Hal ini karena adanya alih fungsi lahan produktif menjadi permukiman, jalan tol dan industri sehingga perlu upaya keras agar luasan lahan produktif tidak terus berkurang.
- c. Luas wilayah industri mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini karena naiknya kebutuhan lahan untuk industri dengan adanya perpindahan pabrik dari luar Kabupaten Semarang.
- d. Luas wilayah kebanjiran di wilayah perkotaan Tahun 2015 sebesar 0,53 Ha. Angka ini menurun jika dibandingkan Tahun 2014 yang sebesar 0,55 Ha. Namun kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan kondisi awal di Tahun 2010 yang hanya sebesar 0,25 Ha. Untuk itu masih diperlukan upaya keras dalam penanganannya.

- e. Luas wilayah kekeringan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami penurunan, dari 4.125 Ha di Tahun 2010 menjadi 3.998 Ha di Tahun 2015. Kondisi ini dapat dicapai antara lain karena adanya program reboisasi dan penanganan lahan kritis di Kabupaten Semarang.
- f. Luas wilayah perkotaan mengalami peningkatan dari Tahun 2010 sebesar 8.404 Ha menjadi 8.702 Ha di Tahun 2015. Peningkatan ini antara lain disebabkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk perumahan, perdagangan dan pariwisata (perhotelan dan fasilitas rekreasi) di seluruh wilayah perkotaan Kabupaten Semarang.

Luas lahan pertanian sawah di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu lima tahun dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian untuk pembangunan perumahan, kawasan industri, jalan, pertokoan, fasilitas umum dan lain sebagainya. Melihat keadaan ini tentunya diperlukan adanya penataan ruang yang terkelola dengan baik agar ada keseimbangan antara lahan sawah, lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian sesuai dengan peruntukannya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut ini

Tabel 2.68
Penggunaan Lahan Di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014

Penggunaan Lahan	Luas (Ha) per Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian sawah	24.386,02	23.982,83	23.921,27	23.919,51	23.918,65
Pertanian bukan sawah	36.250,22	36.457,13	36.363,55	36.360,07	36.358,45
Bukan pertanian	34.384,43	34.580,70	33.735,85	34.741,09	34.743,57
Total	95.020,67	95.020,67	95.020,67	95.020,67	95.020,67

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan BPS Kab Smg, 2015

Dilihat dari ketersediaan ruang terbuka hijau, pada Tahun 2010-2015 rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah per HPL/HGB stagnan tidak mengalami perubahan. Berikut disajikan perkembangan rasio luas ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Tahun 2010-2015. Secara lengkap adapat dilihat pada Tabel 2.69 pada halama berikut:

Tabel 2.69
Rasio Luas Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB Tahun 2010-2015.

URAIAN	Sat	Perkembangan Pertahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	501,67	501,78	501,98	501,61	529,21	529,52
Luas Wilayah ber HPL/HGB	Ha	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00
Rasio RTH per Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	0,670	0,670	0,670	0,670	0,707	0,707

Sumber: DPU Kabupaten Semarang, 2015

Ketetapan pemerintah terkait luasan RTH adalah 30% dari luas perkotaan, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Luas wilayah Kabupaten Semarang secara keseluruhan adalah 95.020,67 Ha yang tersebar di 19 kecamatan. Dengan merujuk pada RTRW, rencana luasan RTH di Kabupaten Semarang adalah 2.067 Ha. Kondisi saat ini luasan RTH terbangun di Kabupaten Semarang adalah 529,52 Ha atau sebesar 25,62 % dari kebutuhan luasan RTH. Dalam 5 tahun ke depan, diharapkan Luasan RTH di Kabupaten Semarang dapat ditingkatkan hingga sampai atau mendekati luasan RTH yang ideal yang dibutuhkan. Saat ini RTH yang ada terfokus pada daerah perkotaan, terutama yang di lintasi jalan nasional. Hal-hal yang menjadi kendala pengembangan RTH diantaranya adalah terkait dengan ketersediaan lahan.

2.4.1.6 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hal yang perlu dijaga adalah konsistensi pembangunan dari tahun ke tahun dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- a. Dokumen RPJPD Kabupaten Semarang yang menjadi pedoman saat ini adalah RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, dan Tahun 2016-2021, masih dalam lingkup RPJPD tersebut sehingga belum ada penyusunan RPJPD pada periode RPJMD 2016-2021 ini.
- b. Ditetapkan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 pada Tahun 2011 dengan Perda Kabupaten Semarang No. 7 Tahun 2011.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang disusun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, masing masing satu dokumen pada Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2 dokumen RKPD pada Tahun 2014 (satu dokumen RKPD, 1 dokumen perubahan RKPD Tahun 2014 karena perubahan SOTK), pada Tahun 2015 tersusun kembali satu dokumen RKPD Tahun 2015. Selengkapnya tersaji pada Tabel 2.70

Tabel 2.70
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2010- 2015

NO	RKPD TAHUN	Peraturan Bupati
1	2010	No. 47 Tahun 2009
2	2011	No. 33 Tahun 2010
3	2012	No. 61 Tahun 2011
4	2013	No. 150 Tahun 2012
5	2014	No. 46 Tahun 2013
6	2014	No. 55 Tahun 2013 (Perubahan atas RKPD Tahun 2014 Perbup No. 46 Tahun 2013 karena perubahan SOTK)
7	2014	No. 60 Tahun 2014
8	2015	No. 34 Tahun 2014

Sumber: Bappeda Kabupaten Semarang, 2015

2.4.1.7 Perhubungan

Capaian perhubungan dalam mendukung aspek pelayanan umum selama Tahun 2010-2015 adalah:

- a. Jumlah arus penumpang angkutan umum cenderung mengalami penurunan yang disebabkan karena dengan adanya pembangunan Terminal Bawen dan Tol Semarang Bawen sehingga sebagian angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) tidak masuk ke Terminal tapi langsung masuk Tol.
- b. Rasio Ijin Trayek Tahun 2015 cenderung menurun jika dibandingkan Tahun 2010. Pada dasarnya di setiap wilayah perbatasan sudah ada trayek angkutan umum akan tetapi pelayanan angkutan belum optimal karena hanya beroperasi pada jam-jam tertentu dan semakin banyaknya kendaraan pribadi sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Tabel 2.71
Jaringan Trayek dan Jumlah Kebutuhan Angkutan perdesaan
Di Kabupaten Semarang Tahun 2015

No	Trayek	Jarak (km)	Kebutuhan	Ter-sedia
1.	TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN DALAM KOTA (s/d 11 Tempat Duduk)	7-22 km	704	392
2.	TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN JALUR WISATA	4-16 km	125	66
3.	TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN JALUR PERMUKIMAN	6-8 km	40	0
4.	TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN (s/d 15 Tempat Duduk)	7-30 km	1.309	684

Sumber: Dishubkominfo, 2015

- c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2015 sebanyak 19.042 kendaraan, jauh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2010 yang hanya sebesar 2.783 kendaraan. Hal ini dikarenakan terdapat kendaraan baru, mutasi masuk dan numpang uji masuk di Kabupaten Semarang;
- d. Jumlah terminal bis dari Tahun 2010-2015 cenderung tetap. Mulai Tahun 2014 terdapat penambahan 3 Terminal tipe C sehingga jumlahnya dari 4 buah menjadi 7 buah yaitu Sub terminal Sisemut Ungaran, Ambarawa, Sumowono, Suruh, Getasan, Bringin, dan Jambu. Terminal A belum dapat tercapai pada Tahun 2015 karena rencana pembangunan Terminal Bawen masih berjalan sampai dengan Tahun 2016, dengan alokasi anggaran bantuan dari pusat (APBN).
- e. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Tahun 2015 cenderung menurun jika dibandingkan kondisi awal di Tahun 2010. Kondisi ini diakibatkan adanya penambahan panjang jalan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan penambahan jumlah kendaraan di wilayah Kabupaten Semarang.
- f. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2010 sampai 2014. Untuk Tahun 2015 terjadi peningkatan walaupun peningkatan tersebut masih di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya peralihan moda

transportasi dari kendaraan angkutan umum ke kendaraan pribadi. Untuk barang tidak dapat terdata karena sejak Tahun 2001 jembatan timbang yang ada di kabupaten Semarang sudah menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah.

- g. Realisasi capaian rasio angkutan darat selama kurun waktu lima tahun cenderung bersifat fluktuatif. Namun capaian untuk Tahun 2015 lebih rendah jika dibanding target akhir RPJMD. Hal ini disebabkan karena jumlah trayek yang ada masih belum cukup untuk melayani jumlah penumpang yang ada.
- h. Kepemilikan KIR Angkutan Umum selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif. Jika dibandingkan kondisi awal di Tahun 2010 cenderung mengalami peningkatan. Untuk Tahun 2015 telah melampaui target yang telah ditetapkan.
- i. Pemasangan rambu rambu lalu lintas terus meningkat selama lima tahun terakhir ini. Pada Tahun 2015 telah dilakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas baru sebanyak 208 buah. Jumlah keseluruhan rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 1.187 buah dan ini sudah melampaui target akhir yang ditetapkan pada RPJMD.

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang perhubungan sebagai berikut. Untuk bidang perhubungan, baru terdapat 18,18% indikator yang dapat mencapai SPM (100%) hingga tahun 2015. Indikator-indikator tersebut adalah (1) tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji (untuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor), dan (2) terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (untuk keselamatan). Sementara itu, indikator-indikator yang belum mencapai SPM (100%) ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2.72
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan
Kabupaten Semarang Tahun 2013 - 2015 (%)

No	Jenis Pelayanan Dasar: Angkutan Jalan	Indikator SPM	2013	2014	2015
1	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	66.76	66.76	66.76
		2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	35.98	35.98	35.98
2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	25.00	30.56	41.67

No	Jenis Pelayanan Dasar: Angkutan Jalan	Indikator SPM	2013	2014	2015
		4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	42.11	42.11	42.11
3	Fasilitas Perlengkapan Jalan	5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, & guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	62.40	69.35	61.69
		a. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, & guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota.	82.43	93.78	78.40
		b. Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	42.37	44.93	44.99
4	Sumber Daya Manusia (SDM)	6 Tersedianya SDM di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	66.10	66.10	64.41
		7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	83.33	71.43	71.43
		8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	52.00	52.00	36.00
		9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100.00	50.00	50.00

Sumber: Dishubkominfo, 2015

2.4.1.8 Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang selama periode Tahun 2010-2015 diukur berdasarkan indikator capaian penanganan sampah, penduduk berakses air minum, luas permukiman yang tertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, tempat pembuangan sampah persatuan penduduk, dan penegakan hukum lingkungan. Berikut gambaran perkembangan kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup Tahun 2010-2015:

- a. Realisasi penanganan sampah sampai Tahun 2015 mencapai 19,99% masih kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 79,50%. 80,72% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 79,50%. Hal ini dicapai melalui kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yakni pengadaan kontainer sebanyak 8 unit, revitalisasi TPS sebanyak 8 unit, pembangunan TPS 14 unit, pemeliharaan zona I dan II TPA Blondo dan peningkatan operasional pengangkutan sampah di 113 TPS. Selain itu juga dengan pelaksanaan bintek persampahan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, pengadaan komposter sebanyak 170 unit, pengadaan tong sampah pemilah sejumlah 38 unit dan pembangunan bank sampah 3 unit.

Kinerja pelayanan persampahan di Kabupaten Semarang dari Tahun 2010-2015 semakin meningkat walaupun cakupannya masih kecil, yaitu hanya 19,99% jumlah sampah yang tertangani terhadap volume produksi sampah. Persentase pelayanan penanganan sampah yang relatif kecil tersebut disebabkan:

- 1) Sebaran penduduk di Kabupaten Semarang adalah 88% adalah di wilayah perdesaan, yaitu dari total 325 desa/kelurahan sebanyak 208 adalah desa. Hal ini berakibat bahwa sebagian besar penduduk masih memanfaatkan lahan yang ada di desa untuk pembuangan sampah secara mandiri.
- 2) Cakupan armada, personil dan sarana prasarana persampahan yang terbatas, yaitu hanya cukup untuk melayani daerah perkotaan dan ibukota kecamatan.

Berikut disajikan perkembangan pelayanan persampahan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015, sebagaimana Tabel 2.73 berikut ini.

Tabel 2.73
Penanganan Persampahan
di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

Uraian	Sat	Perkembangan Tahunan					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk	Jiwa	933.764	938.802	944.277	949.788	955.481	961.238
Jumlah volume produksi sampah	M ³	681.647	685.325	689.322	693.365	697.270	701.704
Jumlah sampah yang ditangani	M ³	112.804	115.375	114.183	109.263	121.940	140.267
Persentase penanganan sampah	%	16,55	16,84	16,56	15,76	17,49	19,99

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2015

- b. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan capaian Tahun 2015 sebesar 0,77% sudah di atas target yang ditetapkan. Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dipengaruhi oleh jumlah TPS terbangun dan perkembangan jumlah penduduk. Rasio TPS per satuan penduduk dari Tahun 2010-2015 meningkat secara signifikan bila ditinjau dari tingkat cakupan pelayanan yang ada, yaitu di wilayah perkotaan. Rasio tempat pembuangan sampah pada Tahun 2010 adalah sebesar 0,11% meningkat menjadi 0,77% pada Tahun 2015. Berikut disajikan perkembangan Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk, sebagaimana Tabel 2.74 berikut:

Tabel 2.74
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk
di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

Uraian	Sat	Perkembangan Tahunan					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah TPS	Bh	89	93	98	108	112	126
Daya Tampung TPS	M ³	107	123	203	605	633	737
Jumlah	Jiwa	933.764	938.802	944.277	949.815	955.481	961.238

Uraian	Sat	Perkembangan Tahunan					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk							
Rasio Daya Tampung TPS thd jml pendk	%	0,11	0,13	0,21	0,64	0,66	0,77
Sistem Pengolahan Persampahan		Control Landfill	Control Landfill	Control Landfill	Control Landfill	Control Landfill	Control Landfill
Proyeksi Batas Waktu Penggunaan TPA	Tahun	4	3	2	1	0	5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2015

- c. Melalui kegiatan penyediaan sarana air bersih dan optimalisasi sarana air bersih, telah meningkatkan persentase penduduk berakses air minum pada Tahun 2015 sebesar 83,39% naik dibanding Tahun 2014 sebesar 82,91%, namun angka ini lebih rendah dari target 2015 yaitu 89,36%. Akses air minum tersebut diperoleh dari PDAM, sumur dan pembangunan sumber mata air di tiap wilayah. Pembangunan sarana air bersih dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Semarang melalui dana DAK dan APBD Kabupaten Semarang. Selain itu terdapat program Pamsimas yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah.
- d. Capaian luas pemukiman tertata pada Tahun 2015 sebesar 59,24%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 55,21% dan meningkat sebesar 0,5% dibanding Tahun 2014. Luas areal permukiman keseluruhan dan luas permukiman tertata di Kabupaten Semarang dari Tahun 2010-2015 mengalami perkembangan yang semakin meningkat, sebagaimana di tunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Luas Permukiman Tertata di Kabupaten Semarang
Tahun 2010-2015

Uraian	Sat	Perkembangan Tahunan					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Luas area permukiman	Ha	19.704	19.920	20.325	20.950	20.950	21.376
Luas permukiman tertata	Ha	7.704,26	8.187	10.949	11.657	12.306	12.663
Persentase luas permukiman tertata	%	39,1	41,1	53,87	55,64	58,74	59,24

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Smg, 2015

- e. Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pantauan pencemaran status mutu air pada 20 titik/lokasi, melebihi target yang sudah ditetapkan sebanyak 9 titik/lokasi dan secara kumulatif berjumlah 145 titik/lokasi telah melampaui target kumulatif sampai dengan akhir 2015 sebanyak 45 titik/lokasi. Pantauan pencemaran status mutu air dilakukan di 10 perusahaan dan 10 sungai.

Secara umum Indeks Kualitas Air Sungai di sekitar Kawasan Industri di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel di halaman berikut:

Tabel 2.76
Indeks Kualitas Air Sungai

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Index Kualitas Air Sungai	42	41,1	40	41,1	30
Kriteria Index Menunjukkan Nilai	WASPADA	WASPADA	WASPADA	WASPADA	WASPADA

Sumber: BLH, 2015

Titik pantau yang mengalami penurunan kualitas air sungai adalah Sungai Klampok, Sungai Kaligarang, Sungai Sinantah, Sungai Tanggi dengan status tercemar sedang, sedangkan, Sungai Belang, Sungai Panjang, Sungai Galeh, Sungai Serang, Sungai Nagan dan Sungai Tuntang tercemar ringan.

- f. Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air secara kumulatif dari Tahun 2010-2015 telah mencapai seluas 103,66 Ha melebihi target kumulatif sebesar 70 Ha. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut berupa pengadaan bibit dan pengadaan biopori.
- g. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL cenderung mengalami peningkatan dalam kurun 2010-2015 dan secara kumulatif telah tercapai sejumlah 141 perusahaan. Angka ini melampaui target sampai dengan akhir Tahun 2015 sebesar 52 perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal, UKL-UPL dan SPPL berbanding lurus terhadap tumbuhnya usaha di Kabupaten Semarang.
- h. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dengan permasalahan dibidang lingkungan hidup cenderung stagnan selama kurun waktu 5 tahun. Namun demikian secara kumulatif sejumlah 70 kasus telah melebihi target sampai dengan akhir Tahun 2015 sebanyak 50 kasus. Diasumsikan bahwa semakin rendah pengaduan masyarakat dapat dikatakan bahwa tingkat pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup semakin intensif.

Berkaitan dengan menurunnya kualitas lingkungan akibat alih fungsi lahan bahwa penggunaan lahan tanpa diimbangi dengan upaya konservasi dan perbaikan kondisi lahan akan menyebabkan degradasi lahan. Lahan di daerah hulu dengan lereng curam yang hanya sesuai untuk hutan, apabila mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian tanaman semusim akan rentan terhadap bencana erosi dan atau tanah longsor. Perubahan penggunaan lahan miring dari vegetasi permanen (hutan) menjadi lahan pertanian intensif menyebabkan tanah menjadi lebih mudah terdegradasi oleh erosi tanah. Praktek penebangan dan perusakan hutan (deforesterisasi) merupakan penyebab utama terjadinya erosi di kawasan daerah aliran sungai (DAS).

Penurunan produktivitas usaha tani secara langsung akan diikuti oleh penurunan pendapatan petani dan kesejahteraan petani. Kegiatan usaha tani tersebut juga bisa menyebabkan kerusakan sumber daya lahan dan lingkungan di

wilayah hilir, yang akan menyebabkan ketidak-berlanjutan beberapa kegiatan usaha ekonomi produktif di wilayah hilir akibat terjadinya pengendapan sedimen, kerusakan sarana irigasi, bahaya banjir dimusim penghujan dan kekeringan dimusim kemarau. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di lingkungan pertanian dapat disebabkan karena penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak proporsional. Dampak negatifnya antara lain berupa pencemaran air, tanah, dan hasil pertanian, gangguan kesehatan petani, menurunnya keanekaragaman hayati, ketidak berdayaan petani dalam pengadaan bibit, pupuk kimia dan dalam menentukan komoditas yang akan ditanam.

Sedangkan menurunnya kualitas air akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan di lingkungan pertanian dapat juga disebabkan karena kegiatan industri. Pengembangan sektor industri akan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan pertanian kita, dikarenakan adanya limbah cair, gas dan padatan yang asing bagi lingkungan pertanian. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa gas buang seperti belerang dioksida (SO₂) akan menyebabkan terjadinya hujan asam dan akan merusak lahan pertanian. Disamping itu, adanya limbah cair dengan kandungan logam berat beracun (Pb, Ni, Cd, Hg) akan menyebabkan degradasi lahan pertanian dan terjadinya pencemaran dakhil. Limbah cair ini apa bila masuk ke badan air pengairan, dampak negatifnya akan meluas sebarannya. Penggalakan terhadap program kali bersih dan langit biru perlu dilakukan, dan penerapan sanksi bagi pengusaha yang mengotori tanah, air dan udara.

Untuk penanganan upaya konservasi di Danau Rawapening bahwa Danau Rawa Pening yang luasnya 2.667 Ha dengan berbagai fungsi, antara lain, air baku untuk rumah tangga dan industri, air irigasi untuk 39.277 Ha sawah, energi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Jelok dan Timo Kecamatan Tuntang untuk Listrik di Jawa Tengah Bagian Timur, DIY, Solo, dan Kudus, Perikanan, dan Pariwisata. Namun, danau Rawa Pening yang daerah tangkapan airnya (DTA) merupakan bagian hulu dari DAS Tuntang saat ini kondisinya kritis, yaitu laju sedimentasi dari 9 anak sungai yang masuk ke danau mencapai 150.000 m³/th termasuk pertumbuhan enceng gondok yang sangat tinggi, sehingga mempercepat pendangkalan danau. Kondisi DAS Tuntang sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu daerah aliran sungai (DAS) prioritas di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 328/Menhut-II/2009).

Danau Rawapening merupakan *landmark* Jawa Tengah dan bagian dari wilayah strategis Jratunseluna (Permen PU nomor 11A/PRT/M/2006). Berdasarkan peran strategis tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dalam Konferensi Nasional Danau Indonesia Tahun 2011 mencanangkan Gerakan Penyelamatan 15 Danau prioritas di Indonesia yang harus diselamatkan antara lain Danau Rawapening.

Berbagai permasalahan yang terdapat di Danau Rawapening, mulai dari masalah turunnya stok sumber daya ikan, pencemaran lingkungan, hingga masalah sosial-ekonomi merupakan dampak dari pengelolaan yang dilakukan secara parsial dan tidak adanya sinergi antar sektor yang memiliki kepentingan. Kondisi saat ini di wilayah Rawa Pening adalah pada permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu tingginya laju pertumbuhan dan perkembangan (eceng gondok) yang kemudian berakibat menurunnya pada kualitas air serta tingginya tingkat

sedimentasi, hal ini berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pemanfaatan Danau Rawa Pening.

Manfaat sosial ekonomi perairan Danau Rawapening bagi masyarakat sekitarnya dan juga masyarakat di wilayah hilirnya sangat besar. Dengan memiliki multifungsi, perairan Danau Rawapening secara hidrologi berperan dalam menahan laju aliran air permukaan dan menampung aliran permukaan yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat secara nyata telah menumbuhkan ekonomi kerakyatan di sektor perikanan, pertanian, industri, jasa dan pariwisata. Beberapa kepentingan perairan Danau Rawapening yang utama adalah:

- a. Pasokan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jelok dan Timo, yang merupakan bagian dari interkoneksi listrik Jawa Bali;
- b. Irigasi pertanian bagi sawah di Kabupaten Semarang, Demak dan Grobogan;
- c. Pengendali banjir daerah hilir terutama di Kabupaten Demak dan Grobogan;
- d. Kegiatan perikanan darat baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan nelayan dan petani ikan;
- e. Penyedia air baku dan air untuk industri;
- f. Kegiatan sektor pertanian lahan pasang surut;
- g. Kegiatan pariwisata yaitu untuk Wisata Air maupun Agro Wisata;
- h. Kerajinan tangan yang memanfaatkan eceng gondok dan
- i. Pemanfaatan gambut sebagai bahan dasar pupuk organik/kompos dan sarana budidaya jamur.

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang Lingkungan Hidup sebagai berikut. Untuk bidang lingkungan hidup, 50% indikator telah mencapai SPM (100%). Indikator-indikator tersebut adalah (1) prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara (untuk Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak), dan (2) prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (untuk pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup). Khusus untuk prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2014 turun apabila dibandingkan tahun 2013 karena tahun 2013 adalah tahun terakhir SPM periode 2008-2013 sehingga untuk tahun 2014 menyesuaikan target yang baru periode 2014 sampai dengan tahun 2019 serta adanya penambahan jumlah obyek yang dijadikan indikator kegiatan persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air namun secara target per tahun sudah memenuhi target SPM yang telah ditetapkan

Sementara itu, indikator bidang lingkungan hidup yang belum mencapai SPM (100%) ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2.77
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Semarang 2013 - 2015 (%)

Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	2013	2014	2015
	Indikator	Nilai				
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Prosentase (%) Jml Usaha Dan/Atau Keg Yg Mentaati Persy Adm & Tek Pencghn Penc Air	100	2013	100	40,9	45,45
Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100	2013	**)	**)	21

Sumber: BLH, 2015 **) Data Tidak Tersedia

2.4.1.9 Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan ditujukan untuk peningkatan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Semarang, baik menyangkut fasilitasi alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemerintah Daerah, penyelesaian permasalahan tanah lainnya serta fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan instansi pemerintah. Beberapa capaian bidang Pertanahan dari Tahun 2010 sampai 2015, adalah:

1. Terfasilitasinya penanganan permohonan alih fungsi, pemindahtanganan atas tanah Pemerintah Kabupaten Semarang sebanyak 47 permohonan,
2. Termonitornya pelaksanaan dan pelunasan setoran hasil lelang eks bengkok
3. Terbitnya sertifikasi tanah Pemda sebanyak 445 buah, tersedianya 114 peta bidang dan tersedianya 225 plang tanda kepemilikan tanah,
4. Terlaksannya penyuluhan di bidang pertanahan kepada aparat desa/kelurahan dan kecamatan
5. Peta bidang tanah 48 bidang, pengsertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Semarang (eks bengkok) sejumlah 23 sertifikat, 50 plang tanda kepemilikan dan 100 patok tanda kepemilikan.
6. Kasus tanah dari Tahun 2010 hingga 2015 pada akhir 2015, 10 kasus terselasaikan dari 14 kasus tanah yang terdaftar.

2.4.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

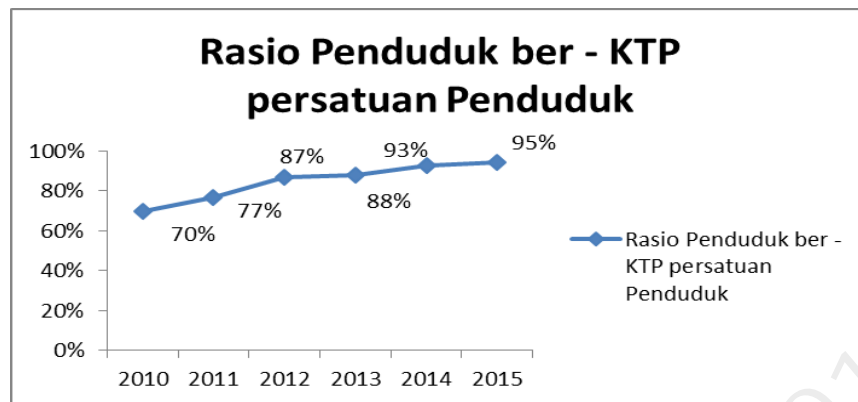
Secara umum capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

- a. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk

Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2010-2015 untuk Rasio penduduk ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) persatuan penduduk dapat dilihat dari diagram dibawah ini:

Gambar 2.9

Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk



Sumber: Dispendukcapil, 2015

Sampai dengan Tahun 2015 sudah 94,57% penduduk Kabupaten Semarang melaksanakan perekaman data KTP-el (KTP elektronik), salah satu usaha mempercepat perekaman KTP-el melalui pelayanan mobil keliling kependudukan ke desa/kelurahan dan sekolah-sekolah (SMU/MA/Sederajat) untuk perekaman KTP Pemula.

b. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

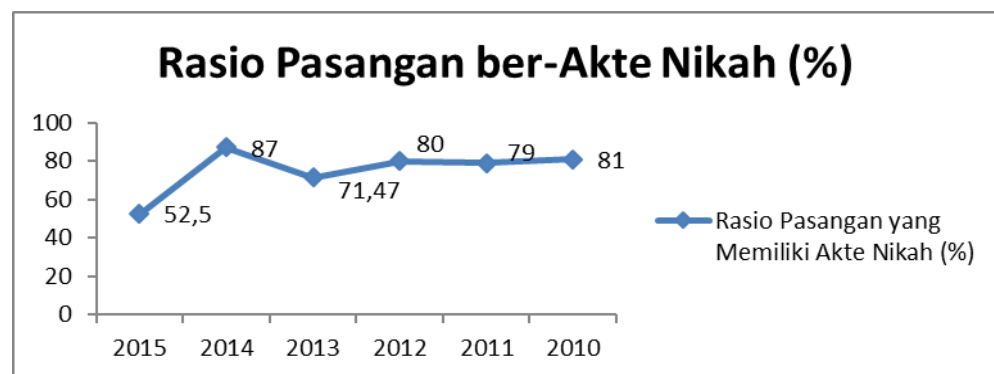
Rasio bayi berakte Kelahiran (0-1 th) telah mencapai 100% atau dengan kata lain penerbitan Akta Kelahiran untuk bayi usia 0-1 th sudah terlayani 100%. Hal ini berkat kerjasama yang baik dengan bidan desa maupun dengan perangkat desa, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta kelahiran putra putrinya. Pemanfaatan Akta Kelahiran untuk berbagai kepentingan, khususnya persyaratan masuk sekolah juga membawa dampak positif atas kepemilikan Akta Kelahiran.

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Capaiannya selama Tahun 2010-2015 dapat dilihat dari diagram dibawah ini:

Gambar 2.10

Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah (%)



Sumber: Dispendukcapil, 2015

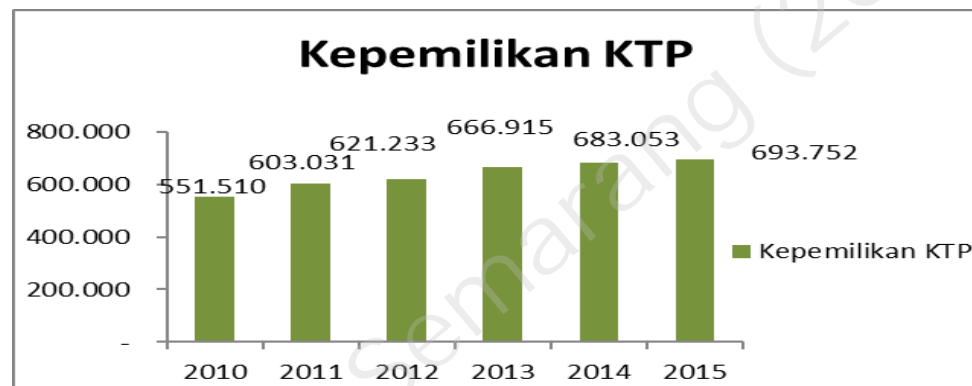
Tahun 2015 capaian 81% adalah kepemilikan Akta Perkawinan yang dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil (non muslim). Kenaikan yang cukup signifikan di Tahun 2010-2011 disebabkan adanya peran serta Pejabat Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) dimasing-masing kecamatan yang

diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah. Dengan adanya P4 ini, penduduk yang telah menikah secara agama/kepercayaan dibantu dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui para P4. Pada Tahun 2012 terjadi penurunan rasio pasangan berakte nikah, dengan beberapa sebab antara lain jauhnya lokasi pasangan nikah dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan sebagian P4 sudah berakhir masa tugasnya dan tidak ada perpanjangan SK Gubernur terkait P4.

d. Kepemilikan KTP

Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2010–2015 untuk Kepemilikan KTP dapat dilihat dari diagram dibawah ini:

Gambar 2.11
Kepemilikan KTP (orang)



Sumber: Dispendukcapil, 2015

Kepemilikan KTP-el dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Sampai dengan Tahun 2015 sudah 94,57% atau 693.752 orang dari 733.597 wajib KTP-el dengan NIK tunggal menjadi dokumen wajib yang dimiliki oleh penduduk Indonesia, dan dimanfaatkan sebagai dokumen sumber untuk berbagai kepentingan baik pemerintahan maupun sektor swasta.

e. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk

Sampai dengan Tahun 2015 kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Semarang adalah 622 per 1000 orang penduduk atau 63% penduduk Kabupaten Semarang. Sosialisasi terus dilakukan untuk mendorong penduduk yang belum memiliki akta kelahiran, khususnya untuk penduduk usia diatas 18 tahun yang belum memiliki Akta kelahiran.

Dalam usaha mendekatkan pelayanan, telah diadakan pelayanan jemput bola di desa/kelurahan melalui pelayanan akta kelahiran di desa/kelurahan yang dilakukan setiap bulan sesuai jadwal maupun lewat kegiatan-kegiatan pemerintahan (antara lain melalui Pameran Pembangunan, TMMD-TNI Manunggal Masuk Desa).

f. Ketersediaan Data base Kependudukan Skala Provinsi

Ketersediaan Database Kependudukan di Kabupaten Semarang mulai dibangun Tahun 2004 dengan skala Kabupaten. Pemakaian Database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Nasional dilaksanakan mulai Tahun 2011. Sinkronisasi Data Kependudukan dengan Data Kependudukan Nasional pada Server Pusat dilaksanakan secara periodik dan disajikan secara berkala per Semester, yang disampaikan pada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui sistem SIAK, dengan hasil Data Konsolidasi Bersih

(DKB) untuk digunakan sebagai data dasar pelaksanaan program/kegiatan baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota.

g. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Perekaman KTP-el dilaksanakan di Kabupaten Semarang secara massal pada Tahun 2011, dan terus dilaksanakan secara reguler di kecamatan, melalui pelayanan keliling ke desa/kelurahan dan di Sekolah Menengah Atas. Sejak Tahun 2011 KTP Nasional sudah berbasis NIK, skala nasional dan tidak menggunakan nomor KTP daerah(kabupaten/kota).

Tabel 2.78
Realisasi Penerbitan Dokumen Kependudukan Tahun 2010-2015 (lembar)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
KTP	118.399	104.822	223.863	83.760	47.695	45.450
KK	86..348	50.064	93.500	99.596	92.407	75.567
Akta Kelahiran	54.851	24.115	16.589	24.974	21.521	20.355
Akta Kematian	38	1.249	1.956	2.572	4.350	3.965
Akta Perkawinan	446	375	780	744	800	924
Akta Perceraian	46	375	104	102	142	64
Akta Pengakuan Anak	-	-	-	-	-	-
Akta Pengesahan Anak	12	-	7	22	10	12
Akta Pengangkatan Anak	9	9	-	10	6	6
Akta Perubahan Nama	13	17	14	23	12	17

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2015

Tabel 2.79
Database Kependudukan Kabupaten Semarang
Tahun 2010-2015

Tahun	Program	Keterangan
2010	SIAK Online dengan Kecamatan menggunakan jaringan	Online di 19 Kecamatan
2011	SIAK Online dengan Kecamatan menggunakan jaringan	Online di 19 Kecamatan
2012	SIAK Online dengan Kecamatan menggunakan jaringan	Online di 19 Kecamatan
2013	SIAK Online dengan Kecamatan menggunakan jaringan	Online di 19 Kecamatan
2014	- SIAK Online dengan Kecamatan menggunakan jaringan - Sistem Informasi Management Administrasi Desa/Kelurahan terintegrasi dengan SIAK	Online di 19 Kecamatan
2015	- SIAK Online dengan Kecamatan menggunakan jaringan - Sistem Informasi Management Administrasi Desa/Kelurahan terintegrasi dengan SIAK - Sistem informasi pendaftaran dan pengendalian permohonan Admindex berbasis SMS	Online di 19 Kecamatan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2015

Tabel 2.80
Jumlah Kepemilikan KTP dan KK
Tahun 2010 s.d 2015

Uraian	Satuan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kepemilikan KTP	jiwa	551.510	603.031	621.233	666.915	683.053	693.752
Kepemilikan KK	Kel	315.303	326.252	300.448	335.263	310.049	310.886

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2015

Tabel 2.81
Jumlah Perekaman KTP-el Tahun 2012-2014

Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2012	orang	741.001	634.088	92%
2013	orang	643.808	666.915	90%
2014	orang	643.808	676.940	105,15

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2015

2.4.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah.

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV dan Eselon III, namun untuk eselon II dari Tahun 2011 menuju Tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan, hal ini disebabkan makin berkurang dan terbatasnya SDM PNS perempuan yang memenuhi persyaratan (Daftar Urut Kepangkatan maupun kompetensi lainnya) untuk dapat menduduki jabatan Eselon II.

- b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta makin tahun makin bertambah. Hal ini dapat disebabkan semakin meningkatnya peran gender dalam kehidupan sosial dan ekonomi dimana fungsi perempuan yang makin mengalami transformasi dari dahulu sekedar mendampingi dan merawat keluarga telah bergeser menjadi pencari nafkah utama, karena semakin terdesak oleh kebutuhan dasar, psikologis maupun pengembangan yang disadari apabila tanpa peran serta perempuan maka keluarganya akan semakin kesulitan dalam persaingan bagi kehidupan generasi berikutnya.

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan dan swasta selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.82 sebagai berikut:

Tabel 2.82
Persentase partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta
Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah pekerja perempuan	67.061	68.878	70.335	70.382	71.743	72.201
Pekerja perempuan di Lembaga pemerintah	5.539	5.569	5.277	5.250	5.441	5.437
Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	5	5	3	3	3
Jumlah perempuan yang	31	27	27	27	31	32

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
menempati jabatan eselon III						
Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	238	224	238	230	240	249
Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	8,26	8,09	7,50	7,46	7,58	7,53
Jumlah perempuan yg bekerja di lembaga swata	61.522	63.309	64.745	65.132	66.302	66.764
% pekerja perempuan di lembaga swasta	87,74	91,91	92,05	92,54	92,42	92,47

Sumber: Badan KB dan PP, 2015

c. Rasio KDRT

Rasio KDRT dari Tahun 2013-2015 terus mengalami peningkatan. Semakin kompleksnya permasalahan dalam era milenium, berpengaruh juga dalam kehidupan di segi keluarga. Keluarga yang kurang mempunyai ketahanan yang kuat akan menyebabkan rapunya sendi-sendi kehidupan dari sebuah keluarga.. Kekerasan bisa terjadi pula di luar keluarga tersebut, hal ini karena multidimensi dan multifaktor. Kehidupan yang makin modern dengan kemajuan komunikasi dan informasi dapat pula menjadi pemicu sebuah kekerasan. Faktor ekonomi maupun sosial politik dan budaya juga bisa menyebabkan KDRT. Rasio KDRT Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.83

Tabel 2.83
Rasio KDRT Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah KDRT	134	116	131	112	106	188
Jumlah Rumah Tangga	245.038	244.695	243.033	240.047	263.582	270.645
Rasio KDRT	0,055	0,047	0,054	0,047	0,040	0,069

Sumber: Badan KB dan PP Kabupaten Semarang, 2015

d. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur.

Data tentang jumlah tenaga kerja di bawah umur di Kabupaten tidak ditemukan, baik dari BPS maupun SKPD lainnya yang mengampu pada permasalahan ini. Namun demikian pada riil dilapangan disinyalir masih ada, walaupun belum terekam dalam dokumentasi data. Pada kurun Tahun 2010-2014 masih terdapat data mengenai jumlah tenaga kerja dibawah umur, namun hanya secara persentasenya saja karena data kompilasi primernya tidak disebutkan. Namun pada Dari temuan data ini, menjadi penting bahwa masih perlunya programantisipasi terhadap pekerja di bawah umur. Pekerja di bawah umur dapat terjadi misalnya pada sektor pertanian dimana anak-anak petani mungkin membantu orang tua dalam kegiatan pertaniannya, atau sektor informal lainnya yang terlihat namun belum terdeteksi dalam acuan kompilasi data survey maupun sensus. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.84

Tabel 2.84
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pekerja anak usia 5-14 tahun	-	3.679	-	-	-	-
Jumlah pekerja usia 15 tahun ke atas	-	506.384	-	-	-	-
Persentase jumlah naker di bawah umur	0,97	0,73	-	-	0,14	-

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, 2015.

e. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang perempuan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	223.871	230.487	231.396	232.660	296.290	230.249
Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	473.993	476.210	484.060	486.737	427.830	487.496
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47,23	48,40	47,80	47,80	69,02	47,23

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Semarang semakin tahun semakin meningkat, walaupun jumlah partisipasi angkatan kerja dan jumlah angkatan kerjanya menurun. Namun demikian secara prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat. Hal ini dapat dipahami, seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa dalam mencapai kebutuhan diperlukan potensi usia produksi untuk bekerja termasuk perempuan, karena diperlukan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya yang dari hari ke hari semakin meningkat pula.

f. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan

Jumlah Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2010-2014 cenderung tetap dan pada Tahun 2015

menurun lebih dari 50%, tetapi secara prosentase berdifat flutuatif. Kasus pengaduan terhadap KDRT diharapkan dari tahun ke tahun dapat menurun, artinya apabila ini terjadi maka ada peningkatan kesadaran di masyarakat tentang pentingnya persamaan gender (*gender equality*) dan meningkatnya kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya maupun hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Tindakan Kekerasan Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	25	25	25	25	25	10
Jumlah Pengaduan perlindungan perempuan dan anak	129	113	131	112	106	98
Prosentase Penyelesaian Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan yang terselesaikan	19,38	22,12	19,08	22,32	23,58	10,20

Sumber: Badan KB dan PP Kabupaten Semarang, 2015

Untuk menangani permasalahan pengaduan dan perlindungan perempuan dan anak telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Di tingkat Kabupaten P2TP2A sebagai koordinator penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan ditingkat Kecamatan disebut Petugas Pendamping Terpadu (PPT). Sampai dengan dengan Tahun 2015 ada 26 PPT, baik yang ada di Kecamatan, Puskesmas, 2 rumah sakit dan ada di Polres. Kurang optimalnya fungsi P2TP2A ini bisa dilihat dari indikasi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selalu terjadi. Itu juga dari kelembagaan PPT yang ada, baru 8 (delapan) yang sudah memiliki SK ditingkat kecamatan. Oleh sebab itu kedepan perlu ditingkatkan kembali baik dari segi eksistensinya maupun tugas pokok dan fungsinya.

Hak anak yang terdiri dari 5 (lima) Hak yaitu: 1) Hak Hidup; 2) Hak Tumbuh Kembang; 3) Hak memperoleh Pelayanan Dasar; 4) Hak memperoleh pendidikan; 5) Hak memperoleh perlindungan tindak kekerasan, pemenuhannya belum optimal, ini bisa dilihat dari capaian pesentase kepemilikan akte kelahiran sebagai bagian dari hak hidup yang masih belum 100% yakni baru 19% pada Tahun 2015. Selain itu bisa juga dilihat dari indikasi selalu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, tercatat pada Tahun 2015 ada 88 kasus.

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai berikut. Untuk bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meskipun belum tersedia data tahun 2015 untuk beberapa indikator, namun secara umum hingga tahun 2014 sebanyak 73,91% indikator bidang pemberdayaan perempuan dan PA telah mencapai SPM (100%). Indikator-indikator tersebut adalah (1) cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu, (2) cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat, (3) cakupan perempuan dan

anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS, (4) cakupan puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A), (5) cakupan RSUD/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (6) cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di puskesmas, (7) cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah sakit, (8) cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu, (9) cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih, (10) cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, (11) cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian, (12) cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta, (13) cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA, (14) cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, (15) cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak, (16) cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dan (17) cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Beberapa indikator bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum mencapai SPM (100%) ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.87
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Semarang 2013 - 2015 (%)

Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun (%)		
		2013	2014	2015
Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	1. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	**)	**)
	2. Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan	100	**)	**)
Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	3. Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender	100	10	**)
	4. Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yg mempunyai kemampuan pendampingan pd saksi dan /atau korban kekerasan thd perempuan dan anak	6	9	**)
Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	5. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	**)	4	-
	6. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	100	-	**)

Sumber: Badan KB dan PP Kabupaten Semarang, 2015

**) Data tidak tersedia

2.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Indikator kerja yang berhubungan dengan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera yang ditandai dengan pencapaian peserta KB Aktif sebesar 82%, Rasio Akseptor Keluarga Berencana melalui pencapaian Peserta KB Baru sebesar 106% terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM), rata-rata jumlah anak per keluarga 3,25 orang, prosentase Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I) sebesar 25% dan Prosentase Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) sebesar 20%.

Secara umum capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera disajikan pada Tabel berikut:

a. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif namun tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini karena pertumbuhan penduduk yang makin besar dapat dikendalikan melalui pengaturan dan penjarangan kelahiran dengan program Keluarga Berencana. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa walaupun terjadi penambahan rata-rata jumlah jiwa per keluarga, namun relatif kecil dan relatif stabil. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.88

Tabel 2.88
Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Jiwa	934.993	942.429	947.261	941.023	965.315	970.146
Jumlah keluarga	295.668	278.819	280.353	282.096	286.016	306.731
Rata-rata jumlah jiwa per keluarga	3,16	3,38	3,38	3,34	3,38	3,16

Sumber: Badan KB dan PP Kabupaten Semarang, 2015

b. Rasio akseptor KB

Rasio Akseptor KB adalah perbandingan antara pencapaian jumlah peserta KB Baru dan KB Aktif dibandingkan dengan pasangan usia subur yang kemudian di persenkan. Adapun rasio akseptor baru dari Tahun 2010-2015 dapat dilihat dalam tabel 2.89 berikut.

Tabel 2.89
Rasio Akseptor KB Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah akseptor KB	185.297	184.147	190.352	176.396	178.301	183.557
Jumlah Pasangan Usia Subur	190.577	191.447	192.358	182.608	186.112	192.239
Rasio Akseptor KB	97,23	96,19	98,96	96,60	95,80	95,48

Sumber: Badan KB dan PP Kabupaten Semarang, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari Tahun 2010-2015 Rasio akseptor KB terhadap pasangan usia subur belum dapat mencapai 100%. Untuk mencapai visi pertumbuhan tumbuh seimbang dengan TFR 2,0 diperkirakan memerlukan rasio KB antara 80-85%. Rasio akseptor KB yang dijadikan indikator tersebut, Kabupaten Semarang telah mencapai TFR 2,02

(dihitung dengan formulasi Bongart) pada Tahun 2014. Dengan makin tinggi rasio akseptor KB terhadap pasangan usia subur menunjukkan makin menurunnya fertilitas, yang pada muaranya menurunkan *total fertility rate (TFR)*. Seperti disebutkan diatas TFR 2,02 adalah pencapaian di Kabupaten Semarang sebagai dampak rasio akseptor KB yang sudah cukup bagus. Angka tersebut artinya kemampuan rata-rata seorang ibu melahirkan di Kabupaten Semarang sampai habis masa reprodusinya adalah 2-3 kelahiran.

c. Cakupan Peserta Aktif

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB aktif yang makin banyak menggambarkan keberhasilan pengendalian kependudukan dalam menciptakan norma keluarga kecil. Adapun pencapaian Peserta KB Aktif di Kabupaten Semarang dari Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Cakupan Peserta Aktif. Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah akseptor KB Aktif (PA)	158.455	159.462	163.160	152.321	154.788	159.904
Jumlah Pasangan Usia Subur	190.577	191.447	192.358	182.608	186.112	192.239
Cakupan Peserta KB Aktif	83,14	83,29	84,82	83,41	83,17	83,18

Sumber: Badan KB dan PP Kabupaten Semarang, 2015

Dari tabel 2.90 dapat dilihat bahwa cakupan peserta KB Aktif relatif sama, yaitu berkisar 83%. Hal ini menunjukkan keberhasilan program KB di Kabupaten Semarang dalam menjaga keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi. Konsistensi para akseptor dalam keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi untuk ber KB ini dikarenakan selain terus menerus dilakukan komunikasi Informasi dan Edukasi maupun advokasi oleh jajaran Badan KB dan PP sampai jajaran lini lapangan kepada masyarakat, juga didukung oleh sarana dan prasarana serta dukungan lintas sektoral.

d. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Sejahtera, adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca

tulis latin dan keluarga berencana. Berikut pencapaian keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015.

a. Keluarga Pra Sejahtera

Pada Tahun 2015 keluarga Pra Sejahtera mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan pada variabel luas lantai yang sebagian besar masih berupa tanah, dinding dan atap yang layak pada sebagian rumah yang dimiliki oleh keluarga belum terealisasi. Kemungkinan kondisi dan situasi perekonomian belum dapat melakukan rehabilitasi tempat tinggalnya atau dapat dimungkinkan keluarga baru yang masih dalam perencanaan untuk membangun atau merehab rumah yang lebih baik. Selain faktor papan, dapat dikatakan pra sejahtera apabila ada salah satu anggota keluarga yang berumur 7-18 tahun (usia SD-SMA) tidak bersekolah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan kemungkinan besar faktor ekonomi yang memicu terjadinya keluarga pra sejahtera.

b. Keluarga Sejahtera I

Keluarga Sejahtera I seperti diuraikan definisi diatas telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Dari data yang ada bahwa jumlah keluarga sejahtera I mengalami penurunan, ini berarti keluarga-keluarga yang telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar dan sosial psikologisnya makin relatif meningkat.

Selengkapnya Jumlah keluarga Pra sejahteradan Sejahtera I selama 2010—2015 dapat dilihat pada tabel 2.91.

Tabel 2.91
Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Tahun 2010-2015

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Keluarga	295.658	278.819	280.353	282.096	286.016	306.731
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	78.190	70.299	69.952	64.201	73.465	78.164
Prosentase Keluarga Pra Sejahtera	26,45	25,21	24,95	22,76	25,69	25,48
Jumlah Keluarga Sejahtera I	44.981	51.682	52.259	70.204	53.114	56.257
% Keluarga Sejahtera	15,21	18,54	18,64	24,89	18,57	18,34

Sumber: Badan KB dan PP Kabupaten Semarang, 2015

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut. Untuk bidang keluarga berencana, hingga Tahun 2015 indikator telah mencapai SPM sesuai dengan yang diharapkan sebesar 55,55%. Indikator-indikator tersebut adalah (1) cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (target 65%, tercapai 83,19%), (2) cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB (target 70%, tercapai: 88,8%), (3) cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (target: 87%, tercapai: 87,27%), (4) rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan, dan (5) cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun.

Sementara itu, indikator bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang belum mencapai target ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.92
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera Kabupaten Semarang 2013 – 2015 (%)

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Tahun		
		2013	2014	2015
Komunikasi Infor masi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	5,06	5,42	5,42
	2. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) 5%	27,07	37,29	16,81
	3. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	Petugas /Desa 0,23	0,23	0,23
Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	4. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	67	**)	**)

Sumber: Badan KB dan PP Kabupaten Semarang, 2015

**) Data Tidak Tersedia

2.4.1.12 Sosial

Capaian kinerja Urusan Sosial dalam kurun waktu Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Sarana Sosial, seperti: panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi

Capaiannya dari Tahun 2010-2015 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan setiap tahunnya juga mengalami kenaikan. Target yang ditetapkan pada Tahun 2015 sebanyak 40 buah panti, dan capaian Tahun 2015 sejumlah 48 panti, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat untuk ikut peduli terhadap penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang ada.

- b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kondisi Tahun 2010 s/d Tahun 2015 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan semakin bertambahnya anggaran untuk penanganan PMKS baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Semarang, juga adanya bantuan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat (Program Keluarga Harapan, Program Simpanan Keluarga Sejahtera) dan Bantuan dari lembaga Swadaya masyarakat/LSM. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.93
Penanganan PMKS Tahun 2010-2015

PMKS	Sat	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anak Balita terlantar	Jiwa	9	15	87	10	6	50
Anak Terlantar	Jiwa	120	220	275	984	1.609	1.037
Anak yg mjd korban Tindak Kekerasan	Jiwa	2	4	47	3	2	26

PMKS	Sat	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anak Nakal	Jiwa	19	25	45	24	5	-
Anak jalanan	Jiwa	6	31	50	30	25	70
Anak cacat	Jiwa	212	424	518	212	130	98
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jiwa	40	100	357	50	0	120
Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	159	318	325	57	163	272
Penyandang Cacat	Jiwa	380	621	748	311	168	139
Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis (Eks. BK)	Jiwa	0	50	50	5	0	-
Penyandang HIV/Aids	Jiwa	33	33	35	4	20	127
Tuna Susila	Jiwa	0	0	50	120	52	20
Pengemis	Jiwa	8	26	30	31	26	82
Gelandangan dan Orang Terlantar	Jiwa	367	630	412	150	325	296
Pekerja Migran Bermasalah	Jiwa	4	4	5	75	75	20
Korban Penyalahgunaan Nafsa	Jiwa	0	0	25	25	0	-
Keluarga Fakir Miskin	KK	40	9.420	10.280	46.450	46.450	56.095
Keluarga Berumah Tak Layak Huni	KK	113	113	258	0	75	434
Keluarga Bermasalah Psikologis	KK	22	46	150	200	380	203
Komunitas Adat Terpencil	KK	0	0	119	0	100	-
Korban Bencana alam	KK	2	207	126	80	1726	2.175
Jumlah		1.525	12.287	13.992	57.008	51.337	61.264

Sumber: Dinsosnakertrans, 2015

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang Sosial sebagai berikut. Untuk bidang sosial, sampai dengan tahun 2015, 42,85 persen indikator jenis pelayanan dasar dan sub kegiatan telah melampaui target nasional 80 persen, 40% untuk presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial). Indikator-indikator tersebut adalah (1) presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (100%), (2) presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (100%), dan (3) presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (82,13%).

Sedangkan indikator-indikator bidang sosial yang belum mencapai target nasional adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.94 pada halaman berikut:

Tabel 2.94
Standar Pelayanan Minimal Penanganan PMKS Tahun 2010-2015

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	Target Nas		Capaian Di Kab Semarang (%)				
			Nilai	Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pelaksanaan prog /kegiatan bidang sosial:								
	Pemberian bantuan sosial PMKS skala Kab /Kota	1 % PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar	80,00	2015	66,94	51,16	62,70	79,82	49,25
2	Penanggulangan korban Bencana								
	a Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/ Kota	5 (%) korban bencana skala kab/kota yg menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80,00	2015	83,00	100,00	54,00	80,02	82,13
3	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:								
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten /Kota	7 % penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40,00	2015	7,70	4,15	4,81	30,59	34,51

Sumber: Dinsosnakertrans,2015

**) Data tidak tersedia

2.1.14 Ketenagakerjaan

Secara umum capaian Urusan Ketenagakerjaan sesuai target pada Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

a. Rasio Penduduk yang bekerja

Sampai dengan akhir Tahun 2015 Rasio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Semarang kecenderungannya mengalami peningkatan terutama pada Tahun 2013, kenaikannya cukup signifikan dibanding Tahun 2012, hal ini dikarenakan banyaknya pertumbuhan industri di Kabupaten Semarang baik karena investasi baru maupun adanya relokasi perusahaan dari daerah lain yang dapat menyerap tenaga kerja. Adapun capaian pada akhir Tahun 2015 adalah sebesar 65,93 % mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni 52,20%.

b. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Semarang 5 (lima) tahun terakhir masih cukup tinggi/diatas target yang ditetapkan, hanya pada Tahun 2014 mengalami sedikit penurunan hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat, penduduk dengan usia angkatan kerja tidak langsung bekerja tetapi melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga penduduk angkatan kerja semakin menurun. Untuk target 2015 adalah 87,15% dan terealisasi 87,40%.

c. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun

Sampai dengan akhir Tahun 2015 Angka perselisihan Pengusaha dan Pekerja atau angka sengketa pengusaha, pekerja di Kabupaten Semarang mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dan kesadaran pengusaha maupun pekerja semakin meningkat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan ketenagakerjaan serta karena optimalnya Fungsi Bipartit di Perusahaan. Namun demikian masih belum mencapai target yang ditetapkan Untuk target 2015 adalah 2.45% capaian sampai dengan Tahun 2015 mencapai 3,99 % atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan

d. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Semarang 5 (lima) tahun terakhir cukup tinggi/diatas target yang ditetapkan, hanya pada Tahun 2014 mengalami sedikit penurunan hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat, penduduk dengan usia angkatan kerja tidak langsung bekerja tetapi melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga penduduk angkatan kerja semakin menurun. Untuk target Tahun 2015 adalah 21,25% dan realisasinya sebesar 82.66%.

e. Keselamatan dan Perlindungan

Sampai dengan akhir Tahun 2015 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Kabupaten Semarang semakin meningkat/melebihi target yang telah ditetapkan hal tersebut dikarenakan adanya sosialisasi ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap penerapan peraturan ketenagakerjaan. Untuk target 2015 adalah 75.00% dan tercapai 75,94 %.

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Semarang perlu mendapat perhatian, karena pada tahun 2015 sebesar 2,57% turun dari tahun 2014 sebesar 4,38%. Meskipun kondisi tersebut jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,99%, capaian Kabupaten Semarang lebih baik. Posisi relatif angka pengangguran terbuka Kabupaten Semarang sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Demak 5,17%, Kendal 6,15%, Temanggung 3,19%, Kota Semarang 7,76% dan Salatiga 4,46%. Kabupaten Brebes paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya sebesar 9,53%.

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang Ketenagakerjaan sebagai berikut. Untuk bidang ketenagakerjaan, hingga tahun 2015, 75% indikator dari standar pelayanan minimal telah melebihi target nasional. Indikator-indikator tersebut adalah (1) besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (62% dari 60%), (2) besaran tenaga

kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (100% dari 60%), (3) besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (83% dari 70%), (4) besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (100% dari 50%), (5) besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek (98,02% dari 80%), dan (6) besaran pemeriksaan perusahaan (91,7% dari 45%).

Sedangkan indikator-indikator bidang ketenagakerjaan yang belum mencapai target nasional sebagai berikut:

Tabel 2.95
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan
Kabupaten Semarang 2011 – 2015 (%)

Jenis Pelayanan Dasar & Sub Keg	SPM		Target Nasional		2011	2012	2013	2014	2015
	Indikator	Nilai	Tahun						
Pelayanan Pelatihan Kerja	1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	60%	61%	63%	70%	72%
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	2	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	2016	29%	30%	33%	44%	45,5%

Sumber: Dinsosnakertrans, 2015

2.1.15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Jumlah koperasi di Kabupaten Semarang hingga Tahun 2015, sebanyak 721 koperasi. Namun karena banyaknya koperasi yang tidak aktif, maka pada bulan Desember 2014, berdasar Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah Republik Indonesia Nomor: 518/246.4/XII/2014, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang telah melakukan pembubaran terhadap 50 koperasi, karena tidak dapat memenuhi ketentuan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selain terjadi pembubaran koperasi di Tahun 2015 juga terdapat pendirian koperasi baru sebanyak 21 koperasi. Pendirian beberapa koperasi baru diantaranya karena adanya regulasi yang mewajibkan bentuk usaha berbadan hukum. Sehingga di akhir Desember 2015 jumlah koperasi di Kabupaten Semarang menjadi 548 koperasi yang secara garis besar terbagi dalam 402 koperasi aktif dan 146 koperasi tidak aktif.

b. Jumlah UKM

Berdasarkan hasil sensus ekonomi Badan Pusat Statistik, jumlah UKM di Kabupaten Semarang Tahun 2015 adalah 63.146 UKM. Dari jumlah tersebut kesemuanya termasuk kategori Usaha Kecil dan Usaha Mikro dengan asset maksimal Rp500 juta. Adapun UMKM yang berhasil dibina sampai dengan Tahun 2015 adalah sebanyak 10.916 UMKM.

c. Jumlah BPR/LKM

Jumlah Lembaga keuangan mikro di Kabupaten Semarang adalah sebanyak 925 buah yang terdiri dari;

- 1) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan sebesar 187 buah
- 2) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) 16 buah
- 3) Lembaga Ketahanan Desa (LKD) 226 buah
- 4) BKD sebanyak 15 buah
- 5) LPED sebanyak 1 buah
- 6) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 16 buah
- 7) Pra koperasi sebanyak 464 buah

Jumlah ini masih dibawah target yang ditetapkan yakni 975 buah.

2.4.1.13 Penanaman Modal

Perkembangan jumlah investor baik PMDN/PMA di Kabupaten Semarang selama Tahun 2010-2015 bersifat flutuatif namun secara umum menunjukkan kenaikan sejak 2tahun terakhir. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.96

Tabel 2.96
Jumlah Investor PMDN/PMA
Tahun 2010 -2015

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2010	Jumlah Investor	495	3	498
2011	Jumlah Investor	402	5	407
2012	Jumlah Investor	401	7	408
2013	Jumlah Investor	446	6	452
2014	Jumlah Investor	537	5	542
2015	Jumlah Investor	628	5	633

Sumber: BPMPPTSP, 2015

a. Jumlah Investor Berkala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN dengan modal menengah-besar dengan banyaknya investasi PMA dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.97
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2010- 2015

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2010	498	345,166 milyar	498	345,166 milyar
2011	407	236,372 milyar	407	236,372 milyar
2012	408	259,929 milyar	408	259,929 milyar
2013	452	371,048 milyar	452	371,048 milyar
2014	537	418,631 milyar	537	418,631 milyar
2015	70	377,509 milyar	70	377,509 milyar

Sumber: BPMPPTSP, 2015

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

b. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah seluruh PMA/PMDN dihitung dari banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu tahun. Selanjutnya hasilnya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.98
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	6.300	4.998	5.482	7.324	8.618	274
Jumlah seluruh PMA/PMDN	498	406	408	452	537	24
Rasio daya serap tenaga kerja	12,65	12,31	13,43	16,2	16,04	11,4

Sumber: *BPMPTSP, 2015*

Selama Tahun 2010-2014 jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN mengalami kenaikan sedangkan pada Tahun 2015 mengalami penurunan secara signifikan karena pada Tahun 2010-2014 jumlah tenaga kerja PMA/PMDN termasuk didalamnya tenaga kerja yang masuk ijin prinsip sedangkan pada Tahun 2015 merupakan jumlah tenaga kerja secara real.

c. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)

Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN ini berpengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Semarang. Realisasinya bersifat flutuatif dari Tahun 2010-2015 namun selalu diatas target yang ditetapkan. Capaian terbesar pada Tahun 2011 yang kenaikannya mencapai Rp9.924 Milyar kemudian menurun menjadi Rp105,4 Milyar pada Tahun 2012. Sedangkan pada Tahun 2013 naik menjadi Rp111,15 Milyar, dan Tahun 2014 menjadi Rp303,48 Milyar. Target pada Tahun 2015 kenaikan PMDN sebesar Rp36,48 dan terealisasi sebesar Rp41,122 Milyar atau 112,7%.

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang Penanaman Modal sebagai berikut:

Tabel 2.99
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal
Kabupaten Semarang 2013 - 2015 (%)

No	Pelayanan Dasar Pengertian	Indikator	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
1.	Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang unggulan s.d 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/ bidang usaha pertahun:	3	3	2	
		- Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan)	10	10	9	
		- Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha)	5	5	5	
		- Ketersediaan Lahan (Ha)	127.023.03	127.023.03	127.023.03	
	Sektor bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (<i>comparative advantage</i>) di daerahnya.	- Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya)	Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya)	Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum & alasannya)	Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya)	
		- Bentuk Dukungan pemerintah Daerah (Keuangan, Perijinan dll)	5	5	5	
	Informasi Peluang Usaha Mencakup: Lokasi, Ketersediaan lahan, Kesesuaian dengan tata ruang, daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, Potensi Pasar, Perkiraan Investasi	- Potensi Pasar	PMA= 6, PMDN = 33	PMA= 6, PMDN = 33	PMA= 6, PMDN = 33	
		- Perkiraan Investasi (Perkiraan nilai (Rp) investasinya)	371.048	1553.53	404.61	
	2	Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan:			
			a Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dgn pengusaha tingkat provinsi/nasional	25	25	22
b Jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan di Kab/ Kota			20	20	20	
c Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi/Nasional yg berminat melakukan kemitraan dgn UMKMK tingkat Kab/Kota	20	20	25			
3	Promosi Penanaman Modal PDKPM adalah kegiatan yg ditujukan	a Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	3	3	4	

No	Pelayanan Dasar Pengertian	Indikator	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
	untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kota secara khusus sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif & meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kab/kota tersebut	tingkat Provinsi/Nas			
b		Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal tingkat Kabupaten.	0	1	BPMPPTSP= 1 DiskopUMKM dan perindag=0
c		Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi Penanaman Modal tingkat Kab. (Jenis kegiatan Promosi)	PMA= 6, PMDN = 12	PMA= 5, PMDN = 39	PMA= 5, PMDN = 65
4	Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotasesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bid penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten	18.183,333	20.883,33	25.250
		Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDKPM / 6 X 100%	1.091	1.253	1.515
		1 Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri	0	0	0
		2 Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	7	39	60
		3 Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri	7	3	4
		4 Jumlah TDP	611	694	827
		5 Jumlah SIUP	466	517	624
6 Jumlah Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data		
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kpd masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun.	Belum ada data	Belum ada data	4 kali bimbingan (Per tri wulan 19 Kecamatan)
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE):	350	1050	1550
		Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE	14	42	62
		1 Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.	0	0	0
		2 Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.	7	39	60
		3 Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.	7	3	4

No	Pelayanan Dasar Pengertian	Indikator		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
		4	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).	Belum dapat hak akses	Belum dapat hak akses	Belum dapat hak akses
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha		Belum ada data	4 kali Sosialisasi (Per tri wulan 1 Kecamatan)	4 kali Sosialisasi (Per tri wulan 19 Kecamatan)

Sumber: BPMPTSP, Dinas Koperasi UMKM dan Perindag, 2015

2.4.1.14 Kebudayaan

Sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya selama kurun waktu lima tahun dilaksanakan di 5 (lima) tempat yaitu:

- a. Pada Tahun 2010-2013 menggunakan: Gedung/aula DPRD, Lapangan Alun-alun Sidomulyo, lapangan Wujil, Gedung Pancasila, dan Gedongsongo.
- b. Pada Tahun 2014-2015 menggunakan: Gedung Kalirejo, Gedung Kesenian Ambarawa, Gedongsongo, Lapangan Wujil, dan Gedung Pancasila

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya telah ditangani secara terpadu antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang Kesenian sebagai berikut. Untuk bidang kesenian, 85,71% indikator telah mencapai SPM (100%). Indikator-indikator tersebut adalah bagian dari jenis pelayanan dasar perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian seperti (1) cakupan kajian seni, (2) cakupan fasilitas seni, (3) cakupan gelar seni, dan (4) misi kesenian, dan bagian dari sarana dan prasarana seperti (5) cakupan sumberdaya manusia kesenian, dan (6) cakupan tempat. Hanya satu indikator yang belum mencapai 100% yakni cakupan organisasi. Hal ini terjadi oleh karena Kabupaten Semarang belum memiliki Taman Budaya sebagai UPT yg menangani kesenian (khusus propinsi).

Tabel 2.100
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian
Kabupaten Semarang 2013 - 2015 (%)

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun		
		2013	2014	2015
Sarana dan Prasarana	Cakupan Organisasi	66,67	66,67	66,67

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

2.4.1.15 Kepemudaan dan Olah raga

Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 mengalami peningkatan, sedangkan untuk Tahun 2014 mengalami penurunan keadaan, Tahun 2015 menurun menjadi 18 organisasi, hal tersebut disebabkan karena ketentuan pembatasan usia (Undang-Undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan), ketentuan bahwa penerima hibah harus

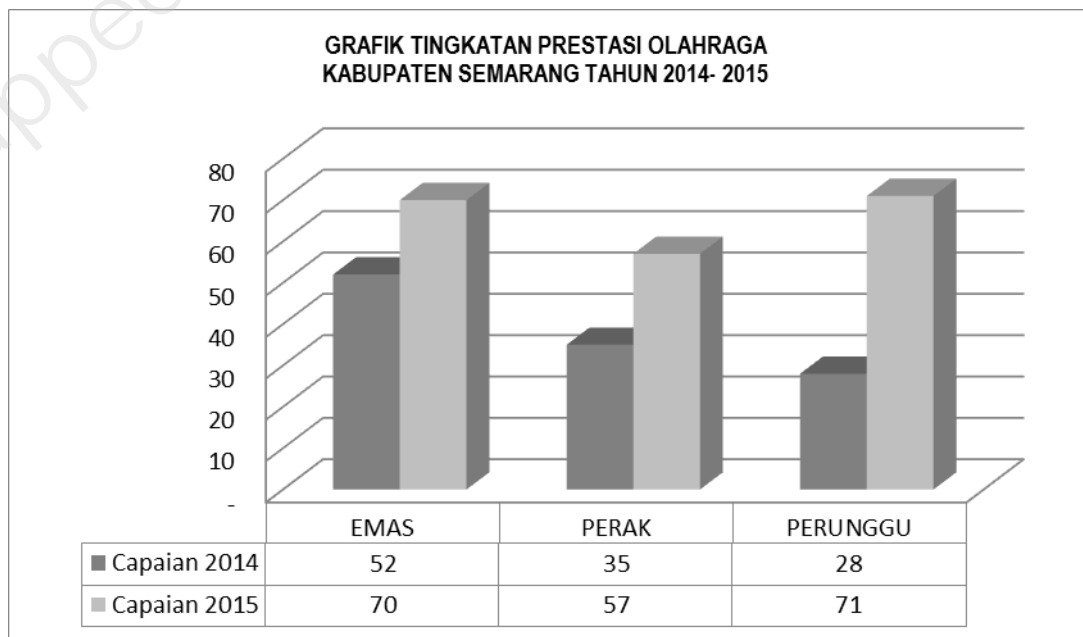
berbadan hukum Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), kurangnya kaderisasi kepengurusan yang berkelanjutan, kurang aktif dan ada yang pindah diluar Kabupaten Semarang sehingga Organisasi Kelompok Kepemudaan (OKP) kurang berkembang.

Jumlah Organisasi Olah Raga keadaan sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 199 organisasi, lebih tinggi dari target Tahun 2015 hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Semarang bersama KONI Kabupaten Semarang memaksimalkan sosialisasi tentang pentingnya olah raga dan peningkatan pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi olah raga di Kabupaten Semarang. Kegiatan Kepemudaan telah dimaksimalkan dengan mengikuti event Nasional, Provinsi dan khususnya Kabupaten.

Jumlah Kegiatan Olah Raga pada Tahun 2014 mencapai 34 kegiatan, pada Tahun 2015 telah melaksanakan 34 kali kegiatan, dengan demikian kegiatan olah raga mengalami kenaikan dari target Tahun 2015 yaitu 32 kegiatan. Peningkatan tersebut karena bertambahnya event-event/kompetisi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat Nasional. yang diiringi pula dengan peningkatan perolehan medali pada kegiatan-kegiatan olah raga, antara lain POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah), POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional), Kejurda (Kejuaraan Daerah), Kejurnas (Kejuaraan Nasional) maupun Kejuaraan Internasional.

Jumlah perolehan medali untuk Kabupaten Semarang di Tahun 2015 berjumlah 198 medali, terdiri dari 70 medali emas, 57 medali perak, dan 71 medali perunggu, rincian perolehan medali sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 2.12
TINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014-2015



sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata, 2015

Jumlah Klub Olah Raga keadaan Tahun 2015 sebanyak 1.175 klub, target Tahun 2015 belum terpenuhi (target 1.500 klub olah raga) karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan olah raga terutama olah raga berprestasi, sehingga memperlambat terbentuknya klub-klub berbagai

cabang olah raga yang berpengaruh pada pencapaian target. Sedangkan jumlah sarana Gedung Olah Raga yang ada di Kabupaten Semarang ada 1 (satu) buah, yakni adalah Gelanggang Olah Raga atau Sport Centre Pandanaran yang terkenal dengan GOR Wujil terdiri dari 2 (dua) gedung olah raga *indoor* dan 1 (satu) gedung olah raga *outdoor*.

2.4.1.16 Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

Berbagai kegiatan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, belum mencapai target yang optimal. Hal ini karena hanya didukung jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang sangat terbatas, dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Semarang yang besar. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang belum dapat meningkatkan jumlah personil dan bahkan cenderung berkurang, sedangkan penambahan personil hasil rekrutmen pengadaan CPNS Tahun 2014 belum ada peningkatan dari segi jumlah personil, sebab dibarengi dengan pengurangan jumlah personil yang sudah saatnya purna tugas (pensiun). Rasio jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga belum bisa memenuhi target dan cenderung berkurang setiap tahunnya dikarenakan banyak anggota Linmas yang masuk usia tua dan meninggal dunia serta tidak ada regenerasi sebab kurang diminati dari kaum muda desa karena minimnya perhatian pemerintah. Sementara rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan melebihi target setiap tahunnya dan cenderung meningkat sehingga rata-rata setiap tahun ada penambahan pos siskamling baru, sedangkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) cenderung melebihi target dan bervariasi setiap tahunnya antara 95 s/d 100%. Artinya banyak pelanggaran yang sudah terselesaikan.

Adanya ketidakseimbangan antara jumlah personil yang saat ini berjumlah 44 orang dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Semarang 95.020.674 Km² dengan cakupan wilayah serta topografi yang bervariasi sehingga jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Semarang masih jauh dari harapan. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja seharusnya adalah 351 anggota.

2.4.1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) mutlak diperlukan komitmen

dari reformasi birokrasi, hal ini menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Reformasi birokrasi sebagai tuntutan dinamika masyarakat dengan menitikberatkan pada area perubahan yang antara lain adalah: organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Selain itu dalam penataan perangkat daerah masih diperlukan komitmen, miskin struktur kaya fungsi yang menyesuaikan kebutuhan, kemampuan dan kondisi daerah sehingga peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dapat mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta memberikan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip mandiri, tertib, dan sejahtera.

Tersedianya dokumen hukum yang lengkap dan pengelolaan bahan dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Semarang, akan meningkatkan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Semarang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari masyarakat.

Dengan kegiatan sosialisasi nilai-nilai HAM kepada perusahaan di Kabupaten Semarang, diharapkan terwujud pemahaman yang sama dari masing-masing perusahaan di Kabupaten Semarang akan nilai-nilai HAM, serta pelaksanaan kegiatan perusahaan di Kabupaten Semarang diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM, dan Panitia RANHAM Kabupaten dapat melaksanakan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pembangunan hukum di Kabupaten Semarang secara umum telah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, pembangunan hukum yang dilaksanakan pada Tahun 2015 dititikberatkan untuk melaksanakan pembentukan beberapa produk hukum daerah dalam rangka penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana telah dituangkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), disamping itu masih rendahnya pemahaman sumber daya manusia dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, khususnya terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, rendahnya anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia guna mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan produk hukum dan masalah sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang belum maksimal serta sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang belum berjalan secara optimal dikarenakan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang menangani kegiatan tersebut sehingga pembangunan hukum masih menjadi perhatian yang serius di Kabupaten Semarang.

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), pelaksanaan lomba Kadarkum dan penetapan desa/kelurahan binaan untuk dibentuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, serta peningkatan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDI)

Untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, pengawasan menjadi agenda penting seperti sinergi pengawasan internal, efektivitas pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat/sosial, pengawasan legislatif dan juga pengawasan melekat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Disamping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (WASMAS/kontrol sosial) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing, yang dalam hal ini oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yaitu Inspektorat Kabupaten Semarang.

Pelaksanaan Bidang Pemerintahan umum Pemerintah Kabupaten Semarang didukung oleh 19 kecamatan untuk melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintah daerah. Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 117 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Semarang yang terdiri dari 6 (enam) bidang, antara lain Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pendidikan dan Kesehatan, Sosial dan Kesra, Pertanahan, dan Pelayanan Umum. Dari keenam bidang tersebut terdiri dari 45 (empat puluh lima) jenis kewenangan, kondisi tersebut saat ini masih perlu ada perhatian agar dapat berjalan optimal, karena belum di dukung dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas SDM yang cukup memadai.

Disamping kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum juga didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Sebagai SKPD ujung tombak pelayanan pemerintah daerah yang terdekat dengan masyarakat, keberadaan kelurahan memegang peranan yang sangat strategis dalam rangka pelayanan prima pada masyarakat. Disamping peran pokok di atas, kelurahan juga mengemban tugas melaksanakan delegasi wewenang dari Bupati berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Lurah di Kabupaten Semarang. Kondisi

kelurahan sampai saat juga masih ada beberapa kelemahan sumber daya manusia baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana serta pendanaan.

Berkaitan dengan belum Optimalnya Tindak Lanjut Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang ditindaklanjuti dengan PP No 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah menjadi landasan untuk menjalankan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Dalam pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 perlu penjelasan lebih luas dalam peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Permendagri, Perda, Perdes dan kebijakan pendukung lainnya. Dan juga perlu ada penyesuaian yang mendukung dari penjabaran teknis UU Desa jika ada Peraturan Pelaksanaan atau kebijakan lainnya yang tidak sesuai dengan penjabaran teknis UU Desa.

Beberapa hambatan implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Aspek regulasi, belum ditetapkannya Permendagri sebagai tindak lanjut UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP No 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga berdampak juga pada keterlambatan penyusunan Perda Dan Perbup di Daerah.
2. Dari aspek Sumber Daya Manusia/Aparatur Desa, banyaknya kekosongan Perangkat Desa yang belum dapat diisi karena menunggu ditetapkannya regulasi di Daerah (PERDA tentang Perangkat Desa), mengakibatkan beban penyelenggaraan Pemerintahan Desa semakin berat. Beban kerja Pemerintah Desa semakin berat, seiring semakin besarnya kewenangan dan anggaran yang diberikan kepada Desa. Adanya kekosongan Perangkat Desa menghambat kinerja Pemerintah Desa. Saat ini dari 208 Kepala Desa ada kekosongan sebanyak 23 Kepala Desa. Sedangkan dari formasi 2.571 Perangkat Desa ada kekosongan sebanyak 274 Perangkat Desa di Kabupaten Semarang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.101
Jumlah Sekdes dan Perangkat Desa

NO	JENIS JABATAN	FORMASI	TERISI	KOSONG
1	Sekretaris Desa	208	139	69
2	Kepala Urusan (Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan/Kesra)	624	576	48
3	Kepala Seksi (Keuangan Dan Umum)	416	395	21
4	Kepala Dusun	1.323	1187	136
JUMLAH		2.571	2.297	274

Sumber: BAPERMASDES, 2015

3. Aspek kapasitas Sumber Daya Manusia/Aparatur Desa, bahwa masih banyaknya perangkat desa yang belum menguasai teknologi seperti belum dapat mengoperasikan komputer. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan di Desa. UU Desa mengamanatkan adanya Sistem Informasi Desa, tanpa didukung kemampuan SDM di Desa maka implementasi Sistem Informasi Desa akan sulit dilaksanakan.
4. Selain itu pemahaman tupoksi aparatur Desa sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya masih kurang, sehingga mengakibatkan arah yang ingin dituju dalam implementasi UU Desa juga belum optimal.

Belum optimalnya pelayanan masyarakat terutama wilayah Selatan karena jauh dari pusat pemerintahan Hal ini disebabkan karena Kota Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang terletak di bagian Utara wilayah administrasi Kabupaten Semarang. Sebagai pusat pemerintahan, perkantoran yang memberikan pelayanan dasar, administrasi kependudukan maupun perizinan sebagian besar terletak di wilayah Kecamatan Ungaran Barat dan Timur yang termasuk dalam kawasan perkotaan Ungaran. Hal ini menjadi tidak efektif dan efisien bilamana warga Kabupaten Semarang yang terletak di wilayah Selatan harus menuju ke kota Ungaran untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Dari tabel dibawah bahwa jarak rata-rata 17 kantor kecamatan (dari total 19 kecamatan, tidak termasuk kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur) menuju kantor Bupati Semarang adalah 26,06 km. Jarak terjauh adalah Kantor Kecamatan Kaliwungu sejauh 49 km disusul Kantor Kecamatan Susukan sejauh 46 km. Sebanyak 11 Kantor Kecamatan berjarak lebih dari 20 km dari kantor Bupati Semarang, sebagian besar berada di wilayah Selatan Kabupaten Semarang (Kecamatan Getasan, Tengaran, Susukan, Kaliwungu, Suruh, Pabelan, Banyubiru, Jambu, Sumowono, Bringin dan Bancak). Hal ini bisa dimaklumi bila warga di wilayah Selatan bila membutuhkan pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan, memilih menuju ke wilayah terdekat seperti Kota Salatiga atau Kabupaten Boyolali.

Guna meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka Bupati Semarang telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Semarang nomor 117 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Camat di Kabupaten Semarang. Adapun urusan yang didelegasikan terdiri dari urusan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pendidikan dan Kesehatan, Sosial dan Kesra, Pertanahan, Kepegawain dan Pelayanan Umum.

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang Pemerintahan Dalam Negeri hingga Tahun 2015, sebesar 36,36% indikator telah memenuhi SPM. Indikator-indikator tersebut adalah (1) cakupan penerbitan kartu keluarga (telah mencapai 100%), (2) cakupan penerbitan kutipan akta kematian (100%), (3) cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (rasio diatas 1, yakni 1,58), dan (4) cakupan rasio petugas

perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota (rasio di atas 1, yakni 1,34).

Sementara itu, indikator-indikator bidang pemerintahan dalam negeri yang belum memenuhi SPM ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2.102
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Kabupaten Semarang 2013 - 2015 (%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	TAHUN		
			2013	2014	2015
I	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	84,68	92,85	95,70
		2. Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran	92,18	61,75	63,36
II	Pemeliharaan Ketenraman & Ketertiban Masyarakat	3. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	95,33	97,12	97,96
III	Penanggulangan Bencana Kebakaran	4. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	50,00	75,00	75,00
		5. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	136,36	71,43	59,06
		6. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	11,11	14,29	30,00
		7. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	21,05	21,05	21,05

Sumber: *Dispendukcapil, Satpol PP dan BPBD, 2015*

2.4.1.18 Ketahanan Pangan

Berkaitan dengan ketahanan pangan, berikut beberapa hal yang dapat disajikan.

1. Ketersediaan energi dan protein perkapita pada Tahun 2015 secara rata-rata sebesar 67,9% dari target yang harus dicapai yaitu 90%.
2. Penguatan cadangan pangan sebesar 101,3%. Sesuai peraturan menteri pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal (SPM) Cadangan pemerintah ditingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras. Target cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten Semarang belum dalam bentuk cadangan pangan daerah akan tetapi masih sebatas data cadangan yang ada pada masyarakat.
3. Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses Pangan dengan capaian Tahun 2015 dari target yang ditentukan yaitu 90% telah terealisasi 296,9%.
4. Dari indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan terjadi penurunan target dari tahun sebelumnya yaitu -5,8%. Hal ini disebabkan kenaikan harga sayuran, daging dan lain-lain, misalnya cabe merah dari harga Rp21.000 per kg dalam rukun waktu Januari s.d Juni harga naik menjadi Rp 55.000 per kg sedangkan harga daging dari harga Rp35.000 per kg menjadi Rp95.000,-
5. Penganekaragaman dan keamanan pangan, terdiri 2 indikator yaitu Skor PPH dan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, saat ini masih dalam

proses analisis dengan mengambil sampel 20 KK per desa, dan 10 desa per Kecamatan pada 19 Kecamatan se Kabupaten Semarang.

6. Penanganan Kerawanan Pangan

Dari 235 desa/kelurahan terdapat 89 desa/kelurahan desa miskin atau terindikasi rawan pangan pada 19 kecamatan. Dari jumlah 19 kecamatan baru 10 daerah kecamatan rawan pangan yang telah ditangani.

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang ketahanan pangan hingga Tahun 2015 sebanyak 28,57% indikator telah mencapai SPM. Indikator-indikator tersebut adalah (1) ketersediaan energi dan protein per kapita (120,96%), dan (2) ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (179,29%).

Sementara itu, indikator-indikator bidang ketahanan pangan yang belum mencapai SPM ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.103
Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang
Tahun 2012-2015

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Hasil Capaian (%)			
			2012	2013	2014	2015
Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1	Penguatan Cadangan Pangan	20,00	35,00	52,08	42,68
Distribusi dan Akses Pangan	2	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	20,00	35,00	94,07	50,22
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,00	88,20	90,10	83,40
	4	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	35,00	40,00	40,00	50,00
Penanganan Kerawanan Pangan	5	Penanganan Daerah Rawan Pangan	40,00	40,00	50,00	62,50

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, 2015

2.4.1.19 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lembaga yang memiliki peran di dalam pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Capaian kinerja dalam meningkatkan pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat di 208 desa melalui peran dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di desa secara maksimal melalui RT/RW, PKK, LKMD, Posyandu, Karang Taruna, LKMK.

Tabel 2.104
Kelompok Binaan LPM Kabupaten Semarang
Tahun 2010 - 2015

Indikator	Sat	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-rata jumlah kelompok binaan (LPM)	klpk	235	235	235	235	235	235
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	klpk	8.001	8.001	8.001	8.001	8.903	8.903
Swadaya masy thdp program pemberdayaan masyarakat (Rp. Mliyar)	Rp.	6,00	5,27	14,26	8,25	8,30	9,00
PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100
Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPERMASDES, 2015

2.4.1.20 Statistik

Data statistik mempunyai peranan penting dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dengan pembangunan disegala bidang yang makin pesat di daerah-daerah, data statistik regional terasa semakin diperlukan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sebagai data atau informasi dan sebagai sistem yang memadukan penyelenggaraan statistik serta sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data. Saat ini kebutuhan akan ketersediaan data yang relevan, akurat dan tepat waktu semakin meningkat dan ketersediaan statistik yang bermutu menjadi sangat penting, tidak hanya pada proses perencanaan dan perumusan kebijakan, ketersediaan data statistik yang berkualitas sangat berperan pada proses monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah.

Dalam kurun waktu Tahun 2010-2015 bahwa Kabupaten Semarang melalui Bappeda Kabupaten Semarang bekerja sama dengan BPS Kabupaten Semarang telah menyusun Buku Kabupaten Semarang Dalam Angka yang pada Tahun 2014 berganti judul menjadi Data Strategis Kabupaten Semarang. Selain Buku Kabupaten Semarang Dalam Angka, telah disusun juga publikasi statistik daerah lainnya, yaitu: Buku Data Strategis Kecamatan, Buku Indikator Ekonomi, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, Buku Nilai Tukar Petani dan Buku Indeks Harga Konsumen dan laju Inflasi, dan Buku PDRB Kabupaten.

Tabel 2.105
Capaian Urusan Statistik Tahun 2010 s.d 2015

INDIKATOR	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Buku Statistik Daerah	5	5	5	6	6	6
Buku PDRB	3	3	2	2	2	3

Sumber: Bappeda Kabupaten Semarang, 2015

2.4.1.23 Kearsipan

Penerapan pengelolaan arsip secara baku dari 56% pada Tahun 2010 meningkat menjadi 60% pada Tahun 2015, karena adanya penyuluhan dan bimtek kearsipan bagi SKPD dan pemerintah desa dan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yaitu bimtek pengelola kearsipan desa, sosialisasi kearsipan SKPD dan pendataan-penataan arsip.

2.4.1.24 Komunikasi dan Informatika

Jumlah jaringan komunikasi dari 44 pada Tahun 2010, menjadi 145 unit pada 2015, jumlah surat kabar nasional/lokal sebanyak 7 buah pada 2010, sama pada Tahun 2015 sebanyak 7 buah, jumlah penyiaran radio/TV lokal sebanyak 9 buah pada Tahun 2010 menjadi 10 buah pada Tahun 2015 dan website milik pemerintah daerah dari 26 sub domain pada Tahun 2010, menjadi 29 sub domain pada Tahun 2015.

Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut. Untuk bidang komunikasi dan informatika, indikator-indikator yang mencerminkan capaian SPM (100 persen) berjumlah 46,15 persen. Indikator-indikator tersebut adalah untuk pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional, yakni (1) radio, (2) media website/media online, (3) media interpersonal (sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya), (4) leaflet, (5) spanduk, dan (6) baliho.

Sementara itu, indikator-indikator bidang komunikasi dan informatika yang belum mencerminkan SPM (100%) ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2.106
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Semarang 2013 - 2015 (%)

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2013	2014	2015
Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:			
	a. Media massa:			
	- Majalah	33	33	33
	- Televisi	100	42	25
	b. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	-	25	25
	c. Media luar ruang:			
	- Buletin	-	-	-
- Booklet	-	-	-	
- Brosur	-	-	-	
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	32	32

Sumber: Bag. Humas dan Protokol SETDA dan Dishubkominfo, 2015

2.4.1.25 Perpustakaan

Jumlah perpustakaan pada Tahun 2010 sebanyak 976 unit menjadi 1.115 unit pada Tahun 2015, dengan jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 83.046 orang pada Tahun 2010 meningkat menjadi 143.345 orang pada Tahun 2015. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari 28.944 judul pada Tahun 2010 menjadi menjadi 38.786 judul Tahun 2015, dengan jumlah 5.750 eksemplar pada Tahun 2010 menjadi 73.870 eksemplar pada Tahun 2015.

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dari Tahun 2010 hingga Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.107

Capaian Indikator Kinerja Fokus Layanan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

No.	Urusan dan Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian							
1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	53.57	54.22	56.61	54.92	56.82	57.08
1.2	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB	Rp. (Juta)	867.908.82	1.030.282.20	1.115.648.90	1.217.345.72	1.385.485.30	1.543.846.37
1.3	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	Rp. (Juta)	118.860.84	127.956.10	126.659.80	147.280.92	166.432.30	179.043.23
1.4	Cakupan bina kelompok tani	%	3.03	10.00	12.00	16.59	17.85	17.05
2	Kehutanan							
2.1	Rehabilitasi Hutan dan lahan kritis	%	15.50	24.20	70.78	70.78	37.45	17.98
2.2	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB	Rp. (Juta)	108.368.69	103.749.00	125.484.70	160.301.25	188.037.84	213.668.64
3	Energi dan Sumber Daya Alam							
3.1	Rasio ketersediaan daya listrik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No.	Urusan dan Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	95.00	82.40	99.00	99.00	99.00	99.00
3.3	Pertambangan tanpa ijin	unit	24.00	22.00	15.00	9.00	7.00	7.00
3.4	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB *)	Rp. (Juta)	14.234.41	16.293.53	17.617.91	16.306.08	17.036.60	17.419.68
3.5	Kontribusi sektor listrik, gas dan air minum terhadap PDRB *)	Rp. (Juta)	146.108.62	164.359.05	204.432.06	239.522.10	258.819.10	295.438.22
4	Pariwisata							
4.1	Kunjungan wisata	Orang	877.731.00	1.172.409.00	1.279.850.00	1.367.452.00	1.528.202.00	2.140.708
4.2	Jumlah, kelas dan jenis restoran	unit	136	156	156	160	169	167
4.3	Jumlah, kelas dan jenis penginapan/hotel	hotel	217	217	228	230	230	233
4.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Perdagangan, RM dan Akomodasi) *)	Rp. (Juta)	2.285.795.33	2.564.710.36	2.790.311.37	3.610.067.58	3.905.538.50	4.422.529.26
5	Kelautan dan Perikanan							
5.1	Produksi perikanan	ton	1.693.60	1.877.00	2.811.00	3.189.00	4.319.27	3.921.86
5.2	Produksi perikanan tangkap	ton	1.216.80	1.218.00	1.236.31	1.244.00	1.328.29	1.250.30
5.3	Konsumsi ikan	Kg/kapita	18.23	13.44	18.26	16.37	18.95	18.96

No.	Urusan dan Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.4	Cakupan binaan kelompok nelayan	kelp	32.00	38.00	36.00	40.00	30.00	24.00
5.5	Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB *)	Rp. (Juta)	18.692.88	26.322.70	23.475.30	34.686.98	32.153.35	36.464.66
6	Perdagangan							
6.1	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$ 000	361.339.26	242.222.98	315.057.52	200.528.72	266.226.94	209.812.64
6.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	29.24	29.24	85.88	131.00	160.00	166.00
7	Perindustrian							
7.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB *)	Rp. (Juta)	4.741.111.66	5.545.149.61	5.914.249.62	6.598.503.81	7.260.774.10	8.006.042.13
7.2	Pertumbuhan industri	%	3.38	5.44	2.60	2.30	1.71	3.44
7.3	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	39.30	39.30	39.30	78.60	64.08	43.82
8	Transmigrasi							
8.1	Transmigrasi swakarsa	%	31.81	-	-	-	-	
8.2	Transmigrasi umum	KK	43.00		20.00	35.00	6.00	8.00

Sumber: Bappeda Kabupaten Semarang Tahun 2015

2.4.2.1 Pertanian

Produktivitas padi dari Tahun 2010 sampai dengan 2015 cenderung naik yakni dari 53,57 meningkat menjadi 57,08. Penurunan terjadi pada Tahun 2013 yaitu 54,92 (dibandingkan dengan Tahun 2012 yaitu 56,61), penurunan ini diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan hama padi yang menyebabkan kerusakan padi. Sedangkan kecenderungan peningkatan produktivitas padi karena berbagai upaya antara lain Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi yang menerapkan sistem teknis yang tepat disesuaikan dengan kondisi setempat, penggunaan benih bermutu, penerapan pemupukan berimbang, pengendalian OPT, penanganan pasca panen dan perbaikan infrastruktur.

Produksi pertanian yang mengalami kenaikan diantaranya padi, jagung, kedelai dan kacang tanah sedangkan ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan dikarenakan banyak petani beralih ke tanaman yang lain dan yang lebih menguntungkan. Petani masih mengharapkan bantuan pupuk non subsidi untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan.

Komoditas hortikultura sayur-sayuran secara umum mengalami peningkatan dari Tahun 2010-2014 antara lain bawang daun, kentang, cabe besar, cabe kecil, tomat dan buncis. Sedangkan komoditas yang mengalami tren penurunan antara lain kubis dan yang diakibatkan curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan kerusakan produksi komoditas sayuran.

Komoditas tanaman hias yang mengalami kenaikan produksi dikarenakan meningkatnya permintaan pasar antara lain krisant pada Tahun 2010 sebanyak 19.341.700 tangkai melonjak di Tahun 2014 sebanyak 136.143.750 tangkai dan mawar sebanyak 6.019.298 tangkai di Tahun 2010 meningkat menjadi 17.522.250 tangkai di Tahun 2014. Sedangkan komoditas gladiol, anggrek, sedap malam dan leather leaf produksinya menurun karena tren pasar atau permintaan pasar yang sedang menurun.

Dari Tahun 2010-2014 produksi tanaman buah-buahan secara umum mengalami peningkatan antara lain alpukat, mangga, rambutan, durian, pisang, salak dan nangka, sedangkan kelengkeng dan manggis mengalami fluktuasi produksi yang naik turun. Penurunan produksi tersebut diakibatkan oleh kegagalan proses pembungaan akibat intensitas curah hujan yang tinggi.

Untuk komoditas tanaman biofarmaka pada 2010 hingga 2014 relatif stabil namun yang cenderung menurun antara lain jahe, kencur, kunyit. Sedangkan produksi yang cenderung naik antara lain temulawak, laos dan kapulago. Secara umum penurunan komoditas di bidang pertanian antara lain diakibatkan adanya hujan hampir sepanjang musim, konversi lahan pertanian ke non pertanian, alih komoditas pertanian yang lebih menguntungkan dan berbagai serangan hama penyakit.

Di bidang perkebunan rata-rata semua komoditas pada dari Tahun 2010 sampai dengan 2015 juga relatif stabil seperti kelapa, kopi, tembakau dan aren. Beberapa komoditas tersebut relatif tidak mengalami perbedaan produksi yang berarti. Saat ini upaya peremajaan tanaman untuk tanaman yang kurang produktif terus dilakukan dan butuh waktu untuk bisa berproduksi lagi.

Sementara itu tanaman cengkeh, kapok, karet, kakao dan panili sebagian besar produktivitasnya rendah dikarenakan tanaman sudah tua/tanaman rusak, sehingga upaya yang diperlukan adalah dengan melakukan peremajaan tanaman. Selain itu dalam bidang perkebunan UPTD Mulyorejo telah melakukan upaya pembuatan bibit antara lain pelaksanaan pengelolaan kebun buah kelengkeng seluas 1 ha (100 batang).

2.4.2.2 Perikanan dan Peternakan

Perkembangan kelas kelompok dari Tahun 2010–2015 sangat dinamis berdasarkan kondisi kelompok dan parameter penilaian yang pada Tahun 2012 terdapat perubahan indikator penilaian kelas kelompok di bidang pertanian sesuai Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 168/Per/SM.170/J/11/11 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok Tani sehingga penerapan penilaian kelas kelompok perlu penyesuaian baik secara administrasi maupun kemampuan kelompok. Hal ini yang menyebabkan belum maksimalnya penilaian kelas kelompok.

Tabel. 2.108
Cakupan Bina Kelompok Tani
Perkembangan Kelas Kelompok Ternak
di Kabupaten Semarang

Indikator, Kinerja	Satuan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kelas kelompok Pemula	Klpk	603	564	658	937	855	855
Kelas kelompok Lanjut	Klpk	56	30	123	147	142	142
Kelas Kelompok Madya	Klpk	1	2	2	2	4	4
Kelas Kelompok Utama	Klpk	2	-	-	-	-	0

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang, 2015

Sedangkan untuk Tahun 2015 ini penilaian kelas kelompok sudah menggunakan parameter penilaian yang baru sesuai pedoman pembinaan kelompok tani yaitu Permentan No. 82/Permentan/OT.140/8/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gapoktan.

Berdasarkan pedoman pembinaan kelompok tani tersebut maka mulai Tahun 2014 perkembangan Kelas Kelompok Ternak di Kabupaten Semarang sudah mengacu pada peraturan yang baru dimana parameter yang dipergunakan lebih banyak dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sehingga memungkinkan kelompok yang sudah berkembang lama namun tidak menggunakan teknologi akan mendapat nilai yang rendah, begitu seterusnya. Menyikapi hal tersebut maka pembinaan penyuluh kepada kelompok akan terus dilakukan guna meningkatkan perkembangan kelompok.

Pada penilaian kelas kelompok dengan parameter baru ini untuk kelompok perikanan terdapat perubahan kelas, yang semula terdapat 4 (empat) kelas kelompok yaitu pemula, lanjut, madya dan utama, dengan parameter baru hanya terdapat 3 (tiga) kelas kelompok yaitu pemula, madya dan utama. Perkembangan kelas kelompok perikanan sangat dinamis dimana banyak bermunculan kelompok-kelompok baru, seiring dengan banyaknya bantuan benih ikan ke masyarakat dalam rangka pengembangan UPR (Unit Pembenihan Rakyat).

Selain itu dengan adanya parameter baru untuk penilaian kelas kelompok terdapat banyak perubahan kelas kelompok, dimana kelas kelompok lanjut cenderung berubah menjadi kelas kelompok madya. Dengan parameter baru untuk kelas kelompok utama, tidak ada kelompok yang memenuhi persyaratan parameter yang ditentukan untuk penilaian kelas kelompok ini.

Untuk capaian indikator kinerja populasi, dari Hasil Sensus Pertanian 2013 secara umum populasi ternak di Kabupaten Semarang mengalami penurunan. Ternak sapi (sapi potong dan sapi perah) dan kerbau berdasarkan hasil sensus pertanian Tahun 2013 secara nasional mengalami penurunan, sedangkan untuk Kabupaten Semarang mengalami penurunan sebesar 20,74%. Hal ini disebabkan karena harga ternak tinggi sehingga petani menjual ternak yang dipelihara, namun hasil penjualan ternak tidak dibelikan ternak kembali, karena harga ternak di pasaran tidak stabil dan cenderung fluktuatif serta adanya berita tentang isu import sehingga petani khawatir harga akan turun dan merugi. Selain permasalahan harga, peternak juga banyak yang menjual ternaknya untuk membayar kredit perbankan (KKPE dan KUPS), hal ini dikarenakan manajemen yang kurang baik, sehingga petani terpaksa menjual ternaknya untuk pembayaran pinjaman yang telah jatuh tempo untuk pelunasan.

Populasi babi mengalami penurunan dari Tahun 2010-2015 disebabkan karena beberapa perusahaan banyak yang tidak operasional (menutup usahanya) karena terkendala biaya perijinan yang dirasakan berat bagi peternak, sedangkan untuk perusahaan yang masih beroperasi, jumlah populasi dalam kandang juga berkurang, karena biaya operasional yang cukup tinggi.

Populasi unggas (ayam petelur dan puyuh) juga mengalami penurunan dari Tahun 2010-2015 dikarenakan biaya produksi untuk beternak unggas tersebut yang tidak sebanding dengan harga jual telur sehingga para peternak tidak menambah populasinya dan ada beberapa peternak burung puyuh dan perusahaan ayam petelur yang menutup usahanya. Penurunan jumlah populasi unggas (ayam petelur dan burung puyuh) juga mempengaruhi produksi telurnya. Sedangkan untuk ternak ayam buras dan itik mengalami penurunan karena terjadi penyakit AI dan ND sehingga banyak terjadi kematian pada unggas tersebut. Populasi ternak ayam broiler dari Tahun 2010-2015 mengalami penurunan karena banyak peternakan ayam broiler yang menutup usahanya, karena tingginya biaya produksi.

Produksi daging, baik daging sapi, kambing maupun domba mengalami peningkatan meskipun kenaikannya sedikit, karena terdapat pemotongan ternak yang tidak tercatat, serta pemotongan di luar RPH.

Pelayanan kesehatan hewan dilaksanakan berupa kegiatan vaksinasi ternak, pengobatan ternak dan pemeriksaan penyakit ternak. Hasil pelaksanaan kegiatan dari Tahun 2010-2015 sangat dinamis menyesuaikan dengan anggaran, permintaan masyarakat untuk pelayanan tersebut. Untuk pelayanan tersebut didukung tidak hanya dari dana APBD Kabupaten Semarang, namun juga berasal dari Dana APBN, APBD Propinsi Jawa Tengah dan Swadaya dari petugas pelayanan kesehatan hewan. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan sudah meningkat.

Kegiatan pemeriksaan sampel baik susu, pada Tahun 2010-2015 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas bahan pangan asal hewan (susu) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) serta layak dikonsumsi. Selain itu juga menunjukkan pembinaan yang dilakukan ke masyarakat terkait pengawasan dan pemantauan pangan asal hewan mendapat respon yang positif dari masyarakat. Kondisi ini sangat menguntungkan karena akan menjamin ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH secara berkelanjutan. Untuk pemeriksaan sampel daging dari Tahun 2010-2015 cenderung tetap. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa produk pangan asal hewan yang beredar di masyarakat sudah mulai memenuhi standar hygiene sanitasi yang ditetapkan. Namun pengawasan dan pemantauan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan pangan asal ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Secara umum hasil pemeriksaan kualitas pangan asal hewan (daging dan susu) dan uji residu dan mikroba sudah baik, dan hanya sedikit yang ditemukan adanya indikasi penambahan bahan lain ke dalam produk asal hewan tersebut. Kondisi tersebut disikapi pemerintah Kabupaten Semarang dengan terus melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan peredaran pangan asal hewan di masyarakat.

2.4.2.3 Kehutanan

Kabupaten Semarang mempunyai luas wilayah kurang lebih 95.020,67 Ha dimana diantaranya 28.442,46 ha atau 29,93% merupakan lahan hutan yang terdiri atas 12.707,96 Ha hutan negara dan 15.613,10 Ha adalah hutan rakyat yang tersebar di 19 kecamatan. Dari lahan hutan rakyat tersebut terdapat luasan 6.245 Ha berupa lahan kritis dan harus segera ditangani.

Keberhasilan penanganan pengurangan kerusakan hutan dan lahan kritis tersebut terlihat dari realisasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis yaitu dengan melakukan kegiatan penanaman tanaman keras seluas 1.125 Ha dari luas total lahan kritis seluas 6.245 Ha sehingga diperoleh prosentasi sebesar 17,98 %. Pada Tahun 2015 kabupaten Semarang melalui Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan telah melaksanakan penanaman yang tersebar di kecamatan sebanyak 1.125 Ha melalui kegiatan DAK 220 Ha, kegiatan KBR 320 Ha, kegiatan bansos 140 Ha, kegiatan APBD 20 Ha dan kegiatan secara swadaya 425 Ha.

Dalam upaya menyediakan bibit kayu-kayuan (tanaman keras) untuk gerakan penghijauan di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan penyediaan bibit unggul melalui Kebun Bibit Rakyat dengan kapasitas

bibit siap salur sebanyak 320.000 batang dari 8 unit dan melalui UPTD Perbibitan Tanaman Kalongan dengan produksi tahun ini lebih kurang 42.500 batang. Potensi Hutan di Kabupaten Semarang terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.109
Potensi Hutan Tahun 2010-2015

Uraian (Ha)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hutan Rakyat	15.734,50	16.059,50	16.059,50	14.596,31	15.412,85	15.412,85
Hutan Produksi	7.611,80	7.611,80	7.611,80	7.611,80	7.611,80	7.611,80
Hutan Lindung	1.593,01	1.593,01	1.593,01	1.593,01	1.593,01	1.593,01
Cagar Alam	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Sumber Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, 2015

Terjadi penurunan atau kenaikan jumlah luasan area kehutanan karena banyak faktor kehidupan masyarakat terkait dengan kebutuhan yang harus di penuhi salah satunya adalah masih banyak terjadi erosi hutan rakyat yang harus ditangani dengan pengarahan/penyuluhan kepada masyarakat agar tidak merusak hutan. Dari data tersebut diatas banyak mengalami penurunan terjadi karena luas hutan rakyat masih banyak penebangan pohon usia muda itu terjadi didasari karena didesak kebutuhan keluarga untuk biaya rumah tangga dan lain sebagainya.

2.4.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Usaha pertambangan mineral di wilayah Kabupaten Semarang memiliki potensi yang cukup besar yaitu pertambangan batuan (batu andesit dan sirtu) dan pertambangan mineral bukan logam (lempung dan bentonit). Namun karena masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, mengakibatkan pada beberapa lokasi pertambangan terdapat masalah kerusakan lingkungan akibat penambangan liar (tidak berijin). Untuk itu upaya pengelolaan dan pengendaliannya perlu terus ditingkatkan.

Kegiatan PETI bersifat sporadis/insidental sesuai dengan dinamika pembangunan, namun berdasarkan data PETI lama sudah tidak ada kegiatan aktif pertambangan. Untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah dilokasi penambangan liar yang dapat menimbulkan dampak lingkungan secara luas, maka penutupan kegiatan penambangan tanpa ijin akan terus dilakukan.

2.4.2.4 Pariwisata

Jumlah kunjungan wisata pada Tahun 2014 sebanyak 1.528.202 wisatawan, keadaan sampai dengan Tahun 2015 mencapai 2.140.708 wisatawan. Capaian kunjungan wisata sampai dengan Tahun 2015 melebihi target karena adanya kegiatan promosi bersama dengan pelaku pariwisata yaitu biro perjalanan dan

pengelola obyek wisata swasta serta informasi pariwisata melalui media cetak dan media elektronik.

Target restoran dan rumah makan sebanyak 200 unit realisasi sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 167 unit, belum tercapainya target jumlah restoran dan rumah makan disebabkan karena perkembangan jumlah rumah makan (Usaha Jasa Pariwisata) tergantung pada permintaan pasar.

Jumlah hotel/penginapan sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 233 hotel terdapat penambahan 3 hotel dari realisasi Tahun 2014, belum tercapainya target untuk Tahun 2015 disebabkan karena adanya kebijakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Semarang nomor 53 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pembatasan Pendirian Hotel Non Bintang (Melati), Karaoke dan Panti Uap di Kawasan Kecamatan Bandungan dan sekitarnya.

2.4.2.5 Kelautan dan Perikanan

2.4.2.5.1 Produksi Perikanan

Capaian indikator kinerja produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dari Tahun 2010 s.d 2014 dan dilihat dari target Tahun 2015, produksi perikanan budidaya telah mencapai target yang ditetapkan. Secara umum pada perikanan budidaya banyak mengalami kendala antara lain permasalahan yang terjadi pada kelompok perikanan pada umumnya adalah keterbatasan sarana prasarana produksi, belum memiliki manajemen usaha yang baik, kualitas produk masih rendah, serta pengetahuan SDM masih rendah sehingga daya saing produk kurang. Selain itu persoalan utama pada perikanan budidaya adalah tingginya harga pakan ikan sehingga menurunkan keuntungan pembudidaya.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan antara lain gencar dilaksanakan peningkatan daya dukung sumber daya ikan di Rawapening melalui penebaran benih di perairan umum termasuk di kawasan Rawapening

Tabel.2.110
Perkembangan Produksi Perikanan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah produksi benih UPR	ekor	36.290.580	65.353.500	52.723.000	66.040.100	66.053.800	57.476.510
Jumlah produksi benih ikan hias	ekor	523.800	1.978.255	3.320.291	3.827.755	3.317.790	1.357.615
Jumlah BBI	unit	2	2	2	2	2	2
Jumlah produksi benih BBI	ekor	1.302.942	865.500	1.600.000	2.149.950	2.097.645	1.520.493
Produksi ikan di kolam	ton	1.200,10	1.249,00	2.023,00	2.378,37	3.216,43	2.704,39
Produksi ikan di karamba apung	ton	115,40	177,30	206,80	216,47	448,41	486,63
Produksi ikan di karamba tancap	ton	324,10	450,60	581,96	594,41	654,40	730,84

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang, 2015

Produksi benih ikan baik di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) maupun BBI pada Tahun 2010-2015 mengalami peningkatan karena banyaknya UPR yang di masyarakat, seiring dengan banyaknya bantuan benih ke masyarakat. Jumlah BBI (Balai Benih Ikan) yang dikelola Dinas Peternakan dan Perikanan sampai dengan Tahun 2015 berjumlah 2 unit yaitu BBI Siwarak dan BBI Kebowan. Produksi perikanan budidaya yang terdiri dari produksi ikan di kolam, karamba dan karamba tancap, dari Tahun 2010-2015 telah mengalami peningkatan meskipun dalam pelaksanaan banyak menemui kendala antara lain harga pakan ikan yang tinggi sehingga produksi perikanan tidak bisa optimal serta karena terbatasnya SDM perikanan sehingga manajemen perikanan kurang baik dan banyak benih ikan yang mati.

2.4.2.5.2 Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan juga sudah mengalami peningkatan dari Tahun 2010-2015, dimana kondisi terakhir sudah menunjukkan pencapaian target RPJMD 2015. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Semarang pada akhir Tahun 2015 sudah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dari lokal.

2.4.2.5.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan binaan kelompok nelayan dari Tahun 2010-2015 mengalami kondisi yang dinamis, yang tergantung dari anggaran yang tersedia untuk pembinaan kelompok. selain itu terdapat beberapa kelompok nelayan tidak aktif melaksanakan kegiatan, meskipun pembinaan kepada kelompok nelayan dilaksanakan secara berkelanjutan

2.4.2.5.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Capaian indicator kinerja kunci untuk produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari Tahun 2010 sd 2014 dan dilihat dari target capaian 2015, produksi perikanan tangkap telah mencapai target RPJMD 2015. Upaya yang telah dilakukan antara lain gencar dilaksanakan peningkatan daya dukung sumber daya ikan di Rawapening melalui penebaran benih di perairan umum termasuk di kawasan Rawapening.

2.4.2.6. Perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB menempati peringkat keempat sektor penyumbang PDRB Kabupaten Semarang sesudah sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor pertanian dan kehutanan, atau menyumbang sebesar 10,35% dari PDRB Kabupaten Semarang Menurut kategori-Sub Kategori, berdasar Harga Berlaku dan pemberi kontribusi terbesar ke-3 pada PDRB Kabupaten Semarang Menurut Kategori-Sub-Kategori pada Tahun 2015.

2.4.2.6.1 Ekspor Bersih Perdagangan

Kegiatan ekspor-impor di kabupaten Semarang didominasi tekstil dan produk turunannya, yaitu konveksi dan garmen. Tahun 2010-2015, ekspor bersih di Kabupaten Semarang menunjukkan angka yang fluktuatif. Dalam US \$ 000, Tahun 2010 jumlah ekspor bersih adalah US \$ 361.339,26 turun menjadi US \$ 209.812,64 pada Tahun 2015.

Fluktuasi angka ekspor ini ini dipengaruhi oleh:

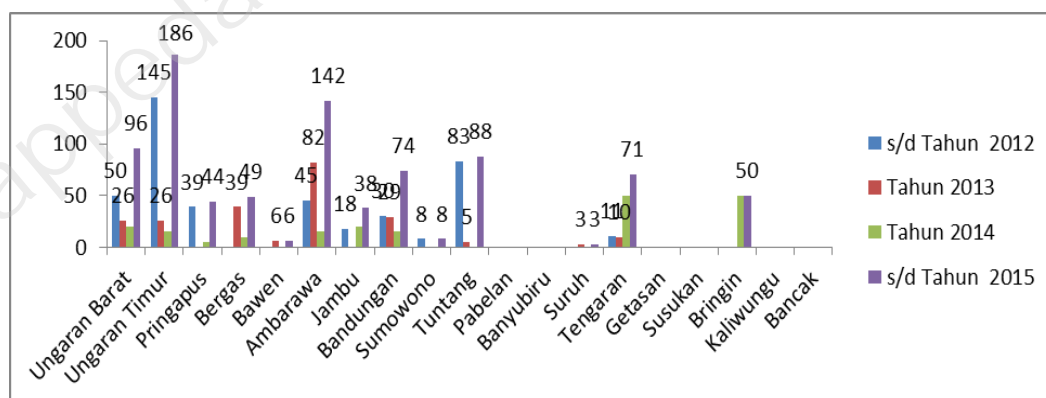
1. Kondisi perekonomian negara tujuan ekspor;
2. Nilai Kurs mata uang;
3. Adanya iklim usaha yang kondusif di dalam negeri;
4. Keunggulan bersaing produk lokal terhadap produk sejenis di pasaran internasional;
5. Kebutuhan bahan baku/aksesoris produk dan peralatan impor oleh perusahaan di Kabupaten Semarang.

2.4.2.6.2 Cakupan Bina Kelompok pedagang/usaha informal

Pembinaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal difokuskan pada pembinaan kelompok Pedagang Kaki Lima. Hal ini mengingat besarnya kontribusi sektor informal PKL dalam mendukung penyediaan lapangan pekerjaan secara mandiri.

Pembinaan PKL diharapkan akan dapat mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Semarang. Pembinaan kelompok PKL dilaksanakan melalui Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Gambar 2.13
Sebaran Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Tahun 2012-2015



Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kabupaten Semarang, 2015

Capaian bina kelompok pedagang/usaha informal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena adanya dukungan penuh untuk penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan pertumbuhan ekonomi lokal yang cukup dinamis sehingga memberi ruang tumbuh bagi pedagang kaki lima.

Pada Tahun 2014 capaian cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Semarang adalah sebanyak 855 pelaku usaha.

2.4.2.7 Perindustrian

Pertumbuhan industri diukur dari penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Data yang ada menunjukkan bahwa trend pertumbuhan industry cenderung mengalami penurunan. Tahun 2011 pertumbuhan industri adalah 5,44%, Tahun 2012 menjadi 2,48%, Tahun 2013 2,3% dan pertumbuhan Tahun 2014 sebesar 1,71, meski pada Tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan dari Tahun 2014, yaitu 3,44%.

Kurangnya pencapaian target pertumbuhan industry diantaranya disebabkan adanya persyaratan pengajuan TDI yang harus melampirkan IMB, HO dan UKL/UPL, sehingga banyak pengusaha Industri Kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan dalam mengurus TDI.

Di akhir tahun RPJMD 2010-2015 ditargetkan, indikator cakupan bina kelompok pengrajin mampu tercapai sebesar 56%. Pada Tahun 2015, realisasi jumlah kelompok pengrajin yang terbina telah mencapai 64,08%. Pencapaian ini dikarenakan karena sudah terbentuknya kelompok-kelompok IKM per komoditas dalam klaster sehingga memudahkan dalam akses pembinaan.

2.4.2.8 Ketransmigrasian

Transmigrasi swakarsa dari Tahun 2010-2015 target tidak tercapai, hal ini disebabkan peruntukan untuk lahan transmigrasi swakarsa sering bermasalah karena sistem beli lahan di lokasi penempatan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dan terbatasnya APBD untuk *sharing* dengan pemerintah daerah penerima transmigrasi. Sedangkan Transmigrasi umum dari tahun ke tahun semakin sedikit karena penetapan kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat.

2.5 Aspek Daya Saing Daerah

2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.5.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita

Komponen PDRB menurut pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang mempunyai kontribusi sekitar 60% terhadap nilai PDRB baik atas dasar berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada Tahun 2010 konsumsi rumah tangga sebesar 60,84% dan nilainya berfluktuasi selama lima tahun terakhir dan mencapai sebesar 60,19% di Tahun 2014. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga pada Tahun 2010 atas dasar berlaku sebesar Rp13.124,05 milyar meningkat sebesar Rp20.154,62 milyar pada Tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 53,57%.

Tabel 2.111
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Berlaku
Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014 (Rp Milyar)

KONSUMSI PENGLUARAN	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Konsumsi Rumah Tangga	13.124,05	14.486,78	15.984,07	18.165,52	20.154,62
a. Makanan	5.135,62	5.526,43	5.937,66	6.631,53	7.107,07
b. Non Makanan	7.988,43	8.960,35	10.046,41	11.534,00	13.047,55

KONSUMSI PENGELUARAN	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
PDRB	12.572,14	24.440,56	27.023,98	29.892,40	33.482,97

Sumber: BAPPEDA Bekerjasama dengan BPS Kabupaten Semarang, 2011-2015

Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kabupaten Semarang.

2.5.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita

Sejak Tahun 2010 konsumsi non makanan memiliki proporsi yang lebih besar daripada konsumsi makanan. Kontribusi makanan Atas Dasar Harga Berlaku mempunyai kontribusi 39,13% di Tahun 2010 dan mengalami penurunan di Tahun 2014 menjadi 32,26%. Sedangkan Kontribusi non makanan pada Tahun 2010 sebesar 60,87% dan naik menjadi 64,49% di Tahun 2014. Pola konsumsi non makanan yang lebih besar dibanding konsumsi makanan ini menunjukkan kalau tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Semarang termasuk tinggi

Tabel 2.112
Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Terhadap
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Semarang
Tahun 2010-2014 (Persen)

KONSUMSI PENGELUARAN	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Atas Dasar Harga Berlaku					
a. Makanan	39,13	38,15	37,15	36,51	32,26
b. Non Makanan	60,87	61,85	62,85	63,49	64,49
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Atas Dasar Harga Konstan					
c. Makanan	39,13	37,50	35,50	34,62	33,70
d. Non Makanan	60,87	62,50	64,06	65,38	66,30
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BAPPEDA Bekerjasama dengan BPS Kabupaten Semarang, 2011-2015

2.5.1.3 Nilai Tukar Petani

Sektor pertanian memiliki peranan penting terhadap perekonomian baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan sumber devisa, bahan baku industri, sumber bioenergi, pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan secara tidak langsung berupa keterkaitan *input-output* antar industri, konsumsi dan investasi.

Pembangunan di segala bidang merupakan arah dan tujuan kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang. Adapun hakikat sosial dari pembangunan itu sendiri adalah upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Mengingat 60% penduduk Kabupaten Semarang masih tinggal di pedesaan dan sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka sangat diharapkan sektor pertanian

merupakan motor penggerak pertumbuhan yang mampu meningkatkan pendapatan para petani dan sekaligus mengentaskan kemiskinan.

Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk khususnya petani adalah Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai tingkat hubungan antara hasil pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang dikonsumsi dan dibeli petani. Semakin tinggi nilai NTP maka relatif semakin mampu untuk mempunyai kebutuhan daya beli petani guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi pertaniannya. Adapun perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2012-2015 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.113
Nilai Tukar Petani Kabupaten Semarang
Tahun 2012 - 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015
Indeks yang Diterima Petani (It)	101,13	101,36	102,48	120,48
Indeks yang Dibayar Petani (Ib)	100,88	100,86	101,45	119,41
Nilai Tukar Petani (NTP) (%)	100,25	100,49	100,98	100,89

Sumber: BAPPEDA Bekerjasama dengan BPS Kabupaten Semarang, 2012-2015

Dengan melihat perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Semarang dari Tahun 2012-2015 dapat disimpulkan bahwa rata-rata petani di Kabupaten Semarang masih mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi pertaniannya.

2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Berkaitan dengan dibukanya jalan tol ruas Ungaran-Bawen membawa dampak yang cukup signifikan. Makin mudahnya akses dari ibukota Provinsi Jawa Tengah menuju wilayah Kabupaten Semarang membuat wilayah ini makin menarik bagi para investor. Keberadaan jalan tol Ungaran-Bawen cukup berperan dalam mengurangi volume lalu lintas karena sebagian kendaraan sudah beralih menggunakan jalan tol. Namun demikian dampak pembukaan ruas jalan tol Ungaran-Bawen masih juga berpengaruh terhadap kemacetan di wilayah Kota Ungaran terutama pada akses keluar masuk pintu tol di depan kantor DPRD Kabupaten Semarang (jalan Diponegoro) dan pada Jalan Hasyim Ashari (depan SDIT/SMPIT Assalamah). Pada sisi lain, pergerakan lokal juga cukup tinggi terutama pada simpul kegiatan industri dan perdagangan. Kapasitas beberapa jalan yang ada sudah tidak mampu lagi untuk menampung volume lalu lintas. Kemacetan masih sering terjadi pada lokasi industri, di Pasar Babadan dan Pasar Karangjati, ruas jalan Bawen-Jambu dengan titik kemacetan di Pasar Projo Ambarawa, ruas jalan Bawen-Salatiga dengan titik kemacetan pada area Tuntang dan Rawa Pening, daerah Tengaran dan Pringapus. Dari segi penataan ruang, terjadi alih fungsi lahan yang cukup banyak akibat aktivitas pembangunan jalan

tol tersebut khususnya lahan pertanian. Berkurangnya lahan pertanian dan ruang terbuka hijau lainnya ini berakibat meningkatnya suhu udara sehingga mengurangi kenyamanan di area perkotaan Ungaran.

Arus investasi yang cukup besar di wilayah Kabupaten Semarang juga perlu diantisipasi. Dari sisi pariwisata, adanya rencana pembangunan Jateng Park di wilayah hutan Penggaron akan berakibat memicu pertumbuhan ekonomi khususnya di Kecamatan Ungaran Timur. Untuk mendukung destinasi wisata tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang dapat memberikan dukungan khususnya penyediaan infrastruktur seperti jalan yang layak menuju lokasi tersebut. Pelaku usaha kecil dan menengah juga dapat menangkap peluang ini untuk memasarkan produk-produknya di sekitar wilayah tersebut. Kebutuhan akomodasi bagi pengunjung destinasi wisata juga patut menjadi perhatian bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam penyediaannya. Penataan kawasan wisata yang sudah ada seperti Bandungan agar menjadi lebih menarik perlu dilakukan karena sudah sering terjadi kemacetan karena jalan yang sempit dan aktivitas Pasar Bandungan yang meluber sampai ke bahu jalan. Dengan penataan kembali diharapkan destinasi wisata menjadi lebih menarik dan lebih memberikan kenyamanan pada para pengunjungnya.

Arus investasi terkait industri yang cukup tinggi, menjadi isu yang perlu diperhatikan karena kawasan peruntukan industri yang telah disediakan belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya dukungan infrastruktur jalan raya. Masuknya investasi terkait industri, salah satunya dipengaruhi perpindahan aktivitas industri dari Jakarta maupun Semarang. Kabupaten Semarang dipandang menarik dari sisi investasi karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah dan dari harga lahan dan biaya tenaga kerja relatif masih terjangkau. Kabupaten Semarang sebagai kawasan penyangga Kota Semarang juga berpotensi untuk pengembangan kawasan permukiman. Beberapa pengembang mulai mengembangkan baik permukiman mewah maupun permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Adanya jalan tol membuat semakin pendek waktu yang dibutuhkan dari Kota Semarang menuju Kabupaten Semarang, disisi lain harga rumah yang makin mahal di Kota Semarang membuat peminat hunian di Kabupaten Semarang semakin meningkat. Kebutuhan yang meningkat untuk kawasan industri dan permukiman ini perlu diantisipasi dengan peninjauan kembali terhadap Perda RTRW Kabupaten Semarang.

2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.5.3.1 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Tabel 2.114
Jumlah Lembaga Keuangan Di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

URAIAN	SAT	TAHUN					
		2010	2010	2012	2013	2014	2015
Jumlah Perbankan							
1 Milik Pemerintah							
a. BRI	Unit	1	1	1	1	1	1
b. BNI	Unit		1	1	1	1	1
c. BANK MANDIRI	Unit		1	1	1	1	1
d. BTN	Unit	1	1	1	1	1	1
e. BTPN	Unit	1	1	1	1	1	1
f. Bank Syari'ah Mandiri	Unit	1	1	1	1	1	1
g. BNI SYARIAH	Unit	1	1	1	1	1	1
h. BRI SYARIAH	Unit	1	1	1	1	1	1
2 Swasta Nasional		-	-	-	-	-	-
- BCA	Unit	1	1	1	1	1	1
- Lippo Bank	Unit	1	1	1	1	1	1
- Panin Bank	Unit	1	1	1	1	1	1
- NISP	Unit	1	1	1	1	1	1
- Danamon	Unit	1	1	1	1	1	1
- Mu'amalat	Unit	1	1	1	1	1	1
- BII	Unit	1	1	1	1	1	1
3. Swasta Asing			-	-	-	-	-
4. Milik Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	-
1. BPD Jateng Cab. Ungaran	Unit	1	1	1	1	1	1
2. PD BPR BKK Ungaran	Unit	1	1	1	1	1	1
Lembaga Non Perbankan			-	-	-	-	-
1 Modal Ventura		-	-	-	-	-	-
2 Lembaga Keu. Mikro							
a. LKD	Unit	208	208	208	208	208	208
b. LKK	Unit	27	27	27	27	27	27
c. PD BPR BKK	Unit	1	1	1	1	1	1
d. PD BKK	Unit	1	1	1	1	1	1
e. BPR	Unit	19	19	19	19	19	19
f. BKPD	Unit	1	1	1	1	1	1
g. BKD	Unit	15	15	15	15	15	15
h. LPED	Unit	1	1	1	1	1	1
i. PNPM Perkotaan	Unit	3	3	3	3	3	3
j. PNPM Pedesaan	Unit	16	16	16	16	16	16
k. UEDSP	Unit	1	1	1	1	1	1
l. KUBE	Unit	15	15	15	15	15	15
m. PUAP	Unit	187	187	187	187	187	187

Sumber: Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Semarang, 2010-2015

Dalam mendukung iklim investasi di Kabupaten Semarang bahwa lembaga perbankan dan lembaga non perbankan yang tumbuh di Kabupaten Semarang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian. Hal ini merupakan salah satu peluang investasi yang perlu ditingkatkan.

2.5.3.2 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran dan Penginapan/Hotel

Tabel 2.115
Jumlah Restoran, Penginapan/Hotel
Di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

Jumlah	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Restoran/Rumah Makan (unit)	136	156	156	160	168	167
Hotel/Penginapan (hotel)	217	217	228	230	230	233

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang, 2010-2015

- 1) Perkembangan restoran dan rumah makan selama lima tahun belum mengalami peningkatan disebabkan karena perkembangan jumlah rumah makan (Usaha Jasa Pariwisata) tergantung pada permintaan pasar.
- 2) Jumlah hotel/penginapan di Kabupaten Semarang berkembang sedikit hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Semarang Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pembatasan Pendirian Hotel Non Bintang (Melati), Karaoke dan Panti Uap di Kawasan Kecamatan Bandungan dan sekitarnya.

2.5.3.4 Jumlah Demo

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas dan demo merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada.

Tabel 2.116
Jumlah Demo Dan Kriminalitas
Di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Kriminalitas (kasus)	477	563	558	497	625	604
Jumlah Demo (kejadian)	16	11	34	18	20	15

Sumber: POLRES, KESBANGPOL, 2015

Seperti halnya di daerah lain di wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Semarang mempunyai angka kriminalitas yang relatif masih tinggi. Jumlah gangguan kriminalitas di Kabupaten Semarang selama Tahun 2010-2015 cukup tinggi.

Pencurian kendaraan roda 2 merupakan jenis kriminalitas yang paling banyak terjadi di Kabupaten Semarang. Tahun 2015 pencurian kendaraan roda 2

mencapai 113 kejadian serta ada pencurian dengan pemberatan sebanyak 111 kejadian, penipuan juga banyak tercatat sebanyak 61 kejadian.

Respon warga terhadap kriminalitas ini diantisipasi dengan penjagaan keamanan mandiri secara spontan dalam bentuk penutupan akses ke kawasan permukiman, selain itu digalakkan siskamling sebagai wujud penjagaan keamanan kepada masyarakat.

2.5.3.5 Lama Proses Perijinan

Proses perijinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perijinan. Sesuai dengan Peraturan Daerah maka telah diatur standar waktu pelayanan perijinan yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.117
Standar Waktu Pelayanan Perijinan

PENGURUSAN PERIJINAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ket
Lama Pengurusan Perijinan							
a. SIUP: Surat Izin Usaha Perdagangan	3 hr	3 hr	3 hr	3 hr	7 hr	3 hr	
b. TDP: Tanda Daftar Perusahaan	3 hr	3 hr	3 hr	3 hr	7 hr	3 hr	
c. IUI: Izin Usaha Industri	14 hr	14 hr	14 hr	14 hr	7 hr	14 hr	
d. TDI: Tanda Daftar Industri	14 hr	14 hr	14 hr	14 hr	7 hr	14 hr	
e. IMB: Izin Mendirikan Bandungan	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	7 hr	5 hr	Setelah kunjungan
f. HO: Izin Gangguan	14 hr	14 hr	14 hr	14 hr	7 hr	14 hr	Setelah kunjungan
Jumlah Persyaratan Dokumen Perijinan							
a. SIUP: Surat Izin Usaha Perdagangan							
b. TDP: Tanda Daftar Perusahaan	1. PO = 8 2. CV = 11 3. PT = 13 4. Kop = 13	1. PO = 8 2. CV = 11 3. PT = 13 4. Kop = 13	1. PO = 8 2. CV = 1 3. PT = 13 4. Kop = 13	1. PO = 8 2. CV = 11 3. PT = 13 4. Kop = 13	1. PO = 8 2. CV = 11 3. PT = 13 4. Kop = 13	1. PO = 8 2. CV = 11 3. PT = 13 4. Kop = 13	
c. IUI: Izin Usaha Industri	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	10 dok	10 dok	
d. TDI: Tanda Daftar Industri	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	9 dok	9 dok	
e. IMB: Izin Mendirikan Bandungan	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	12 dok	12 dok	
f. HO: Izin Gangguna					14 dok	13 dok	

PENGURUSAN PERIJINAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ket
Biaya Resmi Perijinan							
a. SIUP: Surat Izin Usaha Perdagangan	Sesuai Perda	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
b. TDP: Tanda Daftar Perusahaan	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
c. IUI: Izin Usaha Industri	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
d. TDI: Tanda Daftar Industri	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
e. IMB: Izin Mendirikan Bandungan	Sesuai Perda	Sesuai Perda	Sesuai Perda	Sesuai Perda	Sesuai Perda	Sesuai Perda	Sesuai Perda
f. HO: Izin Gangguan	Sesuai Perda	Sesuai Perda	Sesuai Perda	Sesuai Perda	Sesuai Perda	Sesuai Perda	Sesuai Perda

Sumber: *BPMPTSP Kabupaten Semarang, 2015*

Keterangan: Sesuai Surat Bupati Nomor 180/000240, Retribusi untuk SIUP diberhentikan mulai tanggal 1 Januari 2011

Bahwa semua izin yang dikelola oleh BPMPTSP sangat terkait dengan iklim investasi namun demikian kinerja pelayanan perijinan terpadu satu pintu lewat BPMPTSP senantiasa selalu diperbaiki secara berkelanjutan melalui penyederhanaan prosedur dan pelayanan secara cepat dan *on-line* guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.5.3.6 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel 2.118

Jumlah Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

Jumlah	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pajak	7	9	10	12	12	11
Retribusi	38	38	21	21	21	22

Sumber: *DPPKAD Kabupaten Semarang, 2015*

Jumlah pajak dari Tahun 2010 ke 2011 mengalami penambahan karena masuknya Pajak Air Tanah dan BPHTB, sedangkan di Tahun berikutnya bertambah lagi dengan masuknya Pajak Sarang Burung Walet di Tahun 2012 sehingga menjadi 10 jenis. Untuk Tahun 2013 dan 2014 bertambah Pajak Pedesaan dan Perkotaan sehingga menjadi 12 jenis. Tapi di Tahun 2015 ini untuk Pajak Pedesaan dan Pekotaan digabung menjadi satu sehingga jenis pajaknya menjadi 11.

Sejak Tahun 2010 jenis retribusi berkurang karena adanya Undang-undang no. 28 Tahun 2010. Yang berkurang antara lain:

- a. Ijin TPMPB
- b. Ijin Usaha Angkutan Orang
- c. Ijin Usaha Angkutan Barang
- d. Ijin Tebang dan Angkutan Kayu
- e. Ijin Penggunaan Jalan
- f. Penerbitan SIUP

- g. Ijin Pembuangan Limbah
- h. Ijin Air Bawah Tanah
- i. Ijin Usaha Tempat Parkir
- j. Sertifikat Bengkel
- k. Ijin Usaha Jasa Konstruksi
- l. Ijin Usaha Peternakan
- m. Tanda Daftar Perusahaan
- n. Ijin Usaha Penggilingan Padi
- o. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah

Sedangkan pada Tahun 2015 jenis retribusi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena ijin mempekerjakan orang asing.

Macam retribusi antara lain:

- a. Retibusi Umum
 - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2. Retribusi Pelayanan Sampah / Kebersihan
 - 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil
 - 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman Pengabuan Mayat
 - 5. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
 - 6. Retribusi Pelayanan Pasar
 - 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Retribusi Jasa Usaha
 - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - 3. Retribusi Terminal
 - 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 5. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - 7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi Perijinan Tertentu
 - 1. Retribusi Ijin Pendirian Bangunan
 - 2. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - 3. Retribusi Ijin Gangguan
 - 4. Retribusi Ijin Trayek
 - 5. Retribusi Ijin Usaha Perikanan
 - 6. Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

2.4.3.7 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Dalam mendukung iklim usaha sebagai acuan kebijakan dalam mendorong perekonomian, Kabupaten Semarang telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yakni:

- 1. Perda Kabupaten Semarang No. 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

2. Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Smg Tahun 2011-2031
3. Perda No.8 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
4. Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
5. Perda No.7 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
6. Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga
7. perda TDUP No 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Semarang
8. Perda Kabupaten Semarang No 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9. Perda Kabupaten Semarang No 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Waralaba
10. Perda Kabupaten Semarang No 9 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan
11. Perbup No. 40 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan & Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di Kabupaten Semarang
12. Perbup No. 94 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal Di Kabupaten Semarang
13. Perbup No. 111 Tahun 2012 Tentang Penunjukan KPMPT Kabupaten Semarang Sebagai Pelaksana SPIPISE di Kabupaten Semarang
14. Perbup No. 153 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi / Keterangan Lokasi Di Kabupaten Semarang
15. Perbup No. 119 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan & Toko Modern
16. Perbup No 92 Tahun 2013 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Semarang Tahun 2013-2015
17. Perbup No 72 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian, Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi IMB dan IG di Kabupaten Semarang

2.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.5.4.1 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Semarang dari Tahun 2010 hingga 2012 terus mengalami peningkatan. Namun demikian rasio tersebut pada periode 2013-2015 mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Setelah meningkat sebesar 22,28 persen pada Tahun 2013, rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Semarang turun sebesar 12,40 persen pada Tahun 2014 sebelum akhirnya naik ke level yang sama pada Tahun 2013 di Tahun 2015.

2.5.4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. TPAK di Kabupaten Semarang pada periode 2010-2015 secara rata-rata mencapai 87,88 persen. Angka

ini cukup tinggi dimana dari 100 penduduk berusia 15 tahun ke atas sebanyak 87 orang tersedia untuk memproduksi.

2.5.4.3 Perkiraan Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun menunjukkan harmonis atau tidaknya hubungan industrial antara pihak pengusaha dan pihak pekerja. Data menunjukkan bahwa angka sengketa pengusaha pekerja menurun menjadi 3,99 pada Tahun 2015 setelah sebelumnya mencapai 8,37 pada Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Semarang semakin harmonis.

2.5.4.4 Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Semarang semakin meningkat. Sebelumnya, pencari kerja yang ditempatkan hanya berjumlah 13,02 persen pada Tahun 2010 kemudian mencapai 82,66 persen pada Tahun 2015. Hal ini mencerminkan bahwa supply tenaga kerja dari sektor rumah tangga sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang diminta oleh dunia kerja.

2.5.4.5 Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan perlindungan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram bagi tenaga kerja sehingga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja. Selama enam tahun terakhir, dimulai dari Tahun 2010 sebesar 55 persen, Kabupaten Semarang terus menunjukkan peningkatan pada angka keselamatan dan perlindungan. Angka tersebut mencapai 75,94 persen pada Tahun 2015. Data tersebut menjelaskan bahwa suasana kerja di Kabupaten Semarang semakin kondusif bagi para tenaga kerja.

Tabel 2.119
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang
Tahun 2010-2015

Indikator		Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio penduduk yg bekerja	51,45	52,19	53,46	65,30	57,27	65,93
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	76,11	96,20	96,83	95,43	75,34	87,40
3	Perkiraan angka sengketa pengusaha pekerja/ Tahun	5,58	8,37	7,10	5,96	3,51	3,99
4	Pencari kerja yg ditempatkan	13,02	17,47	83,74	70,69	69,10	82,66
5	Keselamatan dan perlindungan	55,00	60,00	60,00	62,65	70,22	75,94

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, 2015

2.5.4.6 Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio Lulusan S1/S2/S3 dapat digunakan untuk menilai apakah suatu daerah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Semakin tinggi rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap total penduduk, semakin maju daerah yang bersangkutan. Negara-negara maju memiliki Rasio 0,4. Berdasarkan Rasio Lulusan

S1/S2/S3, Kabupaten Semarang dikategorikan sebagai daerah yang sedang berkembang oleh karena Rasio Lulusan S1/S2/S3 adalah 0,03 persen dari penduduk Kabupaten Semarang.

Tabel 2.120
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah lulusan S1	30.098	28.981	30.180	28.012	27.846
Jumlah lulusan S2	2.097	1.982	2.006	1.709	1.701
Jumlah lulusan S3	22	30	33	35	37
Jumlah lulusan S1/S2/S3	32.217	30.993	32.219	29.756	29.584
Jumlah penduduk	1.051.593	992.759	983.529	989.399	990.101
Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2011-2015

2.5.4.7 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk menunjukkan apakah suatu daerah tergolong daerah yang maju atau daerah yang berkembang. Semakin rendah persentase rasio ketergantungan, semakin rendah biaya yang ditanggung oleh penduduk berusia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Semarang pada periode 2011-2015 masih lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata rasio ketergantungan negara-negara maju (OECD) yang diperkirakan mencapai 0,59 pada Tahun 2025 dan dari rata-rata rasio ketergantungan dunia yang diperkirakan mencapai 0,52 pada tahun yang sama. Dengan demikian, perekonomian Kabupaten Semarang tergolong perekonomian yang cukup maju dari sisi Rasio Ketergantungan.

Tabel 2.121
Rasio Ketergantungan Kabupaten Semarang
Tahun 2011- 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	235.724	236.968	173.556	115.276	225.433
Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	76.555	73.632	76.614	33.317	68.231
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	312.279	310.600	250.170	148.593	293.664
Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	739.314	682.159	733.359	347.198	696.437
Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,42	0,46	0,34	0,43	0,42

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Semarang, 2011-201

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2010 – 2015

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Perkembangan realisasi APBD selama lima tahun sebelumnya akan memberikan gambaran kemampuan penerimaan dan pengeluaran daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah pada APBD Kabupaten Semarang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, terdiri dari: (1) Pajak Daerah; (2)Retribusi Daerah; (3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4)lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana Perimbangan Kabupaten Semarang terdiri dari: (1)Dana Alokasi Umum (DAU); (2) Dana Bagi Hasil Pajak/ Sumber Daya Alam; (3)Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Semarang antara tahun 2011 sampai dengan 2015 terdiri dari: (1)Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi; (2)Dana penyesuaian khususnya tunjangan kependidikan; (3)Bantuan Keuangan dari pemerintah Provinsi; (4)Dana Desa yang baru masuk dalam APBD pada tahun 2014; (5)Dana desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah; (6) Dana Insentif Daerah.

Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Semarang ditampilkan pada tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2011-2015 (Rupiah)

URAIAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Pertumbuhan Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN DAERAH	1,099,476,750,251.00	1,258,074,319,884.31	1,373,357,844,713.00	1,527,679,177,622.00	1,677,158,224,319.00	11.15
Pendapatan asli daerah	133,198,913,306.00	156,104,007,119.31	215,679,554,472.00	248,213,019,938.00	278,851,900,607.00	20.70
Pajak daerah	39,433,225,418.00	47,192,969,403.00	82,603,475,216.00	85,236,216,371.00	95,576,297,169.00	27.51
Retribusi daerah	66,260,009,503.00	27,368,212,072.00	28,353,829,274.00	22,217,858,666.00	24,311,244,992.00	(16.83)
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3,568,435,564.00	7,570,260,388.00	8,193,157,136.00	5,957,795,241.00	7,938,204,622.00	31.58
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	23,937,242,821.00	73,972,565,256.31	96,529,092,846.00	134,801,149,660.00	151,026,153,824.00	72.80
Dana perimbangan	681,282,975,038.00	809,788,381,997.00	879,109,713,026.00	955,995,669,272.00	952,250,967,517.00	8.94
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	44,424,496,038.00	50,779,598,997.00	41,391,323,026.00	39,852,319,272.00	34,923,732,517.00	(5.07)
Dana alokasi umum	567,856,479,000.00	691,271,583,000.00	778,604,920,000.00	848,736,010,000.00	876,672,925,000.00	11.67
Dana alokasi khusus (fisik dan Non Fisik)	69,002,000,000.00	67,737,200,000.00	59,113,470,000.00	67,407,340,000.00	40,654,310,000.00	(10.06)

URAIAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Pertumbuhan Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	284,994,861,907.00	292,181,930,768.00	278,568,577,215.00	323,470,488,412.00	446,055,356,195.00	12.97
Hibah					1,508,827,580.00	
Dana darurat						
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	56,430,884,715.00	71,820,784,768.00	80,987,773,921.00	104,432,238,412.00	127,017,174,876.00	22.65
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	142,292,228,000.00	134,226,163,000.00	179,511,614,000.00	172,713,810,000.00	233,216,215,000.00	14.83
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	73,659,337,192.00	67,002,415,000.00	18,060,644,294.00	43,321,215,000.00	26,470,432,739.00	4.72
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan PPD	12,592,357,000.00					
Sumbangan dari Pihak Ketiga	20,055,000.00	25,540,000.00	8,545,000.00	3,225,000.00	1,755,000.00	(36.76)
Pendapatan Dana Insentif daerah		19,107,028,000.00		3,000,000,000.00		(100.00)
Dana Desa dari APBN					57,840,951,000.00	

Sumber: DPPKAD tahun 2016, audited

Tabel 3.1 di atas menampilkan pendapatan daerah dan rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, beserta rincian sumber-sumber penerimaannya.

Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD mengalami pertumbuhan rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar 20,70 persen. Peningkatan PAD pada tahun 2011 dan tahun 2013 dipengaruhi oleh kebijakan keuangan pemerintah yang memindahkan penerimaan BPHTB dan PBB menjadi *pajak daerah*. Pada tahun 2012 juga ditetapkan kebijakan daerah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Ungaran dan RSUD Ambarawa, sehingga mempengaruhi struktur *pendapatan retribusi* daerah karena bergeser ke lain-lain PAD yang sah. Pertumbuhan pada tahun 2012 dan 2013 khususnya pada *penerimaan laba BUMD* mengalami peningkatan yang disebabkan adanya setoran laba PDAM.

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada tabel 3.1 di atas, menunjukkan bahwa realisasinya secara kumulatif mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir sebesar 8,94 persen, sebagian besar disumbang dari peningkatan DAU, disisi lain Dana Bagi Hasil dan DAK mengalami pertumbuhan negatif.

Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam mengalami penurunan seiring dengan pengalihan BPHTB dan PBB menjadi pajak daerah mulai tahun 2012, pada komponen Dana Bagi Hasil terdapat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan rata-rata 14,15 persen, penerimaan terbesar disumbang oleh Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan yang bersifat alokatif untuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi juga mengalami pertumbuhan positif sepanjang lima tahun terakhir.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah pada tahun 2011 sampai dengan 2015 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, realisasinya sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2011-2015 (Rupiah)

URAIAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	P rata-rata
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA DAERAH	1,042,026,783,589.32	1,215,522,162,545.52	1,333,537,783,262.07	1,505,315,320,115.25	1,669,408,310,158.47	13.08
Belanja Tidak Langsung	652,191,283,107.32	742,773,505,069.88	803,779,368,214.00	855,998,500,490.02	1,050,235,589,557.87	9.53
Belanja Pegawai	576,025,785,481.00	668,218,123,564.00	709,552,103,984.00	780,567,690,951.00	855,052,699,241.47	10.73
Belanja Bunga	9,766,612.00	7,156,139.00	5,652,576.00	2,040,112.00	2,575,501.00	(37.22)
Belanja Subsidi	108,000,000.00	70,500,000.00	-			(67.36)
Belanja Hibah	25,182,164,000.00	25,621,117,500.00	34,158,865,554.00	13,977,043,420.00	29,620,059,397.00	(8.01)
Belanja bantuan sosial	13,339,992,645.00	10,660,579,866.88	6,730,575,000.00	7,161,792,500.00	735,550,000.00	(16.85)
Belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa dan Balai Cagar Budaya	172,225,000.00	172,225,000.00	172,225,000.00	172,225,000.00	11,925,011,582.00	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Partai politik	36,414,546,519.32	36,701,224,000.00	50,670,337,100.00	53,620,412,757.02	151,415,680,836.40	14.89
Belanja Tidak terduga	938,802,850.00	1,322,579,000.00	2,489,609,000.00	497,295,750.00	1,484,013,000.00	16.36
Belanja Langsung	389,835,500,482.00	472,748,657,475.64	529,758,415,048.07	649,316,819,625.23	619,172,720,600.60	18.63
Belanja pegawai	40,781,358,830.00	30,112,993,870.00	34,181,869,191.00	22,607,320,360.00	25,140,247,594.00	(15.50)
Belanja Barang dan jasa	188,514,778,617.00	178,219,060,378.64	267,992,167,199.07	354,444,084,222.23	364,121,899,516.00	25.72
Belanja Modal	160,539,363,035.00	264,416,603,227.00	227,584,378,658.00	272,265,415,043.00	229,910,573,490.60	23.47

Sumber: DPPKAD tahun 2016, audited

Proporsi belanja sebagaimana tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan belanja langsung. Hal tersebut dipengaruhi kebijakan kenaikan gaji PNS, peningkatan alokasi tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan bagi guru PNSD, serta peningkatan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa seiring dengan meningkatnya dana perimbangan dan penerimaan pajak serta retribusi daerah. Dilihat dari rata-rata pertumbuhannya, maka belanja langsung tumbuh lebih tinggi dibandingkan belanja tidak langsung.

c. Pembiayaan daerah

Realisasi pembiayaan daerah tahun 2011 -2015 mengalami pertumbuhan positif pada komponen penerimaan pembiayaan, sebagian besar bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan rata-rata pertumbuhannya negatif.

Realisasi pembiayaan daerah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)

No	Uraian Pembiayaan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-rata pertumbuhan (%)
	PEMBIAYAAN DAERAH						
1.	Penerimaan pembiayaan	51.73	98.26	125.94	152.54	184.50	40.05
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	51.73	98.26	125.94	152.54	167.00	37.18
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	17.50	
1.3	Penerimaan Dana Bergulir	-	-	0.01	-	-	(100.00)
	Jumlah penerimaan pembiayaan	51.73	98.26	125.94	152.54	184.50	40.05
2.	Pengeluaran pembiayaan	10.92	14.99	13.26	9.24	4.52	(13.92)
2.1	Pembentukan dana cadangan	2.50	3.50	3.50	3.50	4.50	17.14
2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	8.40	9.00	9.74	5.73	-	(31.46)
2.3	Pembayaran pokok utang	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	12.50
2.4	Pembayaran utang jangka pendek	-	2.47	-	-	-	(100.00)
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	10.92	14.99	13.26	9.24	4.52	(13.92)
	Pembiayaan neto	40.81	83.27	112.69	143.31	179.99	48.03

Sumber :DPPKAD, tahun 2016, data realisasi audited

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang mengenai asset, kewajiban dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi dan atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Semarang. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Semarang yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Neraca Pemerintah Kabupaten Semarang secara terinci pada lima tahun terakhir ditampilkan pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4
Neraca Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Rata-rata pertumbuhan s.d Tahun 2014 (%)	Tahun 2015	Rata-rata pertumbuhan s.d 2015 (%)
1	ASET							
1.1	ASET LANCAR							
1.1.1	Kas	98.33	127.24	152.56	167.00	19.59		
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	98.26	124.42	149.61	149.06	15.50	168.87	14.95
	<i>a. Rekening Kasda</i>	38.26	44.42	69.61	69.06	24.01		
	<i>b. Deposito</i>	60	80	80	80	11.11		
1.1.1.2	Kas di BLUD RSUD	-	2.82	2.94	17.91	256.72	18.743	172.70
1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	0.06	-	0	0.01		0.021	106.98
1.1.1.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.01	0	0	0.02		0.007	(82.21)
	<i>Kas lainnya</i>						2.373	
1.1.1.5	Investasi Jangka Pendek							
1.1.2	Piutang	4.38	5.22	17.31	20.1	88.97		
1.1.2.1	Piutang Pajak	0.53	0.82	37.25	43.49	1504.72	49.958	1,132.26
	<i>Penyisihan piutang pajak</i>						-29.136	
	<i>Piutang pajak netto</i>						20.822	
1.1.2.2	Piutang Retribusi	3.85	4.41	0.01	0.01	-28.41	0.309	725.05
	<i>Penyisihan piutang retribusi</i>						-0.002	
	<i>Piutang retribusi (netto)</i>						0.307	
1.1.2.3	Piutang Lainnya	-	-	5.88	6.32	7.48	10.931	40.22
	<i>Penyisihan piutang lainnya</i>						-0.392	
	<i>Piutang lainnya netto</i>						10.539	
1.1.2.4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-	-25.82	-29.72	15.10		
1.1.3	Persediaan	6.25	21.56	16.65	13.26	67.28	25.192	72.95
1.1.4	Belanja Dibayar	0.56	3.75	0.78	1.22	182.28	1.751	147.59

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Rata-rata pertumbuhan s.d Tahun 2014 (%)	Tahun 2015	Rata-rata pertumbuhan s.d 2015 (%)
	Dimuka							
	Jumlah asset lancar (1)	109.53	157.77	187.31	201.58	23.46	248.627	23.43
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-			
1.2.1	Investasi Non Permanen	-	-	-	-			
1.2.1.1	Investasi Non Permanen Lainnya	9.84	11.72	12.65	15.22	15.79		
	Jumlah Investasi Non Permanen (a)	9.84	11.72	12.65	15.22	15.79		
1.2.2	Investasi Permanen	-	-	-	-			
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	42.52	62.41	41.23	51.86	12.87	51.837	9.64
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-			
	Jumlah investasi permanen (b)	42.52	62.41	41.23	51.86	12.87	51.837	9.64
	Jumlah investasi jangka panjang (2=a+b)	52.36	74.14	53.87	67.08	12.93	51.837	4.01
1.3	ASET TETAP	-	-	-	-			
1.3.1	Tanah	551.1	666.58	715.35	715.61	9.44	984.495	16.47
1.3.2	Peralatan dan Mesin	209.78	259.37	302.65	364.04	20.20	408.031	18.17
1.3.3	Gedung dan Bangunan	610.54	672.04	784.77	925.88	14.94	969.708	12.39
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	634.58	722.54	786.37	881.75	11.61	1015.931	12.51
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	50.96	59.68	63.13	68.72	10.58	65.627	6.81
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.3	14.61	25.26	0.00	34.93		
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-605.36	-661.39	-736.24	-814.11	10.38	1153.605	18.21
	Jumlah Aset tetap (3)	1,457.91	1,733.44	1,941.29	2141.89	13.74	2290.187	12.04
1.4	Dana Cadangan							
	Dana Cadangan	2.5	6	9.5	13	78.39		
	Jumlah Dana Cadangan (4)	2.5	6	9.5	13	78.39		
1.5	ASET LAINNYA	-	-	-	-			
1.5.1	Tuntutan Ganti Rugi	0.67	0.66	0.68	0.67	0.02	0.672	0.08
1.5.2	Aset Tak Berwujud	4.03	4.52	5.06	5.69	12.19	6.504	12.72
1.5.3	Aset Lain-Lain	11.42	13.43	4.22	3.94	-19.20	20.127	88.30
	Jumlah asset lainnya (5)	16.12	18.61	9.95	10.31	-9.16	23.634	25.44
	JUMLAH ASET (1+2+3+4+5)	1,638.42	1,989.95	2,201.93	2,433.86	14.21	2614.285	12.51
2	KEWAJIBAN							
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.01		0	0		0.180	
2.1.2	Utang Bunga				0			
2.1.3	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.02	0.02	0.01	0.02	16.67	0.009	(1.71)
2.1.4	Utang Kepada Pihak Ke 3	0.1	1.83	1.75	2.19	583.59		
	<i>Pendapatan dibayar dimuka</i>							

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Rata-rata pertumbuhan s.d Tahun 2014 (%)	Tahun 2015	Rata-rata pertumbuhan s.d 2015 (%)
	<i>Utang belanja</i>							
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.27	2.49	4.16	5.75	27.15	9.604	37.11
	Jumlah kewajiban jangka pendek (1)	3.4	4.34	5.91	7.96	32.84	21.047	65.73
2.2	Kewajiban Jangka Panjang							
2.2.1	Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	0.07	0.04	0.03	0.01	-44.84		
	Jumlah kewajiban jangka panjang (2)	0.07	0.04	0.03	0.01	-44.84		
	JUMLAH KEWAJIBAN (1+2)	3.47	4.38	5.94	7.97	32.01	21.047	65.02
3	EKUITAS DANA							
	EKUITAS DANA LANCAR							
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	98.26	127.24	152.56	166.99	19.62		
3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan	0.06	0	0	0.01			
3.1.3	Cadangan Piutang	4.38	5.22	17.31	20.1	88.97		
3.1.4	Cadangan Persediaan	6.25	21.56	16.65	13.26	67.28		
3.1.5	Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	0.56	3.75	0.78	1.22	182.28		
3.1.6	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-3.39	-4.34	-5.91	-7.96	32.96		
	Jumlah ekuitas dana lancar	106.12	153.43	181.4	193.62	23.18		
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI							
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	52.36	74.14	53.87	67.08	12.93		
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1,457.91	1,733.44	1,941.29	2,141.89	13.74		
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	16.12	18.61	9.95	10.31	-9.16		
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-0.07	-0.04	-0.03	-0.01	-44.84		
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (2)	1,526.33	1,826.14	2,005.09	2,219.27	13.37		
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN							
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	2.5	6	9.5	13	78.39		
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (3)	2.5	6	9.5	13	78.39		
	JUMLAH EKUITAS DANA (1+2+3)	1,634.95	1,985.57	2,195.99	2,425.89	14.17	2593.238	12.35
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,638.42	1,989.95	2,201.93	2,433.86	14.21	2614.285	12.51

Sumber :DPPKAD, tahun 2016, data realisasi audited

Data pada tabel 3.4 di atas disusun dengan menggunakan dua rata-rata pertumbuhan, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2015, dan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Hal tersebut untuk menunjukkan

bahwa pada struktur neraca tahun 2015 mengalami perubahan menjadi akuntansi berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I yang berlaku pada tahun 2015.

Tabel di atas dapat digunakan untuk melakukan analisis rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai berikut:

- a. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek. Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek. Selanjutnya quick rasio dihitung dengan membandingkan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek.
- b. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang.
- c. Rasio aktivitas digunakan adalah rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang sehingga dapat merubah piutang menjadi kas, yang dihitung dengan membandingkan jumlah hari dalam satu tahun (365 hari) dengan perputaran piutang. Rata-rata persediaan yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (yang digunakan untuk pelayanan public), dihitung dengan membandingkan jumlah hari dalam satu tahun dengan perputaran persediaan.

Hasil analisis rasio sebagaimana diuraikan di atas ditampilkan pada tabel di 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang
Tahun 2011 -2015

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
I.	RASIO LIKUIDITAS					
1.	Rasio Lancar	32.215	36.353	31.694	25.324	11.813
2.	Rasio quick	30.376	31.385	28.876	23.658	10.616
II.	RASIO SOLVABILITAS					
1.	Rasio Hutang terhadap total aset	0.002	0.002	0.003	0.003	0.0081
2.	Rasio Hutang terhadap total modal	0.001	0.002	0.003	0.003	0.0081
III.	RASIO AKTIVITAS					
1.	rata-rata umur piutang	1.504	1.392	2.994	4.465	4.579
2.	rata-rata umur persediaan	399.164	235.405	418.818	411.657	278.56

Sumber: DPPKAD, tahun 2016

Dari tabel 3.4 di atas, diketahui pada tahun 2015: (1) rasio likuiditas memperlihatkan kemampuan membayar 11 kali lebih hutang pemerintah Kabupaten Semarang dan dalam jangka pendek, kemampuan membayar hutang adalah baik; (2) Rasio Solvabilitas menunjukkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil dan berdasarkan nilai modal yang dimiliki Kabupaten Semarang pada dasarnya semakin mandiri dan tidak

tergantung pada hutang; serta (3) Rasio aktivitas menunjukkan bahwa piutang yang dimiliki Kabupaten Semarang cenderung meningkat yang berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah dan kemampuan daerah dalam mencukupi input berupa persediaan yang dimasukkan untuk menghasilkan output pelayanan publik dalam satu tahun relatif baik.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Perkembangan realisasi APBD beberapa tahun sebelum tahun rencana RPJMD, dapat memberikan gambaran pengelolaan keuangan masa lalu. Pertumbuhan pengeluaran baik belanja maupun pembiayaan juga dipengaruhi beberapa regulasi dan kebijakan pemerintah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran terhadap yang akan dianalisis pada bab ini adalah prosentase realisasi anggaran terhadap APBD dan realisasi pemenuhan belanja aparatur. Prosentase realisasi akan menunjukkan kinerja pendanaan pembangunan dan seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Semarang, secara rinci akan ditampilkan pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6
Rasio Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2011 - 2015 (%)

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
2.00	BELANJA DAERAH	92.99	91.35	89.22	92.03	89.89
2.1	Belanja Tidak Langsung	97.32	92.94	91.89	93.86	93.24
2.1.1.	Belanja Pegawai	97.14	97.52	91.45	93.76	92.29
2.1.2.	Belanja Bunga	90.40	66.24	99.99	99.96	99.98
2.1.3.	Belanja Subsidi	92.31	60.26	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	98.32	45.20	95.92	97.68	97.56
2.1.5.	Belanja bantuan sosial	99.67	67.89	97.42	94.63	86.36
2.1.6.	Belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa	100.00	100.00	100.00	100.00	99.04
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan partai politik	98.82	98.10	98.74	97.82	99.86
2.1.8.	Belanja Tidak terduga	93.88	33.82	52.77	18.75	29.74
2.2	Belanja Langsung	86.54	88.96	85.44	89.72	84.72
2.2.1	Belanja pegawai	94.69	93.46	91.71	88.00	80.43
2.2.2	Belanja Barang dan jasa	95.92	93.01	89.40	92.62	91.22
2.2.3	Belanja Modal	76.13	85.96	80.43	86.33	76.52
	Jumlah Belanja	92.99	91.35	89.22	92.03	89.89

Sumber: DPPKAD tahun 2016

Dari uraian tabel di atas beberapa jenis belanja mengalami penyerapan yang rendah, tetapi bersifat temporer, seperti realisasi belanja hibah pada tahun 2012 tersebut dipengaruhi permasalahan pada

DAK pendidikan sehingga pada tahun 2013 realisasinya meningkat kembali. Belanja subsidi pada tahun 2012 terealisasi sebesar 60,26 persen, selanjutnya pada tahun 2013 dan tahun 2014 subsidi tidak dianggarkan. Belanja subsidi beberapa tahun diberikan kepada PMI untuk pembelian kantung darah, sehingga mengurangi beban yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Seiring dengan diupayakannya tertib administrasi pengelolaan keuangan maka belanja subsidi hanya dapat diberikan kepada lembaga yang sudah diaudit. Pada belanja modal realisasi dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi peningkatan realisasi.

Penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya membutuhkan aparat pelaksana beserta pendanaan atas gaji dan fasilitas kerja yang dibutuhkan. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur yang ideal tentu akan lebih rendah dari belanja yang dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat dan pendanaan pembangunan.

Regulasi tentang pengelolaan keuangan tidak membagi secara tegas kelompok belanja aparatur dan belanja publik. Belanja gaji dan tunjangan yang diperuntukkan PNS yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan masih digabungkan sebagai belanja aparatur, meskipun kecukupan jumlah tenaga tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan.

Untuk menggambarkan pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Semarang, yang dikelompokkan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung, pada tabel 3.7 di bawah ini akan ditampilkan realisasi belanja pada tiga tahun terakhir.

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Semarang Tahun 2012-2015 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata rata pertumbuhan (%)
1	Belanja Tidak Langsung	655.06	702.49	773.72	848.40	9.01
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan	646.94	684.27	749.23	812.76	7.91
1.2	Belanja Tambahan Penghasilan	8.12	18.23	24.49	35.64	68.12
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2	Belanja Langsung	54.02	24.21	37.00	26.09	-10.61
2.1	Belanja Honorarium PNS	4.57	3.86	3.96	5.16	5.77
2.2	Belanja uang lembur	1.51	2.18	2.22	2.63	21.57
2.3	Belanja beasiswa pendidikan PNS	0.00	0.06	0.01	0.01	3351.12
2.4	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.70	2.57	4.64	3.23	6.53
2.5	belanja makan minum harian PNS	2.25	2.51	2.70	3.34	14.38
2.6	belanja pakaian dinas	0.12	1.81	1.66	0.18	431.06
2.7	belanja pemulangan pegawai	0.00	0.01	0.01	0.01	32.39

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata rata pertumbuhan (%)
2.8	belanja modal (Kantor, mobil dinas, mebelair,dll)	41.87	11.23	21.80	11.53	-8.73
	JUMLAH	709.08	726.70	810.71	874.48	7.30

Sumber : DPPKAD tahun 2016

Pada tabel 3.7 di atas menunjukkan secara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif, terutama pada belanja tidak langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan, serta belanja tambahan penghasilan PNS. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan kenaikan gaji PNS serta peningkatan dana transfer yang dialokasikan untuk tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru PNSD, juga dipengaruhi oleh kebijakan daerah menaikkan tambahan penghasilan PNSD.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran selisih pendapatan daerah dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Apabila selisih positif maka pengeluaran daerah dapat dicukupi dari penerimaan pendapatan, dan apabila terjadi selisih negatif maka harus ditutup dengan penerimaan diluar pendapatan daerah, misalnya dengan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pada Tabel 3.8 di bawah ini ditampilkan data realisasi surplus (defisit) dalam tiga tahun terakhir ini.

Tabel 3.8
Surplus (Defisit) Kabupaten Semarang
Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata rata pertumbuhan (%)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1,099.48	1,258.07	1,373.36	1,524.68	1,677.16	11.15
	Dikurangi realisasi:	-	-	-	-	-	
2.	Belanja Daerah	1,042.03	1,215.52	1,333.54	1,505.32	1,669.41	12.54
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.92	14.99	13.26	9.24	4.52	(13.92)
	Selisih	46.53	27.56	26.56	10.13	3.23	(43.59)

Sumber :DPPKAD, tahun 2016, data realisasi audited

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi selisih antara pendapatan daerah dan pengeluaran daerah berupa belanja dan pembiayaan dalam lima tahun terakhir adalah positif atau surplus.

Selanjutnya pada tabel 3.9 di bawah ini disajikan data realisasi penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan sebagai penutup defisit riil dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3.9
Penutup Defisit Kabupaten Semarang
Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata rata pertumbuhan (%)
1	SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	51.73	98.26	125.94	152.54	167.00	37.18
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	17.50	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	
6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	

Sumber :DPPKAD, tahun 2016, data realisasi audited

Dari tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa realisasi SiLPA pada lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan positif, bersumber dari pelampauan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah, yang secara rinci ditampilkan pada tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3. 10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Semarang, tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Rata rata pertumbuhan (%)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1	Jumlah SiLPA	51.73		98.26		125.94		152.54		167.00		37.18
2	Pelampauan penerimaan PAD	(6.22)	(12.02)	7.59	7.72	13.26	10.53	28.41	18.62	25.67	0.15	(115.85)
3	Pelampauan penerimaan Dana perimbangan	3.28	(52.77)	0.22	0.23	3.17	2.51	1.26	0.83	(11.20)	(0.07)	43.30
4	pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	22.60	688.89	2.82	2.87	(25.69)	(20.40)	6.90	4.52	(14.60)	(0.09)	(469.71)
5	sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	78.60	347.85	115.14	117.18	161.17	127.97	130.43	85.50	187.85	1.12	27.86
6	kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	3.40	4.33	4.38	4.46	5.94	4.72	7.97	5.22	20.99	0.13	65.45
7	kegiatan lanjutan											

Sumber :DPPKAD, tahun 2016, data realisasi audited

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat

Dalam realisasi pelaksanaan anggaran daerah, dapat dipilah dan diklasifikasikan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat, yaitu kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran wajib mengikat terdapat komponen yang secara periodik setiap tahun harus dibayar dan tidak dapat ditunda pembayarannya antara lain: (1)belaja gaji dan tunjangan; (2)belanja bunga; (3)belanja jasa kantor; (4)belanja yang diamanatkan oleh Undang-Undang seperti Alokasi Dana Desa, Belanja Bagi Hasil kepada Desa; (5)pembayaran pokok utang.

Selanjutnya pengeluaran yang merupakan prioritas utama yang secara periodic harus dibayar oleh pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas yaitu belanja pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti: (1)honorarium guru dan tenaga medis, (2)belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD, (3)belanja Jamkesda/ PBI Jaminan Kesehatan kepada penduduk miskin, serta belanja prioritas utama dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan yaitu: (1)Dana Tak Terduga untuk membiayai tanggap darurat bencana alam; (2)Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; (3)belanja asuransi untuk asset daerah; (4)belanja tenaga teknis dan outsourcing. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pemerintah Kabupaten Semarang membentuk Dana Cadangan untuk kepentingan pembiayaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015, sehingga harus menyisihkan pengeluaran dalam pengeluaran pembiayaan yang akan menjadi prioritas utama selama lima tahun.

Gambaran realisasi pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama dalam empat tahun terakhir sebagaimana tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Semarang, Tahun 2012-2015 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-rata pertumbuhan (%)
A.	Belanja Tidak Langsung	694.70	746.32	811.11	984.52	11.24
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	646.94	684.27	749.23	812.76	7.69
2	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	2.86	3.98	4.00	4.00	13.24
3	Belanja bunga	0.01	0.01	0.00	0.00	(21.38)
4	Belanja Bagi Hasil	0.17	0.17	0.17	11.93	32.85
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	35.71	49.76	52.71	150.52	36.75
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Parpol	0.91	0.91	0.91	0.90	(0.54)
8	Belanja Tak Terduga	1.32	2.49	0.50	1.48	24.90
9	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	6.78	4.73	3.59	2.94	(25.47)
B	Belanja Langsung	124.10	144.27	186.90	209.18	18.82
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis (Jasa Pelayanan)	8.25	9.39	18.44	21.40	41.37
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	0.00	0.06	0.01	0.01	3,348.01
3	Belanja honor GTT/PTT, wiyata kesehatan	20.37	22.29	14.58	11.87	(15.99)

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-rata pertumbuhan (%)
4	honor PTTD	1.46	1.59	1.43	1.59	3.04
5	belanja BLUD* setara pendapatan	54.34	65.52	91.15	101.04	23.16
6	Belanja jasa kantor :	-	-	-	-	-
	Listrik, telpon, air	21.79	24.89	29.91	40.12	19.94
	belanja outsourcing	3.11	3.49	6.10	6.82	32.53
	belanja tenaga teknis	-	0.39	7.42	7.03	899.01
	belanja premi asuransi	1.22	0.93	1.72	5.63	43.48
	belanja obat-obatan	5.16	9.15	3.97	4.35	9.75
	Jamkesda/ PBI BPJS	8.40	6.57	12.17	9.31	10.89
C	Pembiayaan pengeluaran	3.51	3.52	3.51	4.52	7.41
1	pembentukan dana cadangan	3.50	3.50	3.50	4.50	7.41
2	pembayaran pokok utang	0.01	0.02	0.01	0.02	13.59
3	Penyertaan modal	9.00	9.74	5.73		(16.49)
	TOTAL	822.31	894.11	1,001.52	1,198.22	12.39

Sumber :DPPKAD, tahun 2016, data realisasi audited

Pada tabel 3.11 di atas menunjukkan pertumbuhan positif pada sebagian besar rincian pengeluaran, antara lain belanja pegawai, belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada desa, belanja jasa kantor. Beberapa hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah antara lain kenaikan gaji, pemberian tunjangan sertifikasi guru, sinergi program nasional Jaminan Kesehatan (JKN) berupa pemberian bantuan iuran kepada penduduk miskin melalui BPJS, kenaikan tariff dasar listrik. Pertumbuhan positif terhadap pengeluaran juga dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan daerah dari sektor tertentu, antara lain pengeluaran BLUD yang setara dengan penerimaan BLUD, belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil kepada desa yang dipengaruhi oleh penerimaan PAD dan dana perimbangan. Sedangkan realisasi pengeluaran yang relatif tetap adalah pengeluaran dana cadangan (karena pengeluaran pembiayaan untuk dana cadangan sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah).

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan analisis dengan proyeksi lima tahun ke depan, sebagaimana tabel 3.12

Tabel 3.12
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Tahun 2016 – 2021 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Data Tahun 2015	Pertumbuhan Rata-rata	Pertumbuhan rata-rata (olah)	Proyeksi Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
I.	Belanja Tidak Langsung	984.52	11.24	7.15	1,152.10	1,209.53	1,301.45	1,399.92	1,509.95	1,627.14
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	812.76	7.69	7.13	899.61	942.62	1,015.14	1,093.24	1,177.34	1,268.92
2	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	4.00	13.24	-	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3	Belanja bunga	0.00	(21.38)		0.00	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	11.93	32.85	9.46	12.97	14.44	15.44	16.37	18.18	20.35
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	150.52	36.75	7.22	230.99	243.94	262.33	281.78	303.78	327.22
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0.90	(0.54)	2.00	1.12	1.12	1.12	1.12	1.23	1.23

No	Uraian	Data Tahun 2015	Pertumbuhan Rata-rata	Pertumbuhan rata-rata (olah)	Proyeksi Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
7	Belanja Tak Terduga	1.48	24.90	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00
8	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.94	(25.47)	-	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42
II.	Belanja Langsung	209.18	18.82	11.25	228.55	273.07	294.85	320.01	351.41	388.06
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis (Jasa Pelayanan kesehatan)	21.40	41.37	16.47	21.56	27.36	31.16	35.48	40.39	46.00
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	0.01	3,348.01	-	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
3	Belanja honor GTT/PTT, wiyata kesehatan	11.87	(15.99)	(12.79)	26.80	26.80	22.52	18.92	15.89	13.35
4	honor PTTD	1.59	3.04	3.04	1.74	1.79	1.85	1.90	1.96	2.02
5	belanja BLUD* setara pendapatan	101.04	23.16	13.12	96.76	125.57	136.71	148.14	161.86	176.96
6	Belanja jasa kantor :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Listrik, telpon, air	40.12	19.94	10.00	44.64	49.10	54.01	59.42	65.36	71.89
	belanja outsourcing	6.82	32.53	10.00	11.40	12.54	13.80	15.18	16.69	18.36
	belanja tenaga teknis	7.03	899.01	10.00	8.21	9.03	9.93	10.92	12.01	13.21
7	belanja premi asuransi	5.63	43.48	43.48	3.56	5.11	7.34	10.53	15.11	21.68
8	belanja obat-obatan	4.35	9.75	9.75	5.70	6.25	6.86	7.53	8.27	9.08
9	Jamkesda/ PBI BPJS	9.31	10.89	13.71	8.14	9.46	10.64	11.96	13.82	15.46
III.	Pembiayaan pengeluaran	4.52	7.41	(15.87)	8.01	8.50	8.00	7.50	4.50	3.00
1	pembentukan dana cadangan	4.50	7.41	-	-	-	-	-	-	-
2	pembayaran pokok utang	0.02	13.59	-	0.01	-	-	-	-	-
3	penyertaan modal kepada BUMD (sesuai perda)	-	(16.49)	(15.84)	8.00	8.50	8.00	7.50	4.50	3.00
	TOTAL	1,198.22	12.39	7.76	1,388.67	1,491.10	1,604.30	1,727.43	1,865.86	2,018.21

Sumber: DPPKAD tahun 2016

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 pemerintah Kabupaten Semarang merencanakan pengeluaran pembiayaan prioritas utama untuk penyertaan modal kepada BUMD Kabupaten Semarang yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PDAM, Bank Jateng, dan BPR BKK.

3.3.2. Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2016- 2021

a. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pada tabel 3.13 di bawah ini proyeksi pendapatan tahun 2016 menggunakan data pendapatan yang direncanakan pada APBD. Rata-rata pertumbuhan masa lalu ditampilkan tetapi tidak sebagai dasar proyeksi, karena pada masa lalu dipengaruhi berbagai faktor kebijakan yang tidak bersifat konstan, beberapa perubahan kebijakan penempatan penerimaan dari pemerintah pusat ke dalam APBD juga mempengaruhi angka pertumbuhan. Selanjutnya ditampilkan dua kolom untuk rata-rata pertumbuhan yaitu rata-rata pertumbuhan hasil perhitungan dengan seluruh data selama lima tahun sebelumnya, serta rata-rata pertumbuhan

yang sudah diolah berdasarkan kondisi awal tahun rencana serta beberapa kebijakan yang ditetapkan.

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2016 – 2021 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015	Rata-rata pertumbuhan (%)	Rata-rata pertumbuhan olah (%)	APBD Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
1	PENDAPATAN DAERAH	1,677.16	11.15	7.91	1,869.00	2,163.21	2,263.94	2,371.66	2,544.65	2,726.41
1.1	Pendapatan asli daerah	278.85	20.70	11.63	268.96	327.73	354.31	381.84	421.14	463.49
1.1.1	Pajak daerah	95.58	27.51	12.08	96.16	115.25	124.06	132.38	149.08	169.30
1.1.2	Retribusi daerah	24.31	(16.83)	6.13	25.38	29.11	30.31	31.34	32.70	34.24
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.94	31.58	17.08	11.89	14.15	16.88	20.17	23.93	25.82
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	151.03	72.80	11.76	135.52	169.22	183.06	197.95	215.43	234.12
1.2	Dana perimbangan	952.25	8.94	10.67	1,097.48	1,500.09	1,539.09	1,583.87	1,671.53	1,765.07
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	34.92	(5.07)	3.11	43.03	44.31	46.90	48.37	50.10	50.10
1.2.2	Dana alokasi umum	876.67	11.67	3.17	968.85	967.26	1,005.85	1,041.81	1,087.32	1,131.72
1.2.3	Dana alokasi khusus (fisik dan Non Fisik)	40.65	(10.06)	97.83	85.60	488.52	486.34	493.69	534.11	583.25
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	446.06	12.97	1.63	502.56	335.39	370.54	405.95	451.98	497.86
1.3.1	Hibah	1.51			-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-			-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	127.02	22.65	12.01	135.54	154.48	172.47	189.04	214.39	238.84
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	233.22	14.83		232.22				-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	26.47	4.72	6.36	-	33.13	36.01	39.15	42.55	44.98
1.3.6	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan PPD	-	(100.00)					-	-	-
1.3.7	Sumbangan dari Pihak Ketiga	0.00	(36.76)		-	-	-	-	-	-
1.3.8	Pendapatan Dana Insentif daerah	-	(100.00)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
1.3.9	Dana Desa dari APBN	57.84		10.00	129.80	142.78	157.06	172.76	190.04	209.04

sumber: DPPKAD tahun 2016, data realisasi 2015 audited.

Rincian Proyeksi pendapatan daerah pada tabel 3.13 di atas masih mengandung unsur-unsur pendapatan tertentu yang bersifat alokatif seperti Dana ALokasi Khusus, Dana Desa, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, beberapa komponen pendapatan asli daerah yang bersifat mengikat seperti Dana Kapitasi JKN, pendapatan BLUD RSUD,serta lain-lain pendapatan daerah yang sah dari jenis penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus yang mulai tahun 2016 beralih ke jenis penerimaan DAK Non Fisik untuk Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD.

Untuk proyeksi pada total pendapatan daerah dan masing-masing kelompok pendapatan PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dihitung tidak berdasar rata-rata pertumbuhan, tetapi dihitung dari akumulasi/ penjumlahan dari jenis-jenis pendapatan pada masing-masing kelompok pendapatan daerah.

Untuk merealisasikan angka pendapatan sebagai sumber pendapatan sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah tahun 2016 sampai dengan 2021, maka dilakukan kegiatan peningkatan pendapatan daerah yang meliputi:

- 1) Optimalisasi, penyusunan dan evaluasi terhadap regulasi tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Perbaikan data potensi untuk setiap jenis obyek pajak/ retribusi daerah dengan perhitungan yang rasional dan terukur serta proyeksi yang bisa dicapai.
- 3) Sosialisasi dan publikasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah melalui media elektronik maupun media cetak.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan public sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- 5) Pemberian penghargaan kepada SKPD pengelola PAD maupun wajib pajak.
- 6) Pemberian insentif kepada petugas terkait pemungutan pajak dan retribusi.
- 7) Meningkatkan pengawasan melalui tim pengawas pajak dan retribusi dengan melibatkan pihak terkait.
- 8) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 9) Memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya.
- 10) Penggalan obyek retribusi baru.
- 11) Melakukan kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga (perbankan, swasta, badan hukum/ masyarakat).
- 12) Optimalisasi pengelolaan BUMD yang dimiliki pemerintah Kabupaten Semarang.
- 13) Sosialisasi sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah adalah sarana untuk menyediakan output kegiatan, yang diharapkan akan berfungsi mewujudkan outcome baik kegiatan maupun program. Disamping hal tersebut belanja daerah dalam prosesnya dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui transaksi-transaksi pengadaan barang maupun jasa serta pembangunan infrastruktur di daerah.

Proyeksi belanja daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2021 dengan rincian sebagaimana sebagaimana struktur belanja APBD ditampilkan pada tabel 3.14 di bawah ini.

Tabel 3.14
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2016 – 2021 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2015	Rata-Rata pertumbuhan	Rata-Rata pertumbuhan (olah)	Tahun 2016 (APBD)	Proyeksi Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
A	BELANJA DAERAH	1,669.41	13.08	6.91	1,953.94	2,163.21	2,263.94	2,371.66	2,544.65	2,726.41
1	Belanja Tidak Langsung	1,050.24	9.53	6.56	1,226.18	1,328.77	1,441.17	1,500.02	1,593.18	1,684.04
2	Belanja Pegawai	855.05	10.73	6.43	974.74	1,059.37	1,133.27	1,195.60	1,265.16	1,330.68
3	Belanja Bunga	0.00	(37.22)		0.00	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	(67.36)		-	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	29.62	(8.01)	(8.01)	3.13	2.88	2.65	2.44	2.24	2.06
6	Belanja bantuan sosial	0.74	(16.85)	(16.85)	1.24	1.03	0.86	0.71	0.59	0.49
7	Belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa	11.93	-	9.47	12.97	13.73	15.44	16.37	18.18	20.35
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pem. Desa/ lainnya	151.42	14.89	7.32	232.10	249.76	286.95	282.89	305.01	328.45
9	Belanja Tidak terduga	1.48	16.36	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
B	Belanja Langsung	619.17	18.63	7.58	727.76	834.44	822.77	871.64	951.47	1,042.38
1	Belanja pegawai	25.14	(15.50)	(15.50)	43.18	36.48	30.83	26.05	22.01	18.60
2	Belanja Barang dan jasa	364.12	25.72	1.84	363.19	345.43	294.85	320.02	351.41	387.93
3	Belanja Modal	229.91	23.47	15.27	321.39	452.53	497.09	525.57	578.04	635.85

*) sumber: data realisasi 2015, audited; proyeksi DPPKAD, dasar tahun 2016.

Pada tabel 3.14 di atas ditampilkan proyeksi belanja daerah dengan rata-rata pertumbuhan yang sudah disesuaikan dengan kondisi rencana pada tahun 2016 dan 2017 serta perkembangan kebijakan yang ada, antara lain pada belanja pegawai angka proyeksi telah memperhitungkan peralihan urusan pemerintah Kabupaten ke Provinsi maupun pusat, rata-rata PNS yang pensiun, serta moratorium PNS. Belanja bantuan sosial diproyeksikan naik dengan mempertimbangkan beberapa prioritas pembangunan direncanakan untuk menangani kemiskinan, antara lain

rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan beasiswa untuk siswa miskin.

Kebijakan yang dirumuskan untuk merencanakan belanja daerah setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan perencanaan dan penyusunan APBD.
- 2) Memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus disediakan setiap tahunnya secara periodik.
- 3) Mempedomani program prioritas daerah untuk pencapaian visi dan misi daerah sesuai kemampuan keuangan setiap tahunnya.
- 4) Memperhatikan program pendukung prioritas daerah sesuai kemampuan keuangan setiap tahunnya.
- 5) Memperhatikan efisiensi dan efektifitas belanja dengan menyesuaikan belanja langsung pegawai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, dan menekan biaya sewa fasilitas kegiatan dengan memanfaatkan asset daerah yang tersedia.
- 6) Mendukung sinkronisasi program nasional dan provinsi.
- 7) Mengutamakan konsistensi setiap tahapan perencanaan penganggaran.

c. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang dimaksud dalam proyeksi ini adalah penerimaan pembiayaan sebagai komponen penutup deficit belanja, sebagaimana tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.15
Proyeksi Penutup Defisit Kabupaten Semarang
Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Kondisi tahun 2015	Rata-rata pertumbuhan (%)	Rata-rata pertumbuhan (% diolah)	Proyeksi Tahun						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	167.00	37.18	(14.75)	187.74						
2	Pencairan dana cadangan	17.50			-	-	-	-	-	-	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-			-	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan pinjaman daerah	-			-	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-			-	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	-			-	-	-	-	-	-	-

Sumber: DPPKAD Tahun 2016, data SiLPA 2016 audited.

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam RPJMD adalah proyeksi penerimaan yang dihitung dengan menjumlahkan proyeksi pendapatan daerah lima tahun ke depan, proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan proyeksi penerimaan dana cadangan, serta proyeksi pengeluaran yang bersifat wajib, mengikat, prioritas utama sebagai unsur pengurang, sehingga akan diperoleh proyeksi kapasitas pendanaan riil yang

dapat digunakan untuk menyusun rencana program dan kegiatan, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.16 di bawah ini.

Tabel 3.16
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pendapatan	1,869.00	2,163.21	2,263.94	2,371.66	2,544.65	2,726.41
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	187.74	-	-	-	-	-
4	Total penerimaan	2,056.74	2,163.21	2,263.94	2,371.66	2,544.65	2,726.41
5	Dikurangi	-	-	-	-	-	-
6	Belanja pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	1,388.67	1,491.10	1,604.30	1,727.43	1,865.86	2,018.21
7	Kapasitas riil kemampuan keuangan	668.07	672.11	659.64	644.23	678.79	708.21

Sumber: proyeksi DPPKAD Tahun 2016

Selanjutnya dalam mengalokasikan belanja sesuai dengan kapasitas kemampuan pendanaan akan memperhatikan kebijakan belanja sebagai berikut:

- 1) Alokasi sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan untuk belanja urusan pendidikan.
- 2) Alokasi minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji, untuk belanja urusan kesehatan.
- 3) Penerimaan dari pajak daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan pajak daerah, belanja yang harus disediakan untuk layanan masyarakat yang terkait dengan perolehan pajak, serta belanja bagi hasil kepada desa sebesar 10 persen dari total penerimaan pajak daerah. Selanjutnya sisanya dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya.
- 4) Penerimaan dari retribusi daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan obyek retribusi baik fisik maupun non fisik, belanja untuk pengelolaan penerimaan retribusi, serta belanja bagi hasil kepada desa sebesar 10 persen dari total penerimaan retribusi daerah. Selanjutnya juga dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya.
- 5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas, dialokasikan sebesar proyeksi penerimaan untuk belanja penerimaan kesehatan.

- 6) Penerimaan dari Dana Alokasi Umum diprioritaskan untuk belanja pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- 7) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, serta Peraturan Menteri teknis yang terkait, juga akan memperhatikan perubahan regulasi terkait pelaksanaan maupun pencairan Dana Alokasi Khusus yang berlaku.
- 8) Penerimaan dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan dari Pemerintah Provinsi sebagian diprioritaskan untuk perbaikan/pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan sesuai jenis dana bagi hasil di dapat.
- 9) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar 50 persen dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 10) Penerimaan dari Bantuan Keuangan Provinsi dialokasikan untuk belanja berpedoman pada Peraturan Gubernur.
- 11) Penerimaan dari Dana Desa dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar proyeksi penerimaan.

Tabel 3. 17
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Semarang tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
I.	Kapasitas keuangan Daerah	2,056.74	2,163.21	2,263.94	2,371.66	2,544.65	2,726.41
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I (wajib mengikat, prioritas utama)	1,389.16	1,491.10	1,604.30	1,727.43	1,865.86	1,627.14
I.a.	Belanja Tidak Langsung						
I.b.	Belanja Langsung	228.55	273.07	294.85	320.01	351.41	388.06
I.c.	pengeluaran pembiayaan daerah	8.50	8.50	8.00	7.50	4.50	3.00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	667.58	672.11	659.64	644.23	678.79	1,099.27
II.	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	213.71	488.16	420.98	354.32	354.05	365.04
II.a.	Belanja program prioritas pembangunan	213.71	488.16	420.98	354.32	354.05	365.04
III.	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III	453.87	183.94	238.66	289.90	324.73	734.23
IIIa.	Belanja program reguler	453.87	183.94	238.66	289.90	324.73	734.23
	Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III)*	-	-	-	-	-	-

Sumber: data proyeksi DPPKAD, 2016.

Rencana penggunaan kapasitas riil pada tabel 3.17 di atas dilakukan atas dasar proyeksi rencana program yang akan direncanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan indikasi pendanaan. Pada tahap pelaksanaan tahunan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada tahun rencana serta perkembangan regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3.18
Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I,II dan III Kabupaten Semarang
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Alokasi (Rupiah)											
		Tahun 2016	%	Tahun 2017	%	Tahun 2018	%	Tahun 2019	%	Tahun 2020	%	Tahun 2021	%
1.	Prioritas I	1,389.16	67.54	1,491.10	69.33	1,604.30	70.27	1,727.43	72.84	1,865.86	73.32	1,627.14	59.681
2.	Prioritas II	213.71	10.39	420.98	19.57	354.05	15.51	354.32	14.94	354.05	13.91	365.04	13.389
3.	Prioritas III	453.87	22.07	238.66	11.10	324.73	14.22	289.90	12.22	324.73	12.76	734.23	26.930
	Total	2,056.74	100.00	2,150.74	100.00	2,283.09	100.00	2,371.66	100.00	2,544.65	100.00	2,726.41	100.000

BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kriteria yang kemudian digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan untuk memperoleh daftar panjang permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan adalah; (1) cakupan masalah yang luas; (2) permasalahan cenderung meningkat atau membesar dimasa yang akan datang dan berdampak negative; dan (3) memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak di atasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk perlu dilakukan berbagai identifikasi permasalahan pembangunan dengan menelaah capaian-capapaian pembangunan sebelumnya, permasalahan pembangunan menurut urusan yang masih dihadapi Kabupaten Semarang serta melakukan telaah terhadap berbagai kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Semarang dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun selanjutnya (2016-2021).

4.1.1 Telaah Capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025

Untuk mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam setiap 5 (lima). Sampai dengan tahun 2015, RPJMD Kabupaten Semarang memasuki RPJPD tahap II yang kemudian diterjemahkan melalui RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015. Hasil analisis terhadap pencapaian pembangunan diperlihatkan tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Capaian RPJPD Dilihat dari RPJMD Tahun 2010-2015

No	Misi RPJPD	Capaian Keberhasilan Misi RPJMD 2010-2015	Permasalahan	Capaian Keberhasilan
1.	Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat Kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kinerja pemenuhan kualitas dan/atau mutu standar pelayanan dasar pendidikan; 2. Belum optimalnya kinerja pemenuhan kualitas dan/atau mutu standar pelayanan dasar kesehatan; 3. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 4. Belum optimalnya kinerja fasilitasi penciptaan kondusivitas antara pengusaha dan pekerja; 5. Belum optimalnya kinerja fasilitasi manajemen pembinaan olah raga; serta 6. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pelayanan transmigrasi 	Capaian keberhasilan: 71,95%,
2.	Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan	Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (intanpari) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum optimalnya kinerja fasilitasi pembinaan manajemen koperasi, UMKM, BPR dan LKM; 2. Masih belum optimalnya kinerja sektor-sektor pendukung perekonomian daerah (sektor perkebunan; sektor lembaga keuangan jasa dan persewaan serta sektor pertambangan dan penggalan) dalam pembentukan PDRB; 3. Masih belum optimalnya kinerja pelayanan investasi; 4. Masih belum optimalnya kinerja pertumbuhan ekonomi; 5. Masih belum optimalnya kinerja pengentasan kemiskinan; 	Capaian keberhasilan: 50,00%

No	Misi RPJPD	Capaian Keberhasilan Misi RPJMD 2010-2015	Permasalahan	Capaian Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> 6. Masih belum optimalnya kinerja untuk mewujudkan ketahanan pangan; 7. Belum optimalnya kinerja pengelolaan lingkungan terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis; 8. Masih belum optimalnya kinerja pemenuhan jaringan listrik rumah tangga; 9. Masih belum optimalnya kinerja pengawasan dan pengendalian pertambangan 10. Masih belum optimalnya kinerja pembinaan manajemen usaha restoran dan hotel; 11. Masih belum optimalnya kinerja pembinaan manajemen usaha perikanan; 12. Masih belum optimalnya kinerja ekspor perdagangan; serta 13. Masih belum optimalnya kinerja pembinaan manajemen bagi kelompok pengrajin. 	
3.	Meningkatkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>good governance</i> didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi;	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kinerja pelayanan administrasi pemerintahan, khususnya berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan keamanan/ketertiban; 2. Belum optimalnya kinerja pengelolaan retribusi daerah; 3. Belum optimalnya kinerja pengelolaan kearsipan; 4. Belum optimalnya kinerja pelayanan informasi dan komunikasi sebagai pendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik 	Capaian keberhasilan: 51,35

No	Misi RPJPD	Capaian Keberhasilan Misi RPJMD 2010-2015	Permasalahan	Capaian Keberhasilan
4.	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah	Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kinerja pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar infrastruktur jalan dan irigasi; 2. Belum optimalnya kinerja pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar perumahan dan pemukiman; 3. Belum optimalnya kinerja penataan ruang; 4. Belum optimalnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi 	Capaian keberhasilan: 44,44%
5.	Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan	Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum optimalnya kinerja pencegahan KDRT; dan 2. Masih belum tersedianya data tenaga kerja dibawah umu 	Capaian keberhasilan: 85,71%
6.	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya	Mendorong terciptanya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kinerja pemenuhan akses air minum bagi penduduk; 2. Belum optimalnya kinerja pengelolaan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 	Capaian keberhasilan: 75,00%

4.1.2 Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib/Pilihan)

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai dimasa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Identifikasi permasalahan pembangunan terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan agar dapat menjamin diperolehnya permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, yang secara umum telah diuraikan pada Bab 2, yaitu mengidentifikasi permasalahan pada tiap urusan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap urusan, seperti dijelaskan dibawah ini.

1. Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

- (1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun masih belum terwujud;
- (2) Masih belum terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan yang berkarakter dan berkualitas belum terwujud;
- (4) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- (5) Belum optimalnya *link and match* antara sekolah menengah dengan dunia usaha dan dunia industri;
- (6) Belum optimalnya pengelolaan benda dan situs budaya sebagai aset yang berharga karena tidak adanya tempat penyimpanan benda, situs budaya berupa museum serta tidak adanya kawasan cagar budaya yang dilestarikan;
- (7) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Semarang untuk menghadapi masuknya arus globalisasi;
- (8) Belum adanya gedung kesenian yang reseprentatif;
- (9) Masih lemahnya penegakan hukum dalam rangka pelestarian aset budaya;
- (10) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembinaan prestasi kepemudaan dan olah raga;
- (11) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
- (12) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dan cakupan pelayanan perpustakaan;
- (13) Kurang sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan.

2. Urusan Kesehatan

- (1) Adanya kecenderungan meningkatnya AKI, AKB dan angka kesakitan penyakit yang disebabkan karena kepadatan penduduk tinggi, lingkungan yang kurang higienis (polusi udara, air, tanah) dan penyalahgunaan obat;

- (2) Masih belum terpenuhinya jumlah kebutuhan tenaga medis yang tersebar diseluruh RS, Puskesmas dan Pustu;
- (3) Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- (4) Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, dan Perhubungan
- (5) Masih kurangnya pembangunan infrastruktur terutama pada daerah terisolir/perbatasan;
- (6) Masih kurangnya peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- (7) Masih kurangnya kualitas dan penyediaan air bersih;
- (8) Masih kurangnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum tercipta lingkungan yang sehat;
- (9) Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (10) Belum tertatanya kawasan pariwisata;
- (11) Belum optimalnya pembangunan yang berwawasan kawasan perdesaan;
- (12) Potensi titik parkir belum tergarap secara optimal;
- (13) Kurangnya kuantitas dan kualitas trotoar yang memenuhi syarat;
- (14) Kurangnya kuantitas dan kualitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang memenuhi syarat;
- (15) Kurangnya penyediaan transportasi umum di wilayah perdesaan/perbatasan;
- (16) Kurangnya jalan yang perlu dilengkapi pagar pengaman (*guard rail*).

3. Urusan Pertanahan; Kependudukan dan Catatan Sipil; Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Statistik; dan Kearsipan

- (1) Kurang lengkapnya data mengenai status kepemilikan tanah Pemda (sebagian besar hasil tukar guling pada masa lalu tidak dilengkapi dengan dokumen administrasinya) sehingga mempersulit dalam penanganan alih fungsi dan tukar menukar tanah;
- (2) Pendaftaran ukur sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Semarang (eks bengkok) mengalami kesulitan dalam identifikasi awal baik data fisik letak tanah, perolehannya maupun alas haknya;
- (3) Masih banyaknya timbul permasalahan/konflik pertanahan dimasyarakat;
- (4) Masih banyaknya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan;
- (5) SIAK (Sistem Informasi Adminduk) sampai dengan saat ini belum terkoneksi secara *online* dengan desa/kelurahan dalam rangka mengelola Register Kependudukan;
- (6) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk kebijakan pelayanan publik pada sektor-sektor lainnya;
- (7) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan dokumen kependudukan jemput bola hingga ke tingkat desa/kelurahan;
- (8) Belum optimalnya penanganan PGOT dan anak-anak jalanan liar;
- (9) Belum optimalnya penanganan/penertiban PKL;
- (10) Masih kurangnya sosialisasi Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya;
- (11) Masih lemahnya penegakan Perda dan Perbup;

- (12) Masih belum optimalnya perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor kapasitas daya dukung SDM aparatur, kapasitas daya dukung kelembagaan organisasi perangkat daerah kapasitas daya dukung sarana dan prasarana serta daya dukung ketatalaksanaan perangkat daerah;
- (13) Belum optimalnya kerjasama daerah baik dalam skala regional, nasional maupun internasional dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (14) Belum terpeliharanya batas-batas daerah;
- (15) Masih terbatasnya ruang lingkup/cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- (16) Belum optimalnya pembinaan kelembagaan di kelurahan;
- (17) Belum terpenuhinya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sesuai dengan potensi;
- (18) Data omzet objek pajak oleh wajib pajak belum dilaporkan dengan baik;
- (19) Masih kurangnya tingkat kompetensi auditor;
- (20) Belum terlaksananya pemeriksaan reguler untuk setiap objek pemeriksaan (Obrik);
- (21) Belum optimalnya pengawasan melekat atau pengendalian internal di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan BUMD;
- (22) Masih belum tertatanya persebaran/penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memenuhi standar kompetensi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- (23) Masih belum tertatanya jabatan fungsional tertentu sesuai dengan analisis kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- (24) Kurangnya penerapan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) didesa;
- (25) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas Kepala dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa;
- (26) Masih kurang aktif dan optimalnya lembaga-lembaga perekonomian di pedesaan;
- (27) Belum optimalnya pembangunan jalan-jalan poros desa;
- (28) Masih sulitnya memperoleh dan pemutakhiran data yang valid baik pada tataran perangkat daerah maupun pada tataran desa;
- (29) Belum optimalnya kapasitas dan peran perangkat daerah serta Pemerintah Desa dalam pengelolaan arsip;
- (30) Belum adanya arsiparis disetiap perangkat daerah dan di Pemerintah Desa;
- (31) Belum tersedianya regulasi penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Semarang.

4. Urusan Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, dan Industri

- (1) Lemahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM;
- (2) Lemahnya kapasitas manajemen/pengelolaan usaha Koperasi dan UMKM baik dari sisi aspek SDM pelaku usaha, teknologi dan sarana prasarana produksi, pemasaran, kemampuan permodalan, maupun kelembagaannya;

- (3) Masih belum rendahnya daya tarik investasi yang diakibatkan oleh tingginya harga tanah dilokasi industri, kurangnya dukungan sarana dan prasarana pada zona industri, belum tersedianya akses keluar masuk jalan tol langsung menuju kawasan peruntukan industri, masih terbatasnya luasan kawasan peruntukan industri, serta belum adanya kawasan industri;
- (4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan;
- (5) Kurangnya sarana penyimpanan hasil pertanian diwilayah produksi pertanian;
- (6) Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada makanan pokok beras dan terigu, sedangkan konsumsi pangan lokal relatif rendah;
- (7) Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian;
- (8) Masih adanya wilayah yang mengalami kekeringan, terutama bila kemarau panjang;
- (9) Belum stabilnya harga produk pertanian;
- (10) banyaknya Jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) yang rusak;
- (11) Belum optimalnya pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit hewan menular strategis;
- (12) Banyaknya kelompok masyarakat petani/peternak yang belum berbadan hukum;
- (13) Belum optimalnya produksi dan produktivitas ternak;
- (14) Kurangnya sarana dan prasarana pemantauan hewan ternak;
- (15) Belum optimalnya diversifikasi usaha komoditas kehutanan;
- (16) Kurangnya infrastruktur yang mendukung sektor Pariwisata Kabupaten Semarang;
- (17) Kurangnya promosi wisata di dalam maupun di luar negeri;
- (18) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- (19) Kurangnya pengelolaan kepariwisataan yang berbasis lingkungan (EKOWISATA);
- (20) Masih terbatasnya sarana prasarana produksi, belum memiliki manajemen usaha yang baik dan kualitas produk masih rendah;
- (21) Tingginya harga pakan ikan sehingga menurunkan keuntungan pembudidaya;
- (22) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya ikan di Perairan Umum Daratan (PUD);
- (23) Kurangnya fasilitasi permodalan dari perbankan untuk sektor usaha perikanan;
- (24) Pasar yang masih mengandalkan konsumen lokal, belum mampu bersaing di tingkat antar wilayah;
- (25) Kurangnya pemahaman dan ketaatan pedagang terhadap peraturan daerah yang mengatur Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Pedagang Kaki Lima;
- (26) Adanya peredaran barang yang tidak memenuhi aspek kesehatan, tertib ukur, legalitas dan SNI;
- (27) Rendahnya jaringan pemasaran produk lokal dan kecintaan terhadap penggunaan produk dalam negeri;
- (28) Belum terjaganya kebersihan dan keamanan di kawasan usaha PKL;

- (29) Banyaknya PKL yang berdagang secara liar / tidak pada tempatnya;
- (30) Kurangnya modal pedagang kaki lima sehingga sulit mengembangkan usaha;
- (31) Lemahnya daya saing pasar tradisional / pasar rakyat;
- (32) Terjadinya kelangkaan barang kebutuhan pokok dan penting dalam masyarakat;
- (33) Terbatasnya kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha dalam pengembangan dan diversifikasi produk;
- (34) Lemahnya SDM pelaku usaha industri kecil;
- (35) Terbatasnya pemanfaatan teknologi dan sarana produksi untuk industri kecil.

5. Urusan Lingkungan Hidup

- (1) Masih kurangnya upaya mengatasi dampak perubahan iklim/pemanasan global;
- (2) Masih terjadinya kerusakan lahan dan lingkungan akibat penambangan dan alih fungsi lahan;
- (3) Menurunnya kualitas udara, air dan tanahdampak dari kegiatan industri;
- (4) Belum optimalnya upaya konservasi di danau Rawapening;
- (5) Masih kurangnya luasan ruang terbuka hijau (RTH);
- (6) Masih kurangnya pengelolaan dan pelayanan sampah;
- (7) Belum optimalnya penanganan dan penanggulangan bencana;
- (8) Masih rendahnya upaya pengelolaan SDA dan LH dalam rangka pelestarian sumber-sumber air;
- (9) Masih banyak usaha tani yang belum memperhatikan kaidah-kaidah konservasi hutan.

6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, dan Ketenagakerjaan

- (1) Kurang optimalnya peran Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR dari *CFCD (Corporate Forum For Community Development)* di Kabupaten Semarang;
- (2) Masih kurangnya kesadaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk hidup mandiri, masih senang menggantungkan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- (3) Kurangnya jumlah Balai Rehabilitasi Sosial yang dapat menampung PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar);
- (4) Belum optimalnya peran perempuan dalam bidang pembangunan dan politik;
- (5) Perlindungan, pemenuhan hak dasar perempuan dan anak masih kurang karena masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan masih banyak mempekerjakan anak dibawah umur;
- (6) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi angkatan kerja muda yang memasuki dunia kerja;
- (7) Masih rendahnya pemahaman tenaga kerja dan pelaku-pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan hubungan industrial, norma ketenagakerjaan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

4.2 Isu-Isu Strategis

4.2.1. Telaah Isu Internasional/Global, Nasional, Regional Provinsi Jawa Tengah serta Isu Lokal/Daerah Kabupaten Semarang

Penentuan isu strategis didahului dengan *review*/telaah terhadap isu-isu pembangunan baik ditingkat internasional, nasional, regional maupun isu skala lokal/daerah yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Semarang. Hasil *review*/telaahan akan menjadi landasan dalam perumusan isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Semarang secara komprehensif.

A. Isu Internasional/Global

1. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru saja meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama *Sustainable Development Goals (SDGs)*, menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir tahun 2015. Pengertian SDGs adalah sebuah dokumen yang akan menjadi salah satu acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia yang bertujuan untuk:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun;
- 2) Mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan;
- 3) Menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Target utama SDGs adalah mengentaskan kemiskinan. Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau *human development* yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau *social economic development* dan lingkungan yang besar atau *environmental development* berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

2. Masyarakat Ekonomi Asean (*Asean Economic Community/AEC*)

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi *Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, isu-isu yang dikembangkan adalah:

- 1) Pengembangan Industri Nasional, yang berfokus pada:
 - a) Pengembangan industri prioritas dalam rangka memenuhi Pasar ASEAN;
 - b) Pengembangan industri dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri;
 - c) Pengembangan industri kecil menengah;
 - d) Pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
 - e) Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 2) Pengembangan Pertanian, yang berfokus pada:
 - a) Peningkatan investasi langsung di sektor pertanian;

- b) Peningkatan akses pasar.
- 3) Pengembangan Kelautan dan Perikanan, yang berfokus pada:
 - a) Penguatan kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan;
 - b) Peningkatan daya saing kelautan dan perikanan;
 - c) Penguatan pasar dalam negeri;
 - d) Penguatan dan peningkatan pasar ekspor
- 4) Pengembangan Energi, yang berfokus pada:
 - a) Pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak);
 - b) Pengembangan sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
 - c) Peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik.
- 5) Pengembangan Infrastruktur, yang berfokus pada:
 - a) Pengembangan Infrastruktur konektivitas;
 - b) Peningkatan daya saing infrastruktur;
 - c) Pengembangan infrastruktur sistem pembayaran.
- 6) Pengembangan sistem logistik nasional
- 7) Pengembangan perbankan
- 8) Pengembangan investasi, yang berfokus pada:
 - a) Peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hukum;
 - b) Kemudahan berusaha;
 - c) Perluasan investasi;
 - d) Database investasi;
 - e) Peningkatan daya saing investasi;
 - f) Perluasan investasi perusahaan nasional di Kawasan ASEAN.
- 9) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang berfokus pada:
 - a) Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah dari sisi pembiayaan;
 - b) Pengembangan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c) Eligibilitas dan kapabilitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d) Mendorong pemberdayaan sektor riil dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 10) Pengembangan Tenaga Kerja, yang berfokus pada:
 - a) Peningkatan daya saing tenaga kerja;
 - b) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
- 11) Pengembangan Kesehatan, yang fokus pada:
 - a) Peningkatan ketahanan pasar jamu dalam negeri;
 - b) Peningkatan akses pasar.
- 12) Pengembangan Perdagangan, yang berfokus pada:
 - a) Stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri;
 - b) Peningkatan ekspor dan kerjasama internasional;
 - c) Pengkajian kebijakan perdagangan dalam negeri;
 - d) Mendukung implementasi masyarakat ekonomi ASEAN;

- e) Pengembangan fasilitas pembiayaan ekspor;
 - f) Edukasi publik mengenai masyarakat ekonomi ASEAN 2015.
- 13) Pengembangan Kepariwisata, yang fokus pada:
- a) Pengembangan destinasi wisata;
 - b) Pengembangan acara (*event*) pariwisata.
- 14) Pengembangan Kewirausahaan, yang fokus pada:
- a) Pengembangan wirausaha pemula;
 - b) Perluasan peran wirausaha muda
- 15) Pengembangan usaha berbasis temuan baru (*Invention/Resources and Development*).

B. Isu Nasional

1. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Pemerintah telah menetapkan RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada RPJPN 2005-2025. RPJMN Tahun 2015-2019 pada dasarnya merupakan manifestasi dari 9 (Sembilan) agenda Pembangunan Nasional NAWACITA dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan;
- 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistim dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan reformasi karakter bangsa;
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM pada dasarnya merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib. Dalam rangka implementasi SPM, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun sampai dengan pertengahan tahun 2013, telah diterbitkan 15 (limabelas) SPM oleh kementerian/lembaga, sebagai berikut:

- 1) Bidang Kesehatan;
- 2) Bidang Lingkungan Hidup;
- 3) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- 4) Bidang Sosial;
- 5) Bidang Perumahan Rakyat;
- 6) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 7) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 8) Bidang Pendidikan Dasar;
- 9) Bidang Pekerjaan Umum;
- 10) Bidang Ketenagakerjaan;
- 11) Bidang Ketahanan Pangan;
- 12) Bidang Komunikasi dan Informasi;
- 13) Bidang Kesenian;
- 14) Bidang Penanaman Modal; serta
- 15) Bidang Perhubungan Daerah

Berkaitan dengan Penerapan dan Pencapaian SPM di lingkungan Kabupaten Semarang telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 61 Tahun 2014. Pemerintah Daerah dalam kewenangannya memerlukan Standar Pelayanan Minimal karena beberapa alasan. Pertama, dengan munculnya SPM memungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatannya secara “lebih terukur”. Kedua, dengan SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya, sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ketiga, didasarkan kemampuan daerahnya masing-masing, maka sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumberdaya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.

C. Isu Regional Provinsi Jawa Tengah

1. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang menjadi prioritas dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pengurangan Kemiskinan
- b. Pengurangan Pengangguran
- c. Pembangunan Infrastruktur
- d. Kedaulatan Pangan
- e. Kedaulatan Energi

f. Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah

Terkait dengan isu strategis dan permasalahan mendesak RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dikaitkan dengan isu strategis dan permasalahan mendesak RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 penekanan isu strategis dan permasalahan pokok lebih kepada: (1) Pengurangan Kemiskinan dari 7,7% tahun 2016 menjadi 6,5% tahun 2021; (2) Pengurangan Pengangguran khususnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,25% pada tahun 2016 menjadi 3,5% pada tahun 2021; (3) Pembangunan Infrastruktur; (4) Kedaulatan Energi; dan (5) Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah.

Keterkaitan isu strategis dan permasalahan mendesak tersebut paling tidak dapat menjadi acuan guna pencapaian sasaran wilayah pengembangan Kedungsepur seperti yang ditargetkan sampai tahun 2021, yaitu; (1) kisaran pertumbuhan ekonomi antara 5,59-6,20%; (2) Angka Kemiskinan 9,99% dan (3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,62%. Untuk Intervensi Kabupaten Semarang dari Tahun 2016-2021 terdiri dari; (1) kisaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang sampai tahun 2021 antara 5,59% sampai 6,20%; (2) Angka Kemiskinan hingga tahun 2021 turun dari 7,7% menjadi 6,5%; dan (3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sampai tahun 2021 turun dari 4,25% menjadi 3,5%.

D. Isu Lokal/Daerah Kabupaten Semarang

1. Telaah RPJPD Tahun 2005-2025

Isu – isu strategis dan permasalahan mendesak yang menjadi prioritas dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan peluang kerja, perluasan akses pasar dan permodalan dalam rangka menanggulangi pengangguran dan kemiskinan;
- 2) Meningkatkan produktivitas usaha dan kualitas produk pertanian, industri kecil/rumah tangga serta jasa pariwisata, dalam rangka meningkatkan daya saing produk lokal;
- 3) Meningkatkan investasi swasta melalui optimalisasi pelayanan perijinan, penyediaan fasilitas usaha, pemanfaatan teknologi informasi dan perluasan akses permodalan;
- 4) Membangun sarana dan prasarana pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama fasilitas pendidikan dasar, kesehatan, permukiman dan air bersih, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Membangun infrastruktur daerah antara lain jalan, jembatan, transportasi, pasar, pengelolaan limbah dan jaringan irigasi, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah;
- 6) Meningkatkan kemandirian daerah dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kinerja aparatur, perbaikan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan, serta menyusun peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan;
- 7) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan melakukan konservasi sumber daya alam guna pencegahan terjadinya bencana

alam, melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan peran masyarakat;

- 8) Meningkatkan pemerataan pembangunan di setiap wilayah, untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap pelayanan publik dan hasil pembangunan sebagai akibat adanya perbedaan kondisi sumber daya alam, terbatasnya infrastruktur wilayah dan terkonsentrasinya investasi swasta pada wilayah tertentu;
- 9) Meningkatkan peran serta masyarakat yang berperspektif gender dalam proses pembangunan.

Bappeda Kab. Semarang (2016)

TABEL 4.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TARGET RPJPD TAHAP III

No	SASARAN POKOK RPJPD TAHAP III	INDIKATOR DAN TARGET RPJPD TAHAP III	Misi RPJMD 2016-2021 (Tahap III RPJPD)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1.	Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat Kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas SDM di segala bidang, sehingga bisa memiliki ketrampilan teknis yang dibutuhkan pasar. 2. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan terjangkau untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar di seluruh Kabupaten Semarang, sesuai kemampuan keuangan daerah. 3. Berkembangnya budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus-menerus agar masyarakat Kabupaten Semarang menguasai iptek serta mampu menghadapi persaingan global. 4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis. 5. Meningkatnya pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja. 	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Penuntasan wajib belajar 9 tahun masih belum terwujud; 2. 2. Masih belum terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan; 3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkarakter dan berkualitas belum terwujud; 4. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan; 5. Belum optimalnya <i>link and match</i> antara sekolah menengah dengan dunia usaha dan dunia industri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemenuhan kualitas dan/atau mutu standar pendidikan serta pembinaan, pemberdayaan pemuda dan olah raga 2. Belum optimalnya pemenuhan kualitas/mutu standar pelayanan kesehatan

No	SASARAN POKOK RPJPD TAHAP III	INDIKATOR DAN TARGET RPJPD TAHAP III	Misi RPJMD 2016-2021 (Tahap III RPJPD)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		6. Meningkatnya pemantapan tatanan sosial politik kemasyarakatan dan penyelenggaraan fungsi pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehat dan cerdas.		6. Belum optimalnya pengelolaan benda dan situs budaya sebagai aset yang berharga karena tidak adanya tempat penyimpanan benda, situs budaya berupa museum serta tidak adanya kawasan cagar budaya yang dilestarikan;	
				7. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Semarang untuk menghadapi masuknya arus globalisasi; 8. Belum adanya gedung kesenian yang resepresentatif; 9. Masih lemahnya penegakan hukum dalam rangka pelestarian aset budaya; 10. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembinaan prestasi kepemudaan dan olah raga; 11. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan kepemudaan dan keolahragaan; 12. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dan cakupan pelayanan perpustakaan; 13. Kurang sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan. 14. Adanya kecenderungan meningkatnya AKI, AKB dan angka kesakitan penyakit yang disebabkan karena kepadatan penduduk tinggi, lingkungan yang kurang higienis (polusi udara, air, tanah) dan penyalahgunaan obat;	

No	SASARAN POKOK RPJPD TAHAP III	INDIKATOR DAN TARGET RPJPD TAHAP III	Misi RPJMD 2016-2021 (Tahap III RPJPD)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
				15. Masih belum terpenuhinya jumlah kebutuhan tenaga medis yang tersebar diseluruh RS, Puskesmas dan Pustu;	
				16. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.	
2.	Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan	<p>1. Penggunaan bahan baku lokal dan teknologi tepat guna dalam industri yang berwawasan lingkungan.</p> <p>2. Tersedianya kawasan industri yang sesuai dengan pengembangan tata ruang dan dikelola secara efisien dengan kualitas yang lebih baik.</p> <p>3. Berkembangnya kepariwisataan untuk mendukung Sapta Pesona dan meningkatnya ragam serta kualitas produk pariwisata serta promosi wisata dengan memanfaatkan kerja sama kepariwisataan regional secara optimal.</p> <p>4. Berkembangnya usaha pertanian, peternakan, dan perikanan dengan pendekatan kewilayahan terpadu dan konsep pengembangan agribisnis.</p> <p>5. Meningkatnya pemantapan kelembagaan untuk mewujudkan petani yang kuat, dinamis, mandiri dan berdaya saing.</p>	Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (intanpari) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.	<p>1. Lemahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM;</p> <p>2. Lemahnya kapasitas manajemen/pengelolaan usaha Koperasi dan UMKM baik dari sisi aspek SDM pelaku usaha, teknologi dan sarana prasarana produksi, pemasaran, kemampuan permodalan, maupun kelembagaannya;</p> <p>3. Masih belum rendahnya daya tarik investasi yang diakibatkan oleh tingginya harga tanah dilokasi industri, kurangnya dukungan sarana dan prasarana pada zona industri, belum tersedianya akses keluar masuk jalan tol langsung menuju kawasan peruntukan industri, masih terbatasnya luasan kawasan peruntukan industri, serta belum adanya kawasan industri;</p> <p>4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan;</p> <p>5. Kurangnya sarana penyimpanan hasil pertanian diwilayah produksi pertanian;</p>	<p>1. Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan pengangguran</p> <p>2. Belum optimalnya pengelolaan potensi produk-produk unggulan daerah guna meningkatkan kualitas daya saing ekonomi daerah</p>

No	SASARAN POKOK RPJPD TAHAP III	INDIKATOR DAN TARGET RPJPD TAHAP III	Misi RPJMD 2016-2021 (Tahap III RPJPD)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
				<ul style="list-style-type: none"> 6. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada makanan pokok beras dan terigu, sedangkan konsumsi pangan lokal relatif rendah; 7. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian; 8. Masih adanya wilayah yang mengalami kekeringan, terutama bila kemarau panjang; 9. Belum stabilnya harga produk pertanian; 10. 10.banyaknya Jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) yang rusak; 11. Belum optimalnya pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit hewan menular strategis; 12. Banyaknya kelompok masyarakat petani/peternak yang belum berbadan hukum; 13. Belum optimalnya produksi dan produktivitas ternak; 14. Kurangnya sarana dan prasarana pemantauan hewan ternak; 15. Belum optimalnya diversifikasi usaha komoditas kehutanan; 16. Kurangnya infrastruktur yang mendukung sektor Pariwisata Kabupaten Semarang; 17. Kurangnya promosi wisata di dalam maupun di luar negeri; 18. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; 	

No	SASARAN POKOK RPJPD TAHAP III	INDIKATOR DAN TARGET RPJPD TAHAP III	Misi RPJMD 2016-2021 (Tahap III RPJPD)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
				<ul style="list-style-type: none"> 19. Kurangnya pengelolaan kepariwisataan yang berbasis lingkungan (EKOWISATA); 20. Masih terbatasnya sarana prasarana produksi, belum memiliki manajemen usaha yang baik dan kualitas produk masih rendah; 21. Tingginya harga pakan ikan sehingga menurunkan keuntungan pembudidaya; 22. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya ikan di Perairan Umum Daratan (PUD); 23. Kurangnya fasilitasi permodalan dari perbankan untuk sektor usaha perikanan; 24. Pasar yang masih mengandalkan konsumen lokal, belum mampu bersaing di tingkat antar wilayah; 25. Kurangnya pemahaman dan ketaatan pedagang terhadap peraturan daerah yang mengatur Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Pedagang Kaki Lima; 26. Adanya peredaran barang yang tidak memenuhi aspek kesehatan, tertib ukur, legalitas dan SNI; 27. Rendahnya jaringan pemasaran produk lokal dan kecintaan terhadap penggunaan produk dalam negeri; 28. Belum terjaganya kebersihan dan keamanan di kawasan usaha PKL; 29. Banyaknya PKL yang berdagang secara liar / tidak pada tempatnya; 	

No	SASARAN POKOK RPJPD TAHAP III	INDIKATOR DAN TARGET RPJPD TAHAP III	Misi RPJMD 2016-2021 (Tahap III RPJPD)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
				30. Kurangnya modal pedagang kaki lima sehingga sulit mengembangkan usaha; 31. Lemahnya daya saing pasar tradisional / pasar rakyat; 32. Terjadinya kelangkaan barang kebutuhan pokok dan penting dalam masyarakat; 33. Terbatasnya kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha dalam pengembangan dan diversifikasi produk; 34. Lemahnya SDM pelaku usaha industri kecil; 35. Terbatasnya pemanfaatan teknologi dan sarana produksi untuk industri kecil.	
3.	Meningkatkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	1. Meningkatnya kinerja aparatur dan kapasitas kelembagaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. 2. Meningkatnya efektivitas pengawasan aparatur pemerintah daerah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat guna menekan kebocoran anggaran.	Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>good governance</i> didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan	1. Kurang lengkapnya data mengenai status kepemilikan tanah Pemda (sebagian besar hasil tukar guling pada masa lalu tidak dilengkapi dengan dokumen administrasinya) sehingga mempersulit dalam penanganan alih fungsi dan tukar menukar tanah; 2. Pendaftaran ukur sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Semarang (eks bengkok) mengalami kesulitan dalam identifikasi awal baik data fisik letak tanah, perolehannya maupun alas haknya;	1. Belum optimalnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun tata laksana

No	SASARAN POKOK RPJPD TAHAP III	INDIKATOR DAN TARGET RPJPD TAHAP III	Misi RPJMD 2016-2021 (Tahap III RPJPD)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		<p>3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.</p> <p>4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.</p> <p>5. Berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik.</p>	teknologi informasi;	<p>3. Masih banyaknya timbul permasalahan/ konflik pertanahan dimasyarakat;</p> <p>4. Masih banyaknya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan;</p> <p>5. SIAK (Sistem Informasi Adminduk) sampai dengan saat ini belum terkoneksi secara <i>online</i> dengan desa/kelurahan dalam rangka mengelola Register Kependudukan;</p> <p>6. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk kebijakan pelayanan publik pada sektor-sektor lainnya;</p> <p>7. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan dokumen kependudukan jemput bola hingga ke tingkat desa/kelurahan;</p> <p>8. Belum optimalnya penanganan PGOT dan anak-anak jalanan liar;</p> <p>9. Belum optimalnya penanganan/ penertiban PKL;</p> <p>10. Masih kurangnya sosialisasi Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya;</p> <p>11. Masih lemahnya penegakan Perda dan Perbup;</p>	

No	SASARAN POKOK RPJPD TAHAP III	INDIKATOR DAN TARGET RPJPD TAHAP III	Misi RPJMD 2016-2021 (Tahap III RPJPD)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
				<p>12. Masih belum optimalnya perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor kapasitas daya dukung SDM aparatur, kapasitas daya dukung kelembagaan organisasi perangkat daerah kapasitas daya dukung sarana dan prasarana serta daya dukung ketatalaksanaan perangkat daerah;</p> <p>13. Belum optimalnya kerjasama daerah baik dalam skala regional, nasional maupun internasional dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>14. Belum terpeliharanya batas-batas daerah;</p> <p>15. Masih terbatasnya ruang lingkup/ cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);</p> <p>16. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan di kelurahan;</p> <p>17. Belum terpenuhinya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sesuai dengan potensi;</p> <p>18. Data omzet objek pajak oleh wajib pajak belum dilaporkan dengan baik;</p> <p>19. Masih kurangnya tingkat kompetensi auditor;</p> <p>20. Belum terlaksananya pemeriksaan reguler untuk setiap objek pemeriksaan (Obrik);</p>	

No	SASARAN POKOK RPJPD TAHAP III	INDIKATOR DAN TARGET RPJPD TAHAP III	Misi RPJMD 2016-2021 (Tahap III RPJPD)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
				<p>21. Belum optimalnya pengawasan melekat atau pengendalian internal di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan BUMD;</p> <p>22. Masih belum tertatanya persebaran/ penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memenuhi standar kompetensi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;</p> <p>23. Masih belum tertatanya jabatan fungsional tertentu sesuai dengan analisis kebutuhan organisasi perangkat daerah;</p> <p>24. Kurangnya penerapan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) didesa;</p> <p>25. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas Kepala dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>26. Masih kurang aktif dan optimalnya lembaga-lembaga perekonomian di pedesaan;</p> <p>27. Belum optimalnya pembangunan jalan-jalan poros desa;</p> <p>28. Masih sulitnya memperoleh dan pemutakhiran data yang valid baik pada tataran perangkat daerah maupun pada tataran desa;</p> <p>29. Belum optimalnya kapasitas dan peran perangkat daerah serta Pemerintah Desa dalam pengelolaan arsip;</p> <p>30. Belum adanya arsiparis di setiap perangkat daerah dan di Pemerintah Desa;</p>	

No	SASARAN POKOK RPJPD TAHAP III	INDIKATOR DAN TARGET RPJPD TAHAP III	Misi RPJMD 2016-2021 (Tahap III RPJPD)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
				31. Belum tersedianya regulasi penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Semarang.	
4.	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah	<p>1. Berkembangnya Perekonomian Kabupaten Semarang yang berlandaskan prinsip ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.</p> <p>2. Menguatnya investasi, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, yang bertumpu pada sektor industri, pertanian, dan pariwisata dengan didukung oleh sektor-sektor lainnya.</p> <p>3. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjangnya yang dibiayai oleh pemerintah atau bekerjasama dengan pihak lain.</p> <p>4. Menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.</p> <p>5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>6. Tersedianya pelayanan pendidikan yang memadai untuk seluruh masyarakat yang meliputi ketersediaan sarana prasarana, infrastruktur dan fasilitas pendidikan.</p>	Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan	<p>1. Masih kurangnya pembangunan infrastruktur terutama pada daerah terisolir/perbatasan;</p> <p>2. Masih kurangnya peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;</p> <p>3. Masih kurangnya kualitas dan penyediaan air bersih;</p> <p>4. Masih kurangnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum tercipta lingkungan yang sehat;</p> <p>5. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;</p> <p>6. Belum tertatanya kawasan pariwisata;</p>	1. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang, pembangunan infrastruktur terutama penyelesaian Ruas Tuntas, peningkatan Jalan-jalan Poros Desa dan daerah tujuan wisata, infrastruktur dasar permukiman dan penyediaan transportasi umum di wilayah perdesaan/perbatasan/daerah terpencil

No	SASARAN POKOK RPJPD TAHAP III	INDIKATOR DAN TARGET RPJPD TAHAP III	Misi RPJMD 2016-2021 (Tahap III RPJPD)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		7. Terwujudnya ketahanan pangan yang diarahkan pada keragaman sumberdaya pangan. 8. Meningkatnya daya saing produk lokal agar dapat berkompetisi dengan produk daerah/negara lain. 9. Terpenuhinya kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk menghindari tumbuhnya pemukiman kumuh.		7. Belum optimalnya pembangunan yang berwawasan kawasan perdesaan; 8. Potensi titik parkir belum tergarap secara optimal; 9. Kurangnya kuantitas dan kualitas trotoar yang memenuhi syarat; 10. Kurangnya kuantitas dan kualitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang memenuhi syarat; 11. Kurangnya penyediaan transportasi umum di wilayah perdesaan/perbatasan; 12. Kurangnya jalan yang perlu dilengkapi pagar pengaman (<i>guard rail</i>).	
5.	Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan	1. Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup. 2. Tegaknya keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan. 3. Meningkatnya keamanan, ketertiban, persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat.	Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan	1. Kurang optimalnya peran Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR dari <i>CFCD (Corporate Forum For Community Development)</i> di Kabupaten Semarang; 2. Masih kurangnya kesadaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk hidup mandiri, masih senang menggantungkan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; 3. Kurangnya jumlah Balai Rehabilitasi Sosial yang dapat menampung PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar);	1. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pembangunan yang berprespektif gender dan berorientasi pada pemenuhan hak anak

No	SASARAN POKOK RPJPD TAHAP III	INDIKATOR DAN TARGET RPJPD TAHAP III	Misi RPJMD 2016-2021 (Tahap III RPJPD)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		<p>4. Meningkatnya perlindungan dan pengayoman masyarakat dari segala tindak kejahatan.</p> <p>5. Berkurangnya kasus kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>6. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>7. Mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh kepastian hukum, penegakan HAM, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak.</p>		<p>4. Belum optimalnya peran perempuan dalam bidang pembangunan dan politik;</p> <p>5. Perlindungan, pemenuhan hak dasar perempuan dan anak masih kurang karena masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan masih banyak mempekerjakan anak dibawah umur;</p> <p>6. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi angkatan kerja muda yang memasuki dunia kerja;</p> <p>7. Masih rendahnya pemahaman tenaga kerja dan pelaku-pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>8. Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan hubungan industrial, norma ketenagakerjaan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).</p>	
6.	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya	<p>1. Berkembangnya obyek wisata alam yang berwawasan lingkungan.</p> <p>2. Meningkatnya produktivitas petani dengan pengolahan lahan pertanian dengan sistem organik.</p> <p>3. Tersedianya ruang hijau sebagai paru-paru kota.</p>	Mendorong terciptanya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga	<p>1. Masih kurangnya upaya mengatasi dampak perubahan iklim/pemanasan global;</p> <p>2. Masih terjadinya kerusakan lahan dan lingkungan akibat penambangan dan alih fungsi lahan;</p> <p>3. Menurunnya kualitas udara, air dan tanahdampak dari kegiatan industri;</p>	Semakin menurunnya kualitas daya dukung lingkungan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan

No	SASARAN POKOK RPJPD TAHAP III	INDIKATOR DAN TARGET RPJPD TAHAP III	Misi RPJMD 2016-2021 (Tahap III RPJPD)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		<p>4. Pengembangan metode pengelolaan lahan di sektor pertanian yang mengarah ke agrobisnis dengan memanfaatkan struktur tanah yang ada.</p> <p>5. Menjaga dan atau memperluas hutan lindung untuk menanggulangi daerah yang berpotensi erosi.</p> <p>6. Terciptanya ketertiban dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.</p>	kelestariannya	<p>4. Belum optimalnya upaya konservasi di danau Rawapening;</p> <p>5. Masih kurangnya luasan ruang terbuka hijau (RTH);</p> <p>6. Masih kurangnya pengelolaan dan pelayanan sampah;</p> <p>7. Belum optimalnya penanganan dan penanggulangan bencana;</p> <p>8. Masih rendahnya upaya pengelolaan SDA dan LH dalam rangka pelestarian sumber-sumber air;</p> <p>9. Masih banyak usaha tani yang belum memperhatikan kaidah-kaidah konservasi hutan.</p>	

2. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 menetapkan bahwa pengaturan sistem perwilayahan di Kabupaten Semarang dilakukan dengan cara membagi wilayah Kabupaten Semarang kedalam Satuan-Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) sebagai gabungan dari beberapa kecamatan dengan kondisi fisik, sosial dan budaya yang sama serta berada dalam satu pola aliran barang dan jangkauan pelayanan yang sama.

Dalam RTRW Tahun 2011-2031 diatur bahwa sistem perwilayahan Kabupaten Semarang dibagi ke dalam 3 (tiga) SWP yang meliputi:

- 1) **SWP-1**, yaitu kawasan yang ditetapkan menjadi bagian dari ibukota Kabupaten serta kawasan sekitarnya yang termasuk dalam jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus dengan pusat pengembangan di perkotaan Ungaran. Kecamatan-kecamatan yang tergabung di dalam SWP-1 diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman; dengan fungsi pusat SWP adalah pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala Kabupaten serta permukiman perkotaan.
- 2) **SWP-2**, yaitu kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari Kota Ambarawa meliputi Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen dan Sumowono dengan pusat pengembangan di perkotaan Ambarawa. Kecamatan-kecamatan yang tergabung di dalam SWP-2 diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, perikanan, serta pertahanan dan keamanan; dengan fungsi pusat SWP adalah perdagangan dan jasa agribisnis, serta fasilitas umum.
- 3) **SWP-3**, yaitu kawasan yang berada di daerah selatan Kabupaten Semarang; meliputi Kecamatan Suruh, Tenganan, Getasan, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bancak dan Bringin dengan pusat pengembangan di perkotaan Suruh dan Tenganan. Kecamatan-kecamatan yang tergabung di dalam SWP-3 diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, dan perikanan; dengan fungsi pusat SWP adalah pusat industri, agribisnis, perdagangan dan jasa, serta pusat fasilitas umum penunjang agropolitan.

Berdasarkan data Indeks Williamson pada Bab II diketahui bahwa Ketimpangan Wilayah pada Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir hampir selalu mendekati ketimpangan mutlak/ sempurna.

Oleh sebab itu kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 diharapkan dapat secara efektif memaksimalkan potensi dan arahan pengembangan kawasan SWP sebagaimana yang diamanatkan dalam

RTRW Tahun 2005-2025 melalui penerapan program-program pembangunan sektoral SKPD yang digerakkan secara sinergis, simultan dan agregatif berorientasi pada pembangunan berdimensi kewilayahan yang terintegrasi dengan upaya optimalisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, melalui implementasi kebijakan program pembangunan melalui pendekatan yang terintegrasi tersebut, diharapkan disparitas/ketimpangan wilayah di Kabupaten Semarang dalam lima tahun mendatang akan semakin berangsur-angsur berkurang dan menjauh dari angka ketimpangan mutlak/sempurna namun tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3. Telaah Kebijakan Politik Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2016-2021

Kebijakan politik Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2016-2021 merupakan kebijakan unggulan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2016-2021 yang diharapkan melalui implementasinya dapat secara langsung menyentuh terhadap penanganan permasalahan riil masyarakat secara efektif dan tepat sasaran, serta memiliki daya serap dengan tingkat penerimaan yang tinggi dari masyarakat.

Kebijakan politik dimaksud berangkat dari permasalahan utama yang dihadapi secara riil dimasyarakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih tingginya tingkat inflasi dan harga kebutuhan pokok yang tidak stabil;
- 2) Masih banyaknya jumlah pengangguran terselubung akibat sulitnya mencari lapangan pekerjaan;
- 3) Masih banyaknya kondisi jalan yang buruk;
- 4) Kurangnya modal usaha;
- 5) Biaya pendidikan yang relatif mahal.

Berpijak dari kelima permasalahan tersebut, maka dirumuskan kebijakan politik sebagai kebijakan unggulan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengendalian tingkat inflasi dan harga kebutuhan pokok dimasyarakat;
- 2) Pengentasan pengangguran terselubung dan perluasan lapangan kerja;
- 3) Menuntaskan pembangunan jalan melalui perencanaan yang matang, selektif, dan tepat bangun (ruas tuntas);
- 4) Meningkatkan akses permodalan usaha; serta
- 5) Perbaiki manajemen pelayanan pendidikan.

4.2.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang, maka kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang di Kabupaten Semarang diwujudkan berdasarkan:

a. Arahan pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan meliputi:

PKN Kedungsepur (perkotaan PKL Ungaran), PKL perkotaan Ambarawa, PKLp meliputi perkotaan Tengaran dan Suruh, PPK (perkotaan Bergas, Pringapus, Bandungan, Sumowono, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Getasan, Pabelan,

Susukan, Kaliwungu, Bancak dan Bringin), Pusat Pelayanan Lingkungan pada setiap pusat Desa; dan kawasan agropolitan(kawasan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak);

- b. Sistem jaringan prasarana wilayah, meliputi SWP-1 (kawasan yang ditetapkan menjadi bagian dari Ibukota Kabupaten serta kawasan sekitarnya dalam jangkauan pelayanan yaitu Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus dengan pusat pengembangan di perkotaan Ungaran), SWP-2 (kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari Kota Ambarawa yaitu Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen, dan Sumowono dengan pusat pengembangan perkotaan Ambarawa), dan SWP-3 (kawasan di daerah Selatan yaitu Kecamatan Suruh, Tenganan, Getasan, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bancak, dan Bringin dengan pusat pengembangan di perkotaan Suruh dan Tenganan.

Tabel 4.3.

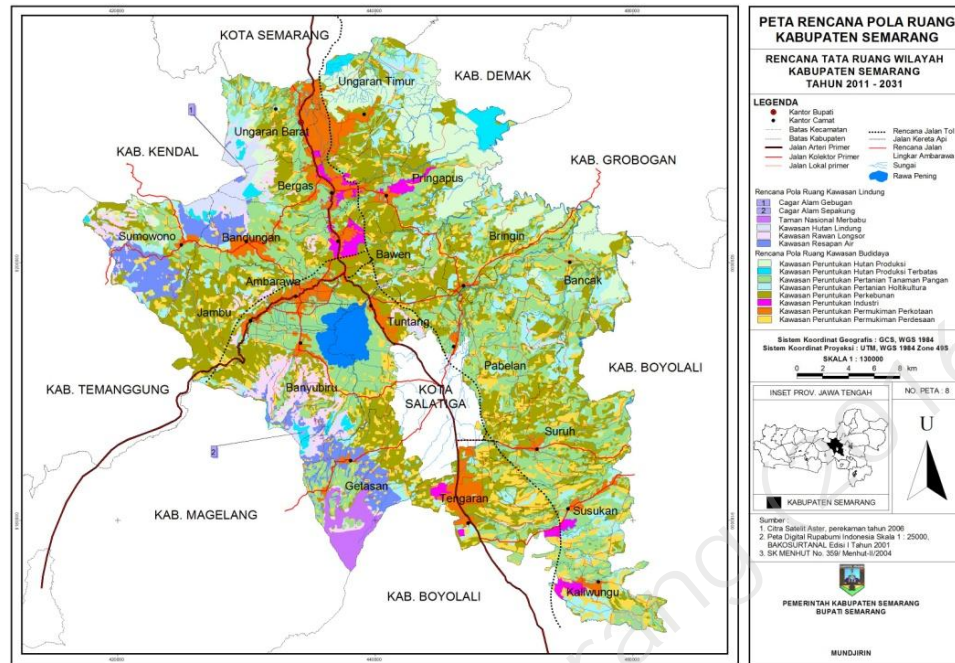
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	Kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat	Hutan produksi terbatas tersebar di Kecamatan Sumowono, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Pringapus, dan Kecamatan Banyubiru
		Hutan produksi tetap tersebar di Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bringin, dan Kecamatan Bancak
		Kawasan peruntukan hutan rakyat tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang
2	Kawasan peruntukan pertanian	Kawasan pertanian tanaman pangan tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang
		Kawasan hortikultura tersebar di seluruh Kecamatan
		Kawasan perkebunan tersebar di seluruh Kecamatan
		Kawasan peternakan: a. Kawasan peternakan skala besar berlokasi pada seluruh Kecamatan di luar kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku b. Kawasan peternakan skala kecil diarahkan dalam bentuk sentra peternakan di kawasan perdesaan yang diarahkan di seluruh Kecamatan yang dikelola secara terpadu dengan kegiatan pertanian lainnya
3	Kawasan peruntukan perikanan	Kawasan peruntukan budidaya perikanan kolam dapat dilakukan di seluruh Kecamatan
		Kawasan peruntukan perikanan tangkap berbasis budidaya pada perairan waduk dan sungai diarahkan di perairan Rawa Pening dan sungai di Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru, dan Kecamatan Bawen
		Kawasan minapolitan diarahkan pada Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Jambu dan Kecamatan Tuntang
4	Kawasan peruntukan	Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
	pertambangan	<p>logam dan batuan, terdapat: di kawasan Bakalrejo dan Karangsalam (Kecamatan Susukan);</p> <p>kawasan Gunung Mergi (Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran Timur); kawasan Kandangan dan Polosiri (Kecamatan Bawen); kawasan Delik (Kecamatan Tuntang); kawasan Pucung (Kecamatan Bancak); kawasan sekitar Sungai Senjoyo (Kecamatan Bringin dan Kecamatan Bancak); kawasan sekitar Sungai Gading (Kecamatan Suruh); kawasan Boto dan Plumutan (Kecamatan Bancak); kawasan di seluruh Kecamatan khusus untuk pengambilan material tanah urug dengan ketentuan tidak pada kawasan lindung dan tidak merusak lingkungan; dan kawasan Rawa Pening</p> <p>Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo</p> <p>Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Bringin dan Bancak</p>
5	Kawasan peruntukan industri	<p>Kawasan peruntukan industri berlokasi di Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Bergas</p> <p>Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dapat didirikan di seluruh Kecamatan</p> <p>Kawasan industri diarahkan di Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu</p> <p>Kawasan peruntukan industri kecil diarahkan di seluruh Kecamatan terpadu dengan kawasan permukiman dengan syarat melakukan pengelolaan lingkungan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan</p>
6	Kawasan peruntukan pariwisata	Kawasan peruntukan pariwisata diarahkan pada pembentukan Wilayah Pengembangan Pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan sesuai potensi dan daya tarik wisata wilayah
7	Kawasan peruntukan permukiman	<p>Permukiman perdesaan meliputi permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh Kecamatan, dikembangkan dengan berbasis perkebunan, agrowisata, pertanian tanaman pangan, perikanan darat dan peternakan disertai pengolahan hasil atau agroindustri</p> <p>Permukiman perkotaan tersebar di seluruh kecamatan</p>

Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031

Gambar 4.1
Peta Pola Ruang



Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031

Kebijakan ruang dalam RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kebijakan Ruang Kabupaten Semarang

ASPEK	PENJELASAN
Kebijakan struktur tata ruang	- Membagi wilayah menjadi 3 SWP
Arahan pengembangan pemanfaatan ruang	- Mendorong pengembangan ke wilayah Selatan - Membatasi aktifitas industri di wilayah perkotaan Ungaran
Kebijakan pendukung struktur tata ruang	- Meningkatkan pelayanan jaringan infrastuktur di wilayah perbatasan - Mengembangkan jalan alternatif dan/atau pembangunan jalan lingkaran

Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031

Kabupaten Semarang memiliki potensi unggulan terutama dibidang industri, pertanian, dan pariwisata. Hal ini karena faktor-faktor antara lain secara geografis posisi Kabupaten Semarang adalah sebagai Penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah, selain itu juga merupakan bagian kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR dan dilalui jalur lintas nasional Jogja-Solo-Semarang (JOGLOSEMAR) serta Potensi sumberdaya alam melimpah.

Potensi unggulan tersebut juga tergambar dari kontribusi yang telah disumbangkan terhadap PDRB Kabupaten dari tahun ke tahun yaitu berturut-turut sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian.

4.2.3. Penetapan Isu Strategis

Setelah melakukan penelaahan terhadap berbagai permasalahan pembangunan yang diperkuat dengan telaah atas kebijakan dan agenda pembangunan ditingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah dan daerah/lokal Kabupaten Semarang serta agenda pembangunan internasional dan regional Asia Tenggara (ASEAN), maka dapat diperoleh kajian terhadap kondisi Kabupaten Semarang yang ditinjau dari berbagai sudut pandang secara komprehensif.

Hasil kajian tersebut menjadi salah satu komponen penentu dalam merumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Semarang yang menjadi fokus permasalahan utama guna dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun dasar penentuan isu strategis ini diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. RPJPD Kabupaten Semarang 2005-2025;
2. Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2010-2015 yang belum terpenuhi;
3. Isu strategis yang diangkat dari identifikasi permasalahan per urusan bidang pembangunan, serta kemungkinan kondisinya di masa datang;
4. Isu strategis dari dinamika nasional, Provinsi Jawa Tengah dan daerah/lokal Kabupaten Semarang serta agenda pembangunan internasional dan regional Asia Tenggara (ASEAN) yang mempengaruhi Kabupaten Semarang;
5. Isu strategis dari kebijakan politik dan kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kabupaten Semarang.

Melalui inventarisasi serta identifikasi data dan informasi aktual, maka dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemenuhan kualitas dan/atau mutu standar pendidikan serta pembinaan, pemberdayaan pemuda dan olah raga

Ditandai oleh sejumlah isu terkait, diantaranya: (1) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal pendidikan dasar; (2) Masih kurangnya jumlah dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disatuan pendidikan; (3) Masih terbatasnya ketersediaan dan pelayanan pendidikan non-formal; (4) Belum maksimalnya pencapaian APK/APM SMP/MTs, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI dan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs; (5) Belum optimalnya penuntasan wajib belajar 9 tahun serta pengembangan wajib belajar 12 tahun; (6) Masih tingginya jumlah penduduk yang tidak memiliki ijazah dan/atau hanya berijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah; (7) Belum optimalnya pelestarian budaya dan pengembangan minat bakat; (8) Belum optimalnya pengembangan minat bakat dalam bidang seni dan budaya; (9) Belum cukup tersedianya sarana dan prasarana yang representatif untuk mewadahi aktivitas aktivitas pemuda dan olah raga, serta pelestarian dan pengembangan seni dan budaya; (10) Belum optimalnya sistem manajemen pembinaan pemuda dan olah raga; (11) Belum optimalnya pendayagunaan partisipasi pemuda dalam pembangunan; (12) Belum optimalnya prestasi bidang olah raga.

2. Belum optimalnya pemenuhan kualitas/mutu standar pelayanan kesehatan

Ditandai dengan sejumlah isu terkait., diantaranya: (1) Adanya kecenderungan meningkatnya Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA); (2) Masih kurangnya ketersediaan tenaga medis yang tersebar diseluruh Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu); (3) Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan; (4) Masih belum optimalnya pencapaian cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC dan BTA; serta (5) Masih kurang optimalnya pelayanan kesehatan baik diwilayah utara maupun selatan.

3. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang, pembangunan infrastruktur terutama penyelesaian Ruas Tuntas, peningkatan Jalan-jalan Poros Desa dan daerah tujuan wisata, infrastruktur dasar permukiman dan penyediaan transportasi umum di wilayah perdesaan/perbatasan/daerah terpencil

Ditandai oleh sejumlah detail permasalahan sebagai berikut: (1) Belum optimalnya perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (2) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur terutama penyelesaian Ruas Tuntas, peningkatan Jalan-jalan Poros Desa dan daerah tujuan wisata; (3) Masih kurangnya sarana dan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan;(4) Belum optimalnya kualitas dan penyediaan sarana prasarana air bersih; (5) Belum optimalnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum tercipta lingkungan yang sehat; (6) Potensi titik parkir belum tergarap secara optimal; (7) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas trotoar (pedestrian); (8) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang memenuhi syarat; serta (9) Masih kurangnya penyediaan transportasi umum diwilayah perdesaan/perbatasan/daerah terpencil.

4. Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

Ditandai oleh sejumlah detail permasalahan sebagai berikut: (1) Masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten; (2) Masih cukup tingginya angka pengangguran terbuka; (3) Masih terbatasnya ketersediaan lapangan kerja; (4) Masih belum terjangkaunya pemenuhan kebutuhan pokok yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat akibat inflasi dan (5) Rendahnya penghasilan petani.

5. Belum optimalnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun tata laksananya

Ditandai oleh sejumlah detail permasalahan sebagai berikut: (1) Belum optimalnya perwujudan area perubahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu meliputi: (a) Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), (b) Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, (c) Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, (d) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, (e) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, (f) Meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi, (g) Pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, (h) Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (2) Belum optimalnya tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (3) Belum optimalnya pelayanan masyarakat, terutama wilayah Selatan, karena jauh dari pusat pemerintahan.

6. Belum optimalnya pengelolaan potensi produk-produk unggulan daerah guna meningkatkan kualitas daya saing ekonomi daerah

Ditandai oleh sejumlah detail permasalahan sebagai berikut: (1) Masih rendahnya daya saing produk-produk unggulan daerah (Industri, Pertanian dan Pariwisata/INTANPARI); (2) Masih rendahnya iklim berusaha; (3) Masih terbatasnya akses permodalan usaha, khususnya untuk sektor UMKM; (4) Masih belum optimalnya penyediaan insentif untuk menarik investasi; (5) Masih tingginya ketergantungan akan potensi sumber daya alam dan belum tumbuhnya industri kreatif; serta (6) Masih tingginya disparitas/ketimpangan ekonomi antar wilayah kecamatan.

7. Semakin menurunnya kualitas daya dukung lingkungan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan

Ditandai oleh sejumlah detail permasalahan sebagai berikut: (1) Menurunnya kualitas lingkungan akibat alih fungsi lahan; (2) Menurunnya kualitas air dampak dari kegiatan industri; (3) Belum optimalnya upaya konservasi di danau Rawapening; (4) Masih kurangnya luasan ruang terbuka hijau (RTH); dan (5) Masih kurangnya pengelolaan dan pelayanan sampah.

8. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pembangunan yang berprespektif gender dan berorientasi pada pemenuhan hak anak

Ditandai oleh sejumlah detail permasalahan sebagai berikut: (1) Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan; (2) Belum optimalnya pemenuhan hak anak; (3) Masih cukup tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) Masih belum berfungsinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2016-2021 merupakan bagian tahap ketiga (2015-2019) dan tahap keempat (2020-2024) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Semarang tahun 2005-2025. Tahap ketiga RPJPD diarahkan untuk mengembangkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan upaya pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Sementara tahap keempat RPJPD merupakan suatu upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Semarang yang adil, mandiri dan sejahtera melalui pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah Kabupaten Semarang yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

5.1. Visi

Visi RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2016-2021 merupakan gambaran kondisi masa depan Kabupaten Semarang yang dicita-citakan dan diharapkan dapat terwujud diakhir masa berlakunya periode RPJMD yaitu tahun 2021.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Semarang serta memperhatikan visi dalam RPJM Nasional Tahun 2016-2021 dan visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, maka dapat dirumuskan visi pembangunan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 yaitu :

PENEGUHAN KABUPATEN SEMARANG YANG MAJU, MANDIRI, TERTIB, DAN SEJAHTERA (MATRA II)

Visi yang dikembangkan merupakan kesinambungan dari visi Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 yaitu MATRA. Pengembangan visi meliputi keselarasan visi dengan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, keselarasan visi dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

Sedangkan kondisi yang dimaksud MATRA II adalah :

Maju

Maju bermakna memiliki warga yang kreatif, dinamis, dan berpikir positif. Maju juga dimaknai dengan mempunyai kekuatan ekonomi yang tidak tertinggal dari daerah lain serta mampu berprestasi, berkompetisi dan unggul diberbagai bidang.

Mandiri

Mandiri bermakna mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat, serta saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan melalui kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Kemandirian juga dimaknai dengan kemampuan untuk mengambil prakarsa dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, disertai

dengan kemampuan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Kemandirian tercermin pula pada kemampuan menyerap aspirasi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersamanya. *Dengan kebersamaan tercapai kesamaan harapan, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, yang ruwet menjadi sederhana dan yang gelap akan menjadi terang.*

Tertib

Tertib artinya mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum oleh aparat pemerintah maupun masyarakat.

Sejahtera

Sejahtera dimaknai sebagai kemampuan mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama, dapat beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, hidup secara harmonis dan saling toleransi. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra sejahtera, pemenuhan kebutuhan pokok, masyarakat, pangan, sandang dan papan serta terwujudnya kondisi lingkungan yang tetap asri dan lestari sebagai dampak positif dari meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang semakin sejahtera.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Semarang untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan dalam kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meningkatkan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Guna keperluan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai.

2) Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Pengembangan produk unggulan daerah meliputi produk industri, pertanian dan pariwisata dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan. Pengembangan produk tersebut dilakukan secara sinergis dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan sumber daya daerah terutama yang rentan

terhadap kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya.

3) Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintahan yang katalis dan dinamis merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demikian dibutuhkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif.

4) Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.

Infrastruktur yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenihunya kebutuhan infrastruktur dapat meningkatkan kemandirian, perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya infrastruktur sumber daya air akan mendorong upaya peningkatan produktivitas pertanian sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah.

5) Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan.

Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat bergantung pada adanya kerjasama yang sinergi antar semua palaku pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat disemua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuh kembangnya anak.

6) Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Potensi sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya dengan cara menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Semarang selama kurun waktu 2016-2021.

Senafas dengan agenda prioritas (nawa cita) dalam RPJMN tahun 2015-2019, dalam RPJMD Kabupaten Semarang memiliki delapan agenda tujuan (asta asha) yang kemudian akan dijabarkan dalam 53 sasaran.

Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran :

- 1) Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, semua warga miskin mendapatkan layanan secara gratis tanpa terkecuali;
- 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah daerah dan swasta yang berkualitas dan berijin;
- 3) Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat);
- 4) Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih;
- 5) Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar;
- 6) Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera;
- 7) Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, khusus Puskesmas Tenganan akan dibangun setara Rumah Sakit tipe D. Serta terlaksananya **E-kesehatan termasuk diantaranya MATRA STAT dan SMS GATEWAY.**

Tujuan 2 : Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan;
- 2) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal dan pendidikan tinggi;
- 3) Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, yang memiliki *Intelligence Quotient*, *Emotional Quotient*, dan *Spiritual Quotient*;
- 4) Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- 5) Tersediannya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan, memiliki daya saing, dan bersertifikat;
- 6) Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;
- 7) Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya, agama, pemuda olah raga dan revolusi mental;
- 8) Pembenahan peran komite sekolah dan meningkatkan penyaluran beasiswa.

Misi 2 : Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Tujuan 3 : Meningkatkan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Sasaran :

- 1) Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing dan dipatenkan;
- 2) Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;
- 3) Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran, *e-pertanian*;
- 4) Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;
- 5) Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal;
- 6) Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber daya alam, serta industri kreatif yang dipatenkan;
- 7) Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- 8) Diwajibkannya perusahaan, perkantoran, rumah makan, PNS untuk pro terhadap UMKM.

Misi 3 : Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Tujuan 4 : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran :

- 1) Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan *Information Communication and Technology (ICT)* melalui *Electronic Government* dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (*database*);
- 2) Meningkatnya disiplin, kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan;
- 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk melakukan kajian dan pemindahan pusat pemerintahan;
- 4) Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan;
- 5) Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk pemerintahan desa melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan berbasis data serta arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.

Misi 4 : Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.

Tujuan 5 : Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi.

Sasaran :

- 1) Tersediannya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang;
- 2) Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan, dan akuntabel;
- 3) Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum;
- 4) Tersediannya regulasi dan promosi yang mendukung investasi;
- 5) Meningkatnya peran BPR dan BKK dalam membantu masyarakat;
- 6) Adanya kewajiban dunia usaha memberdayakan sumber daya lokal.

Tujuan 6 : Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa.

Sasaran :

- 1) Tersediannya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;
- 2) Tersediannya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian;
- 3) Tersediannya prasarana olah raga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan;
- 4) Tersediannya sarana dan prasarana air bersih yang memadai;
- 5) Tersediannya rumah layak huni dan rumah bersanitasi;
- 6) Tersediannya sarana prasarana pengelolaan sampah;
- 7) Terpenuhinya kebutuhan energi listrik;
- 8) Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan;
- 9) Terpenuhinya RUAS TUNTAS dengan perencanaan matang, tepat bangun dan pembagian wewenang daerah-desa.

Misi 5 : Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan.

Tujuan 7 : Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah;
- 2) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup;
- 3) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui sinergitas pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- 4) Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat.

Misi 6 : Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

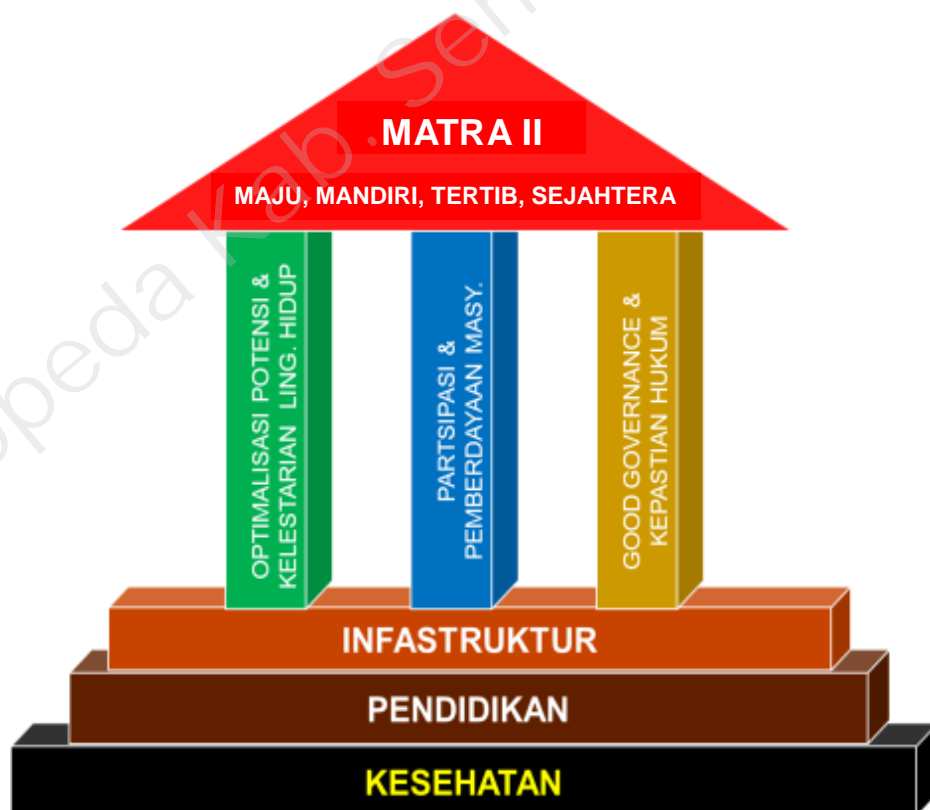
Tujuan 8 : Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Sasaran :

- 1) Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumberdaya alam;
- 2) Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan;
- 4) Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat;
- 5) Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian;
- 6) Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR.

Secara visual, sebagaimana digambarkan dalam RPJMD Tahun 2010-2015, pencapaian visi dalam RPJMD tahun 2016-2021 ini digambarkan sebagai sebuah bangunan rumah **MAJU MATRA**, sebagaimana pada gambar 5.1.:

Gambar 5.1
Bangunan MAJU MATRA



Sebagai sebuah bangunan, visi MAJU MATRA dibangun diatas 3 fondasi, yaitu :

1. Kesehatan;
2. Pendidikan;
3. Infrastruktur.

Ketiga pondasi ini harus kuat agar mampu menopang 3 pilar, yaitu

1. Optimalisasi potensi dan kelestarian lingkungan hidup,
2. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan
3. *Good governance* dan kepastian hukum.

Dengan pondasi yang kuat dan pilar yang kokoh diharapkan mampu mewujudkan totalitas bangunan rumah “MAJU MATRA”.

5.4. Indikator Kinerja Misi

Guna menilai keberhasilan pelaksanaan misi secara kualitatif maupun kuantitatif, maka disusun satu instrumen pengukuran berupa indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja *benefit/impact* dari program.

Indikator kinerja tujuan dan sasaran untuk masing-masing misi RPJMD selama periode tahun 2016-2021 yang disertai dengan target kinerja per tahunnya dapat diuraikan sebagaimana pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Target Kinerjanya Berdasarkan Misi RPJMD Tahun 2016 - 2021

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi	1 Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat (senafas dengan Nawa Cita butir Kelima : "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia")	Angka Harapan Hidup			72.42	72.49	72.56	72.64	72.71	72.78
				1. Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, semua warga miskin mendapatkan layanan secara gratis tanpa terkecuali;	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat pertahun (%)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
				2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah daerah dan swasta yang berkualitas dan berijin;	Angka Kematian Bayi (AKB)	10,08	10,06	10,04	10,02	10	9,80
				3. Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat	Angka Kematian Balita (AKABA)	12,40	12,20	12,10	12	11,80	11,60
					Angka Kematian Ibu (AKI)	117	117	116	116	115	115
					Persalinan oleh tenaga yang berkompeten (%)	95	95	95	95	95	95

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat);	Persentase rumah tangga yang ber PHBS strata sehat utama	35	40	45	50	55	60
				4. Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih;	Prevalensi Gizi kurang pada balita (%)	5,18	5,13	5,08	5,03	4,98	4,95
				5. Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar;	Persentase kesejahteraan dan ketahanan keluarga (%)	56,61	57,04	57,47	57,90	58,34	58,77
				6. Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera;	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan (%)	17,51	11,52	11,06	9,68	8,76	7,83
				7. Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, khusus Puskesmas Tenganan akan dibangun setara Rumah Sakit tipe							

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D, serta terlaksananya E-kesehatan termasuk diantaranya MATRA STAT dan SMS GATEWAY.							
		2 Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Kreatif, Berbudaya, Berkarakter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi (senafas dengan Nawa Cita butir Kelima dan Keenam : “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” serta “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional”)	Angka Partisipasi Sekolah :								
			Usia 7 - 12 Tahun			100	100	100	100	100	100
			Usia 13 - 15 Tahun			96,89	96,90	96,91	96,92	96,93	96,93
			Usia 16 -18 Tahun			61,35	61,36	61,37	61,38	61,39	61,40
				1. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan; 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana	Rata-rata lama sekolah	7,33	7,34	7,35	7,36	7,37	7,38
				Angka harapan lama sekolah	12,83	12,84	12,85	12,86	12,87	12,88	
				Calon tenaga kerja yang Terampil (%)	2,86	3,15	3,47	3,81	4,19	4,61	
				Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,25	4,1	3,95	3,8	3,65	3,50	

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pendidikan baik formal maupun non formal dan pendidikan tinggi;	Persentase penduduk miskin (%)	7,70	7,50	7,30	7,10	6,80	6,50
				3. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, yang memiliki <i>Intelligence Quotient</i> , <i>Emotional Quotient</i> , dan <i>Spiritual Quotient</i> ;	Pendapatan per kapita (Juta Rp.)	6,383	6,539	6,695	6,851	7,007	7,161
				4. Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;	Persentase organisasi Pemuda berprestasi (%)	20	20	40	40	40	40
				5. Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan, memiliki daya saing, dan bersertifikat;	Jumlah peningkatan grup kesenian (grup)	4	5	6	10	15	24
					Peningkatan jumlah Museum dan Kepurbakalaan (buah)	3	4	5	5	6	7
					Indeks cabang olahraga yang berprestasi (%)	67	73	80	87	93	93
					Jumlah Lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan bantuan (%)	0	20	40	60	80	100

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<p>6. Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;</p> <p>7. Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya, agama, pemuda olah raga dan revolusi mental;</p> <p>8. Pembenahan peran komite sekolah dan meningkatkan penyaluran beasiswa.</p>	Peningkatan penyaluran beasiswa miskin (%)	2,61	4,54	4,88	5,13	5,18	5,32

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan	3 Meningkatkan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (senafas dengan Nawa Cita butir Keenam : “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional”)	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi			5,62	5,81	5,98	6,15	6,33	6,50
			Nilai PDRB (Trilyun Rp.)			18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5
			Laju Inflasi (%)			3,12	3,40	3,67	3,95	4,22	4,5
			Kontribusi PAD terhadap Total APBD (%)			14,70	15,15	15,65	16,10	16,55	17
			Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kap/Tahun)			176	177	178	179	180	182
			Pola pangan harapan (%)			86	88	90	91	92	92
				1. Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing dan dipatenkan;	Persentase Peningkatan jumlah unit UMKM yang Berijin (%)	2%	2%	2%	2%	2%	2%
				2. Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;	Persentase pembinaan kelompok industri (%)	18	18	18	20	20	20
				3. Meningkatnya akses petani terhadap sarana	Jumlah investor (PMDN/PMA)	227	262	277	305	335	370
					Indeks Nilai Tukar Petani	100,89	101,39	101,89	102,39	102,89	103,39

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				produksi, modal dan pemasaran, <i>e-pertanian</i> ; 4. Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis ,agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;	Persentase peningkatan jumlah industri kecil yang Berijin(%)	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
				5. Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal;	Persentase peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata (%)	5,37	5,91	6,21	6,52	6,84	7,18
				6. Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber	Jumlah Koperasi yang berkualitas (unit)	50	85	120	155	193	228
					Persentase kebijakan usaha tani yang terlaksana (%)	100	100	100	100	100	100
					Nilai volume usaha koperasi (Juta Rp.)	681240	694860	708760	722935	741008	741008
					Pencari kerja yang ditempatkan (%)	22	13	16	19	20	22

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<p>daya alam, serta industri kreatif yang dipatenkan;</p> <p>7. Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR);</p> <p>8. Diwajibkannya perusahaan, perkantoran, rumah makan, PNS untuk pro terhadap UMKM.</p>	Keselamatan dan Perlindungan tenaga kerja (%)	72	78	79	81	83	84

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>good governance</i> didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi	4 Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel (senafas dengan Nawa Cita butir ke dua : “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”)	Indeks Kepuasan Masyarakat			84,09	88,9	89,79	90,69	91,59	92,51
			Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Skor evaluasi SAKIP			CC	CC	CC	CC	B	B
				1. Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan <i>Information Communication and Technology (ICT)</i> melalui <i>Electronic Government</i> dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (<i>database</i>); 2. Meningkatnya disiplin, kompetensi,	Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik (%)	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan struktural (%)	87,23	92,00	95,00	98,00	100	100			
		Persentase peningkatan disiplin pegawai (%)	99,95	99,96	99,96	99,97	99,97	99,97			

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				profesionalisme dan integritas;	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat PNS (%)	90,36	90,88	91,24	92	93	94
				3. aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan;	kapasitas APIP dilihat dari skor IACM (level)	level 1	level 2	level 2	level 3	level 3	level 4
				4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk melakukan kajian dan pemindahan pusat pemerintahan;	skor hasil evaluasi SPIP (level)	-	Level 1	Level 2	level 3	level 3	level 4
				5. Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan	Realisasi Indikator Kinerja yang tercapai sesuai target (%)	100	100	100	100	100	100
					Persentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah (%)	24,59	25,82	27,11	28,47	29,89	32,72

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pembangunan; 6. Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk pemerintahan desa melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan berbasis data serta arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.	Persentase peningkatan kualitas penyusunan LPPD (%)	100	100	100	100	100	100
					Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal (%)	24,44	24,53	33,33	43,66	48,72	51,22

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan	5 Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi (Senafas dengan Nawa Cita butir Kedelapan : "Melakukan revolusi karakter bangsa")	Persentase Peningkatan Nilai investasi Daerah			9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
				1. Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang;	Tersedianya dokumen tata ruang yang disahkan (Jumlah)	1	4	5	5	5	4
				2. Meningkatnya pelayanan perijinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel;	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Perijinan	84,31	88,53	89,41	90,30	91,21	92,12
				3. Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum;	Persentase penurunan pelanggaran perda (%)	54	49	44	39	35	32
				4. Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi;	Persentase penurunan pelanggaran trantibum	9,3	8,4	7,5	6,8	5,1	1
				5. Meningkatnya peran BPR dan BKK dalam membantu masyarakat;	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)	330	361,81	396,69	434,93	476,86	522,83
					Jumlah Usaha Mikro Binaan (Unit)	10296	10406	10511	10666	10816	10816

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6. Adanya kewajiban dunia usaha memberdayakan sumber daya lokal.							
		6 Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata diseluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa (Senafas dalam Nawa Cita butir ketiga : "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan ")	Persentase Kondisi infrastruktur dalam kondisi baik			55	73,9	77,6	81,5	85,6	89,8
			Indeks pembangunan Desa			29,5	36,8	43,5	49,6	55,3	60
				1. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus (Buah)	Tipe A=0 Tipe B=1 Tipe C=7	Tipe A=0 Tipe B=1 Tipe C=7	Tipe A=0 Tipe B=0 Tipe C=7	Tipe A=0 Tipe B=0 Tipe C=8	Tipe A=0 Tipe B=0 Tipe C=9	Tipe A=0 Tipe B=0 Tipe C=9
				2. Tersedianya jaringan irigasi dan sumber sumber air untuk pertanian;	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)	0,148	0,147	0,145	0,144	0,142	0,140
				3. Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan;	Angkutan darat (%)	0,015	0,026	0,024	0,023	0,022	0,021
				Persentase panjang jalan yang terpasang PJU (%)	24,28	26,00	27,72	29,44	31,16	32,88	

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai;	Luas Irigasi Pertanian dalam kondisi baik (%)	53,02	55,34	57,50	59,55	61,25	63,12
				5. Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi;	Persentase Luas Irigasi dalam kondisi baik (%)	53	57	62	67	72	76
				6. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (Ha)	529,65	530,05	532,25	532,75	533,25	533,75
				7. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik;	Persentase penduduk berakses air minum aman (%)	87,54	91,69	95,85	100	100	100
				8. Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan;	Persentase penduduk berakses sanitasi sehat (%)	89,08	92,72	96,36	100	100	100
				9. Terpenuhinya RUAS TUNTAS dengan perencanaan matang, tepat bangun dan pembagian wewenang daerah-desa.	Luas lingkungan permukiman kumuh (Ha)	248,41	187,65	90,63	0	0	0
					Rasio Rumah Layak Huni	0,756	0,756	0,756	0,756	0,756	0,757
					Persentase penanganan sampah (%)	20,24	20,49	20,74	20,99	21,24	21,49

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase TPS persatuan penduduk (%)	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83
					Rasio elektrifikasi (%)	99	99	100	100	100	100
					Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik (%)	73	75	77	80	82	85
5	Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan	7 Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak hak anak (senafas dengan Nawa Cita butir kesembilan : "Memperteguh kebhinekaan dan Memperkuat restorasi sosial Indonesia")	Indeks Pembangunan Gender			25,43	27,97	29,37	30,84	32,38	34
				1. Meningkatkan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah;	Persentase usulan kegiatan berbasis musrenbang yang tertuang dalam RKPD (%)	70	70	70	70	70	70
				2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	5	6	6,5	6,9	7,5	8

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				segala bidang guna peningkatan kualitas hidup;	Persentase penurunan tingkat penyandang masalah sosial (%)	0,99	1,09	1,20	1,32	1,45	1,60
				3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak hak anak melalui sinergitas pemerintah ,masyarakat dan swasta;	Persentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak (%)	7,69	9,61	10,57	11,63	12,79	14,07
				4. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang Aktif (%)	100	100	100	100	100	100
6	Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya	8 Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan (Senafas dengan Nawa Cita butir kelima : "Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia")	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			54,79	58,48	61,18	68,5	68,53	68,7
				1. Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumberdaya alam	Jumlah penerapan teknologi tepat guna yang mendapat fasilitasi dari pemerintah (unit)	3	10	19	19	28	38
				2. Terwujudnya jejaring kerjasama dalam							

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<p>pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan</p> <p>3. Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan</p>	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pertahun (%)	54,79	58,24	61,69	65,14	68,59	68,61
				<p>4. Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat</p>	Produktivitas Hasil Hutan Pertahun (m ³ /Hektar)	88,89	89,89	90,91	91,95	93,02	94,12
				<p>5. Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian</p>	Produktivitas hasil pertanian pertahun (ton/Hektar)	58,38	58,96	59,55	60,15	60,75	61,36
				<p>6. Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR</p>	Persentase bangunan ber-IMB (%)	65	70	75	80	85	90

5.5. Sasaran Prioritas dan Fokus Pencapaiannya

Sasaran prioritas pada dasarnya adalah sasaran-sasaran yang bernilai paling strategis dalam pencapaian tujuan misi pembangunan jangka menengah daerah. Identifikasi sasaran prioritas pembangunan tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan berpedoman pada Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta memperhatikan juga hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021.

Sasaran prioritas pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran Prioritas :

- 1). Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; semua warga miskin mendapatkan layanan secara gratis tanpa terkecuali;
- 2). Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah daerah dan swasta yang berkualitas dan berijin;
- 3). Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih;
- 4). Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, khusus Puskesmas Tenganan akan dibangun setara Rumah Sakit tipe D. Serta terlaksananya **E-kesehatan termasuk diantaranya MATRA STAT dan SMS GATEWAY.**

Fokus pencapaian sasaran-sasaran prioritas pada **tujuan 1** ini diarahkan pada :

- 1). Penyediaan anggaran BPJS, akses kesehatan yang berkualitas, sarana prasarana Puskesmas Tenganan setingkat RSUD kelas D, Puskesmas menjadi BLUD dan program E-Kesehatan; serta
- 2). Peningkatan sarana prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Tujuan 2 : Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran Prioritas :

- 1). Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan;
- 2). Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal dan pendidikan tinggi;
- 3). Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, yang memiliki Intelligence Quotient, Emotional Quotient, dan Spiritual Quotient;
- 4). Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- 5). Pembenahan peran komite sekolah dan meningkatkan penyaluran beasiswa.

Fokus pencapaian sasaran-sasaran prioritas pada **tujuan 2** ini diarahkan pada :

- 1). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- 2). Peningkatan sarana prasarana pendidikan sekolah negeri/swasta, madrasah, pondok pesantren, TK dan PAUD;
- 3). Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi pendidikan;
- 4). Mendorong pendidikan sistem ganda dengan mengedepankan *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia industri; serta
- 5). Bekerja sama dengan sekolah swasta dalam penyaluran beasiswa pendidikan.

Misi 2 : Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Tujuan 3 : Meningkatkan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Sasaran Prioritas :

- 1). Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;
- 2). Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran, e-pertanian;
- 3). Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber daya alam, serta industri kreatif yang dipatenkan;
- 4). Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- 5). Diwajibkannya perusahaan, perkantoran, rumah makan, PNS untuk pro terhadap UMKM.

Fokus pencapaian sasaran-sasaran prioritas pada **tujuan 3** ini diarahkan pada :

- 1). Mengevaluasi dan merevisi Perda RTRW guna pemanfaatan interchange toll an mendorong pertumbuhan industri dijalur selatan, sehingga daerah cepat berkembang;
- 2). Fasilitasi peningkatan akses sarana produksi, modal dan pemasaran bagi petani serta penerapan e-pertanian;
- 3). Peningkatan infrastruktur, sarana prasarana pariwisata;
- 4). Bebas/menggratiskan biaya perizinan UMKM skala kecil dan menengah yang pengurusannya dikecamatan, memfasilitasi akses permodalan dan pemasaran hasil produksi UMKM; serta
- 5). Pembatasan minimarket modern, menggalakkan belanja ke pasar tradisional, serta memberi teladan dalam belanja cerdas dan efisien.

Misi 3 : Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Tujuan 4 : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran Prioritas :

- 1). Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan *Information Communication and Technology (ICT)* melalui *Electronic Government* dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (*database*);
- 2). Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk melakukan kajian dan pemindahan pusat pemerintahan.

Fokus pencapaian sasaran-sasaran prioritas pada **tujuan 4** ini diarahkan pada :

- 1). Peningkatan kapasitas sistem layanan pembuatan KTP dan KK dikecamatan;
- 2). Revisi peraturan daerah yang sudah tidak sesuai; serta
- 3). Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat diseluruh bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Misi 4 : Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.

Tujuan 5 : Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi.

Sasaran Prioritas :

- 1). Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang;
- 2). Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Fokus pencapaian sasaran-sasaran prioritas pada **tujuan 5** ini diarahkan pada :

- 1). Mengevaluasi dan merevisi Perda RTRW guna pemanfaatan interchange toll dan mendorong pertumbuhan industri dijalur selatan, sehingga daerah cepat berkembang;
- 2). Bebas/menggratiskan biaya perizinan UMKM skala kecil dan menengah yang pengurusannya dikecamatan, memfasilitasi akses permodalan dan pemasaran hasil produksi UMKM; serta
- 3). Mempermudah perpanjangan ijin perusahaan.

Tujuan 6 : Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa.

Sasaran Prioritas :

- 1). Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;
- 2). Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian;

- 3). Tersedianya prasarana olah raga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan;
- 4). Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai;
- 5). Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi;
- 6). Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan;
- 7). Terpenuhinya RUAS TUNTAS dengan perencanaan matang, tepat bangun dan pembagian wewenang daerah-desa.

Fokus pencapaian sasaran-sasaran prioritas pada tujuan 6 ini diarahkan pada :

- 1). Mengembangkan trayek angkutan disekolah-sekolah yang berada diwilayah terpencil;
- 2). Peningkatan sarana prasarana dibidang pertanian dan memfasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian;
- 3). Peningkatan infrastruktur, sarana prasarana pariwisata;
- 4). Peningkatan sarana prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat;
- 5). Peningkatan jumlah rehab rumah tidak layak huni;
- 6). Membangun pasar-pasar tradisional yang resik, apik dan ramah terhadap pedagang kecil;
- 7). Ruas Tuntas, menuntaskan pembangunan jalan melalui perencanaan yang matang, selektif, tepat bangun (d disesuaikan dengan kondisi tanah) dan pembagian wewenang kabupaten dan desa; serta
- 8). Peningkatan jalan-jalan poros desa.

Misi 5 : Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan.

Tujuan 7 : Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak.

Sasaran Prioritas :

- 1). Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah;
- 2). Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat.

Fokus pencapaian sasaran-sasaran prioritas pada tujuan 7 ini diarahkan pada :

- 1). Menyediakan rumah aspirasi rakyat, termasuk rumah dinas; dan
- 2). Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa, RT dan RW.

Misi 6 : Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Tujuan 8 : Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Sasaran Prioritas :

- 1). Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

Fokus pencapaian sasaran prioritas pada tujuan 8 ini diarahkan pada :

- 1). Menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena bencana alam.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021 secara efektif dan efisien. Mendasarkan tujuan dan sasaran, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi

MISI 1:

“Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran 1 : Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; semua warga miskin mendapatkan layanan secara gratis tanpa terkecuali.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
2. Pendataan penerima bantuan iuran JKN secara periodik.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan jumlah kepesertaan JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD I dan PBI APBD II serta Pekerja Penerima Upah (PPU);
2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi PBI JKN secara periodik.

Sasaran 2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah daerah dan swasta yang berkualitas dan berijin.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Meningkatkan standar pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan melibatkan lintas sektor terkait;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang.

Arah Kebijakan:

1. Memenuhi sarana prasarana dan tenaga medis, serta meningkatkan manajemen mutu dan kualitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan penerapan PPK BLUD bagi Puskesmas;

2. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dalam menghadapi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mampu berdaya saing dengan rumah sakit swasta;
3. Meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing rumah sakit Umum Daerah Ungaran dan Ambarawa;
4. Peningkatan Rumah Sakit PONEK;
5. Meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan rumah sakit Umum Daerah Ungaran dan Ambarawa.

Sasaran 3: Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat).

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat rumah tangga melalui penyuluhan dan penguatan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran 4: Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Meningkatkan akses sanitasi yang layak dan air bersih.

Arah Kebijakan:

1. Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerja sama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat.

Sasaran 5: Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat.

Arah Kebijakan:

1. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK), balita gizi kurang dan balita gizi buruk dari keluarga kurang mampu.

Sasaran 6: Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat dan cerdas.

Arah Kebijakan:

1. Mengurangi tingkat pernikahan dini;
2. Memasyarakatkan kembali program Keluarga Berencana (KB).

Sasaran 7: Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, khusus Puskesmas Tenganan akan dibangun setara Rumah Sakit tipe D. Serta terlaksananya **E-kesehatan termasuk diantaranya MATRA STAT dan SMS GATEWAY.**

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (PKD).

Arah Kebijakan:

1. Memenuhi sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (PKD).

Tujuan 2 : Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran 1: Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Penguatan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Penguatan akses dan mutu pendidikan Sekolah Dasar (SD)/sederajat;
3. Penguatan akses dan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat;
4. Penguatan akses dan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat;
5. Penguatan akses dan mutu pendidikan non formal;
6. Penguatan Pendidikan karakter dan budi pekerti dalam rangka mendukung revolusi mental.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan layanan PAUD;
2. Peningkatan layanan pendidikan SD/sederajat;
3. Peningkatan layanan pendidikan SMP/sederajat;
4. Peningkatan layanan pendidikan SMA/SMK sederajat;
5. Peningkatan layanan pendidikan non formal;
6. Pengembangan Pendidikan karakter dan budi pekerti melalui kurikulum disatuan pendidikan.

Sasaran 2: Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal dan pendidikan tinggi.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Peningkatan budaya baca masyarakat.

Arah Kebijakan:

1. Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan di PAUD;
2. Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan di SD;
3. Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan di SMP;
4. Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA/SMK;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan.

Sasaran 3: Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, yang memiliki *Intelligence Quotient*, *Emotional Quotient*, dan *Spiritual Quotient*.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di TK/RA;
2. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SD/MI;
3. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SMP/MTs;
4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SMA/SMK/MA;
5. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di TK/RA.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan di TK/RA;
2. Peningkatan jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan di SD/MI;
3. Peningkatan jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan di SMP/MTs;
4. Peningkatan jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan di SMA/SMK/MA.

Sasaran 4: Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri:

Strategi:

1. Membangun kemitraan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan informal;
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Sasaran 5: Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan, memiliki daya saing, dan bersertifikat.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Melaksanakan relevansi kurikulum.

Arah Kebijakan:

1. Mengembangkan pelatihan-pelatihan kerja berbasis kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Sasaran 6: Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Peningkatan Tenaga Kerja Mandiri;
2. Penguatan lembaga Pendidikan Non Formal.

Arah Kebijakan:

1. Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan / STPK yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan program PNF kejuruan (Lembaga Kursus, Pelatihan Kerja, Pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan dan transmigrasi);
2. Peningkatan layanan Pendidikan Non Fomal.

Sasaran 7: Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya, agama, pemuda olah raga dan revolusi mental.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Peningkatan kapasitas organisasi pemuda;
2. Peningkatan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
3. Meningkatnya peran dan prestasi organisasi kepemudaan;
4. Optimalisasi pendayagunaan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
5. Peningkatan fungsi sekolah, partisipasi masyarakat dalam rangka pelestarian budaya;
6. Optimalisasi upaya pelestarian budaya;
7. Optimalisasi pengembangan minat bakat dalam bidang seni dan budaya;
8. Menyediakan sarana dan prasarana seni dan budaya yang representatif;
9. Penyempurnaan sistem manajemen pembinaan pemuda dan olah raga;
10. Optimalisasi pembinaan prestasi bidang olah raga;
11. Fasilitasi pembinaan keagamaan;

12. Optimalisasi lembaga pendidikan keagamaan dalam meningkatkan sinergitas dan peran pemerintah kepada masyarakat;
13. Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama;
14. Melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama dimasyarakat;
15. Membentuk kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan dalam rangka memberi bekal pentingnya kewaspadaan dini untuk menjaga kondusivitas wilayah.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan peran dan prestasi organisasi kepemudaan;
2. Meningkatkan pengembangan kegiatan kepemudaan;
3. Peningkatan kewaspadaan gerakan anti narkoba, HIV-AIDS dan kenakalan remaja;
4. Peningkatan sarana prasarana pelestarian budaya, Pengembangan seni dan budaya;
5. Meningkatkan dan mengembangkan upaya pelestarian budaya;
6. Melaksanakan fasilitasi pengembangan minat bakat dalam bidang seni dan budaya;
7. Membangun sarana dan prasarana seni dan budaya yang representatif;
8. Merevitalisasi sistem manajemen pembinaan pemuda dan olah raga;
9. Meningkatkan dan mengembangkan pembinaan prestasi bidang olah raga;
10. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pendidikan keagamaan;
11. Koordinasi dalam forum komunikasi umat beragama tentang kerukunan umat beragama;
12. Meningkatkan aktualisasi budaya dan wawasan kebangsaan;
13. Terwujudnya toleransi inter dan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari;
14. Terbangunnya kewaspadaan dini masyarakat terhadap permasalahan dibidang ipoleksosbud.

Sasaran 8: Pembenahan peran komite sekolah dan meningkatkan penyaluran beasiswa.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Penguatan peran komite SD;
2. Penguatan peran komite SMP;
3. Penguatan peran komite SMA/SMK;
4. Pemenuhan beasiswa miskin SD;
5. Pemenuhan beasiswa miskin SMP;
6. Pemenuhan beasiswa miskin SMA/SMK.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan peran komite sekolah SD;
2. Peningkatan peran komite sekolah SMP;

3. Peningkatan peran komite sekolah SMA/SMK;
4. Pemberian beasiswa miskin SD;
5. Pemberian beasiswa miskin SMP;
6. Pemberian beasiswa miskin SMA/SMK.

MISI 2:

“Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan”.

Tujuan 3 : Meningkatkan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Sasaran 1: Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing dan dipatenkan.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Optimalisasi dan peningkatan kompetensi serta daya saing usaha KUMKM;
2. Peningkatan jumlah UMKM;
3. Peningkatan kapasitas kelompok wira usaha pemuda.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM;
2. Penyediaan kemudahan perijinan UMKM.

Sasaran 2: Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja;
2. Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan ;
3. Peluang peningkatan jumlah investor dan kepastian berusaha.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja;
2. Meningkatnya jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif serta pelaku usaha kreatif, memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi wirausaha kreatif baru;
3. Mendorong investor untuk berinvestasi di kawasan industri dibagian selatan apalagi dengan akan dibukanya *interchange* tol di Tengarani.

Sasaran 3: Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran, *e-pertanian*.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Penyediaan saprodi untuk petani;
2. Kemudahan untuk mengakses kredit;
3. Fasilitasi kemitraan kelompok;
4. Pembinaan kelompok tani agribisnis;
5. Pengendalian laju inflasi daerah;
6. Penyediaan pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
7. Monitoring kebijakan kualitas Sumber Daya Alam;
8. Pembinaan kelompok tani agribisnis.

Arah Kebijakan:

1. Fasilitasidalam pemenuhan saprodi;
2. Peningkatan kemampuan kelompok dalam mengakses kredit;
3. Peningkatan peran kelompok tani dalam kemitraan;
4. Pembinaan kelompok tani agribisnis;
5. Stabilisasi harga Bahan Pokok Masyarakat;
6. Pengawasan distribusibantuan pupuk bersubsidi;
7. Implementasi Kebijakan peningkatan kualitas SDA;
8. Peningkatan peran kelompok tani menuju agrobisnis.

Sasaran 4: Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

- 1.Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya pangan B2SA;
- 2.Penerapan sapta usaha tani komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar;
- 3.Mengembangkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- 4.Penanganan daerah rawan pangan;
- 5.Optimalisasi informasi harga pasokan dan akses pangan.

Arah Kebijakan:

1. Sosialisasi, pelatihan, intervensi pangan B2SA;
2. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan;
3. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pelatihan kepada SDM pertanian;
4. Pengisian gudang cadangan pangan pemerintah;
5. Pengembangan lumbung pangan masyarakat;
6. Meningkatkan usaha produktif melalui DMP (Desa Mandiri Pangan) dan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi);

7. Meningkatkan pendataan informasi harga pasokan dan akses pangan.

Sasaran 5: Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Optimalisasi pengembangan perekonomian Daerah berbasis potensi lokal.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan upaya pemantauan dan pengawasan pengembangan perekonomian daerah.

Sasaran 6: Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber daya alam, serta industri kreatif yang dipatenkan.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Mengembangkan industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber daya alam, serta industri kreatif;

2. Mengurus hak paten produk industri kreatif dan budaya-budaya lokal sebagai identitas daerah.

Arah Kebijakan:

1. Pengembangan industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber daya alam, serta industri kreatif;

2. Fasilitasi pengurusan hak paten produk industri kreatif dan budaya-budaya lokal sebagai identitas daerah.

Sasaran 7: Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Mengoptimalkan peran *Corporate Social Responsibility (CSR)*;

2. Pembinaan kelompok yang memiliki skala usaha produksi.

Arah Kebijakan:

1. Mensinergikan CSR Perusahaan dengan Program Pemerintah Daerah;

2. Peningkatan peran pihak ketiga terhadap kelompok tani.

Sasaran 8: Diwajibkannya perusahaan, perkantoran, rumah makan, PNS untuk pro terhadap UMKM.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Pembuatan aturan kemitraan perusahaan, perkantoran, rumah makan dengan UMKM;
2. Peningkatan akses teknologi, SDM, Pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM;
3. Mengkampanyekan dan melaksanakan kebijakan bela-beli produk lokal;
4. Pemerataan kesempatan kerja dan terciptanya perluasan fasilitasi kerja, hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan akses teknologi, SDM, Pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM;
2. Pemanfaatan produk lokal antara lain dengan mewajibkan erusahaan, rertoran, hotel, kantor emerintahan/swasta menggunakan produk UMKM lokal;
3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja.

MISI 3:

“Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi”.

Tujuan 4 : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran 1: Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan *Information Communication and Technology (ICT)* melalui *Electronic Government* dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (*database*).

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Mewujudkan peningkatan tertib arsip pemerintah daerah dan pemerintah desa;
2. Menyiapkan manajemen sistem informasi dan regulasi tata kelola dan optimalisasi manajemen sarana prasarana informasi;
3. Pencetakan KTP-el di 19 Kecamatan;
4. Pendataan Penduduk Non Permanen;
5. Pemutakhiran Data Penduduk;
6. Penyusunan Proyeksi Penduduk;
7. Digitalisasi Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Pelayanan Administrasi Kependudukan baik statis maupun dinamis;
9. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
10. Optimalisasi infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi antar Perangkat Daerah;

11. Pengembangan aplikasi *e-office*; peningkatan kapasitas SDM;
12. Pembangunan aplikasi *e-perijinan* dan pengembangan *website*.

Arah Kebijakan:

1. Tersedianya Sistem Kearsipan Daerah;
2. Membuat program Sistem Kearsipan Daerah;
3. Penerapan arsip baku Perangkat Daerah;
4. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik;
5. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
6. Menyediakan data dan informasi kependudukan yang berkualitas;
7. Pengembangan *database* kependudukan yang mutakhir dan dinamis;
8. Penyusunan proyeksi penduduk yang dapat menggambarkan keadaan jumlah, struktur dan komposisi penduduk pada waktu mendatang sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah;
9. Pengembangan Sistem Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil Digital;
10. Pengembangan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan baik statis maupun dinamis;
11. Membangun keterpaduan infrastruktur jaringan internet dan intranet Perangkat Daerah;
12. Mengoptimalkan pengelolaan data dan pengembangan integrasi data/*web*;
13. Menerapkan pelaksanaan surat menyurat secara elektronik;
14. Sinergitas dan sinkronisasi pengendalian dan pengadaan perangkat lunak.

Sasaran 2: Meningkatkan disiplin, kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur melalui uji kompetensi/seleksi terbuka;
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur melalui Pelaksanaan absensi online semua Perangkat Daerah dan pemberian sanksi disiplin pegawai;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Peningkatan Kapasitas kinerja aparatur daerah;
5. Pembinaan hukum pertanahan pada aparatur pelaksana;
6. Menyelenggarakan dialog dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemda serta Tokoh masyarakat dan tokoh Agama selama 60 bulan.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan SDM aparatur yang berkompeten, akuntabel, kapabel;
2. Pelaksanaan absensi *online* dan pemberian sanksi disiplin pegawai;
3. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
4. Meningkatkan pemahaman aparatur pelaksana dan masyarakat di bidang pertanahan;

5. Penyelenggaraan dialog dengan Pemprov dan Pemerintah daerah serta Tokoh masyarakat dan tokoh Agama selama 60 bulan.

Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk melakukan kajian dan pemindahan pusat pemerintahan.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada Perangkat Daerah;
2. Penerapan standar pelayanan dan Standar Operasional pada seluruh Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan kapasitas pelayanan administrasi perkantoran melalui implementasi standar pelayanan prosedur;
4. Penguatan penatausahaan keuangan dan aset pada Perangkat Daerah dan PPKD di lingkup Pemkab Semarang;
5. Melaksanakan kunjungan kerjalar daerah (luarjawa, DKI/JABAR/JATIM, Jateng/DIY, Kota Semarang) pimpinan dan anggota DPRD;
6. Menyelenggarakan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD;
7. Pelaksanaan rapat-rapat paripurna DPRD;
8. Pelaksanaan kunjungan kerjadalam daerah Pimpinan dan anggota DPRD;
9. Pembahasan Raperda melalui Pansus;
10. Pengiriman kursus/ pelatihan/ bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD;
11. Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
12. Penyerapan aspirasi masyarakat di 5 daerah pemilihan oleh 45 orang anggota DPRD;
13. Pelaksanaan seminar/dialog melalui TMMD dalam rangka mewujudkan ketahanan NKRI;
14. Melaksanakan studi analisis dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik kepada masyarakat;
15. Penataan dan optimalisasi kebijakan pertanahan yang bersifat lokal;
16. Fasilitasi Program Operasional Daerah Agraria (PRODA);
17. Inventarisasi permasalahan pertanahan dan peningkatan kapasitas aparatur;
18. Pelaksanaan fasilitasi pensertifikatan tanah melalui Program PRODA;
19. Pendampingan dan optimalisasi layanan di Kecamatan;
20. Pelayanan jemput bola dan digitalisasi dokumen pencatatan sipil;
21. Pendataan kependudukan dengan melibatkan RT/RW;
22. Pelaksanaan dialog interaktif tentang pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan nasional;
23. Optimalisasi penyelenggaraan rakor pemerintahan dan PATEN.

Arah Kebijakan:

1. Pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada Perangkat Daerah;

2. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah yang memadai;
4. membangun sistem kerja dan tata kelola pelayanan pemerintahan;
5. Melaksanakan kunjungan kerja luar daerah (luarjawa, DKI/JABAR/JATIM, Jateng/DIY, Kota Semarang) pimpinan dan anggota DPRD selama 5 tahun;
6. Menyelenggarakan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD seperti Rapat Pimpinan, Rapat Banmus, Rapat Komisi, Rapat Bangkar internal/ eksternal, Rapat Pansus non Raperda, Rapat Badan Kehormatan selama 60 bulan;
7. Menyelenggarakan rapat-rapat paripurna DPRD meliputi rapat paripurna dan rapat paripurna istimewa selama 60 bulan;
8. Menyelenggarakan kunjungan kerja dalam daerah Pimpinan dan anggota DPRD selama 5 tahun;
9. Optimalisasi pembahasan Raperda dengan Instansi terkait;
10. Pelaksanaan pengiriman kursus/ pelatihan/ bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD selama 5 tahun;
11. Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
12. Penyerapan aspirasi masyarakat di 5 daerah pemilihan oleh 45 orang anggota DPRD 3 kali dalam setahun selama 5 tahun;
13. Pembahasan Raperda melalui Pansus dan Program Legislasi Daerah selama 60 bulan;
14. Meningkatkan kemandirian masyarakat;
15. Penyusunan kajian dan pemindahan pusat pemerintahan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
16. Pengelolaan pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Fasilitasi pensertifikatan pertanahan melalui PRODA;
18. Pemetaan wilayah konflik dan fasilitasi penanganan konflik pertanahan;
19. Memberikan kepastian Hukum bagi ahli waris;
20. Peningkatan kualitas pelayanan pada kecamatan dan kelurahan;
21. Mewujudkan pelayanan yang efektif efisien dan bebas biaya;
22. Optimalisasi layanan perijinan dan non perijinan di Kecamatan;
23. Mewujudkan semua penduduk memiliki identitas;
24. Optimalisasi pendataan penduduk melalui RT/RW;
25. Optimalisasi dialog interaktif tentang pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan nasional;
26. Terkoordinasinya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan PATEN.

Sasaran 4: Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Pendampingan dan penyusunan yang tersistem laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Semarang;

3. Liputan informasi kegiatan/rapat DPRD;
4. Mewujudkan sumber arsip berupa foto, rekaman kaset suara dan rekaman keping DVD kegiatan DPRD;
5. Peningkatan penyebarluasan informasi kegiatan DPRD;
6. Peningkatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Terlaksananya informasi pembangunan daerah melalui media.

Arah Kebijakan:

1. Optimalisasi penyusunan laporan dengan dukungan data yang sah;
2. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Reviu LKjIP;
3. Peningkatan kualitas SDM APiP selaku *quality assurance* penyusunan LKjIP;
4. Meningkatkan kualitas SDM APiP selaku *quality insurance* penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah dan LKD;
5. Optimalisasi pelaksanaan liputan kegiatan rapat DPRD;
6. Mewujudkan penyediaan sumber arsip berupa foto, rekaman kaset suara dan rekaman keping DVD kegiatan DPRD selama 5 tahun;
7. Meningkatkan penyebarluasan informasi kegiatan DPRD lewat Media Cetak kepada Pemda, DPRD, Desa, Bupati & DPRD se-Jateng, papan informasi selama 5 tahun;
8. Menyebarkan informasi pembangunan daerah secara cepat dan efektif;
9. Menginformasikan neraca keuangan daerah APBD, LPPD dan LKPD serta melaksanakan koordinasi kehumasan dalam rangka penyatuan persepsi agenda rutin;
10. Mengoptimalkan fungsikan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama/pembantu sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2008;
11. Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan;
12. Peningkatan akuntabilitas kinerja pembangunan dalam mendukung pencapaian visi misi daerah;
13. Peningkatan informasi hasil pembangunan.

Sasaran 5: Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk pemerintahan desa melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan berbasis data serta arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa;
2. Optimalisasi peningkatan pendapatan Daerah;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pembangunan;

5. Meningkatkan kinerja dan sinergitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
6. Menata, mempublikasikan Produk Hukum daerah dan Meningkatkan budaya taat hukum;
7. Meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan;
8. Peningkatan kapasitas, kualitas dan daya saing APIP di lingkup pemkab Semarang;
9. Penguatan kinerja pengawasan di lingkup pemkab Semarang;
10. Peningkatan kualitas pemeriksaan reguler, khusus dan kasus;
11. Penerapan kebijakan *whistle blowing system*;
12. Penguatan layanan pengaduan masyarakat;
13. Penguatan perencanaan kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah di lingkup pemkab Semarang;
14. Penguatan pengendalian Manajemen pelaksanaan KDH;
15. Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
16. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
17. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, aset daerah dan pelayanan publik bidang pendapatan yang didukung oleh aparatur profesional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima melalui Peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
18. Pembuatan sistem pengelolaan keuangan daerah;
19. Peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
20. Perbaikan prosedur pembayaran pajak dan retribusi daerah;
21. Pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Perangkat Daerah;
22. Penguatan pengendalian Manajemen pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
23. Penyusunan regulasi, fasilitasi dan asistensi pencapaian target SPM;
24. Pelaksanaan diskusi tentang pendidikan politik, melaksanakan bintek bantuan keuangan kepadapartai politik;
25. Pelaksanaan inventarisasi partai politik sampai dengan di tingkat kecamatan;
26. Pelaksanaan pendidikan/penyuluhan Undang-undang bidang politik, memerankan partai politik dalam pendidikan politik baik dilingkungan anggota maupun di masyarakat (orang);
27. Pembentukan Tim terpadu PPKS baik tingkat Kabupaten sampai dengan Kecamatan, melakukan analisa estimasi munculnya konflik sosial, melakukan langkah-langkah dini akan timbulnya permasalahan konflik sosial;
28. Pengembangan budaya lokal berwawasan kebangsaan sesuai amanat Permendagri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
29. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perilaku demokratis;
30. Peningkatan pemantauan terhadap kelompok radikal, deteksi dini, pengembangan jaring informasi;
31. Monitoring atas kegiatan ormas dan memantau ormas yg mendapat bantuan hibah;

32. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melalui dialog/sosialisasi sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas;
33. Sosialisasi pendaftaran Ormas baru serta melakukan pembinaan dan pengawasan;
34. Pemetaan wilayah konflik dan fasilitasi penanganan konflik pertanahan;
35. Pensertifikatan tanah milik Pemda;
36. Pemberian nama jalan/sarana umum/gedung kedinasan;
37. Pemeliharaan pilar batas daerah dan fasilitasi penegasan batas desa;
38. Optimalisasi perwujudan kerjasama antar daerah, pihak ketiga, pemerintah desa dan pihak luar negeri;
39. Meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
40. Optimalisasi legalitas wilayah administrasi pemerintahan.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan sistem kerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan teknologi informasi;
2. Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah;
3. Peningkatan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah;
4. Peningkatan kapasitas penatausahaan keuangan daerah;
5. Peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran keuangan Perangkat Daerah;
6. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. peningkatan kualitas pembangunan sarana prasarana daerah;
8. peningkatan kapasitas dan kualitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan;
9. penyusunan SOP juklak dan juknis pengawasan;
10. sosialisasi penerapan SPIP;
11. peningkatan kualitas laporan hasil audit/pemeriksaan;
12. pembentukan dan penerapan kebijakan *whistle blowing system*;
13. peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
14. peningkatan kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan LKD;
15. peningkatan kualitas Laporan Hasil Reviu RKA;
16. peningkatan kualitas pembinaan dan pemantauan pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan daerah;
17. Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
18. Melaksanakan intensifikasi, ekstensifikasi menyusun sistem memperbaiki prosedur pembayaran, optimalisasi aset;
19. Pembuatan sistem pengelolaan keuangan daerah;
20. Peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
21. Perbaikan prosedur pembayaran pajak dan retribusi daerah;
22. Menerapkan dan mengupayakan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM);
23. Melaksanakan pendataan penduduk luar domisili;
24. Mewujudkan masyarakat yang berjiwa patriotisme dan berwawasan kebangsaan;

25. Mewujudkan pemahaman sistem politik dan demokrasi kepada masyarakat;
26. Mewujudkan stabilitas sosial politik, keamanan dan ketertiban daerah;
27. Mewujudkan komunikasi yang baik dan harmonis antara masyarakat dan partai politik;
28. Memfasilitasi penyelesaian konflik sosial di daerah secara terpadu baik saat kejadian maupun paska konflik yang muncul di daerah dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (PKS);
29. Mengembangkan budaya lokal berwawasan kebangsaan;
30. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi budaya berperilaku demokratis bagi masyarakat;
31. Menggiatkan pemantauan terhadap kelompok radikal, deteksi dini dan pengembangan jaring informasi;
32. Mendata Ormas yang ada di Daerah;
33. Mewujudkan sinergitas LSM, Ormas dengan Pemerintah daerah;
34. Melaksanakan sosialisasi pendaftaran ormas baru serta melakukan pembinaan dan pengawasan;
35. Melaksanakan penataan serta optimalisasi pelaksanaan kebijakan pertanahan;
36. Mengurangi mata rantai penyelesaian permasalahan pertanahan (*off court*);
37. Optimalisasi pengelolaan tanah-tanah milik pemda;
38. Melakukan penjaringan usulan nama jalan/sarana umum/gedung kedinasan;
39. Peningkatan kerjasama pengelolaan batas wilayah antar daerah serta fasilitasi peningkatan kerjasama pengelolaan batas wilayah antar desa;
40. Fasilitasi kerjasama antar daerah, pihak ketiga, pemerintah desa dan pihak luar negeri;
41. Pemeliharaan pilar batas daerah dan fasilitasi penegasan batas desa.

MISI 4:

“Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan”.

Tujuan 5 : Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi.

Sasaran 1: Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang. Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Penyusunan dokumen tata ruang yang berkualitas dan aplikatif;
2. Peningkatan investasi dan kepastian berusaha serta meningkatkan fungsi BKPRD terkait dengan tata ruang;
3. Peningkatan perencanaan tata ruang untuk mewujudkan tata ruang yang efisien, efektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Arah Kebijakan:

1. Penyusunan dokumen rencana tata ruang yang bersifat komprehensif multi sektor melalui pengkajian secara teknokratis dan partisipatif;
2. Meningkatkan kinerja BKPRD;
3. Meningkatkan kinerja perencanaan tata ruang.

Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Melaksanakan pelayanan prima dalam pelayanan perijinan dan investasi;
2. Menjadikan kemitraan dengan UMKM sebagai persyaratan perijinan;
3. Pembebasan retribusi perizinan IMB dan HO untuk skala tertentu;
4. Peningkatan daya tarik dan daya saing investasi dan investor dengan kepastian hukum.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan mekanisme pelayanan perijinan melalui: Revisi SOP, Perizinan *Online*, Perizinan dengan jemput bola, Fasilitas Pengaduan, SDM aparatur yang dan handal, Penyederhanaan prosedur, Sarana dan prasarana, Sosialisasi perizinan, Koordinasi antar lembaga;
2. Pengembangan pelayanan perijinan UMKM;
3. Pembebasan retribusi perizinan IMB dan HO untuk skala tertentu;
4. Pemberian insentif untuk perusahaan yang memenuhi persyaratan.

Sasaran 3: Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Peningkatan koordinasi konsultasi dan advokasi hukum berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hukum;
2. Peningkatan pemahaman kelompok kadarkum terhadap hukum dan perilaku demokratis;
3. Peningkatan pengkajian peraturan perundang-undangan dan terlaksananya koordinasi serta konsultasi berkaitan dengan kajian peraturan perundang-undangan;
4. Peningkatan penyusunan produk hukum daerah;
5. Peningkatan sinergitas penanganan perkara peradilan;
6. Tersedianya naskah sumber arsip berupa buku produk perundangan selama 5 tahun;
7. Pelaksanaan sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

8. Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat tentang keamanan. Ketentaman dan ketertiban dengan arah kebijakan perwujudan kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitasnya;
9. Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat tentang hukum serta meningkatkan SDM aparatur panegak hukum dengan arah kebijakan perwujudan kesadaran dan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah dan peningkatan sinergitas penanganan perkara antar lembaga;
10. Meningkatkan peran serta Satlinmas dengan arah kebijakan mewujudkan peran serta dan kapasitas Satlinmas.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan penyelesaian permasalahan hukum di Kabupaten Semarang;
2. Meningkatkan pemahaman kelompok kadarkum terhadap hukum dan perilaku demokratis;
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketentuan peraturan Perundang-undangan;
4. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan nilai-nilai HAM;
5. Meningkatkan pengkajian peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan koordinasi serta konsultasi berkaitan dengan kajian peraturan perundang-undangan;
6. Meningkatkan penyelarasan produk hukum daerah;
7. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
8. Meningkatkan penataan dan publikasi produk hukum pusat dan daerah;
9. Meningkatkan sinergitas penanganan perkara peradilan;
10. Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat dan aparatur terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah dan peningkatan sinergitas penanganan perkara antar lembaga;
11. Tersedianyankah sumber arsip berupa buku produk perundangan selama 5 tahun;
12. Meningkatkan kapasitas kepada aparatur dan masyarakat tentang keamanan, Ketentaman dan ketertiban dengan arah kebijakan perwujudan kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitasnya;
13. Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat tentang hukum serta meningkatkan SDM aparatur panegak hukum dengan arah kebijakan perwujudan kesadaran dan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah dan peningkatan sinergitas penanganan perkara antar lembaga;
14. Mengoptimalkan peran Satlinmas dengan arah kebijakan mewujudkan peran serta dan kapasitas Satlinmas.

Sasaran 4: Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi;
2. Penyediaan regulasi daerah yang tepat dan responsif terhadap investor/dunia usaha;
3. Peningkatan upaya promosi investasi;
4. Meningkatkan peluang kepastian berusaha;
5. Meningkatkan peluang kepastian berusaha;
6. Peningkatan sosialisasi dan promosi investasi secara elektronik dan non elektronik.

Arah Kebijakan:

1. Simplifikasi/penyederhanaan regulasi untuk mendukung investasi dan menekan investasi ekonomi biaya tinggi;
2. Penyusunan regulasi-regulasi investasi;
3. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kebijakan investasi baik pada event skala lokal, regional maupun nasional;
4. Membangun partisipasi dan memberdayakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan promosi investasi.

Sasaran 5: Meningkatnya peran BPR dan BKK dalam membantu masyarakat.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Membangun kemitraan antara BPR dan BKK dengan UMKM;
2. Meningkatkan peranan BPR dan BKK dalam membangun perekonomian daerah pedesaan.

Arah Kebijakan:

1. Fasilitasi pemberian kemudahan bantuan akses modal berusaha bagi UMKM melalui BPR dan BKK;
2. Membangun partisipasi BPR dan BKK sebagai motor penggerak dalam mendidik rakyat untuk menggali potensi ekonomi yang terdapat di daerah pedesaan.

Sasaran 6: Adanya kewajiban dunia usaha memberdayakan sumber daya lokal.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Meningkatkan peranan dunia usaha dalam membangun perekonomian daerah berbasis sumber daya lokal.

Arah Kebijakan:

1. Membangun partisipasi dunia usaha sebagai sebagai roda penggerak perekonomian yang berbasis sumber daya lokal;
2. Memberikan insentif bagi dunia usaha sebagai daya tarik dalam upaya pengembangan perekonomian yang berbasis sumber daya lokal.

Tujuan 6 : Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa.

Sasaran 1: Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi di wilayah perbatasan dan terpencil.

Arah Kebijakan:

1. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi;
2. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi di wilayah perbatasan dan terpencil.

Sasaran 2: Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi.

Arah Kebijakan:

1. Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan;
2. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan embung.

Sasaran 3: Tersedianya prasarana olah raga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Penyediaan taman rekreasi, taman kota, dan hutan kota;
2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Arah Kebijakan:

1. Menambah luasan RTH dan memelihara RTH yang sudah ada;
2. Terwujudnya sarana prasarana olahraga untuk peningkatan prestasi atlet daerah di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Sasaran 4: Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur air bersih/minum.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan guna mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air bersih/air minum.

Sasaran 5: Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman;
2. Penurunan luas lingkungan permukiman kumuh;
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana sanitasi.
4. Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas serta kepastian bermukim bagi masyarakat;
2. Meningkatkan upaya penyehatan lingkungan permukiman kumuh;
3. Meningkatkan cakupan sanitasi dan peran masyarakat serta stakeholder dalam pembangunan sarana prasarana sanitasi;
4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas serta kepastian bermukim bagi masyarakat.

Sasaran 6: Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Pengelolaan sampah di perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya (bank sampah), peningkatan daur ulang sampah (TPST 3R) dan mengkonversi sampah menjadi energi dgn teknologi ramah lingkungan;
2. Penambahan pembangunan TPST 3R;
3. Melaksanakan sosialisasi penanganan sampah, fasilitasi pembentukan lembaga bank sampah dan pembangunan percontohan bank sampah.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan sampah dengan membangun TPA baru, teknologi pengolahan sampah dan peran serta seluruh *stakeholders* dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan;
2. Meningkatkan pengelolaan sampah oleh masyarakat;
3. Peningkatan pengelolaan sampah tuntas di tempat dengan peran serta masyarakat.

Sasaran 7: Terpenuhinya kebutuhan energi listrik.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Inventarisasi rumah tinggal yang belum menggunakan listrik;
2. Peningkatan dan pemerataan pelayanan PJU.

Arah Kebijakan:

1. Memberikan stimulan rumah tangga miskin untuk mendapatkan listrik;
2. Membangun, menata dan meterisasi serta meningkatkan pelayanan pemeliharaan PJU.

Sasaran 8: Terpenuhi sarana dan prasarana perdagangan.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Meningkatkan kualitas pasar-pasar tradisional dan mengendalikan tumbuh kembangnya mini market modern.

Arah Kebijakan:

1. Pembatasan mini market modern dan memodernisasikan pasar-pasar tradisional.

Sasaran 9: Terpenuhi RUAS TUNTAS dengan perencanaan matang, tepat bangun dan pembagian wewenang daerah-desa.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dengan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan;
2. Penyelenggaraan jalan poros desa dalam kondisi mantap dengan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan.

Arah Kebijakan:

1. Penanganan ruas jalan kabupaten yang belum tuntas dan mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun;
2. Penanganan ruas jalan poros desa yang belum tuntas dan mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun.

MISI 5:

“Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan”.

Tujuan 7 : Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak.

Sasaran 1: Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tanpa membedakan gender.

Sasaran 2: Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
2. Peningkatan peran perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender;
3. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial;
4. Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan;
5. Peningkatan kualitas SDM Organisasi sosial.

Arah Kebijakan:

1. Perlindungan anak dan perempuan;
2. Pelaksanaan pembangunan yang responsif gender (PPRG);
3. Meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat penyandang Masalah sosial;
4. Meningkatkan jaminan perlindungan sosial;
5. Pemberi insentif untuk perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal;
6. Meningkatkan pembinaan organisasi sosial.

Sasaran 3: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui sinergitas pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan sinergitas peran Pemerintah, masyarakat dan Lembaga masyarakat Dalam Mewujudkan Kabupaten Semarang menuju Kabupaten Layak Anak;
2. Penguatan peran kelembagaan Gugus Tugas KLA, dan Forum Komunikasi Anak Kabupaten Semarang.

Sasaran 4: Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa;
2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan dan potensi desasebagai salah satu sumber pendapatan;
3. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa;
4. Peningkatan fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan;
5. Penyerahan lahan yang dimiliki desa ke Pemerintah Daerah, misalnya untuk jalan poros desa, sarana air bersih, embung jalud, jitung;
6. Pengembangan produk unggulan berbasis desa;
7. Membangun desa berdikari;
8. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
9. Peningkatan serapan aspirasi dari masyarakat;
10. Peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
11. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kunjungan/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan kualitas perangkat desa, pemilihan kades serentak;
2. Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintahan desa, pemilihan pendamping desa;
3. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan dan potensi desa sebagai salah satu pendapatan;
4. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa;
5. Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintahan desa, pemilihan pendamping desa;
6. Meningkatkan fasilitas pembangunan kawasan perdesaan;
7. Membangun desa berdikari;
8. Peningkatan kualitas SDM aparatur desa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa;
9. Meningkatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsibilitas;
10. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan akan nilai luhur dan budaya bangsa;
11. Melaksanakan kunjungan kerja/inspeksi Kepala dan Wakil Kepala Daerah dengan tertib lancar dan teratur.

MISI 6:

“Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya”.

Tujuan 8 : Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Sasaran 1: Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumberdaya alam.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Penanganan dan pemanfaatan limbah.

Arah Kebijakan:

1. Menangani gas metan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran 2: Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Pembimbingan Perdes tentang lingkungan hidup.

Arah Kebijakan:

1. Menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat desa.

Sasaran 3: Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Pelaksanaan pengujian kualitas air daya dukung dan daya tampung, penetapan kelas air sungai, pelaksanaan konservasi, penanaman pohon, penambahan penyediaan air tanah, penanganan rawa pening dan pelaksanaan pengkajian KLHS;
2. Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat.

Arah Kebijakan:

1. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan memastikan bahwa kebijakan rencana dan program berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana (mitigasi/pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi).

Sasaran 4: Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Perbanyak vegetasi tanaman kehutanan dan konservasi lahan.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan kegiatan penghijauan baik vegetatif maupun sipil teknis.

Sasaran 5: Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Pemanfaatan lahan kritis;
2. Penguatan kelembagaan kelompok petani dalam penggunaan pupuk organik.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan jumlah tanaman kehutanan;
2. Pengembangan kawasan pertanian organik.

Sasaran 6: Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR.

Guna mewujudkan sasaran ini, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

Strategi:

1. Meningkatkan kualitas pemanfaatan lahan dan pengendalian pemanfaatannya.

Arah Kebijakan:

1. Optimalisasi peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan;
2. Peningkatan kinerja aparatur/sumberdaya manusia dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan;
3. Pengendalian pertanahan dan penertiban tanah terlantar;
4. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta yang berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian pemanfaatan lahan.

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan keterpaduan program pembangunan antarwilayah dan antarsektor yang berdimensi keruangan, diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumberdaya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Kondisi pembangunan kewilayahan saat ini masih terdapat beberapa permasalahan pengembangan wilayah di Kabupaten Semarang, yaitu:

- a. Pembangunan ekonomi yang belum merata, diindikasikan dengan masih tingginyakesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah;
- b. Pengembangan wilayah belum didasarkan pada potensi yang dimiliki.

Pengembangan wilayah Kabupaten Semarang ke depan, diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut, dengan menetapkan tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Semarang yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan baik dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya, dengan tetap memperhatikan potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dengan kawasan budidaya;
2. Tercapainya distribusi pembangunan yang merata antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan;
3. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.

Guna mencapai tujuan dan sasaran pengembangan wilayah tersebut, maka telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai berikut:

Strategi :

1. Pengembangan kawasan strategis kabupaten;
2. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata khususnya di wilayah selatan;
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah Selatan;
4. Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Strategis Rawa Pening;
5. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat terutama di kecamatan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi;
6. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki sumberdaya alam tinggi tetapi nilai PDRB per kapitanya rendah;
7. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan;
8. Penguatan kerjasama antar daerah/wilayah/regional dan antar pihak.

Arah Kebijakan :

1. Pengembangan kawasan strategis kabupaten, dilakukan melalui upaya:
 - a). Pembangunan wilayah terpadu
 - b). Pembangunan dan penataan kawasan pariwisata
2. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata khususnya di wilayah Selatan, dilakukan melalui upaya:
 - a). Peningkatan pelayanan dasar;
 - b). Penyediaan sarana prasarana transportasi yang berkualitas dan memadai;
 - c). Pembangunan konektivitas transportasi antar wilayah
 - d). Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah Selatan, melalui upaya:
 - a). Peningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur;
 - b). Peningkatan aksesibilitas antar wilayah;
4. Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Strategis Rawa Pening, melalui upaya:
 - a). Pengendalian pertumbuhan enceng gondok;
 - b). Pengendalian pencemaran limbah terhadap rawa pening;
 - c). Pengendalian sedimentasi;
 - d). Pengembangan kawasan rawa pening sebagai obyek wisata alam;
 - e). Pengendalian kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar rawa pening;
 - f). Sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan penanganan rawa pening;

- g). Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat
- 5. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat terutama di kecamatan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi, melalui upaya:
 - a). Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, dan rumah layak huni;
 - b). Mengembangkan ekonomi padat karya untuk mengurangi pengangguran.
- 6. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki sumberdaya alam tinggi tetapi nilai PDRB per kapitanya rendah, melalui upaya:
 - a). Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas;
 - b). Mengendalikan konversi lahan sawah dengan mengimplementasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c). Mengembangkan kawasan berdasarkan potensi unggulan baik di pedesaan maupun perkotaan;
 - d). Mengembangkan industri unggulan daerah, baik skala kecil, menengah, maupun besar;
 - e). Mendorong fasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha tani dan UMKM di wilayah pedesaan.
- 7. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, melalui upaya:
 - a). Meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam terutama di pedesaan yang termasuk daerah tertinggal dan di kawasan perbatasan;
 - b). Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar di desa-desa tertinggal;
 - c). Mendorong pengembangan investasi pada daerah-daerah tertinggal, terutama di wilayah selatan;
 - d). Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
- 8. Penguatan kerjasama antar daerah/wilayah/regional dan antar pihak, melalui upaya:
 - a). Memfasilitasi pengembangan kerjasama antar wilayah/daerah;
 - b). Pemantapan skema kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.

6.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Tahunan

Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka ditetapkan arah kebijakan dan prioritas tahunan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan tahun 2016 adalah sosialisasi, konsolidasi dan penyelesaian target yang belum tercapai pada periode RPJMD 2010-2015, dengan prioritas :
 - a. Sosialisasi dan konsolidasi visi dan misi pasca pemilihan kepala daerah dengan 31 (tiga puluh satu) program prioritas;
 - b. Melanjutkan pelaksanaan pembangunan sesuai RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2016;
 - c. Menyelesaikan capaian target kinerja yang belum tercapai pada RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015;

- d. Penyiapan instrument perencanaan pembangunan untuk mewujudkan bangunan MAJU MATRA.
2. Arah kebijakan tahun 2017 adalah penguatan fondasi bangunan MAJU MATRA, dengan prioritas :
- a. Pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan;
 - b. Pemenuhan standar pelayanan dasar kesehatan;
 - c. Pemenuhan standar pelayanan dasar pekerjaan umum;
 - d. Pemenuhan standar pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- Didukung dengan :**
- 1) Penataan ruang yang optimal
 - 2) Penciptaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3) Pemenuhan akses pelayanan sosial;
 - 4) Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan publik;
 - 5) Penciptaan stabilitas makro ekonomi;
 - 6) Penciptaan kelembagaan pemerintahan daerah yang kuat; serta
 - 7) Pemantapan koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
3. Arah kebijakan tahun 2018 adalah pemantapan fondasi bangunan MAJU MATRA, dengan prioritas :
- a. Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan;
 - b. Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan dasar kesehatan;
 - c. Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan dasar pekerjaan umum;
 - e. Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- Didukung dengan :**
- 1) Penataan ruang yang berkualitas;
 - 2) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3) Pelayanan dan perlindungan sosial yang komprehensif;
 - 4) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik;
 - 5) Penguatan struktur ekonomi dan pengembangan penghidupan yang berkelanjutan melalui pengembangan mata pencaharian penduduk dan pembangunan sistem pendukung penghidupan masyarakat melalui kemudahan akses pasar dan permodalan; serta
 - 6) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
4. Arah kebijakan tahun 2019 adalah penguatan pilar-pilar bangunan MAJU MATRA, dengan prioritas :
- a. Optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi;
 - b. Optimalisasi kelestarian lingkungan hidup;
 - c. Optimalisasi pembangunan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan perwujudan kepastian hukum.

Didukung dengan:

- 1) Optimalisasi dan peningkatan kualitas pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 2) Penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan;
 - 3) Pemantapan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - 4) Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial yang komprehensif;
 - 5) Perluasan akses dan kualitas pelayanan publik;
 - 6) Pemantapan struktur ekonomi dan pemantapan penghidupan yang berkelanjutan melalui pengembangan mata pencaharian penduduk dan pembangunan sistem pendukung penghidupan masyarakat melalui kemudahan akses pasar dan permodalan; serta
 - 7) Pemantapan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
5. Arah kebijakan tahun 2020 adalah pemantapan pilar-pilar bangunan MAJU MATRA dengan prioritas :
- a. Peningkatan daya saing ekonomi;
 - b. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepastian hukum.

Didukung dengan :

- 1) Pemantapan kualitas pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 2) Penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan;
 - 3) Pemantapan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 4) Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial yang komprehensif;
 - 5) Pemantapan akses dan kualitas pelayanan publik;
 - 6) Pemantapan struktur ekonomi dan pemantapan penghidupan yang berkelanjutan melalui pengembangan mata pencaharian penduduk dan pembangunan sistem pendukung penghidupan masyarakat melalui kemudahan akses pasar dan permodalan; serta
 - 7) Pemantapan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
6. Arah kebijakan tahun 2021 adalah perwujudan totalitas bangunan MAJU MATRA, dengan prioritas :
- a. Pemantapan daya saing ekonomi;
 - b. Pemantapan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. Pemantapan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pemantapan kualitas tata kelola pemerintah dan kepastian hukum.

Didukung dengan :

- 1) Pemantapan kualitas pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 2) Penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan;
- 3) Pemantapan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

- 4) Pemantapan pelayanan dan perlindungan social yang komprehensif;
- 5) Pemantapan akses dan kualitas pelayanan publik;
- 6) Pemantapan struktur ekonomi dan pemantapan penghidupan yang berkelanjutan melalui pengembangan mata pencaharian penduduk dan pembangunan sistem pendukung penghidupan masyarakat melalui kemudahan akses pasar dan permodalan; serta
- 7) Pemantapan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Adapun keterkaitan antara misi, isu strategis, sasaran dan strategi dapat dilihat pada tabel 6.1:

Tabel 6.1
Keterkaitan Misi, Isu Strategis dan Strategi

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.	1. Belum optimalnya pemenuhan kualitas/mutu standar pendidikan	<p>1. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan.</p> <p>2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal dan pendidikan tinggi.</p> <p>3. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, yang memiliki <i>Intelligence Quotient, Emotional Quotient, dan Spiritual Quotient</i>.</p>	<p>1. Penguatan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</p> <p>2. Penguatan akses dan mutu pendidikan Sekolah Dasar (SD)/sederajat;</p> <p>3. Penguatan akses dan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat;</p> <p>4. Penguatan akses dan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat;</p> <p>5. Penguatan akses dan mutu pendidikan non formal;</p> <p>6. Penguatan Pendidikan karakter dan budi pekerti dalam rangka mendukung revolusi mental.</p> <p>1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;</p> <p>2. Peningkatan budaya baca masyarakat.</p> <p>1. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di TK/RA;</p> <p>2. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SD/MI;</p> <p>3. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SMP/MTs;</p> <p>4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SMA/SMK/MA;</p> <p>5. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di TK/RA.</p>

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
			<p>4. Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>5. Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan, memiliki daya saing, dan bersertifikat.</p> <p>6. Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja.</p> <p>7. Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya, agama, pemuda olah raga dan revolusi mental.</p>	<p>1. Membangun kemitraan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>1. Melaksanakan relevansi kurikulum</p> <p>1. Peningkatan Tenaga Kerja Mandiri; 2. Penguatan lembaga Pendidikan Non Formal.</p> <p>1. Peningkatan kapasitas organisasi pemuda; 2. Peningkatan dan pengembangan kegiatan kepemudaan; 3. Meningkatnya peran dan prestasi organisasi kepemudaan; 4. Peningkatan fungsi sekolah, partisipasi masyarakat dalam rangka pelestarian budaya; 5. Optimalisasi lembaga pendidikan keagamaan dalam meningkatkan sinergitas dan peran pemerintah kepada masyarakat; 6. Sosialisasi peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama; 7. Melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama dimasyarakat; 8. Membentuk kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan dalam rangka memberi bekal pentingnya kewaspadaan dini untuk menjaga kondusivitas wilayah; 9. Optimalisasi upaya pelestarian budaya;</p>

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
		<p>2. Belum optimalnya pemenuhan kualitas/mutu standar pelayanan kesehatan</p>	<p>8. Pembinaan peran komite sekolah dan meningkatkan penyaluran beasiswa.</p> <p>1. Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; semua warga miskin mendapatkan layanan secara gratis tanpa terkecuali.</p> <p>2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah daerah dan swasta yang berkualitas dan berijin.</p> <p>3. Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat).</p>	<p>10. Optimalisasi pengembangan minat bakat dalam bidang seni dan budaya;</p> <p>11. Menyediakan sarana dan prasarana seni dan budaya yang representatif;</p> <p>12. Penyempurnaan sistem manajemen pembinaan pemuda dan olah raga;</p> <p>13. Optimalisasi pendayagunaan partisipasi pemuda dalam pembangunan;</p> <p>14. Optimalisasi pembinaan prestasi bidang olah raga;</p> <p>15. Menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang representatif.</p> <p>1. Penguatan peran komite SD;</p> <p>2. Penguatan peran komite SMP;</p> <p>3. Penguatan peran komite SMA/SMK;</p> <p>4. Pemenuhan beasiswa miskin SD;</p> <p>5. Pemenuhan beasiswa miskin SMP;</p> <p>6. Pemenuhan beasiswa miskin SMA/SMK.</p> <p>1. Meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);</p> <p>2. Pendataan penerima bantuan iuran JKN secara periodik.</p> <p>1. Meningkatkan standar pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan melibatkan lintas sektor terkait;</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang.</p> <p>1. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.</p>

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih 5. Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar. 6. Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera. 7. Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, khusus Puskesmas Tengahan akan dibangun setara Rumah Sakit tipe D. Serta terlaksananya E-kesehatan termasuk diantaranya MATRA STAT dan SMS GATEWAY. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses sanitasi yang layak dan air bersih. 1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat dan cerdas. 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (PKD).
2	Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.	1. Belum optimalnya pengelolaan potensi produk-produk unggulan daerah guna meningkatkan kualitas daya saing ekonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing dan dipatenkan. 2. Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi dan peningkatan kompetensi serta daya saing usaha KUMKM; 2. Peningkatan jumlah UMKM; 3. Peningkatan kapasitas kelompok wira usaha pemuda. 1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya pangan B2SA; 2. Penerapan saptata usaha tani komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar; 3. Mengembangkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Semarang; 4. Penanganan daerah rawan pangan; 5. Optimalisasi informasi harga, pasokan pangan, dan akses.

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
		<p>2. Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan pengangguran</p>	<p>3. Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal.</p> <p>4. Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber daya alam, serta industri kreatif yang dipatenkan.</p> <p>5. Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)</p> <p>6. Diwajibkannya perusahaan, perkantoran, rumah makan, PNS untuk pro terhadap UMKM.</p> <p>1. Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal.</p> <p>2. Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran, <i>e-pertanian</i>.</p>	<p>1. Optimalisasi pengembangan perekonomian Daerah berbasis potensi lokal.</p> <p>1. Mengembangkan industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal; 2. Mengurus hak paten budaya-budaya lokal sebagai identitas daerah.</p> <p>1. Mengoptimalkan peran <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>; 2. Pembinaan kelompok yang memiliki skala usaha produksi.</p> <p>1. Diwajibkannya perusahaan, perkantoran, rumah makan, PNS untuk pro terhadap UMKM.</p> <p>1. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja; 2. Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan; 3. Peluang peningkatan jumlah investor dan kepastian berusaha.</p> <p>1. Penyediaan saprodi untuk petani; 2. Kemudahan untuk mengakses kredit; 3. Fasilitasi kemitraan kelompok;</p>

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
				4. Pembinaan kelompok tani agribisnis; 5. Pengendalian laju inflasi daerah; 4. Penyediaan pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); 6. Monitoring kebijakan kualitas Sumber Daya Alam; 7. Pembinaan kelompok tani agribisnis.
3	Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>good governance</i> didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.	1. Belum optimalnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun tata laksananya	1. Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan <i>Information Communication and Technology (ICT)</i> melalui <i>Electronic Government</i> dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (<i>database</i>). 2. Meningkatnya disiplin, kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan.	1. Mewujudkan peningkatan tertib arsip pemerintah daerah dan pemerintah desa; 2. Menyiapkan manajemen sistem informasi dan regulasi tata kelola dan optimalisasi manajemen sarana prasarana informasi; 3. Pencetakan KTP-el di 19 Kecamatan; 4. Pendataan Penduduk Non Permanen; 5. Pemutakhiran Data Penduduk; 6. Penyusunan Proyeksi Penduduk; 7. Digitalisasi Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 8. Pelayanan Administrasi Kependudukan baik statis maupun dinamis; 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; 10. Optimalisasi infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi antar Perangkat Daerah; 11. Pengembangan aplikasi <i>e-office</i> ; peningkatan kapasitas SDM; 12. Pembangunan aplikasi <i>e-perijinan</i> dan pengembangan <i>website</i> . 1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur melalui uji kompetensi/seleksi terbuka; 2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur melalui Pelaksanaan absensi online semua Perangkat Daerah dan pemberian sanksi disiplin pegawai;

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
			<p>3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk melakukan kajian dan pemindahan pusat pemerintahan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan; 4. Peningkatan Kapasitas kinerja aparatur daerah; 5. Pembinaan hukum pertanahan pada aparatur pelaksana; 6. Menyelenggarakan dialog dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemda serta Tokoh masyarakat dan tokoh Agama. 1. Optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada Perangkat Daerah; 2. Penerapan standar pelayanan dan Standar Operasional pada seluruh Perangkat Daerah; 3. Meningkatkan kapasitas pelayanan administrasi perkantoran melalui implementasi standar pelayanan prosedur; 4. Penguatan penatausahaan keuangan dan aset pada Perangkat Daerah dan PPKD di lingkup pemkab Semarang; 5. Melaksanakan kunjungan kerja luar daerah (luarjawa, DKI/JABAR/JATIM, Jateng/DIY, Kota Semarang) pimpinan dan anggota DPRD; 6. Menyelenggarakan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD; 7. Pelaksanaan rapat-rapat paripurna DPRD; 8. Pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah Pimpinan dan anggota DPRD; 9. Pembahasan Raperda melalui Pansus; 10. Pengiriman kursus/ pelatihan/ bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD; 11. Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; 12. Penyerapan aspirasi masyarakat di 5 daerah

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
			<p>4. Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.</p>	<p> pemilihan oleh 45 orang anggota DPRD; 13. Pelaksanaan seminar/dialog melalui TMMD dalam rangka mewujudkan ketahanan NKRI; 14. Melaksanakan studi analisis dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik kepada masyarakat; 15. Penataan dan optimalisasi kebijakan pertanahan yang bersifat lokal; 16. Fasilitasi Program Operasional Daerah Agraria (PRODA); 17. Inventarisasi permasalahan pertanahan dan peningkatan kapasitas aparatur; 18. Pelaksanaan fasilitasi pensertifikatan tanah melalui Program PRODA; 19. Pendampingan dan optimalisasi layanan di Kecamatan; 20. Pelayanan jemput bola dan digitalisasi dokumen pencatatan sipil; 21. Pendataan kependudukan dengan melibatkan RT/RW; 22. Pelaksanaan dialog interaktif tentang pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan nasional; 23. Optimalisasi penyelenggaraan rakor pemerintahan dan PATEN. </p> <p> 1. Pendampingan dan penyusunan yang tersistem laporan penyelenggaraan pemerintah daerah; 2. Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Semarang; 3. Liputan informasi kegiatan/rapat DPRD; </p>

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
			<p>5. Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk pemerintahan desa melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan berbasis data serta arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.</p>	<p>4. Mewujudkan sumber arsip berupa foto, rekaman kaset suara dan rekaman keping DVD kegiatan DPRD;</p> <p>5. Peningkatan penyebarluasan informasi kegiatan DPRD;</p> <p>6. Peningkatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>7. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>8. Terlaksananya informasi pembangunan daerah melalui media.</p> <p>1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa;</p> <p>2. Optimalisasi peningkatan pendapatan Daerah;</p> <p>3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;</p> <p>4. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pembangunan;</p> <p>5. Meningkatkan kinerja dan sinergitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>6. Menata, mempublikasikan Produk Hukum daerah dan Meningkatkan budaya taat hukum;</p> <p>7. Meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan;</p> <p>8. Peningkatan kualitas dan daya saing APIP di lingkup pemkab semarang;</p> <p>9. Penguatan kinerja pengawasan di lingkup pemkab semarang;</p> <p>10. Peningkatan kualitas pemeriksaan reguler, khusus dan kasus;</p> <p>11. Penerapan kebijakan <i>whistle blowing system</i>;</p>

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
				<p>12. Penguatan layanan pengaduan masyarakat;</p> <p>13. Penguatan perencanaan kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah di lingkup pemkab Semarang;</p> <p>14. Penguatan pengendalian Manajemen pelaksanaan KDH;</p> <p>15. Optimalisasi pengelolaan aset daerah;</p> <p>16. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;</p> <p>17. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, asset daerah dan pelayanan publik bidang pendapatan yang didukung oleh aparatur professional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima melalui Peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>18. Pembuatan sistem pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>19. Peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>20. Perbaikan prosedur pembayaran pajak dan retribusi daerah;</p> <p>21. Pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Perangkat Daerah;</p> <p>22. Penguatan pengendalian Manajemen pelaksanaan pemerintahan Daerah;</p> <p>23. Penyusunan regulasi, fasilitasi dan asistensi pencapaian target SPM;</p> <p>24. Pelaksanaan diskusi tentang pendidikan politik, melaksanakan bintek bantuan keuangan kepada partai politik;</p>

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
				25. Pelaksanaan inventarisasi partai politik sampai dengan di tingkat kecamatan; 26. Pelaksanaan pendidikan/penyuluhan Undang-undang bidang politik, memerankan partai politik dalam pendidikan politik baik dilingkungan anggota maupun di masyarakat (orang); 27. Pembentukan Tim terpadu PPKS baik tingkat Kabupaten sampai dengan Kecamatan, melakukan analisa estimasi munculnya konflik sosial, melakukan langkah-langkah dini akan timbulnya permasalahan konflik sosial; 28. Pengembangan budaya lokal berwawasan kebangsaan sesuai amanat Permendagri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan; 29. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perilaku demokratis; 30. Peningkatan pemantauan terhadap kelompok radikal, deteksi dini, pengembangan jaring informasi; 31. Monitoring atas kegiatan ormas dan memantau ormas yg mendapat bantuan hibah; 32. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melalui dialog/sosialisasi sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas; 33. Sosialisasi pendaftaran Ormas baru serta melakukan pembinaan dan pengawasan; 34. Pemetaan wilayah konflik dan fasilitasi penanganan konflik pertanahan; 35. Pensertifikatan tanah milik Pemda; 36. Pemberian nama jalan/sarana umum/gedung kedinasan;

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
				37. Pemeliharaan pilar batas daerah dan fasilitasi penegasan batas desa; 38. Optimalisasi perwujudan kerjasama antar daerah, pihak ketiga, pemerintah desa dan pihak luar negeri; 39. Meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; 40. Optimalisasi legalitas wilayah administrasi pemerintahan.
4	Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan	1. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta masih kurangnya ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana wilayah baik secara kuantitas maupun kualitas	1. Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang. 2. Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. 3. Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum.	1. Penyusunan dokumen tata ruang yang berkualitas dan aplikatif; 2. Peningkatan investasi dan kepastian berusaha serta meningkatkan fungsi BKPRD terkait dengan tata ruang; 3. Peningkatan perencanaan tata ruang untuk mewujudkan tata ruang yang efisien, efektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 1. Melaksanakan pelayanan prima dalam pelayanan perijinan dan investasi; 2. Menjadikan kemitraan dengan UMKM sebagai persyaratan perijinan; 3. Pembebasan retribusi perizinan IMB dan HO untuk skala tertentu; 4. Peningkatan daya tarik dan daya saing investasi dan investor dengan kepastian hukum. 1. Peningkatan kordinasi konsultasi dan advokasi hukum berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hukum;

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
			<p>4. Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi.</p>	<p>2. Peningkatan pemahaman kelompok kadarkum terhadap hukum dan perilaku demokratis;</p> <p>3. Peningkatan pengkajian peraturan perundang-undangan dan terlaksananya koordinasi</p> <p>4. Peningkatan penyusunan produk hukum daerah;</p> <p>5. Peningkatan sinergitas penanganan perkara peradilan;</p> <p>6. Tersedianya naskah sumber arsip berupa buku produk perundangan selama 5 tahun;</p> <p>7. Pelaksanaan sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba (P4GN);</p> <p>8. Meningkatkan pemahaman aparaturnya dan masyarakat tentang keamanan. Ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitasnya;</p> <p>9. Meningkatkan pemahaman aparaturnya dan masyarakat tentang hukum serta meningkatkan SDM aparaturnya panegak hukum dengan arah kebijakan perwujudan kesadaran dan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparaturnya terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah dan peningkatan sinergitas penanganan perkara antar lembaga;</p> <p>10. Meningkatkan peran serta Satlinmas dengan arah kebijakan mewujudkan peran serta dan kapasitas Satlinmas.</p> <p>1. Meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi;</p> <p>2. Penyediaan regulasi daerah yang tepat dan responsif terhadap investor/dunia usaha;</p>

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
				3. Peningkatan upaya promosi investasi; 4. Meningkatkan peluang kepastian berusaha; 5. Meningkatkan peluang kepastian berusaha; 6. Peningkatan sosialisasi dan promosi investasi secara elektronik dan non elektronik.
			5. Meningkatnya peran BPR dan BKK dalam membantu masyarakat. 6. Adanya kewajiban dunia usaha memberdayakan sumber daya lokal. 7. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata. 8. Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian. 9. Tersedianya prasarana olah raga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan. 10. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai. 11. Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi.	1. Membangun kemitraan antara BPR dan BKK dengan UMKM; 2. Meningkatkan peranan BPR dan BKK dalam membangun perekonomian daerah pedesaan. 1. Meningkatkan peranan dunia usaha dalam membangun perekonomian daerah berbasis sumber daya lokal. 1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; 2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi di wilayah perbatasan dan terpencil. 1. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi. 1. Penyediaan taman rekreasi, taman kota, dan hutan kota; 2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga. 1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur air bersih/minum. 1. Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman; 2. Penurunan luas lingkungan permukiman kumuh;

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
			<p>12. Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah.</p> <p>13. Terpenuhiya kebutuhan energi listrik</p> <p>14. Terpenuhiya sarana dan prasarana perdagangan.</p> <p>15. Terpenuhiya RUAS TUNTAS dengan perencanaan matang, tepat bangun dan pembagian wewenang daerah-desa.</p>	<p>3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana sanitasi;</p> <p>4. Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.</p> <p>1. Pengelolaan sampah di perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya (bank sampah), peningkatan daur ulang sampah (TPST 3R) dan mengkonversi sampah menjadi energi dgn teknologi ramah lingkungan;</p> <p>2. Penambahan pembangunan TPST 3R;</p> <p>3. Melaksanakan sosialisasi penanganan sampah, fasilitasi pembentukan lembaga bank sampah dan pembangunan percontohan bank sampah.</p> <p>1. Inventarisasi rumah tinggal yang belum menggunakan listrik;</p> <p>2. Peningkatan dan pemerataan pelayanan PJU.</p> <p>1. Meningkatkan kualitas pasar-pasar tradisional dan mengendalikan tumbuh kembangnya mini market modern.</p> <p>1. Penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dengan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan;</p> <p>2. Penyelenggaraan jalan poros desa dalam kondisi mantap dengan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan.</p>

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
5	Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan.	1. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pembangunan yang berprespektif gender dan berorientasi pada pemenuhan hak anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. 2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup. 3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui sinergitas pemerintah, masyarakat, dan swasta. 4. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan. 1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 2. Peningkatan peran perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender; 3. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial; 4. Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan; 5. Peningkatan kualitas SDM Organisasi sosial. 1. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak. 1. Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa; 2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan dan potensi desa sebagai salah satu sumber pendapatan; 3. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa; 4. Peningkatan fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan; 5. Penyerahan lahan yang dimiliki desa ke Pemerintah Daerah, misalnya untuk jalan poros desa, sarana air bersih, embung jalud, jitung; 6. Pengembangan produk unggulan berbasis desa;

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
				7. Membangun desa berdikari; 8. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 9. Peningkatan serapan aspirasi dari masyarakat; 10. Peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa; 11. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kunjungan/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6	Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.	1. Semakin menurunnya kualitas daya dukung lingkungan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan	1. Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumberdaya alam. 2. Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. 4. Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat. 5. Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian.	1. Penanganan dan pemanfaatan limbah. 1. Pembimbingan Perdes tentang lingkungan hidup. 1. Pelaksanaan pengujian kualitas air daya dukung dan daya tampung, penetapan kelas air sungai, pelaksanaan konservasi, penanaman pohon, penambahan penyediaan air tanah, penanganan rawa pening dan pelaksanaan pengkajian KLHS; 2. Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat. 1. Perbanyak vegetasi tanaman kehutanan dan konservasi lahan. 1. Pemanfaatan lahan kritis; 2. Penguatan kelembagaan kelompok petani dalam penggunaan pupuk organik.

NO.	MISI	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
			6. Terkendalnya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR.	1. Meningkatkan kualitas pemanfaatan lahan dan pengendalian pemanfaatannya.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum program pembangunan daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait didalam merumuskan kebijakan dan program tahun 2016-2021 sesuai dengan fungsinya masing-masing agar senantiasa dapat selaras dengan strategi dan arah kebijakan dari tiap-tiap misi pembangunan daerah tahun 2016-2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan Umum untuk mewujudkan Misi Ke-1: **Meningkatkan kualitas SDM yang beriman bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu, dengan tujuan Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai IPTEK**, dirumuskan sasaran sebagai berikut:

1. Penguatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, kuantitas tenaga kerja kesehatan dan sarana prasarana kesehatan serta pelibatan masyarakat;
2. Terbentuknya SDM di segala bidang yang berkualitas, memiliki ketrampilan dan berdaya saing;
3. Penguatan akses dan mutu pendidikan, sertifikasi tenaga pendidik, peningkatan relevansi kurikulum;
4. Pembentukan karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, tahan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional;
5. Penguatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan serta kerukunan antar umat;
6. Penguatan kualitas SDM dan kelembagaan yang mampu menghasilkan aplikasi IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas termasuk industri;
7. Penguatan tatanan sosial politik kemasyarakatan dan penyelenggaraan fungsi pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehat dan cerdas.

Kebijakan Umum untuk mewujudkan Misi Ke-2: **Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, dengan tujuan Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal**, dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan jenis dan kualitas bahan baku lokal untuk industri melalui teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;
2. Mendorong terealisasinya pengembangan kawasan industri sesuai revisi RTRW;

3. Pengembangan kualitas dan produk wisata melalui promosi wisata dan kerja sama regional;
4. Penguatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang diarahkan untuk produk-produk system agribisnis, menjamin ketersediaan pangan serta menciptakan swasembada pangan dan ekspor;
5. Pengembangan kelembagaan petani melalui kemudahan memperoleh akses bahan baku dan teknologi pertanian ditunjang dengan sarana prasarana;
6. Pengembangan industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber daya alam, serta industri kreatif yang dipatenkan

Kebijakan Umum untuk mewujudkan Misi Ke-3: **Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi**, dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* melalui peningkatan transparansi dan keadilan serta melakukan kajian dan pemindahan pusat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Pengembangan efisiensi dan efektifitas pengawasan dengan membentuk sistem pengawasan yang terpadu;
3. Pengembangan teknologi informasi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan SPM pada bidang pelayanan dasar penunjang pertumbuhan ekonomi yang memenuhi indeks kepuasan masyarakat;
5. Penguatan system demokrasi, politik dan penegakan hukum melalui peningkatan kesadaran politik, penegak hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM.

Kebijakan Umum untuk mewujudkan Misi Ke-4: **Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan**, dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan perekonomian daerah berlandaskan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan;
2. Penguatan investasi daerah pada sektor industri, pertanian dan pariwisata dalam rangka mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi;
3. Pemerataan penyediaan fasilitas umum, sarana dan prasarana transportasi dan penunjangnya dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha;
4. Pengembangan sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan pendidikan;
5. Pengolahan jenis dan ragam pangan dengan teknologi dalam rangka ketahanan pangan;
6. Perluasan akses pemasaran dan jejaring kemitraan baik ditingkat lokal, regional, maupun nasional;

7. Pengembangan kawasan permukiman beserta fasilitasnya yang sesuai kebutuhan masyarakat, selaras dengan tata ruang, serta menciptakan titik-titik baru perkembangan ekonomi;
8. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang merata, berkualitas, dengan kuantitas yang seimbang untuk memudahkan akses masyarakat secara cepat, tepat dan murah berdasarkan potensi geografis diseluruh wilayah Kabupaten Semarang.

Kebijakan Umum untuk mewujudkan Misi Ke-5: **Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan**, dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup;
2. Pemantapan budaya penegakan keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan;
3. Penguatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat;
4. Pengembangan sistem keamanan rakyat terpadu dalam melindungi dan mengayomi masyarakat dari segala tindak kejahatan;
5. Pengurangan kasus kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat;
6. Pemantapan budaya masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh kepastian hukum, penegakan HAM, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak.

Kebijakan Umum untuk mewujudkan Misi Ke-6: **Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya**, dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis industri, pertanian dan pariwisata;
2. Pemantapan penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan dalam rangka peningkatan produktivitas;
3. Pemantapan pengelolaan, peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan ruang terbuka hijau;
4. Pengembangan pengelolaan lahan disektor pertanian yang mengarah ke agrobisnis dengan memanfaatkan struktur tanah yang ada;
5. Penguatan fungsi kelembagaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan/atau pengendalian kerusakan lingkungan;
6. Penguatan kebijakan dan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.2. Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan kebijakan umum, dapat diidentifikasi berbagai program yang paling efektif guna mengoperasionalkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan visi dan misi pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan sejumlah **186 (seratus delapan puluh enam) program pada 24 (dua puluh empat) Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan** serta **Penunjang Urusan Pemerintahan** yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Misi Ke-1: **Meningkatkan kualitas SDM yang beriman bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu, dengan tujuan Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai IPTEK.** Program-program yang akan dilaksanakan untuk mendukung misi ini adalah:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Program wajar pendidikan dasar 9 tahun;
- c. Program pendidikan menengah;
- d. Program peningkatan pendidikan non formal;
- e. Program pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Program manajemen pelayanan pendidikan.

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

- a. Program obat dan perbekalan kesehatan;
- b. Program upaya kesehatan masyarakat;
- c. Program pengawasan obat dan makanan;
- d. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Program perbaikan gizi masyarakat;
- f. Program pengembangan lingkungan sehat;
- g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- h. Program standarisasi pelayanan kesehatan
- i. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- j. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- k. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
- l. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
- m. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
- n. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
- o. Program peningkatan pelayanan RS BLUD;

- p. Program peningkatan pelayanan kesehatan;
- q. Program pelayanan kesehatan peserta BPJS di puskesmas dan jaringannya.

3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program pengembangan wawasan kebangsaan.

4. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Program Keluarga Berencana (KB);
- b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- c. Program pelayanan kontrasepsi;
- d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/Kesehatan Reproduksi mandiri;
- e. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja;
- f. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Program pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaan dan olahraga;
- b. Program peningkatan peran peserta pemberdayaan;
- c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
- d. Program upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba;
- e. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
- f. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

7. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan

- a. Program pengembangan nilai budaya;
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya;
- c. Program fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.

8. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan

- a. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

9. Urusan Pilihan Transmigrasi

- a. Program pengembangan wilayah transmigrasi;

- b. Program transmigrasi lokal.

Misi Ke-2: **Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, dengan tujuan Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.** Program-program yang akan dilaksanakan untuk mendukung misi ini adalah:

1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

- a. Program peningkatan kesempatan kerja;
- b. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

- a. Program peningkatan ketahanan pangan.

3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif;
- b. Program pengembangan kewirausahaan dana keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah;
- c. Program pengembangan pendukung usaha bagi UMKM;
- d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

4. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

- a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- b. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi;
- c. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

5. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

- a. Program pengembangan budidaya perikanan;
- b. Program pengembangan perikanan tangkap;
- c. Program pengembangan system penyuluhan perikanan;
- d. Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan;
- e. Program pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar.

6. Urusan Pilihan Pariwisata

- a. Program pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. Program pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Program pengembangan kemitraan.

7. Urusan Pilihan Pertanian

- a. Program peningkatan kesejahteraan petani;
- b. Program peningkatan produksi pangan;
- c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian atau perkebunan;
- d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;

- e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- f. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- g. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- h. Program peningkatan kesehatan masyarakat veteriner.

8. Urusan Pilihan Kehutanan

- a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan.

9. Urusan Pilihan Perdagangan

- a. Program peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- b. Program peningkatan dan pengembangan ekspor;
- c. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- d. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

10. Urusan Pilihan Perindustrian

- a. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi;
- b. Program pengembangan industri kecil dan menengah;
- c. Program peningkatan kemampuan teknologi industri;
- d. Program penataan struktur industri;
- e. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Misi Ke-3: **Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.** Program-program yang akan dilaksanakan untuk mendukung misi ini adalah:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- c. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
- d. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
- e. Program pendidikan politik masyarakat;
- f. Program pembinaan organisasi kemasyarakatan.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan

- a. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program penataan administrasi kependudukan.

4. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

- a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
- b. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;

- c. Program kerjasama informasi dan media massa.

5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik

- a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian

- a. Program persandian.

7. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan

- a. Program peningkatan sistem administrasi kearsipan;
- b. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan;
- c. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

8. Penunjang Urusan Pemerintahan:

- a. Perencanaan
 - 1). Program pengembangan data/informasi;
 - 2). Program kerjasama pembangunan;
 - 3). Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
 - 4). Program perencanaan pembangunan daerah;
 - 5). Program perencanaan pembangunan ekonomi;
 - 6). Program perencanaan pembangunan sosial budaya;
 - 7). Program perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
 - 8). Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
 - 9). Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar;
 - 10). Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
- b. Keuangan
 - 1). Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
 - 2). Program pengembangan peningkatan pendapatan daerah;
 - 3). Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
- c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
 - 1). Program pendidikan kedinasan;
 - 2). Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
 - 3). Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
 - 4). Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
- d. Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:
 - 1). Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
 - (a). Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH;
 - (b). Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
 - (c). Program penataan peraturan perundang-undangan;

- (d). Program penataan kelembagaan ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur daerah;
- (e). Program fasilitasi penyelesaian perkara peradilan;
- (f). Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- (g). Program peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- (h). Program pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan pelimpahan kewenangan;
- (i). Program pelayanan masyarakat tingkat kecamatan atau kelurahan;
- (j). Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
- (k). Program penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pasca bencana.

Misi Ke-4: **Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.** Program-program yang akan dilaksanakan untuk mendukung misi ini adalah:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- c. Program pembangunan turap/talud/bronjong;
- d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
- f. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan;
- g. Program pembangunan sistem informasi/*database* jalan dan jembatan;
- h. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
- i. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- j. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- k. Program pengaturan jasa konstruksi;
- l. Program pemberdayaan jasa konstruksi;
- m. Program pengawasan jasa konstruksi;
- n. Program perencanaan tata ruang;
- o. Program pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Program pengembangan perumahan;
- b. Program lingkungan sehat perumahan;
- c. Program pemberdayaan komunitas perumahan;
- d. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- c. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

4. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

- a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan

- a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- b. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
- c. Program peningkatan pelayanan angkutan;
- d. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas.

6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif.

7. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

- a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
- b. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi;
- c. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

8. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

9. Urusan Pilihan Perdagangan

- a. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

10. Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - 1). Program penataan peraturan perundang-undangan.

Misi Ke-5: **Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan** Program-program yang akan dilaksanakan untuk mendukung misi ini adalah:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

- a. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- c. Program pembinaan pada penyandang cacat dan trauma;

- d. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo;
- e. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial;
- f. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- g. Program pengembangan lembaga sosial keagamaan;
- h. Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;
- c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Misi Ke-6: **Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.** Program-program yang akan dilaksanakan untuk mendukung misi ini adalah:

1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

- a. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- c. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam;
- d. Program peningkatan pengendalian polusi;
- e. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- f. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
- g. Program penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pasca bencana.

2. Urusan Pilihan Kehutanan

- a. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Hubungan keterkaitan antara program pembangunan pada seluruh urusan dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan dari tiap-tiap misi RPJMD Tahun 2016-2021 secara lebih detail dapat diuraikan dalam tabel 7.1 berikut

Tabel 7.1

Hubungan Keterkaitan Antara Program Pembangunan dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Tiap-Tiap Misi RPJMD Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi									
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat									
1.	Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; semua warga miskin mendapatkan layanan secara gratis tanpa terkecuali	1. Meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 2. Pendataan penerima bantuan iuran JKN secara periodik.	1. Meningkatkan jumlah kepesertaan JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD I dan PBI APBD II serta Pekerja Penerima Upah (PPU); 2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi PBI JKN secara periodik.	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat pertahun (%)	16,5	16,5	1. Program obat dan perbekalan kesehatan; 2. Program upaya kesehatan masyarakat; 3. Program pengawasan obat dan makanan; 4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 5. Program perbaikan gizi masyarakat; 6. Program pengembangan lingkungan sehat; 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 8. Program standarisasi pelayanan kesehatan;	1. Kesehatan; 2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Dinkes; 2. BKBPP; 3. RSUD Ambarawa; 4. RSUD Ungaran; 5. Setda; 6. DPU; 7. Bappeda
				Angka Kematian Bayi (AKB)	10,08	9,80			
				Angka Kematian Balita (AKABA)	12,40	11,60			
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah daerah dan swasta yang berkualitas dan berijin	1. Meningkatkan standar pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan melibatkan lintas sektor terkait; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang	1. Memenuhi sarana prasarana dan tenaga medis, serta meningkatkan manajemen mutu dan kualitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan penerapan PPK BLUD bagi Puskesmas; 2. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dalam menghadapi JKN dan mampu berdaya saing dengan rumah sakit swasta; 3. Meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing RSUD Ungaran dan Ambarawa; 4. Peningkatan Rumah Sakit PONEK; 5. Meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan RSUD Ungaran dan Ambarawa.	Angka Kematian Ibu (AKI)	117	115			
				Persalinan oleh tenaga yang berkompeten (%)	95	95			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
3.	Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat)	1. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat rumah tangga melalui penyuluhan dan penguatan pemberdayaan masyarakat	Persentase rumah tangga yang ber PHBS strata sehat utama	35	60	9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;		
4.	Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih	1. Meningkatkan akses sanitasi yang layak dan air bersih	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerja sama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat				10. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;		
5.	Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar	1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat	1. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK), balita gizi kurang dan balita gizi buruk dari keluarga kurang mampu	Prevalensi Gizi kurang pada balita (%)	5,18	4,95	11. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;		
6.	Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat dan cerdas	1. Mengurangi tingkat pernikahan dini; 2. Memasyarakatkan kembali program Keluarga Berencana (KB)	Persentase kesejahteraan dan ketahanan keluarga (%)	56,61	58,77	12. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;		
							13. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;		
							14. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;		
							15. Program peningkatan pelayanan RS BLUD;		
							16. Program peningkatan		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
7.	Meningkatnya sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas, khusus Puskesmas Tenganan akan dibangun setara RS tipe D; serta terlaksananya E-kesehatan termasuk diantaranya MATRA STAT dan SMS GATEWAY	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (PKD)	1. Memenuhi sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (PKD)	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan (%)	17,51	7,83	<p>pelayanan kesehatan;</p> <p>17. Program pelayanan kesehatan peserta BPJS di puskesmas dan jaringannya;</p> <p>18. Program Keluarga Berencana (KB);</p> <p>19. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);</p> <p>20. Program pelayanan kontrasepsi;</p> <p>21. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/Kesehatan Reproduksi mandiri;</p> <p>22. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja;</p> <p>23. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.</p>		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
Tujuan 2 : Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Kreatif, Berbudaya, Berkarakter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi									
1.	Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Penguatan akses dan mutu pendidikan Sekolah Dasar (SD)/sederajat; 3. Penguatan akses dan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat; 4. Penguatan akses dan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat; 5. Penguatan akses dan mutu pendidikan non formal; 6. Penguatan Pendidikan karakter dan budi pekerti dalam rangka mendukung revolusi mental. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan layanan PAUD; 2. Peningkatan layanan pendidikan SD/sederajat; 3. Peningkatan layanan pendidikan SMP/sederajat; 4. Peningkatan layanan pendidikan SMA/SMK sederajat; 5. Peningkatan layanan pendidikan non formal; 6. Pengembangan Pendidikan karakter dan budi pekerti melalui kurikulum disatuan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata lama sekolah • Angka harapan lama sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • 7,33 • 12,83 	<ul style="list-style-type: none"> • 7,38 • 12,88 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Program wajar pendidikan dasar 9 tahun; 3. Program pendidikan menengah; 4. Program peningkatan pendidikan non formal; 5. Program pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Program manajemen pelayanan pendidikan; 7. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 8. Program pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaan dan olahraga; 9. Program peningkatan peran serta kepemudaan; 10. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; 11. Program upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan; 2. Tenaga Kerja; 3. Kepemudaan dan Olah Raga; 4. Kebudayaan; 5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 6. Perpustakaan; 7. Transmigrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disdikbud; 2. Dinsosnaker trans; 3. Disporapar; 4. Kankesbang pol; 5. DPU; 6. DPPKAD; 7. Setda; 8. Kanperpus dan Arda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
2.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal dan pendidikan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; 2. Peningkatan budaya baca masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan di PAUD; 2. Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan di SD; 3. Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan di SMP; 4. Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA/SMK; 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan. 			<ol style="list-style-type: none"> 12. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga; 13. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 14. Program pengembangan nilai budaya; 15. Program pengelolaan kekayaan budaya; 16. Program fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah; 17. Program pengembangan wawasan kebangsaan; 18. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; 19. Program pengembangan wawasan kebangsaan; 20. Program pengembangan wilayah transmigrasi; 21. Program transmigrasi lokal. 			
3.	Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, yang memiliki <i>Intelligence Quotient, Emotional Quotient, dan Spiritual Quotient</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di TK/RA; 2. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SD/MI; 3. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SMP/MTs; 4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SMA/SMK/MA; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan di TK/RA; 2. Peningkatan jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan di SD/MI; 3. Peningkatan jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan di SMP/MTs; 4. Peningkatan jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan di SMA/SMK/MA. 						

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di TK/RA							
4.	Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	1. Membangun kemitraan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri	1. Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan informal; 2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja						
5.	Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan, memiliki daya saing, dan bersertifikat	1. Melaksanakan relevansi kurikulum	1. Mengembangkan pelatihan-pelatihan kerja berbasis kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	Calon tenaga kerja yang Terampil (%)	2,86	4,61			
6.	Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja	1. Peningkatan Tenaga Kerja Mandiri; 2. Penguatan lembaga Pendidikan Non Formal	1. Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan / STPK yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan program PNF kejuruan (Lembaga Kursus, Pelatihan Kerja, Pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan dan transmigrasi); 2. Peningkatan layanan Pendidikan Non Fomal	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,25	3,50			
				Persentase penduduk miskin (%)	7,70	6,50			
				Pendapatan per kapita (Juta Rp.)	6,383	7.161			
7.	Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial	1. Peningkatan kapasitas organisasi pemuda; 2. Peningkatan dan pengembangan	1. Meningkatkan peran dan prestasi organisasi kepemudaan; 2. Meningkatkan pengembangan kegiatan kepemudaan;	Persentase organisasi Pemuda berprestasi (%)	20	40			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
	kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya, agama, pemuda olah raga dan revolusi mental	kegiatan kepemudaan; 3. Meningkatkan peran dan prestasi organisasi kepemudaan; 4. Optimalisasi pendayagunaan partisipasi pemuda dalam pembangunan; 5. Peningkatan fungsi sekolah, partisipasi masyarakat dalam rangka pelestarian budaya; 6. Optimalisasi upaya pelestarian budaya; 7. Optimalisasi pengembangan minat bakat dalam bidang seni dan budaya; 8. Menyediakan sarana dan prasarana seni dan budaya yang representatif; 9. Penyempurnaan sistem manajemen pembinaan pemuda dan olah raga; 10. Optimalisasi pembinaan prestasi bidang olah raga;	3. Peningkatan kewaspadaan gerakan anti narkoba, HIV-AIDS dan kenakalan remaja; 4. Peningkatan sarana prasarana pelestarian budaya, Pengembangan seni dan budaya; 5. Meningkatkan dan mengembangkan upaya pelestarian budaya; 6. Melaksanakan fasilitasi pengembangan minat bakat dalam bidang seni dan budaya; 7. Membangun sarana dan prasarana seni dan budaya yang representatif; 8. Merevitalisasi sistem manajemen pembinaan pemuda dan olah raga; 9. Meningkatkan dan mengembangkan pembinaan prestasi bidang olah raga; 10. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pendidikan keagamaan; 11. Koordinasi dalam forum komunikasi umat beragama tentang kerukunan umat beragama; 12. Meningkatkan aktualisasi budaya dan wawasan kebangsaan; 13. Terwujudnya toleransi inter dan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari; 14. Terbangunnya kewaspadaan dini masyarakat terhadap permasalahan dibidang ipoleksosbud.	Jumlah peningkatan grup kesenian (grup)	4	24			
				Peningkatan jumlah Museum dan Kepurbakalaan (buah)	3	7			
				Indeks cabang olah raga yang berprestasi	67	93			
				Jumlah Lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan bantuan (%)	0	100			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		11. Fasilitasi pembinaan keagamaan 12. Optimalisasi lembaga pendidikan keagamaan dalam meningkatkan sinergitas dan peran pemerintah kepada masyarakat; 13. Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama; 14. Melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama dimasyarakat; 15. Membentuk kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan dalam rangka memberi bekal pentingnya kewaspadaan dini untuk menjaga kondusivitas wilayah.							

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
8.	Pembenahan peran komite sekolah dan meningkatkan penyaluran beasiswa	1. Penguatan peran komite SD; 2. Penguatan peran komite SMP; 3. Penguatan peran komite SMA/SMK; 4. Pemenuhan beasiswa miskin SD; 5. Pemenuhan beasiswa miskin SMP; 6. Pemenuhan beasiswa miskin SMA/SMK	1. Peningkatan peran komite sekolah SD; 2. Peningkatan peran komite sekolah SMP; 3. Peningkatan peran komite sekolah SMA/SMK; 4. Pemberian beasiswa miskin SD; 5. Pemberian beasiswa miskin SMP; 6. Pemberian beasiswa miskin SMA/SMK.	Peningkatan penyaluran beasiswa miskin (%)	2,61	5,32			
Misi 2 : Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan									
Tujuan 3 : Meningkatkan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal									
1.	Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing dan dipatenkan	1. Optimalisasi dan peningkatan kompetensi serta daya saing usaha KUMKM; 2. Peningkatan jumlah UMKM; 3. Peningkatan kapasitas kelompok wira usaha pemuda	1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM; 2. Penyediaan kemudahan perijinan UMKM	Persentase Peningkatan jumlah unit UMKM yang Berijin (%)	2	2	1. Program peningkatan kesempatan kerja; 2. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan; 3. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif; 4. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah; 5. Program pengembangan pendukung usaha bagi UMKM; 6. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; 7. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;	1. Tenaga Kerja; 2. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 3. Perindustrian; 4. Penanaman Modal; 5. Pangan; 6. Pertanian; 7. Kehutanan; 8. Pariwisata; 9. Kelautan dan Perikanan; 10. Perdagangan; 11. Perindustrian	1. Dinsosnaker trans; 2. Diskop, UMKM dan Perindag; 3. BPPMPTSP; 4. Kan. Ketapang; 5. Distanbunhut; 6. Disporapar; 7. Disnakkas; 8. Setda; 9. DPPKAD; 10. DPU

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
2.	Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal	<p>1. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja;</p> <p>2. Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan;</p> <p>3. Peluang peningkatan jumlah investor dan kepastian berusaha</p>	<p>1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja;</p> <p>2. Meningkatnya jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif serta pelaku usaha kreatif, memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi wirausaha kreatif baru;</p> <p>3. Mendorong investor untuk berinvestasi di kawasan industri dibagian selatan</p>	<p>Persentase pembinaan kelompok industri (%)</p> <p>Jumlah investor (PMDN/PMA)</p>	18	20	<p>8. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi;</p> <p>9. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah;</p> <p>10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;</p> <p>11. Program peningkatan kesejahteraan petani;</p> <p>12. Program peningkatan produksi pangan;</p> <p>13. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian atau perkebunan;</p> <p>14. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;</p> <p>15. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;</p> <p>16. Program peningkatan produksi hasil peternakan;</p> <p>17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;</p> <p>18. Program peningkatan kesehatan masyarakat veteriner;</p> <p>19. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan;</p> <p>20. Program pengembangan pemasaran pariwisata;</p> <p>21. Program pengembangan destinasi pariwisata;</p> <p>22. Program pengembangan kemitraan;</p>		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
3.	Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran, e-pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan saprodi untuk petani; 2. Kemudahan untuk mengakses kredit; 3. Fasilitasi kemitraan kelompok; 4. Pembinaan kelompok tani agribisnis; 5. Pengendalian laju inflasi daerah; 6. Penyediaan pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); 7. Monitoring kebijakan kualitas Sumber Daya Alam; 8. Pembinaan kelompok tani agribisnis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dalam pemenuhan saprodi; 2. Peningkatan kemampuan kelompok dalam mengakses kredit; 3. Peningkatan peran kelompok tani dalam kemitraan; 4. Pembinaan kelompok tani agribisnis; 5. Stabilisasi harga Bahan Pokok Masyarakat; 6. Pengawasan distribusi bantuan pupuk bersubsidi; 7. Implementasi Kebijakan peningkatan kualitas SDA; 8. Peningkatan peran kelompok tani menuju agribisnis 	Indeks Nilai Tukar Petani	100,89	103,39	<ol style="list-style-type: none"> 23. Program pengembangan budidaya perikanan; 24. Program pengembangan perikanan tangkap; 25. Program pengembangan system penyuluhan perikanan; 26. Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan; 27. Program pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar; 28. Program peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 29. Program peningkatan dan pengembangan ekspor; 30. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 31. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; 32. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi; 33. Program pengembangan industri kecil dan menengah; 34. Program peningkatan kemampuan teknologi industri; 35. Program penataan struktur industri; 36. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
4.	Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya pangan B2SA; Penerapan sapta usaha tani komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar; Mengembangkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Semarang; Penanganan daerah rawan pangan; Optimalisasi informasi harga pasokan dan akses pangan 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi, pelatihan, intervensi pangan B2SA; Optimalisasi pemanfaatan pekarangan; Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pelatihan kepada SDM pertanian; Pengisian gudang cadangan pangan pemerintah; Pengembangan lumbung pangan masyarakat; Meningkatkan usaha produktif melalui DMP (Desa Mandiri Pangan) dan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi); Meningkatkan pendataan informasi harga pasokan dan akses pangan 						
5.	Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi pengembangan perekonomian Daerah berbasis potensi lokal 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan upaya pemantauan dan pengawasan pengembangan perekonomian daerah 	Persentase peningkatan jumlah industri kecil yang berijin (%)	2	2			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
6.	Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber daya alam, serta industri kreatif yang dipatenkan	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber daya alam, serta industri kreatif; Mengurus hak paten produk industri kreatif dan budaya-budaya lokal sebagai identitas daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber daya alam, serta industri kreatif; Fasilitasi pengurusan hak paten produk industri kreatif dan budaya-budaya lokal sebagai identitas daerah 	Persentase peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata (%)	5,37	7,18			
7.	Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan peran <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>; Pembinaan kelompok yang memiliki skala usaha produksi 	<ol style="list-style-type: none"> Mensinergikan CSR Perusahaan dengan Program Pemerintah Daerah; Peningkatan peran pihak ketiga terhadap kelompok tani 	Jumlah Koperasi yang berkualitas (unit)	50	228			
				Persentase kebijakan usaha tani yang terlaksana (%)	100	100			
8.	Diwajibkannya perusahaan, perkantoran, rumah makan, PNS untuk pro terhadap UMKM	<ol style="list-style-type: none"> Pembuatan aturan kemitraan perusahaan, perkantoran, rumah makan dengan UMKM; Peningkatan akses teknologi, SDM, Pasar, 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan akses teknologi, SDM, Pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM; Pemanfaatan produk lokal antara lain dengan mewajibkan perusahaan, restoran, hotel, kantor pemerintah/swasta menggunakan produk UMKM lokal; 	Nilai volume usaha koperasi (Juta Rp.)	681240	741008			
				Pencari kerja yang ditempatkan (%)	22	22			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM; 3. Mengkampanyekan dan melaksanakan kebijakan bela-beli produk lokal; 4. Pemerataan kesempatan kerja dan terciptanya perluasan fasilitas kerja, hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja	3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja; 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja	Keselamatan dan Perlindungan tenaga kerja (%)	72	84			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
Misi 3 : Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>good governance</i> didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi									
Tujuan 4 : Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efisien dan akuntabel									
1.	Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan <i>Information Communication and Technology (ICT)</i> melalui <i>Electronic Government</i> dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (<i>database</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan peningkatan tertib arsip pemerintah daerah dan pemerintah desa; Menyiapkan manajemen sistem informasi dan regulasi tata kelola dan optimalisasi manajemen sarana prasarana informasi; Pencetakan KTP-el di 19 Kecamatan; Pendataan Penduduk Non Permanen; Pemutakhiran Data Penduduk; Penyusunan Proyeksi Penduduk; Digitalisasi Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pelayanan Administrasi Kependudukan baik statis maupun dinamis; 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya Sistem Kearsipan Daerah; Membuat program Sistem Kearsipan Daerah; Penerapan arsip baku Perangkat Daerah; Optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik; Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; Menyediakan data dan informasi kependudukan yang berkualitas; Pengembangan database kependudukan yang mutakhir dan dinamis; Penyusunan proyeksi penduduk yang dapat menggambarkan keadaan jumlah, struktur dan komposisi penduduk pada waktu mendatang sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah; Pengembangan Sistem Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil Digital; Pengembangan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan baik statis maupun dinamis; Membangun keterpaduan infrastruktur jaringan internet dan intranet SKPD; Mengoptimalkan pengelolaan data dan 	Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik (%)	100	100	<ol style="list-style-type: none"> Program peningkatan sistem administrasi kearsipan; Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan; Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; Program peningkatan kualitas pelayanan informasi; Program penataan administrasi kependudukan; Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH; Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; Program penataan peraturan perundang-undangan; Program penataan kelembagaan ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur daerah; Program fasilitasi penyelesaian perkara peradilan; Program persandian; 	<ol style="list-style-type: none"> Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Persandian; Statistik; Pertanahan; Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Komunikasi dan Informatika; Kearsipan; Penunjang Urusan Pemerintahan : <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Dispenduk-capil; Setda; Bappeda; DPPKAD; BKD; Setwan; BPBD; Bappeda Inspektora- Kanperpus dan Arda; Kan. Kesbang-pol; Satpol PP; Kecamatan; Kelurahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		9. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; 10. Optimalisasi infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi antar Perangkat Daerah; 11. Pengembangan aplikasi e-office; peningkatan kapasitas SDM; 12. Pembangunan aplikasi e-perijinan dan pengembangan website;	pengembangan integrasi data/web; 13. Menerapkan pelaksanaan surat menyurat secara elektronik; 14. Sinergitas dan sinkronisasi pengendalian dan pengadaan perangkat lunak				13. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; 14. Program pengembangan peningkatan pendapatan daerah; 15. Program pendidikan kedinasan; 16. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 17. Program pembinaan dan pengembangan aparatur; 18. Program peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah; 19. Program pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan pelimpahan kewenangan; 20. Program pelayanan masyarakat tingkat kecamatan atau kelurahan; 21. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; 22. Program penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pasca bencana; 23. Program pembinaan dan fasilitasi		
2.	Meningkatnya disiplin, kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan	1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur melalui uji kompetensi/seleksi terbuka; 2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur melalui Pelaksanaan absensi online semua Perangkat Daerah dan pemberian sanksi disiplin pegawai;	1. Meningkatkan SDM aparatur yang berkompeten, akuntabel, kapabel; 2. Pelaksanaan absensi online dan pemberian sanksi disiplin pegawai; 3. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; 4. Meningkatkan pemahaman aparatur pelaksana dan masyarakat di bidang pertanahan; 5. Penyelenggaraan dialog dengan Pemprov dan Pemerintah daerah serta Tokoh masyarakat dan tokoh Agama selama 60 bulan	Persentase Kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan struktural (%) Persentase peningkatan disiplin pegawai (%)	87,23	100			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		3. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan; 4. Peningkatan Kapasitas kinerja aparatur daerah; 5. Pembinaan hukum pertanahan pada aparatur pelaksana; 6. Menyelenggarakan dialog dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemda serta Tokoh masyarakat dan tokoh Agama selama 60 bulan		Persentase pemenuhan kebutuhan diklat PNS (%)	90,36	94	pengelolaan keuangan desa; 24. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; 25. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; 26. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; 27. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; 28. Program kerjasama informasi dan media massa; 29. Program pengembangan data/informasi; 30. Program kerjasama pembangunan; 31. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; 32. Program perencanaan pembangunan daerah; 33. Program perencanaan pembangunan ekonomi; 34. Program perencanaan pembangunan sosial budaya; 35. Program perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 36. Program perencanaan prasarana wilayah dan		
3.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk melakukan kajian dan pemindahan pusat pemerintahan	1. Optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada Perangkat Daerah; 2. Penerapan standar pelayanan dan Standar Operasional pada seluruh SKPD; 3. Meningkatkan kapasitas pelayanan	1. Pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada Perangkat Daerah; 2. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah; 3. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai; 4. membangun sistem kerja dan tata kelola pelayanan pemerintahan; 5. Melaksanakan kunjungan kerja luar daerah (luarjawa, DKI/JABAR/JATIM, Jateng/DIY, Kota Semarang) pimpinan dan anggota DPRD selama 5 tahun; 6. Menyelenggarakan rapat-rapat alat	Realisasi Indikator Kinerja yang tercapai sesuai target (%)	100	100			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		<p>administrasi perkantoran melalui implementasi standar pelayanan prosedur;</p> <p>4. Penguatan penatausahaan keuangan dan aset pada Perangkat Daerah dan PPKD di lingkup pemkab Semarang;</p> <p>5. Melaksanakan kunjungan kerja luar daerah (luarjawa, DKI/JABAR/JATIM, Jateng/DIY, Kota Semarang) pimpinan dan anggota DPRD;</p> <p>6. Menyelenggarakan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD;</p> <p>7. Pelaksanaan rapat-rapat paripurna DPRD;</p> <p>8. Pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah Pimpinan dan anggota DPRD;</p> <p>9. Pembahasan Raperda melalui Pansus;</p>	<p>kelengkapan DPRD seperti Rapat Pimpinan, Rapat Banmus, Rapat Komisi, Rapat Banggar internal/ eksternal, Rapat Pansus non Raperda, Rapat Badan Kehormatan selama 60 bulan;</p> <p>7. Menyelenggarakan rapat-rapat paripurna DPRD meliputi rapat paripurna dan rapat paripurna istimewa selama 60 bulan;</p> <p>8. Menyelenggarakan kunjungan kerja dalam daerah Pimpinan dan anggota DPRD selama 5 tahun;</p> <p>9. Optimalisasi pembahasan Raperda dengan Instansi terkait;</p> <p>10. Pelaksanaan pengiriman kursus/ pelatihan/ bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD selama 5 tahun;</p> <p>11. Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;</p> <p>12. Penyerapan aspirasi masyarakat di 5 daerah pemilihan oleh 45 orang anggota DPRD 3 kali dalam setahun selama 5 tahun;</p> <p>13. Pembahasan Raperda melalui Pansus dan Program Legislasi Daerah selama 60 bulan;</p> <p>14. Meningkatkan kemandirian masyarakat;</p> <p>15. Penyusunan kajian dan pemindahan pusat pemerintahan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat;</p>			<p>sumber daya alam;</p> <p>37. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar;</p> <p>38. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;</p> <p>39. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;</p> <p>40. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;</p> <p>41. Program pengembangan wawasan kebangsaan;</p> <p>42. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);</p> <p>43. Program pendidikan politik masyarakat;</p> <p>44. Program pembinaan organisasi kemasyarakatan</p>			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		<p>10. Pengiriman kursus/ pelatihan/ bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD;</p> <p>11. Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;</p> <p>12. Penyerapan aspirasi masyarakat di 5 daerah pemilihan oleh 45 orang anggota DPRD;</p> <p>13. Pelaksanaan seminar/dialog melalui TMMD dalam rangka mewujudkan ketahanan NKRI;</p> <p>14. Melaksanakan studi analisis dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik kepada masyarakat;</p> <p>15. Penataan dan optimalisasi kebijakan pertanahan yang bersifat lokal;</p> <p>16. Fasilitasi Program Operasional Daerah Agraria (PRODA);</p>	<p>16. Pengelolaan pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>17. Fasilitasi pensertifikatan pertanahan melalui PRODA;</p> <p>18. Pemetaan wilayah konflik dan fasilitasi penanganan konflik pertanahan;</p> <p>19. Memberikan kepastian Hukum bagi ahli waris;</p> <p>20. Peningkatan kualitas pelayanan pada kecamatan dan kelurahan;</p> <p>21. Mewujudkan pelayanan yang efektif efisien dan bebas biaya;</p> <p>22. Optimalisasi layanan perijinan dan non perijinan di Kecamatan;</p> <p>23. Mewujudkan semua penduduk memiliki identitas;</p> <p>24. Optimalisasi pendataan penduduk melalui RT/RW;</p> <p>25. Optimalisasi dialog interaktif tentang pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan nasional;</p> <p>26. Terkoordinasinya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan PATEN</p>						

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		17. Inventarisasi permasalahan pertanahan dan peningkatan kapasitas aparatur; 18. Pelaksanaan fasilitasi pensertifikatan tanah melalui Program PRODA; 19. Pendampingan dan optimalisasi layanan di Kecamatan; 20. Pelayanan jemput bola dan digitalisasi dokumen pencatatan sipil; 21. Pendataan kependudukan dengan melibatkan RT/RW; 22. Pelaksanaan dialog interaktif tentang pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan nasional; 23. Optimalisasi penyelenggaraan rakor pemerintahan dan PATEN.							

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
4.	Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dan penyusunan yang tersistem laporan penyelenggaraan pemerintah daerah; 2. Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Semarang; 3. Liputan informasi kegiatan/rapat DPRD; 4. Mewujudkan sumber arsip berupa foto, rekaman kaset suara dan rekaman keping DVD kegiatan DPRD; 5. Peningkatan penyebaran informasi kegiatan DPRD; 6. Peningkatan penyebaran informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 7. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyusunan laporan dengan dukungan data yang sah; 2. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Reviu LKJIP; 3. Peningkatan kualitas SDM APIP selaku quality assurance penyusunan LKJIP; 4. Meningkatkan kualitas SDM APIP selaku quality insurance penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah dan LKD; 5. Optimalisasi pelaksanaan liputan kegiatan rapat DPRD; 6. Mewujudkan penyediaan sumber arsip berupa foto, rekaman kaset suara dan rekaman keping DVD kegiatan DPRD selama 5 tahun; 7. Meningkatkan penyebaran informasi kegiatan DPRD lewat Media Cetak kepada Pemda, DPRD, Desa, Bupati & DPRD se-Jateng, papan informasi selama 5 tahun; 8. Menyebarkan informasi pembangunan daerah secara cepat dan efektif; 9. Menginformasikan neraca keuangan daerah APBD, LPPD dan LKPD serta melaksanakan koordinasi kehumasan dalam rangka penyatuan persepsi agenda rutin; 10. Mengoptimalkan fungsi dan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama/pembantu sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2008; 11. Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan; 	Persentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah (%)	24,59	32,72			
				Persentase peningkatan kualitas penyusunan LPPD	100	100			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		8. Terlaksananya informasi pembangunan daerah melalui media	12. Peningkatan akuntabilitas kinerja pembangunan dalam mendukung pencapaian visi misi daerah; 13. Peningkatan informasi hasil pembangunan						
5.	Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk pemerintahan desa melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan berbasis data serta arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa; 2. Optimalisasi peningkatan pendapatan Daerah; 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan; 4. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pembangunan; 5. Meningkatkan kinerja dan sinergitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah; 6. Menata, mempublikasikan Produk Hukum daerah dan Meningkatkan budaya taat hukum;	1. Peningkatan sistem kerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan teknologi informasi; 2. Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah; 3. Peningkatan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah; 4. Peningkatan kapasitas penatausahaan keuangan daerah; 5. Peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran keuangan Perangkat Daerah; 6. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan; 7. Peningkatan kualitas pembangunan sarana prasarana daerah; 8. peningkatan kapasitas dan kualitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan; 9. penyusunan SOP juklak dan juknis pengawasan; 10. sosialisasi penerapan SPIP; 11. peningkatan kualitas laporan hasil audit/pemeriksaan;	Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal (%)	24,44	51,22			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		<p>7. Meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan;</p> <p>8. Peningkatan kapasitas, kualitas dan daya saing APIP di lingkup pemkab semarang;</p> <p>9. Penguatan kinerja pengawasan di lingkup pemkab semarang;</p> <p>10. Peningkatan kualitas pemeriksaan reguler, khusus dan kasus;</p> <p>11. Penerapan kebijakan whistle blowing system;</p> <p>12. Penguatan layanan pengaduan masyarakat;</p> <p>13. Penguatan perencanaan kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah di lingkup pemkab Semarang;</p> <p>14. Penguatan pengendalian Manajemen pelaksanaan KDH;</p> <p>15. Optimalisasi pengelolaan aset daerah;</p>	<p>12. pembentukan dan penerapan kebijakan whistle blowing system;</p> <p>13. peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat;</p> <p>14. peningkatan kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan LKD;</p> <p>15. peningkatan kualitas Laporan Hasil Reviu RKA;</p> <p>16. peningkatan kualitas pembinaan dan pemantauan pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan daerah;</p> <p>17. Optimalisasi pengelolaan aset daerah;</p> <p>18. Melaksanakan intensifikasi, ekstensifikasi menyusun sistem memperbaiki prosedur pembayaran, optimalisasi aset;</p> <p>19. Pembuatan sistem pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>20. Peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>21. Perbaikan prosedur pembayaran pajak dan retribusi daerah;</p> <p>22. Menerapkan dan mengupayakan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM);</p> <p>23. Melaksanakan pendataan penduduk luar domisili;</p> <p>24. Mewujudkan masyarakat yang berjiwa patriotisme dan berwawasan kebangsaan;</p> <p>25. Mewujudkan pemahaman sistim politik dan demokrasi kepada masyarakat;</p>						

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		<p>16. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;</p> <p>17. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, asset daerah dan pelayanan publik bidang pendapatan yang didukung oleh aparatur professional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima melalui Peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>18. Pembuatan sistem pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>19. Peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>20. Perbaikan prosedur pembayaran pajak dan retribusi daerah;</p>	<p>26. Mewujudkan stabilitas sosial politik, keamanan dan ketertiban daerah;</p> <p>27. Mewujudkan komunikasi yang baik dan harmonis antara masyarakat dan partai politik;</p> <p>28. Memfasilitasi penyelesaian konflik sosial di daerah secara terpadu baik saat kejadian maupun paska konflik yang muncul di daerah dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (PKS);</p> <p>29. Mengembangkan budaya lokal berwawasan kebangsaan;</p> <p>30. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi budaya berperilaku demokratis bagi masyarakat;</p> <p>31. Menggiatkan pemantauan terhadap kelompok radikal, deteksi dini dan pengembangan jaring informasi;</p> <p>32. Mendata Ormas yang ada di Daerah;</p> <p>33. Mewujudkan sinergitas LSM, Ormas dengan Pemerintah daerah;</p> <p>34. Melaksanakan sosialisasi pendaftaran ormas baru serta melakukan pembinaan dan pengawasan;</p> <p>35. Melaksanakan penataan serta optimalisasi pelaksanaan kebijakan pertanahan;</p> <p>36. Mengurangi mata rantai penyelesaian permasalahan pertanahan (off court);</p> <p>37. Optimalisasi pengelolaan tanah-tanah milik pemda;</p> <p>38. Melakukan penjaringan usulan nama jalan/sarana umum/gedung kedinmasan;</p>						

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		21. Pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Perangkat Daerah; 22. Penguatan pengendalian Manajemen pelaksanaan pemerintahan Daerah; 23. Penyusunan regulasi, fasilitasi dan asistensi pencapaian target SPM; 24. Pelaksanaan diskusi tentang pendidikan politik, melaksanakan bintek bantuan keuangan kepada partai politik; 25. Pelaksanaan inventarisasi partai politik sampai dengan di tingkat kecamatan; 26. Pelaksanaan pendidikan/penyuluhan Undang-undang bidang politik, memerankan partai politik dalam pendidikan politik baik dilingkungan anggota maupun di masyarakat (orang);	39. Peningkatan kerjasama pengelolaan batas wilayah antar daerah serta fasilitasi peningkatan kerjasama pengelolaan batas wilayah antar desa; 40. Fasilitasi kerjasama antar daerah, pihak ketiga, pemerintah desa dan pihak luar negeri; 41. Pemeliharaan pilar batas daerah dan fasilitasi penegasan batas desa						

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		<p>27. Pembentukan Tim terpadu PPKS baik tingkat Kabupaten sampai dengan Kecamatan, melakukan analisa estimasi munculnya konflik sosial, melakukan langkah-langkah dini akan timbulnya permasalahan konflik sosial;</p> <p>28. Pengembangan budaya lokal berwawasan kebangsaan sesuai amanat Permendagri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;</p> <p>29. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perilaku demokratis;</p> <p>30. Peningkatan pemantauan terhadap kelompok radikal, deteksi dini, pengembangan jaring informasi;</p>							

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		31. Monitoring atas kegiatan ormas dan memantau ormas yg mendapat bantuan hibah; 32. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melalui dialog/ sosialisasi sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas; 33. Sosialisasi pendaftaran Ormas baru serta melakukan pembinaan dan pengawasan; 34. Pemetaan wilayah konflik dan fasilitasi penanganan konflik pertanahan; 35. Pensertifikatan tanah milik Pemda; 36. Pemberian nama jalan/sarana umum/gedung kedinasan; 37. Pemeliharaan pilar batas daerah dan fasilitasi penegakan batas desa;							

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		38. Optimalisasi perwujudan kerjasama antar daerah, pihak ketiga, pemerintah desa dan pihak luar negeri; 39. Meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; 40. Optimalisasi legalitas wilayah administrasi pemerintahan							

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
Misi 4 : Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan									
Tujuan 5 : Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi									
1.	Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen tata ruang yang berkualitas dan aplikatif; 2. Peningkatan investasi dan kepastian berusaha serta meningkatkan fungsi BKPRD terkait dengan tata ruang; 3. Peningkatan perencanaan tata ruang untuk mewujudkan tata ruang yang efisien, efektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen rencana tata ruang yang bersifat komprehensif multi sektor melalui pengkajian secara teknokratris dan partisipatif; 2. Meningkatkan kinerja BKPRD; 3. Meningkatkan kinerja perencanaan tata ruang 	Tersedianya dokumen tata ruang yang disahkan (Jumlah)	1	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program perencanaan tata ruang; 2. Program pengendalian pemanfaatan ruang; 3. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; 4. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi; 5. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah; 6. Program penataan peraturan perundang-undangan; 7. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; 8. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 9. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat); 10. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Penanaman Modal; 3. Penunjang Urusan Pemerintahan; 4. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 5. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPU; 2. Bappeda; 3. Setda; 4. BPMPTSP; 5. Satpol PP; 6. Diskop, UMKM dan Perindag

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
2.	Meningkatnya pelayanan perijinan yang tertib ,tepat waktu,transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelayanan prima dalam pelayanan perijinan dan investasi; Menjadikan kemitraan dengan UMKM sebagai persyaratan perijinan; Pembebasan retribusi perizinan IMB dan HO untuk skala tertentu; Peningkatan daya tarik dan daya saing investasi dan investor dengan kepastian hukum 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan mekanisme pelayanan perijinan melalui : Revisi SOP, Perizinan Online, Perizinan dengan jemput bola, Fasilitas Pengaduan, SDM aparatur yang dan handal, Penyederhanaan prosedur, Sarana dan prasarana, Sosialisasi perizinan, Koordinasi antar lembaga; Pengembangan pelayanan perijinan UMKM; Pembebasan retribusi perizinan IMB dan HO untuk skala tertentu; Pemberian insentif untuk perusahaan yang memenuhi persyaratan 	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Perijinan	84,31	92,12			
3.	Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kordinasi konsultasi dan advokasi hukum berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hukum; Peningkatan pemahaman kelompok kadarkum terhadap hukum dan perilaku demokratis; 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan penyelesaian permasalahan hukum di Kabupaten Semarang; Meningkatkan pemahaman kelompok kadarkum terhadap hukum dan perilaku demokratis; Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketentuan peraturan Perundang-undangan; Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan nilai-nilai HAM; Meningkatkan pengkajian peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan koordinasi serta konsultasi berkaitan dengan kajian peraturan perundang-undangan; 	<p>Persentase penurunan pelanggaran perda (%)</p> <p>Persentase penurunan pelanggaran trantibum (%)</p>	54	32			
					9,3	1			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		<p>3. Peningkatan pengkajian peraturan perundang-undangan dan terlaksananya koordinasi serta konsultasi berkaitan dengan kajian peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Peningkatan penyusunan produk hukum daerah;</p> <p>5. Peningkatan sinergitas penanganan perkara peradilan;</p> <p>6. Tersedianya naskah sumber arsip berupa buku produk perundangan selama 5 tahun;</p> <p>7. Pelaksanaan sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika (P4GN);</p>	<p>6. Meningkatkan penyelarasan produk hukum daerah;</p> <p>7. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>8. Meningkatkan penataan dan publikasi produk hukum pusat dan daerah;</p> <p>9. Meningkatkan sinergitas penanganan perkara peradilan;</p> <p>10. Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat dan aparatur terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah dan peningkatan sinergitas penanganan perkara antar lembaga;</p> <p>11. Tersedianya naskah sumber arsip berupa buku produk perundangan selama 5 tahun;</p> <p>12. Meningkatkan kapasitas kepada aparatur dan masyarakat tentang keamanan, Ketentaman dan ketertiban dengan arah kebijakan perwujudan kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitasnya;</p> <p>13. Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat tentang hukum serta meningkatkan SDM aparatur panegak hukum dengan arah kebijakan perwujudan kesadaran dan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah dan peningkatan sinergitas penanganan perkara antar lembaga;</p>						

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		<p>8. Meningkatkan pemahaman aparaturnya dan masyarakat tentang keamanan. Ketertarikan dan ketertiban dengan arah kebijakan perwujudan kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitasnya;</p> <p>9. Meningkatkan pemahaman aparaturnya dan masyarakat tentang hukum serta meningkatkan SDM aparaturnya panegak hukum dengan arah kebijakan perwujudan kesadaran dan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparaturnya terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah dan peningkatan sinergitas penanganan perkara antar lembaga;</p>	14. Mengoptimalkan peran Satlinmas dengan arah kebijakan mewujudkan peran serta dan kapasitas Satlinmas						

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		10. Meningkatkan peran serta Satlinmas dengan arah kebijakan mewujudkan peran serta dan kapasitas Satlinmas							
4.	Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi; 2. Penyediaan regulasi daerah yang tepat dan responsif terhadap investor/dunia usaha; 3. Peningkatan upaya promosi investasi; 4. Meningkatkan peluang kepastian berusaha; 5. Meningkatkan peluang kepastian berusaha; 6. Peningkatan sosialisasi dan promosi investasi secara elektronik dan non elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simplifikasi/penyederhanaan regulasi untuk mendukung investasi dan menekan investasi ekonomi biaya tinggi; 2. Penyusunan regulasi-regulasi investasi; 3. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kebijakan investasi baik pada event skala lokal, regional maupun nasional; 4. Membangun partisipasi dan memberdayakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan promosi investasi 	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)	330	522,83			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
5.	Meningkatnya peran BPR dan BKK dalam membantu masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Membangun kemitraan antara BPR dan BKK dengan UMKM; Meningkatkan peranan BPR dan BKK dalam membangun perekonomian daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi pemberian kemudahan bantuan akses modal berusaha bagi UMKM melalui BPR dan BKK; Membangun partisipasi BPR dan BKK sebagai motor penggerak dalam mendidik rakyat untuk menggali potensi ekonomi yang terdapat di daerah pedesaan 	Jumlah Usaha Mikro Binaan (Unit)	10296	10816			
6.	Adanya kewajiban dunia usaha memberdayakan sumber daya lokal	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan peranan dunia usaha dalam membangun perekonomian daerah berbasis sumber daya lokal 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun partisipasi dunia usaha sebagai sebagai roda penggerak perekonomian yang berbasis sumber daya lokal; Memberikan insentif bagi dunia usaha sebagai daya tarik dalam upaya pengembangan perekonomian yang berbasis sumber daya lokal 						
Tujuan 6 : Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata diseluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa									
1.	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; Peningkatan sarana dan prasarana transportasi di wilayah perbatasan dan terpencil 	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan sarana dan prasarana transportasi; Menyediakan sarana dan prasarana transportasi di wilayah perbatasan dan terpencil 	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus (Buah) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%) Angkutan darat (%)	Tipe A=0, Tipe B=1, Tipe C=7 0,148 0,015	Tipe A=0, Tipe B=0, Tipe C=9 0,140 0,021	<ol style="list-style-type: none"> Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; Program peningkatan pelayanan angkutan; Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; 	<ol style="list-style-type: none"> Perhubungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup; Energi dan Sumberdaya 	<ol style="list-style-type: none"> Dishubkom-info; DPU; Diskop, UMKM dan Perindag BLH; BPBD; Setda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
				Persentase panjang jalan yang terpasang PJU (%)	24,28	32,88	5. Program pembangunan jalan dan jembatan;	Mineral; 6. Perdagangan	
2.	Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian	1. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi	1. Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan; 2. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan embung	Luas irigasi dalam kondisi baik (%)	53,02	63,12	7. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 8. Program pembangunan turap/talud/bronjong; 9. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;		
				Persentase Luas Irigasi dalam kondisi baik (%)	53	76	10. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong; 11. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan; 12. Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan; 13. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;		
3.	Tersedianya prasarana olahraga ,ruang publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan	1. Penyediaan taman rekreasi, taman kota, dan hutan kota; 2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1. Menambah luasan RTH dan memelihara RTH yang sudah ada; 2. Terwujudnya sarana prasarana olahraga untuk peningkatan prestasi atlet daerah di tingkat regional, nasional, maupun internasional	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (ha)	529,65	533,75	14. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; 15. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;		
4.	Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai	1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur air bersih/minum	1. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan guna mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air bersih/air minum	Persentase penduduk berakses air minum aman (%)	87,54	100			
5.	Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi	1. Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman; 2. Penurunan luas lingkungan permukiman kumuh; 3. Peningkatan	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas serta kepastian bermukim bagi masyarakat; 2. Meningkatkan upaya penyehatan lingkungan permukiman kumuh; 3. Meningkatkan cakupan sanitasi dan peran masyarakat serta stakeholder	Persentase penduduk berakses sanitasi sehat (%)	89,08	100			
				Luas lingkungan permukiman kumuh (Ha)	248,41	0			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		<p>aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana sanitasi.</p> <p>4. Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman;</p>	<p>dalam pembangunan sarana prasarana sanitasi;</p> <p>4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas serta kepastian bermukim bagi masyarakat;</p>	Rasio Rumah Layak Huni	0,756	0,757	<p>16. Program pengaturan jasa konstruksi;</p> <p>17. Program pemberdayaan jasa konstruksi;</p> <p>18. Program pengawasan jasa konstruksi;</p> <p>19. Program pengembangan perumahan;</p> <p>20. Program lingkungan sehat perumahan;</p> <p>21. Program pemberdayaan komunitas perumahan;</p> <p>22. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;</p> <p>23. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;</p> <p>24. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;</p> <p>25. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</p>		
6.	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	<p>1. Pengelolaan sampah di perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya (bank sampah), peningkatan daur ulang sampah (TPST 3R) dan mengkonversi sampah menjadi energi dgn teknologi ramah lingkungan;</p> <p>2. Penambahan pembangunan TPST 3R;</p> <p>3. Melaksanakan sosialisasi penanganan sampah, fasilitasi pembentukan lembaga bank sampah dan pembangunan percontohan bank sampah</p>	<p>1. Meningkatkan cakupan pelayanan sampah dengan membangun TPA baru, teknologi pengolahan sampah dan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan;</p> <p>2. Meningkatkan pengelolaan sampah oleh masyarakat;</p> <p>3. Peningkatan pengelolaan sampah tuntas di tempat dengan peran serta masyarakat</p>	<p>Persentase penanganan sampah (%)</p> <p>Persentase TPS persatuan penduduk (%)</p>	20,24	21,49			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
7.	Terpenuhinya kebutuhan energi listrik	<ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi rumah tinggal yang belum menggunakan listrik; Peningkatan dan pemerataan pelayanan PJU 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan stimulan rumah tangga miskin untuk mendapatkan listrik; Membangun, menata dan meterisasi serta meningkatkan pelayanan pemeliharaan PJU 	Rasio elektrifikasi (%)	99	100			
8.	Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pasar-pasar tradisional dan mengendalikan tumbuh kembangnya mini market modern 	<ol style="list-style-type: none"> Pembatasan mini market modern dan memodernisasikan pasar-pasar tradisional 	Persentase Fasilitas pasar dalam kondisi baik (%)					
9.	Terpenuhinya RUAS TUNTAS dengan perencanaan matang, tepat bangun dan pembagian wewenang daerah-daerah	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dengan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan; Penyelenggaraan jalan poros desa dalam kondisi mantap dengan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan 	<ol style="list-style-type: none"> Penanganan ruas jalan kabupaten yang belum tuntas dan mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun; Penanganan ruas jalan poros desa yang belum tuntas dan mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun 	Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik	73	85			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
Misi 5 : Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan									
Tujuan 7 : Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak hak anak									
1.	meningkatkan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah	1. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tanpa membedakan gender	Persentase usulan kegiatan berbasis musrenbang yang tertuang dalam RKPD (%)	70	70	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; 2. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan; 3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; 5. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; 6. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 7. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 8. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; 9. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan	1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3. Sosial	1. Bapermasdes; 2. BKBPP; 3. Dinsosnakertrans; 4. Setda
				Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	5	8			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
2.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 2. Peningkatan peran perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender; 3. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial; 4. Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan; 5. Peningkatan kualitas SDM Organisasi sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan anak dan perempuan; 2. Pelaksanaan pembangunan yang responsif gender (PPRG); 3. Meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat penyandang Masalah sosial; 4. Meningkatkan jaminan perlindungan sosial; 5. Pemberi insentif untuk perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal; 6. Meningkatkan pembinaan organisasi sosial 	Persentase penurunan tingkat penyandang masalah sosial (%)	0.99	1.60	<p>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 11. Program pembinaan pada penyandang cacat dan trauma; 12. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo; 13. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial; 14. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; 15. Program pengembangan lembaga sosial keagamaan; 16. Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan 		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
3.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak hak anak melalui sinergitas pemerintah ,masyarakat dan swasta	1. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak	1. Peningkatan sinergitas peran Pemerintah, masyarakat dan Lembaga masyarakat Dalam Mewujudkan Kabupaten Semarang menuju Kabupaten Layak Anak; 2. Penguatan peran kelembagaan Gugus Tugas KLA, dan Forum Komunikasi Anak Kabupaten Semarang	Persentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak (%)	7,69	14,07			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
4.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa; 2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan dan potensi desa sebagai salah satu sumber pendapatan; 3. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa; 4. Peningkatan fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan; 5. Penyerahan lahan yang dimiliki desa ke Pemerintah Daerah, misalnya untuk jalan poros desa, sarana air bersih, embung jalud, jitu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas perangkat desa, pemilihan kades serentak; 2. Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintahan desa, pemilihan pendamping desa; 3. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan dan potensi desa sebagai salah satu pendapatan; 4. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa; 5. Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintahan desa, pemilihan pendamping desa; 6. Meningkatkan fasilitas pembangunan kawasan perdesaan; 7. Membangun desa berdikari; 8. Peningkatan kualitas SDM aparatur desa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa; 9. Meningkatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsibilitas; 10. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan akan nilai luhur dan budaya bangsa; 	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang Aktif (%)	100	100			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
		6. Pengembangan produk unggulan berbasis desa; 7. Membangun desa berdikari; 8. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 9. Peningkatan serapan aspirasi dari masyarakat; 10. Peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa; 11. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kunjungan/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	11. Melaksanakan kunjungan kerja/inspeksi Kepala dan Wakil Kepala Daerah dengan tertib lancar dan teratur						
Misi 6 : Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya									
Tujuan 8 : Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan									
1.	Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumberdaya alam	1. Penanganan dan pemanfaatan limbah	1. Menangani gas metan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Jumlah penerapan teknologi tepat guna yang mendapat fasilitasi dari pemerintah (unit)	3	38	1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;	1. Lingkungan Hidup; 2. Kehutanan	1. BLH; 2. Distanbunhut; 3. DPU; 4. Setda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
2.	Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	1. Pembimbingan Perdes tentang lingkungan hidup	1. Menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat desa				2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam; 3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam; 4. Program peningkatan pengendalian polusi; 5. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 6. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; 7. Program penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pasca bencana; 8. Program rehabilitasi hutan dan lahan; 9. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan		
3.	Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan	1. Pelaksanaan pengujian kualitas air daya dukung dan daya tampung, penetapan kelas air sungai, pelaksanaan konservasi, penanaman pohon, penambahan penyediaan air tanah, penanganan rawa pening dan pelaksanaan pengkajian KLHS; 2. Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat	1. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan memastikan bahwa kebijakan rencana dan program berwawasan lingkungan; 2. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana (mitigasi/pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi)	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pertahun (%)	54,79	68,61			
4.	Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat	1. Perbanyak vegetasi tanaman kehutanan dan konservasi lahan	1. Peningkatan kegiatan penghijauan baik vegetatif maupun sipil teknis	Produktivitas Hasil Hutan Pertahun (m ³ /Hektar)	88,89	94,12			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)			
5.	Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan lahan kritis; 2. Penguatan kelembagaan kelompok petani dalam penggunaan pupuk organik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah tanaman kehutanan; 2. Pengembangan kawasan pertanian organik 	Produktivitas hasil pertanian pertahun (ton/Hektar)	58,38	61,36			
6.	Terkendalnya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pemanfaatan lahan dan pengendalian pemanfaatannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan; 2. Peningkatan kinerja aparatatur/sumberdaya manusia dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan; 3. Pengendalian pertanahan dan penertiban tanah terlantar; 4. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta yang berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian pemanfaatan lahan 	Persentase bangunan ber-IMB (%)	65	90			

1.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah adalah program-program yang bersifat *urgent*, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas sasaran pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta standar pelayanan minimal. Tidak semua program dapat dikategorikan menjadi program prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Program-program prioritas pembangunan daerah tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2
Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021

No.	Program Unggulan Bupati	Indikasi Hasil Program Unggulan Bupati	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1.	Bebas/Menggratiskan biaya perizinan UMKM skala kecil dan menengah yang pengurusannya dikecamatan, memfasilitasi akses permodalan dan pemasaran hasil produksi UMKM	1. Penambahan jumlah kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat; 2. Optimalisasi pelayanan perizinan di kecamatan melalui PATEN.	Program pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan pelimpahan kewenangan
2.	Membangun pasar-pasar tradisional yang resik, apik dan ramah terhadap pedagang kecil	1. Pembangunan/revitalisasi pasar-pasar tradisional; 2. Pembangunan gedung grosir produk UMKM.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3.	Fasilitasi sertifikasi keahlian/profesi untuk pendidikan formal dan non formal	Pengembangan kemitraan antara BLK dengan dunia usaha dan industri.	Program manajemen pelayanan pendidikan
4.	Pelatihan ketrampilan bagi anak putus sekolah melalui BLK	1. Pengembangan kemitraan antara BLK dengan dunia usaha dan industri; 2. Kajian pembangunan technopark Kabupaten Semarang; 3. Pembangunan technopark Kabupaten Semarang; 4. Mengembangkan jurusan di SMK sesuai dengan kebutuhan industri; 5. Mengembangkan program magang siswa di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

No.	Program Unggulan Bupati	Indikasi Hasil Program Unggulan Bupati	Program Prioritas Pembangunan Daerah
5.	Mengembangkan trayek angkutan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil	1. Pembukaan trayek angkutan di wilayah terpencil; 2. Pengadaan angkutan bagi siswa oleh sekolah.	Program peningkatan pelayanan angkutan
6.	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri	1. Kajian penataan kawasan Bawen raya Networking (Baranet); 2. Kajian penataan kawasan Bandungan;	Program perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh
7.	Kajian pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang	Pengkajian pemindahan pusat pemerintahan.	Program perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh
8.	Rintisan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang	Pengadaan lahan untuk pemindahan pusat pemerintahan.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Rintisan konstruksi untuk lokasi pemindahan pusat pemerintahan.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
9.	Pembangunan/perluasan kawasan industri	Penyusunan RDTR (18), RTBL (15), Survei dan pemetaan.	Program perencanaan tata ruang
10.	Peningkatan prosentase penerimaan bagi hasil alokasi dana desa	Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa, RT dan RW.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
11.	Menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena bencana alam	Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena bencana alam.	Program penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pasca bencana
12.	Pencanangan rumah aspirasi rakyat	Menyediakan rumah aspirasi rakyat, termasuk rumah dinas.	Program pendidikan politik masyarakat
13.	Peningkatan pelayanan KTP dan KK	Pengadaan sarana Pelayanan pembuatan KTP dan KK di DISPENDUKCAPIL (peralatan).	Program penataan administrasi kependudukan
14.	Peningkatan pelayanan KTP dan KK di Kecamatan melalui PATEN	Pelayanan pembuatan KTP dan KK di Kecamatan.	Program pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan pelimpahan kewenangan
15.	Pembatasan minimarket modern, menggalakkan belanja ke pasar tradisional, serta	1. Pengetatan perijinan minimarket;	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

No.	Program Unggulan Bupati	Indikasi Hasil Program Unggulan Bupati	Program Prioritas Pembangunan Daerah
	memberi teladan dalam belanja cerdas dan efisien	2. Pembangunan Toko Milik Rakyat (TOMIRA)/Toko Gotong-Royong (TOGORO) sebagai wadah pemasaran produk UMKM; 3. Program bela-beli produk lokal; 4. Program pasar murah; 5. Program operasi pasar; 6. SIHATI (Sistim Informasi Harga dan Produksi Komoditi).	
16.	Peningkatan infrastruktur, sarana prasarana pariwisata	1. Penataan kawasan wisata Bandungan; 2. Penataan kawasan wisata Kopeng; 3. Penataan ODTW Candi Gedongsongo; 4. Pengembangan ODTW Bukit Cinta; 5. Pembangunan Waterpark di Muncul. 1. Penataan kawasan wisata Bandungan; 2. Penataan kawasan wisata Kopeng; 3. Penataan ODTW Candi Gedongsongo; 4. Pengembangan ODTW Bukit Cinta; 5. Pengkajian pembangunan Waterpark di Muncul; 6. Pembangunan Waterpark di Muncul; 7. Promosi produk unggulan daerah untuk mendukung promosi pariwisata.	Program pembangunan jalan dan jembatan Program pengembangan destinasi pariwisata
17.	Peningkatan jalan-jalan poros desa	Peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan.	Program pembangunan jalan dan jembatan

No.	Program Unggulan Bupati	Indikasi Hasil Program Unggulan Bupati	Program Prioritas Pembangunan Daerah
18.	Peningkatan sarana prasarana jaringan irigasi dan pengairan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian hibah kepada kelompok masyarakat yang berbadan hukum; 2. Pengembangan kawasan agribisnis. 	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
19.	Peningkatan sarana prasarana dibidang pertanian dan memfasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian hibah kepada kelompok masyarakat yang berbadan hukum; 2. Pengembangan kawasan agribisnis; 3. Kajian pengembangan kawasan agribisnis. 	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
20.	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan; serta Peningkatan sarana, prasarana dan SDM pendidikan	Peningkatan sarana prasarana dan SDM pendidikan TK dan PAUD. Peningkatan sarana prasarana pendidikan madrasah, pondok pesantren, Pengentasan angka buta aksara dan meningkatkan kegiatan di PKBM. Peningkatan sarana prasarana, pemberian beasiswa bagi anak miskin dan anak berprestasi SD, SMP Negeri/swasta.	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Program pendidikan non formal
21.	Peningkatan sarana prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat. Pengkajian dan fasilitasi kebijakan lingkungan sehat.	Program lingkungan sehat perumahan
			Program pengembangan lingkungan sehat
22.	Rehab rumah tidak layak huni	Rehab rumah tidak layak huni.	Program lingkungan sehat perumahan
23.	Penyaluran Beasiswa untuk sekolah negeri dan swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas jangkauan beasiswa bagi siswa di sekolah swasta; 2. Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin; 3. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi. 	Program manajemen pelayanan pendidikan
24.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; Peningkatan sarana, prasarana dan SDM kesehatan; serta pengembangan SMS Gateway (E-Kesehatan)	Penyediaan anggaran BPJS dan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Program pelayanan kesehatan peserta BPJS di Puskesmas dan jaringannya

No.	Program Unggulan Bupati	Indikasi Hasil Program Unggulan Bupati	Program Prioritas Pembangunan Daerah
		Pengadaan sarana prasarana RSUD Ungaran dan RSUD Ambarawa.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/rumah sakit paru-paru/RS mata
		Sarana prasarana Puskesmas, khusus untuk puskesmas Tengaran sebagai rintisan RSUD kelas D, Puskesmas menjadi BLUD dan program E-Kesehatan.	Program peningkatan pelayanan kesehatan
25.	Perpanjangan izin perusahaan yang dipermudah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah prosedur Perpanjangan izin perusahaan; 2. Pelayanan perizinan online; 3. Pembangunan sistem pelayanan e-perijinan; 4. Pembebasan biaya perijinan bagi UMKM skala kecil dan menengah 5. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi; 6. Keringanan retribusi dan pajak; 7. Pembebasan biaya perijinan bagi UMKM. 	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
26.	Revisi peraturan daerah yang sudah tidak sesuai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Perda RTRW; 2. Penyusunan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 	Program penataan peraturan perundang-undangan
27.	Ruas Tuntas, menuntaskan pembangunan jalan melalui perencanaan yang matang, selektif, tepat bangun (disesuaikan dengan kondisi tanah) dan pembagian wewenang kabupaten dan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan jalan kabupaten dan perkotaan secara tuntas; 2. Pembangunan jalan alternatif. 	Program pembangunan jalan dan jembatan

Adapun keterkaitan antara isu strategis dengan program prioritas seperti pada tabel 7.3:

Tabel 7.3
Keterkaitan Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2016-2021

NO	ISU STRATEGIS 2016-2021	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1	Belum optimalnya pemenuhan kualitas/mutu standar pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Program pendidikan non formal 3. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; 4. Program manajemen pelayanan pendidikan 5. Program peningkatan pelayanan angkutan
2	Belum optimalnya pemenuhan kualitas/mutu standar pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelayanan kesehatan peserta BPJS di Puskesmas dan jaringannya 2. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/rumah sakit paru-paru/RS mata. 3. Program peningkatan pelayanan kesehatan
3	Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta masih kurangnya ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana wilayah baik secara kuantitas maupun kualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; 3. Program perencanaan tata ruang 4. Program peningkatan pelayanan angkutan 5. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 6. Program lingkungan sehat perumahan 7. Program pengembangan lingkungan sehat; 8. Program pembangunan jalan dan jembatan; 9. Program penataan peraturan perundang-undangan
4	Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pendidikan non formal 2. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 3. Program peningkatan pelayanan angkutan 4. Program penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pasca bencana. 5. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 6. Program manajemen pelayanan pendidikan
5	Belum optimalnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun tata laksananya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan pelimpahan kewenangan 2. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 3. Program pendidikan politik masyarakat 4. Program penataan administrasi kependudukan
6	Belum optimalnya pengelolaan potensi produk-produk unggulan daerah guna meningkatkan kualitas daya saing ekonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. 2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. 3. Program pembangunan jalan dan jembatan 4. Program pengembangan destinasi pariwisata 5. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 6. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
7	Semakin menurunnya kualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program lingkungan sehat perumahan

NO	ISU STRATEGIS 2016-2021	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	daya dukung lingkungan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan	2. Program pengembangan lingkungan sehat 3. Program penataan peraturan perundang-undangan
8	Masih belum optimalnya penyelenggaraan pembangunan yang berprespektif gender dan berorientasi pada pemenuhan hak anak	1. Program pelayanan kesehatan peserta BPJS di Puskesmas dan jaringannya 2. Program pendidikan politik masyarakat

Dari tabel diatas diketahui bahwa seluruh isu strategis sudah direncanakan penyelesaiannya dalam progam prioritas pembangunan tahun 2016-2021.

7.5. Agenda Tahunan Pembangunan Daerah

Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan maka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam agenda tahunan sebagai berikut:

1. Tahun 2016, merupakan tahun:

- a. Tahap sosialisasi dan konsolidasi visi-misi pasca pemilihan kepala daerah dengan 27 (dua puluh tujuh) program unggulan;
- b. Melanjutkan pelaksanaan pembangunan sesuai RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2016;
- c. Menyelesaikan capaian target kinerja yang belum tercapai pada RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015;
- d. Konsolidasi dan penyiapan instrumen perencanaan pembangunan untuk mewujudkan bangunan maju matra.

2. Tahun 2017, merupakan tahun **penguatan pondasi bangunan maju matra** yang dilakukan melalui pemenuhan standar pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

3. Tahun 2018 - 2019, merupakan tahun **pemantapan bangunan maju matra dan pilar bangunan maju matra** yang dilakukan melalui optimalisasi pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

4. Tahun 2020-2021, merupakan tahun **perwujudan bangunan maju matra** yang dilakukan melalui peningkatan daya saing ekonomi dan peningkatan kelestarian lingkungan hidup, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepastian hukum.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang berhubungan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan dengan program Bupati terpilih, atau sekurang-kurangnya mengandung program Bupati terpilih yang didalamnya berisi program prioritas. Program prioritas dirumuskan berdasarkan kebijakan umum dan masing-masing memuat fokus kegiatan yang saling berkaitan dengan indikator kinerja (*outcome*) yang dipersyaratkan.

Program prioritas pada RPJMD 2016-2021 dirumuskan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dituangkan menjadi program dan kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah. Perumusan program pembangunan meliputi Program Prioritas I atau Program wajib mengikat, Program Prioritas II atau Program Prioritas Pembangunan dan Prioritas III atau Program Reguler.

Program Prioritas I atau Program Wajib mengikat merupakan program dengan fokus kegiatan untuk mendanai :

1. pengeluaran wajib mengikat secara periodik yang setiap tahun harus dibayar dan tidak dapat ditunda pembayarannya , antara lain gaji dan tunjangan, belanja bunga, belanja jasa kantor;
2. pengeluaran yang merupakan prioritas utama yang secara periodik harus dibayar oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas yaitu belanja pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis, belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD, belanja JAMKESDA /PBI Jaminan Kesehatan kepada penduduk miskin;
3. pengeluaran Dana Tak Terduga untuk membiayai tanggap darurat bencana alam, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Belanja asuransi untuk asset daerah , serta belanja tenaga teknis dan outsourcing.
4. pengeluaran pembiayaan untuk membentuk dana cadangan guna kepentingan pembiayaan Pemilu Bupati Tahun 2021, penyertaan modal kepada BUMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal masing – masing kepada PDAM, Bank Jateng dan kepada BPR BKK.

Sedangkan Program Prioritas II atau Program Prioritas Pembangunan adalah Program dengan fokus kegiatan yang langsung mendukung janji politik Bupati dalam pencapaian visi-misi Bupati terpilih, dalam hal ini ada 32 Program Prioritas II atau Program Prioritas Pembangunan sebagaimana dimuat dalam tabel 8.1.

Adapun Prioritas III atau Program Reguler adalah merupakan program dalam rangka penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan setiap tahun walaupun tidak secara langsung mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

Perhitungan indikatif pendanaan masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk Program Prioritas I atau Program wajib mengikat dan Program Prioritas II atau Program Prioritas Pembangunan, serta Prioritas III atau program reguler. Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dimaksud dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2016-2021.

Secara lebih jelas Program Prioritas I atau Program wajib mengikat dan Program Prioritas II atau Program Prioritas Pembangunan, serta Prioritas III atau program reguler, indikator kinerja dan indikatif pendanaan tertuang dalam tabel 8.2 dengan pemberian kode atau catatan sebagai berikut :

- * untuk Program Prioritas I atau Program wajib mengikat ;
- ** untuk Program Prioritas II atau Program Prioritas Pembangunan (tabel 8.1);
- *** untuk Prioritas III atau Program Reguler

Tabel 8.1
Program Prioritas Pembangunan (Prioritas II) Tahun 2016-2021
dan Kebutuhan Pendanaannya

No.	Program Prioritas Pembangunan (Prioritas II)	Indikasi Keluaran Program Prioritas	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Ribu Rp.)
1.	Program pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan pelimpahan kewenangan.	1. Penambahan jumlah kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat 2. Optimalisasi pelayanan perizinan di kecamatan melalui PATEN	10.000.000
2.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.	1. Pembangunan/revitalisasi pasar-pasar tradisional 2. Pembangunan gedung grosir produk UMKM.	90.500.000
3.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengembangan kemitraan antara BLK dengan dunia usaha dan industri	3.000.000
4.	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	1. Pengembangan kemitraan antara BLK dengan dunia usaha dan industry 2. Kajian pembangunan technopark Kabupaten Semarang 3. Pembangunan technopark Kabupaten Semarang 4. Mengembangkan jurusan di SMK sesuai dengan kebutuhan industry 5. Mengembangkan program magang siswa di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	3.600.000

No.	Program Prioritas Pembangunan (Prioritas II)	Indikasi Keluaran Program Prioritas	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Ribu Rp.)
5.	Program peningkatan pelayanan angkutan.	1. Pembukaan trayek angkutan di wilayah terpencil 2. Pengadaan angkutan bagi siswa oleh sekolah	600.000
6.	Program perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh;	1. Kajian penataan Kawasan Bawen Raya Networking (Baranet) 2. Kajian Penataan Kawasan Bandungan	675.000
7.	Program perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pengkajian Pemindehan Pusat Pemerintahan	250.000
8.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pengadaan Lahan untuk pemindahan pusat pemerintahan	100.000.000
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rintisan Konstruksi Pusat Pemerintahan	100.000.000
10.	Program perencanaan tata ruang;	Penyusunan RDTR (18), RTBL (15), Survai dan pemetaan.	12.850.000
11.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.	Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa, Rt dan RW	37.000.000
12.	Program penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pasca bencana.	Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena bencana alam	12.000.000
13.	Program pendidikan politik masyarakat.	Pencanangan rumah aspirasi rakyat, termasuk rumah dinas	1.000.000
14.	Program penataan administrasi kependudukan;	Peningkatan pelayanan KTP dan KK	3.000.000
15.	Program pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan pelimpahan kewenangan.	Peningkatan pelayanan KTP dan KK dikecamatan melalui PATEN	15.000.000
16.	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.	1. Pengetatan perijinan minimarket 2. Pembangunan Toko Milik Rakyat (TOMIRA)/Toko Gotong-Royong (TOGORO) sebagai wadah pemasaran produk UMKM 3. Program bela-beli produk lokal; 4. Program pasar murah 5. Program operasi pasar 6. SIHATI (Sistim Informasi Harga dan Produksi Komoditi)	300.000
17.	Program pembangunan jalan dan jembatan;	1. Penataan kawasan wisata Bandungan 2. Penataan kawasan wisata Kopeng 3. Penataan ODTW Candi Gedongsongo 4. Pengembangan ODTW Bukit Cinta 5. Pembangunan Waterpark di Muncul	80.000.000
18.	Program pengembangan destinasi pariwisata;	1. Penataan kawasan wisata Bandungan 2. Penataan kawasan wisata Kopeng 3. Penataan ODTW Candi Gedongsongo 4. Pengembangan ODTW Bukit Cinta 5. Pengkajian pembangunan Waterpark di Muncul 6. Pembangunan Waterpark di Muncul	120.000.000

No.	Program Prioritas Pembangunan (Prioritas II)	Indikasi Keluaran Program Prioritas	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Ribu Rp.)
		7. Promosi produk unggulan daerah untuk mendukung promosi pariwisata	
19.	Program pembangunan jalan dan jembatan;	Peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan	120.000.000
20.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	1. Pemberian hibah kepada kelompok masyarakat yang berbadan hukum 2. Pengembangan kawasan agribisnis	256.000.000
21.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;	1. Pemberian hibah kepada kelompok masyarakat yang berbadan hukum 2. Pengembangan kawasan agribisnis 3. Kajian pengembangan kawasan agribisnis	6.000.000
22.	Program Pendidikan Anak Usia Dini;	1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 2. Peningkatan sarana, prasarana dan SDM pendidikan	66.000.000
23.	Program pendidikan non formal	Peningkatan sarana prasarana pendidikan madrasah, pondok pesantren, pengentasan angka buta aksara dan meningkatkan kegiatan di PKBM	12.000.000
24.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;	Peningkatan sarana prasarana, pemberian beasiswa bagi anak miskin dan anak berprestasi SD, SMP Negeri/swasta.	184.000.000
25.	Program lingkungan sehat perumahan.	1. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat 2. Rehab rumah tidak layak huni	200.000.000
26.	Program pengembangan lingkungan sehat;	Pengkajian dan fasilitasi kebijakan lingkungan sehat.	2.400.000
27.	Program manajemen pelayanan pendidikan.	1. Memperluas jangkauan beasiswa bagi siswa di sekolah swasta 2. Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin 3. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi	38.500.000
28.	Program pelayanan kesehatan peserta BPJS di Puskesmas dan jaringannya;	Penyediaan anggaran BPJS dan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	153.000.000
29.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/rumah sakit paru-paru/RS mata.	Pengadaan dan peningkatan sarana, prasarana RSUD Ungaran dan RSUD Ambarawa	670.000.000
30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan;	Peningkatan sarana, prasarana Puskesmas, khusus untuk Puskesmas tengaran sebagai rintisan RSUD kelas D, Puskesmas menjadi BLUD dan program E-Kesehatan (SMS Gateway)	75.000.000
31.	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.	1. Mempermudah prosedur Perpanjangan izin perusahaan 2. Pelayanan perizinan online 3. Pembangunan sistem pelayanan e-perijinan 4. Pembebasan biaya perijinan bagi UMKM skala kecil dan menengah 5. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi	600.000

No.	Program Prioritas Pembangunan (Prioritas II)	Indikasi Keluaran Program Prioritas	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Ribu Rp.)
		6. Keringanan retribusi dan pajak 7. Pembebasan biaya perijinan bagi UMKM	
32.	Program penataan peraturan perundang-undangan	1. Revisi Perda RTRW 2. Penyusunan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	3.000.000
33.	Program pembangunan jalan dan jembatan;	1. Peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan jalan kabupaten dan perkotaan secara tuntas 2. Pembangunan jalan alternatif	120.000.000
			2.496.275.000

Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)				
				2015	TARGET	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						TARGET	Rp. (000)	
	TOTAL BELANJA					2.155.105.274		2.537.900.008		2.696.292.648		2.730.865.699		2.840.694.382		2.991.195.143		15.952.053.153	2.496.275.000	13.455.778.153			
	Belanja Tidak Langsung		1.049.820.000		1.254.350.000		1.328.770.000		1.441.170.000		1.500.010.000		1.593.180.000		1.684.030.000		8.801.510.000		8.801.510.000				
	Belanja Pegawai		855.050.000		974.740.000		1.059.370.000		1.133.270.000		1.195.600.000		1.265.160.000		1.330.680.000		6.958.820.000		6.958.820.000				
	Belanja bunga		0		0		0		0		0		0		0		-		0				
	Belanja Subsidi		0		0		0		0		0		0		0		-		0				
	Belanja Hibah		29.200.000		31.300.000		2.880.000		2.650.000		2.440.000		2.240.000		2.060.000		43.570.000		43.570.000				
	Belanja Bantuan Sosial		740.000		1.240.000		1.030.000		860.000		710.000		590.000		490.000		4.920.000		4.920.000				
	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa		11.930.000		12.970.000		13.730.000		15.440.000		16.370.000		18.180.000		20.350.000		97.040.000		97.040.000				
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa lainnya		151.420.000		232.100.000		249.760.000		286.950.000		282.890.000		305.010.000		328.450.000		1.685.160.000		1.685.160.000				
	Belanja Tak Terduga		1.480.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		12.000.000		12.000.000				
	BELANJA LANGSUNG				900.755.274		1.209.130.008		1.255.122.648		1.230.855.699		1.247.514.382		1.307.165.143		7.150.543.153	2.496.275.000	4.654.268.153				
1	1. URUSAN WAJIB				581.747.469		777.731.726		815.906.802		759.215.620		745.868.658		793.417.791		4.473.888.067	2.116.850.000	2.357.038.067				
	1.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				545.161.587		727.068.156		723.339.294		665.316.652		686.380.516		728.400.517		4.075.666.722	1.893.750.000	2.181.916.722				
1	01	1.1.1 URUSAN PENDIDIKAN			74.125.518		149.152.130		111.273.663		111.726.416		117.871.043		118.339.998		682.488.768	303.500.000	378.988.768				
1	01	1.01.01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini**	Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 4 - 6 Tahun untuk usia PAUD (%)	62,55	63,46	11.264.728	64,80	29.422.000	67,40	24.307.000	69,40	24.404.500	72,05	24.334.500	72,10	24.372.500	72,10	138.105.228	66.000.000	72.105.228	DISDIKBUD
				Ruang kelas Kondisi Baik PAUD TK mendukung PBM (%)	86,54	86,57		86,60			86,64		86,67		86,70		87,00		87,00				
1	01	1.01.01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun **	Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 7 - 12 Tahun untuk usia sekolah SD/Sederajat (%)	104,51	100,00	24.988.432	100,00	78.060.120	100,00	45.089.775	100,00	45.409.018	100,00	51.011.238	100,00	50.884.438	100,00	295.443.021	184.000.000	111.443.021	DISDIKBUD
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 13 - 15 Tahun untuk usia sekolah SMP/Sederajat (%)	96,28	96,29		96,30			96,31		96,32		96,33		96,34		96,34				
				Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 7 - 12 Tahun untuk usia sekolah SD/Sederajat (%)	95,16	95,17		95,19			95,21		95,23		95,25		95,27		95,27				

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER (000) Rp	
				2015	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 13 - 15 Tahun untuk usia sekolah SMP/Sederajat (%)	81,81	81,82		81,85		81,86		81,88		81,90		81,95		81,95				
		Rata-rata capaian SPM SD (%)	94,26	94,28		94,40		94,55		94,70		94,85		95,00		95,00				
		Rata-rata capaian SPM SMP (%)	93,66	93,86		94,00		94,20		94,40		94,60		94,80		94,80				
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,09	0,09		0,08		0,08		0,07		0,07		0,07		0,07				
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,20	0,20		0,19		0,19		0,18		0,18		0,17		0,17				
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	94,16	94,17		94,18		94,19		94,20		94,25		94,30		94,30				
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	82,61	82,62		82,63		82,64		82,66		82,69		82,72		82,72				
		Ruang kelas Kondisi Baik SD mendukung PBM (%)	94,01	94,02		94,03		94,04		94,06		94,08		94,50		94,50				
		Ruang kelas Kondisi Baik SMP mendukung PBM (%)	98,29	98,29		98,30		98,31		98,32		98,41		98,50		98,50				
		Komite SD berperan aktif (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Komite SMP berperan aktif (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Siswa miskin SD/MI memperoleh beasiswa (%)	90,02	90,69		91,94		93,24		94,59		95,89		97,20		97,20				
		Siswa miskin SMP/MTs memperoleh beasiswa (%)	87,35	88,45		90,02		91,66		93,34		95,02		96,70		96,70				
		Penerapan TIK Pembelajaran SD (%)	39,14	39,69		40,91		42,32		43,93		45,40		46,52		46,52				
		Penerapan TIK Pembelajaran SMP (%)	65,63	67,01		69,39		71,72		73,00		75,25		77,45		77,45				

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB			
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)					
			2015	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET											
1	01	1.01.01	17	Program Pendidikan Menengah***	Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 16-18 Tahun untuk usia sekolah SMA/SMK/ Sederajat (%)	69,09	69,10	6.407.056	69,15	-	69,20	69,30	69,40	69,50	69,50	6.407.056		6.407.056		DISDIKBUD			
					Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 16 - 18 Tahun untuk usia sekolah SMA/SMK/ Sederajat (%)	43,41	45,00		47,25		47,50	47,75	48,00	50,00	50,00								
					Penerapan TK Pembelajaran SMA/SMK (%)	100,00	100,00																
					Ruang kelas Kondisi Baik SMA/SMK mendukung PBM	98,97	98,99																
					Komite SMA/SMK berperan aktif	100,00	100,00																
1	01	1.01.01	18	Program Pendidikan Non Formal**	Angka melek huruf(%)	99,98	99,98	1.580.000	99,98	1.765.000	99,98	1.237.000	99,98	1.267.000	99,99	1.317.000	99,99	1.347.000	99,99	8.513.000	12.000.000	(3.487.000)	DISDIKBUD
					Jumlah satuan pendidikan non formal (PKBM/LKP/ Kelom pok Belajar) (lembaga)	227,00	229,00		237,00		244,00	251,00	258,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00				
1	01	1.01.01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan***	Guru TK/RA memenuhi kualifikasi S1/DIV (%)	62,38	63,18	1.035.250	63,97	1.545.000	64,75	2.590.500	65,52	2.590.500	66,27	3.075.000	66,50	3.128.000	66,50	13.964.250			DISDIKBUD
					Guru SD/MI memenuhi kualifikasi S1/DIV (%)	84,98	84,99		85,01		85,03	85,05	85,07	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30			
					Guru SMP/MTs memenuhi kualifikasi S1/DIV (%)	88,98	94,00		94,10		94,20	94,30	94,40	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50			
					Guru SMA/SMK/MA memenuhi kualifikasi S1/DIV (%)	94,69	98,00																
					Guru TK Bersertifikat Pendidik (%)	35,29	37,93		40,53		43,09	45,62	48,10	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35			
					Guru SD Bersertifikat Pendidik (%)	56,10	56,80		57,40		57,96	59,80	61,65	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75			
					Guru SMP Bersertifikat Pendidik (%)	61,51	62,50		63,24		64,21	64,93	66,11	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30			
					Guru SMA/SMK Bersertifikat Pendidik (%)	35,83	39,00																

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB		
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)				
			2015	TARGET	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					TARGET		Rp. (000)	
1	01	1.01.01	22	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	Penguatan pendidikan karakter dan budi pekerti di sekolah (%)	100	100,00	28.850.052	100,00	38.360.010	100,00	38.049.388	100,00	38.055.398	100,00	38.133.305	100,00	38.608.060	100,00	220.056.213	41.500.000	178.556.213	DISDIKBUD
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99				
				Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	100	99,96		99,96		99,96		99,97		99,97		99,97		99,97				
				Siswa miskin SMA/SMK/MA memperoleh beasiswa (%)	86,32	87,16		88,88		90,82		92,93		95,13		97,46		97,46				
				Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	0,68	0,67		0,66		0,65		0,64		0,63		0,63		0,63				
				Kemitraan SMK dengan DUDI dalam penyaluran tamatan (%)	11,36	13,64		15,56		17,39		19,15		20,83		22,45		22,45				
				Lulusan SMK bersertifikat keahlian (%)				10,06		11,06		12,07		13,07		14,08		14,08				
1	02		1.1.2 URUSAN KESEHATAN			226.070.081		395.655.075		421.586.952		338.773.765		356.300.549		382.318.418		2.120.704.840	900.400.000	1.220.304.840		
1	02	1.02.01	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan***	Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan di UPTD Puskesmas dan Labkesda	12 bulan	12 bulan	3.217.145	12 bulan	1.359.457	12 bulan	1.359.457	12 bulan	1.444.943	12 bulan	1.609.437	12 bulan	1.890.381	12 bulan	10.880.820	10.880.820	DINKES
1	02	1.02.01	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat***	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan			41.723.490		36.224.771		39.847.249		43.831.973		48.215.171		53.036.687		262.879.341	262.879.341	DINKES
				- Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN			270.834	290.054		290.054		290.054		290.054		290.054		290.054				
				- Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD			36.131	36.131		40.000		47.000		47.000		47.000		47.000				
				- Jumlah peserta Jamkesda			9.000	7.000		7.000		-		-		-		-				
				- Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang diperbaiki (ditingkatkan)			11,36	11,36		6		8		5		5		5				

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER (000) Rp	
				2015	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,32	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		akan dikoordinasikan dg seksi ybs						

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB		
			2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)							
			0,40	0,40		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4						
		- Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk																				
		- Cakupan puskesmas	136,84	136,84		136,84		136,84		136,84		136,84		136,84		136,84						
		- Cakupan puskesmas pembantu	28,51	28,94		28,51		28,51		28,51		28,51		28,51		28,51						
1	02	1.02.02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat***	Peningkatan kesehatan masyarakat	1 paket pengadaan alkes (bersumber DBHCHT,	1 paket pengadaan alkes (bersumber DBHCHT,	1.976.406	1 paket pengadaan alkes (bersumber DBHCHT, pengadaan 1 paket alkes	4.221.070	1 paket pengadaan alkes (bersumber DBHCHT, pengadaan 1 paket alkes	3.500.000	1 paket pengadaan alkes (bersumber DBHCHT, pengadaan 1 paket alkes	3.750.000	1 paket pengadaan alkes (bersumber DBHCHT, pengadaan 1 paket alkes	4.000.000	1 paket pengadaan alkes (bersumber DBHCHT, pengadaan 1 paket alkes	4.250.000	1 paket pengadaan alkes (bersumber DBHCHT, pengadaan 1 paket alkes	21.697.476	21.697.476	RSUD AMBARAWA
					pengadaan 1 paket alkes (bersumber Pajak Rokok)	pengadaan 1 paket alkes (bersumber Pajak Rokok)		pengadaan 1 paket alkes (bersumber Pajak Rokok)		pengadaan 1 paket alkes (bersumber Pajak Rokok)		pengadaan 1 paket alkes (bersumber Pajak Rokok)		pengadaan 1 paket alkes (bersumber Pajak Rokok)		pengadaan 1 paket alkes (bersumber Pajak Rokok)		pengadaan 1 paket alkes (bersumber Pajak Rokok)				
1	02	1.20.03	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat***	Prosentase peningkatan Pola Hidup Masyarakat	100%	100%	35.656	100%	38.600	100%	42.600	100%	46.860	100%	51.546	100%	56.701	100%	271.963	271.963	SETDA
1	02	1.02.01	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan***	Tercapainya program pengawasan obat dan makanan	12 bulan	12 bulan	24.307	12 bulan	28.384	12 bulan	29.222	12 bulan	31.345	12 bulan	33.779	12 bulan	35.557	12 bulan	182.594	182.594	DINKES
1	02	1.02.01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat***	- Persentase rumah tangga yang ber- PHBS strata sehat utama	29,50	35,00	476.511	40	627.252	45	639.977	50	658.975	55	684.872	60	718.360	60	3.805.947	3.805.947	DINKES
1	02	1.02.01	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat***	Tercapainya peningkatan status gizi balita			197.762		228.200		241.020		266.122		283.734		301.108		1.517.946	1.517.946	DINKES
					- Persentase ibu hamil KEK dari keluarga kurang mampu yang mendapat makanan tambahan	9,00	20,00		22		24		26		28		30		30			
					- Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	87,25	87,00		87		88		88		89		89		89			
					- Persentase bayi usia kurang 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	44,83	45,00		45		46		46		47		47		47			
					- Persentase balita gizi buruk dari keluarga kurang mampu yang mendapat makanan tambahan	88,00	75,00		80		85		90		90		90		90			
					- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100,00	100,00		100		100		100		100		100		100			

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB			
			2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULIER Rp (000)				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)								
1	02	1.02.02	23	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	02	1.02.02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan***	Pelayanan rumah sakit terakreditasi		100%	400.000	100%	400.000	100%	400.000	100%	400.000	100%	400.000	100%	2.000.000		2.000.000	RSUD AMBARAWA		
1	02	1.02.03	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan***	Peningkatan pelayanan kesehatan di rs:			132.805													RSUD UNGARAN		
1	02	1.02.02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**	Peningkatan pelayanan kesehatan	1 paket pengadaan alat kesehatan	1 paket pengadaan alat kesehatan	16.620.683	3 paket pengadaan alat kesehatan bersumber APBD Kab, APBD Provinsi dan APBN,	87.893.317	1 paket pengadaan alat kesehatan bersumber APBD Kab, APBD Provinsi dan APBN,	90.850.000	1 paket pengadaan alat kesehatan bersumber APBD Kab, APBD Provinsi dan APBN,	87.000.000	1 paket pengadaan alat kesehatan bersumber APBD Kab, APBD Provinsi dan APBN,	82.250.000	1 paket pengadaan alat kesehatan bersumber APBD Kab, APBD Provinsi dan APBN,	86.750.000	6 paket pengadaan alat kesehatan bersumber APBD Kab, APBD Provinsi dan APBN,	451.364.000	670.000.000	8.417.862	RSUD AMBARAWA
																						RSUD AMBARAWA	
																						RSUD AMBARAWA	
1	02	1.02.03	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**	Peningkatan pelayanan kesehatan di rs:	- pengadaan tanah luas 3.425m2 - pengadaan alkes : 1. Dana DAK untuk pemenuhan R. Klas III dan R. IGD 1 item du klas III = 32 unit unit, 6 item di R. IGD = 42 buah 2. Dana dari bantuan Gubernur (Provinsi) 8 item = 2 unit dan 6 set	- pengadaan tanah luas 3.240 m2 1 paket - pengadaan alkes : sisa DAK 2015 : 5 item = 69 unit ; bed set pasien = 30 set ; minor surgery set = 4 set utk DAK 2016	9.553.862	- pembangunan rs gedung - pengadaan alkes RS utk RJ dan RI - pembelian 1 unit mobil ambulance	101.800.000	- pembangunan alkes utk RI & RJ - pembelian 1 unit mobil ambulance	103.100.000	4.150.000	- pengadaan alkes utk RI & RJ	4.450.000	- pengadaan alkes utk RI & RJ	4.000.000	- pembangunan Gedung RS 7 Lantai. - pengadaan alkes RJ dan RI - Pengadaan 2 Unit Mobil Ambulance	227.053.862				RSUD UNGARAN
1	02	1.02.03	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata***	Peningkatan pelayanan kesehatan di rs:	- rehab ruang rawat inap 1 paket		750.000	- pemeliharaan gedung rs 1 paket - rehab ruang rawat inap 1 paket	2.300.000	- pemeliharaan gedung rs 1 paket - rehab ruang rawat inap 1 paket	3.500.000	5.000.000	- pemeliharaan gedung rs 1 paket - rehab ruang rawat inap 1 paket	5.000.000	- pemeliharaan gedung rs 1 paket - rehab ruang rawat inap 1 paket	3.000.000	- pemeliharaan gedung rs 1 paket - rehab ruang rawat inap 1 paket	19.550.000		19.550.000	RSUD UNGARAN	
1	02	1.02.01	29	Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita***	Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita			24.099		40.020		42.022		44.424		46.267		48.593		245.425		245.425	DINKES
					- Angka Kematian Balita		12,46	12,40		12		12		12		12		12					DINKES
					- Rasio Posyandu per satuan balita		23,20	22,00		22		22		22		22		22					DINKES
1	02	1.02.01	30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia***	Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia	12 bulan	12 bulan	119.004	12 bulan	122.040	12 bulan	134.244	12 bulan	147.668	12 bulan	162.435	12 bulan	178.679	12 bulan	864.070		864.070	DINKES

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB		
			2016			2017			2018			2019			2020			2021				
			2015	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	02	1.02.01	31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Peningkatan pengetahuan tentang keamanan pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	12 bulan	12 bulan	4.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.077	-	4.077	DINKES	
1	02	1.02.01	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak***	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			494.000		523.260		575.586		633.145		696.459		766.105		3.688.555	3.688.555	DINKES
					- Angka Kematian Ibu	120,34	117,00		117		116		116		115		115		115			DINKES
					- Angka Kematian Bayi	11,18	10,08		10		10		10		10		10		10			DINKES
					- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00	100,00		100		100		100		100		100		100			DINKES
					- Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,85	95,00		95		95		95		95		95		95			DINKES
					- Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN-1)	Data menyusul	95,00		95		95		95		95		95		95			DINKES
1	02	1.02.03	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak***	Prosentase keselamatan ibu melahirkan	100%	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	600.000	600.000	SETDA
1	02	1.02.02	33	Program Peningkatan Pelayanan RS BLUD*	Peningkatan pelayanan kesehatan	100%	24 kegiatan (instalasi pelayanan dan pendukung pelayanan)	65.438.109	71.673.680	24 kegiatan (instalasi pelayanan dan pendukung pelayanan)	78.741.534	24 kegiatan (instalasi pelayanan dan pendukung pelayanan)	83.701.846	24 kegiatan (instalasi pelayanan dan pendukung pelayanan)	90.722.274	24 kegiatan (instalasi pelayanan dan pendukung pelayanan)	98.111.599	24 kegiatan (instalasi pelayanan dan pendukung pelayanan)	488.389.042	488.389.042		RSUD AMBARAWA
					Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	BPJS 74.956 pasien (PBI: 15.091 dan Non PBI: 59.865); Jamkesda 5.258 pasien	BPJS 114.683 pasien (PBI: 23.089 dan Non PBI: 91.593); Jamkesda 12.367 pasien		BPJS 116.976 pasien (PBI: 23.551 dan Non PBI: 93.425); Jamkesda 12.119 pasien	BPJS 119.316 pasien (PBI: 24.022 dan Non PBI: 95.294); Jamkesda 12.367 pasien	BPJS 121.702 pasien (PBI: 24.502 dan Non PBI: 97.200); Jamkesda 11.580 pasien	BPJS 124.136 pasien (PBI: 24.993 dan Non PBI: 99.144); Jamkesda 11.291 pasien	BPJS 126.619 pasien (PBI: 25.492 dan Non PBI: 101.127); Jamkesda 11.008 pasien	BPJS 126.619 pasien (PBI: 25.492 dan Non PBI: 101.127); Jamkesda 11.008 pasien								RSUD AMBARAWA
					prosentase rujukan pasien kurang dari	75,40%	1,3% (396/30.508) pasien	75,40%	1,2% (372/31.000) pasien	75,50%	1,1% (360/31.500) pasien	75,60%	1% (350/33.500) pasien	75,70%	1% (350/33.500) pasien	75,80%	1% (350/33.500) pasien	75,80%	1% (350/33.500) pasien	75,80%		RSUD AMBARAWA
					Persentase penggunaan tempat tidur (BOR)	75,40%	75,40%		75,50%		75,60%		75,70%		75,80%		75,80%		75,80%			RSUD AMBARAWA
					Rata-rata lama hari perawatan (ALOS)	4,6 hari	4,6 hari		5 hari		5,1 hari		5,2 hari		5,3 hari		5,3 hari		5,3 hari			RSUD AMBARAWA
					Jumlah Interval Pemakaian Tempat Tidur (TOI)	1,5 hari	1,5 hari		1,4 hari		1,4 hari		1,4 hari		1,3 hari		1,3 hari		1,3 hari			RSUD AMBARAWA

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER (000) Rp		
				2015	TARGET	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur (Bed Turn Over)	50 kali	50 kali		50 kali	50 kali		50 kali		50 kali	50 kali	50 kali		50 kali					
			Rata rata Kematian Umum pasien (Gross Death Rate)	33,6%	33,6%		33%	32,8%		32,5%		30,9%	30,9%		30,9%						
			Rata Rata Kematian pasien > 48 jam (Net Death Rate)	18,4%	18,4%		18,1%	17,9%		17,7%		16,8%	16,8%		16,8%						
1	02	1.02.03	33	Program Peningkatan Pelayanan RS BLUD*	Peningkatan pelayanan kesehatan di rs:	15 instalasi dan 5 unit kerja, termasuk didalamnya yankes maskin :	15 instalasi dan 5 unit kerja, termasuk didalamnya yankes maskin :	60.059.970	15 instalasi dan 5 unit kerja, termasuk didalamnya yankes maskin :	59.398.147	15 instalasi dan 5 unit kerja, termasuk didalamnya yankes maskin :	64.968.739	15 instalasi dan 5 unit kerja, termasuk didalamnya yankes maskin :	70.933.632	15 instalasi dan 5 unit kerja, termasuk didalamnya yankes maskin :	77.537.359	15 instalasi dan 5 unit kerja, termasuk didalamnya yankes maskin :	84.852.711	15 instalasi dan 5 unit kerja, termasuk didalamnya yankes maskin :	417.750.558	417.750.558
				PASIEAN BPJS :	42.532	46.784		51.462	56.607		62.267		68.493	75.342		360.955					
				- PBI	11.484	12.632		13.895	15.284		16.812		18.493	20.342		97.458					
				- NON PBI	31.048	34.152		37.567	41.323		45.455		50.000	55.000		263.497					
				JAMKESDA	725	600		600	550		300		0	0		0					
				pasien RUJUKAN	47067	52.490		57.739	63.513		69.864		76.851	84.851		84.851					
				Indikator lainnva :																	
				BOR(Bed Occupation Rate)	75,5	75,0		77,0	77,0		80,0		80,0	80,0		80,0					
				LOS (Length of Stay)	4,6	4,1		4,1	4,1		4,1		4,1	4,1		4,1					
				TOI (Turn Over Interval)	1,2	1,2		1,2	1,2		1,2		1,2	1,2		1,2					
				BTO (Bed Turn Over)	74,6	60,0		60,0	58,0		58,0		55,0	55,0		55,0					
				GDR (Gross Death Rate)	23,9	11,2		11,2	11,2		11,2		11,2	11,2		11,2					
				NDR (Net Death Rate)	12,4	20,0		20,0	20,0		20,0		20,0	20,0		20,0					
1	02	1.02.01	34	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	Tercapainya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas dan Labkesda	12 bulan	12 bulan	5.073.074	12 bulan	6.402.010	12 bulan	7.042.211	12 bulan	7.746.432	12 bulan	8.521.075	12 bulan	9.373.183	12 bulan	44.157.985	75.000.000 (30.842.015)
1	02	1.02.01	36	Program Pelayanan Kesehatan BPJS di Puskesmas dan Jaringannya**	Tercapainya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas	12 bulan	12 bulan	19.109.840	12 bulan	20.233.948	12 bulan	22.257.343	12 bulan	24.483.077	12 bulan	26.931.385	12 bulan	29.624.523	12 bulan	142.640.116	153.000.000 (10.359.884)

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)		
				2015	TARGET	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						
1 02 1.06.01 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat***	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	-		53.875		53.875		60.000		65.000		70.000		75.000		377.750		377.750	BAPPEDA	
	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium		19 kecamatan		19 kecamatan		19 kecamatan		19 kecamatan		19 kecamatan		19 kecamatan		19 kecamatan		-			
		Tersedianya data Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen				BAPPEDA	
		Terukupinya alat pengetes kadar garam beryodium		6 alat minilab dan 18 reagen		20 reagen		20 reagen		6 alat minilab dan 20 reagen		20 reagen		6 alat minilab dan 20 reagen		12 alat minilab dan 100 reagen					
		Tersusunnya laporan pelaksanaan GAKY		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen					
1 03	1.1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				217.909.919		138.384.400		142.610.000		157.731.000		160.301.300		166.005.000		982.941.619		588.850.000	394.091.619	
1 03 1.03.01 15	Program Pembangunan jalan dan Jembatan**	Terwujudnya kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik 85% pada tahun 2021	70,00%	73,00%	102.219.600	75,00%	33.800.000	77,00%	36.300.000	80,00%	51.250.000	82,00%	51.250.000	85,00%	51.250.000	85,00%	326.069.600		320.000.000	6.069.600	DPU
1 03 1.03.01 16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong***	Terwujudnya kondisi trotoar dan saluran drainase jalan perkotaan dalam kondisi baik 60% pada tahun 2021	29,50%	35,00%	3.450.000	40,00%	2.000.000	45,00%	2.000.000	50,00%	2.000.000	55,00%	2.000.000	60,00%	2.100.000	60,00%	13.550.000			13.550.000	DPU
1 03 1.03.01 17	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong***	Terbangunnya talud jalan kabupaten sepanjang 10 km dalam rangka mendukung jalan kabupaten dalam kondisi baik 85% tahun 2021	0,00%	20,00%	3.150.000	35,00%	2.000.000	55,00%	2.000.000	70,00%	2.000.000	85,00%	2.000.000	100,00%	2.100.000	100,00%	13.250.000			13.250.000	DPU

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB	
			2015	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020					
1	03	1.03.01	18	83,00%	85,00%	32.997.275	87,00%	25.000.000	89,00%	25.000.000	91,00%	25.000.000	93,00%	25.000.000	95,00%	25.000.000	95,00%	157.997.275	157.997.275	DPU	
1	03	1.03.01	19	0,00%	20,00%	500.000	35,00%	1.000.000	55,00%	1.000.000	70,00%	1.000.000	85,00%	1.000.000	100,00%	1.000.000	85,00%	5.500.000	5.500.000	DPU	
1	03	1.03.01	20	100,00%	100,00%	150.000	100,00%	75.000	100,00%	75.000	100,00%	75.000	100,00%	75.000	100,00%	75.000	100,00%	525.000	525.000	DPU	
1	03	1.03.01	22	15,00%	25,00%	110.000	50,00%	200.000	40,00%	200.000	60,00%	200.000	80,00%	200.000	100,00%	200.000	100,00%	1.110.000	1.110.000	DPU	
1	03	1.03.01	23	100%	100%	1.980.000	100%	2.000.000	100%	750.000	100%	750.000	100%	750.000	100%	750.000	100%	6.980.000	6.980.000	DPU	
1	03	1.03.01	24	44,20%	53,00%	53.217.213	57,00%	43.193.700	62,00%	48.000.000	67,00%	53.000.000	72,00%	54.000.000	76,00%	58.000.000	76,00%	309.410.913	256.000.000	53.754.613	DPU
1	03	1.06.01	24	44,20%	53,00%	150.000	57,00%	193.700	62,00%	0	67,00%	0	72,00%	0	76,00%	0	76,00%	343.700		BAPPEDA	
1	03	1.03.01	28	0,00%	15,00%	5.005.000	30,00%	4.972.000	45,00%	3.000.000	60,00%	3.000.000	80,00%	4.435.000	100,00%	4.500.000	100,00%	24.912.000	24.912.000	DPU	
1	03	1.03.01	29	0,00%	10,00%	13.721.790	50,00%	20.000.000	70,00%	20.000.000	80,00%	15.000.000	90,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	98.721.790	98.721.790	DPU	

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)		
			2015	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET								
1 03 1.03.01 31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi***	Terlaksananya pengaturan jasa konstruksi sebanyak 500 buah PJT/PJB pada tahun 2021	0,00%	16,67%	170.000	33,33%	300.000	50,00%	270.000	66,67%	270.000	83,33%	270.000	100,00%	300.000	100,00%	1.580.000	1.580.000	DPU	
1 03 1.20.03 32	Program pemberdayaan jasa konstruksi***	Prosentase penyedia jasa konstruksi yang terfasilitasi	100%	20%	80.754	40%	125.000	60%	150.000	80%	175.000	100%	200.000	100%	225.000	100	955.754	955.754	SETDA	
1 03 1.03.01 33	Program Pengawasan Jasa Konstruksi**	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 1000 unit pada tahun 2021	0,00%	10,00%	150.000	0	150.000	1	180.000	1	216.000	1	260.000	1	310.000	1	1.266.000	1.266.000	DPU	
1 03 1.03.01 34	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong***	Terwujudnya kondisi trotoar dan saluran drainase jalan perkotaan dalam kondisi baik 60% pada tahun 2021	29,50%	35,00%	500.000	40,00%	1.000.000	45,00%	1.000.000	50,00%	1.000.000	55,00%	1.000.000	60,00%	2.000.000	#REF!	6.500.000	6.500.000	DPU	
1 05 1.03.01 15	Program Perencanaan Tata Ruang**	Ketersediaan rancangan tata ruang pada kawasan strategis kabupaten sebanyak 15 dokumen RTBL pada tahun 2021	0	0	0	3	600.000	3	600.000	3	600.000	3	600.000	3	600.000	15	3.000.000	12.850.000	9.850.000	DPU
1 05 1.06.01 15	Program Perencanaan Tata Ruang**	Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang dan turunannya sebagai acuan pemanfaatan ruang terdiri dari 1 Perda RTRW, 14 Perda RDTR, 4 Perda RTR Kawasan Strategis, 4 RTR Kawasan Perdesaan tersedianya sistem informasi dan SDM pengelola penataan ruang yang berkualitas	1	1	-	4	1.225.000	5	1.535.000	5	1.620.000	5	1.686.300	3	1.995.000	23	8.061.300	-	8.061.300	BAPPEDA
1 05 1.20.03 15	Program Perencanaan Tata Ruang**	Prosentase dokumen tata ruang yang berkualitas	100%	100%	38.287	100%	250.000	100%	250.000	100%	275.000	100%	275.000	100%	300.000	100	1.388.287	1.388.287	SETDA	
1 05 1.03.01 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang***	Persentase pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan 100% pertahun	100,00%	100,00%	320.000	100,00%	300.000	100,00%	300.000	100,00%	300.000	100,00%	300.000	100,00%	300.000	100,00%	1.820.000	1.820.000	DPU	

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)		INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)
			2015	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET			
1 04 1.03.01	1.1.4 URUSAN PERUMAHAN				22.658.357		36.587.200		37.727.450		46.606.620		41.145.340		46.137.850		230.862.817	100.000.000	130.862.817		
1 04 1.03.01 15	Program Pengembangan Perumahan***	Ketersediaan rumah hunian yang layak 2% pertahun	2%	2%	1.350.000	2%	7.500.000	2%	5.000.000	2%	5.000.000	2%	5.000.000	2%	5.000.000	14%	28.850.000		28.850.000	DPU	
1 04 1.03.01 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan**	Terwujudnya universal akses pada tahun 2019			20.520.982		27.500.000		32.000.000		40.000.000		35.000.000		40.000.000		195.020.982	100.000.000	95.020.982	DPU	
		Peningkatan Persentase penduduk yang memiliki akses air minum aman	83,39%	4,15%		4,15%		4,16%	4,15%		0,00%		0,00%		100,00%				-		
		Peningkatan persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi sehat	85,44%	3,64%		3,64%		3,64%	3,64%		0,00%		0,00%		100,00%				-		
		Tertanganinya kawasan kumuh permukiman seluas 477,92 Ha pada tahun 2019	144,29	85,22		60,76		97,02	90,63		0		0		477,92				-		
1 04 1.03.01 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan***	Terwujudnya pembangunan infrastruktur perumahan melalui pemberdayaan masyarakat sebanyak 75 desa pada tahun 2021	5	10	200.000	15	300.000	14	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	75	1.700.000		1.700.000	DPU	
1 04 1.06.01 17	Program Pemberdayaan Komunitas perumahan***	Terfasilitasinya calon peserta Program Pamsimas III sebanyak 83 desa/keI	143	1	30.000	28	75.000	27	75.000	27	75.000	-	75.000	-	75.000	226	405.000		405.000	BAPPEDA	
1 04 1.20.10 19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran***	Terwujudnya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		100%	557.375	100%	1.212.200	100%	352.450	100%	1.231.620	100%	770.340	100%	762.850	100%	4.886.835		4.886.835	BPBD	
		jumlah pengadaan sarpras	-	8 roll		1 posko dan 8 roll selang	8 roll		8 roll selang, Rekonidisi 1 Unit Damkar	8 roll selang,		8 roll selang,		48 roll selang, 1 Unit PMK rekonidisi, 1 Posko					-		
1 19	1.1.5 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				2.753.092		4.238.199		7.008.408		7.440.332		7.291.855		11.820.941		40.552.827	1.000.000	39.552.827		
1 19 1.19.01 15	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan***	Terlaksananya penanganan konflik sosial	-		490.678		490678		500000		550000		600000		660000		2.800.678		2.800.678	KESBANGPOL	
		Penanganan rakor dan laporan rencana aksi PKS																			

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB	
			2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)		INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)
			TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.19.02.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan***	Terwujudnya kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitasnya	500 anggota Satlinmas di 19 Kec. Pengamanan di wil Kab. Smg	335 org KST; 600 anggota Satlinmas di 19 Kec; 60 org tenaga bantu; Pengamanan di wil Kab Smg	1.129.410	200 org KST; 600 anggota Satlinmas di 19 Kec; 50 org tenaga bantu; Pengamanan di wil Kab Smg	2.292.600	300 org KST; 700 anggota Satlinmas di 19 Kec; 80 org tenaga bantu; Pengamanan di wil Kab Smg; Pengamanan Pilgub dan Pilkades.	4.749.886	400 org KST; 750 anggota Satlinmas di 19 Kec; 110 org tenaga bantu; Pengamanan di wil Kab Smg; Pengamanan Pilgub dan Pilkades.	4.971.445	450 org KST; 800 anggota Satlinmas di 19 Kec; 140 org tenaga bantu; Pengamanan di wil Kab Smg.	4.606.759	500 org KST; 850 anggota Satlinmas di 19 Kec; 170 org tenaga bantu; Pengamanan di wil Kab Smg; Pengamanan Pilkada	8.886.500	2185 org KST; 5727 anggota Satlinmas; 170 tenaga bantu; pengamanan di wil Kab. Smg. Pengamanan Pilkada.	26.636.600		26.636.600	SATPOL PP	
1.19.01.16	Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal***	Terciptanya iklim kondusif di Kab Smg serta Terdeteknisnya kel.radikal	- di 19 Kecamatan - 6 Kel.Radikal kanan, 6 kel. Radikal kiri dan 5 kel. Radikal lainnya	- di 19 Kecamatan - 6 Kel.Radikal kanan, 6 kel. Radikal kiri dan 5 kel. Radikal lainnya	89.390	- di 19 Kecamatan - 6 Kel.Radikal kanan, 6 kel. Radikal kiri dan 5 kel. Radikal lainnya	75.000	- di 19 Kecamatan - 6 Kel.Radikal kanan, 6 kel. Radikal kiri dan 5 kel. Radikal lainnya	104.500	- di 19 Kecamatan - 6 Kel.Radikal kanan, 6 kel. Radikal kiri dan 5 kel. Radikal lainnya	114.950	- di 19 Kecamatan - 6 Kel.Radikal kanan, 6 kel. Radikal kiri dan 5 kel. Radikal lainnya	125.400	- di 19 Kecamatan - 6 Kel.Radikal kanan, 6 kel. Radikal kiri dan 5 kel. Radikal lainnya	137.940	Terciptanya iklim kondusif di Kab Smg serta Terdeteknisnya a kel.radikal di 19 Kecamatan	647.180		647.180	KESBANGPOL	
1.19.02.16	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal***	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan-peraturan daerah	9 Perda di 19 Kec	9 Perda di 19 Kec	303.000	10 Perda di 19 Kec	343.000	11 Perda di 19 Kec	377.300	12 Perda di 19 Kec	415.030	13 Perda di 19 Kec	456.533	14 Perda di 19 Kec	500.097	14 Perda di 19 Kec	2.394.960		2.394.960	SATPOL PP	
1.19.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan***	Terlaksananya seminar ,sosialisasi,dialog tentang kerukunan wawasan Kebangsaan , FKUB , FKDM dan FPBI, di Kab.Semarang	Terlaksananya seminar ,sosialisasi,dialog tentang kerukunan wawasan Kebangsaan , FKUB , FKDM dan FPBI, di Kab.Semarang	Terlaksananya seminar ,sosialisasi,dialog tentang kerukunan wawasan Kebangsaan , FKUB , FKDM dan FPBI, di Kab.Semarang	129.246	Terlaksananya seminar ,sosialisasi,dialog tentang kerukunan wawasan Kebangsaan , FKUB , FKDM dan FPBI, di Kab.Semarang	138.000	Terlaksananya seminar ,sosialisasi,dialog tentang kerukunan wawasan Kebangsaan , FKUB , FKDM dan FPBI, di Kab.Semarang	186.500	Terlaksananya seminar ,sosialisasi,dialog tentang kerukunan wawasan Kebangsaan , FKUB , FKDM dan FPBI, di Kab.Semarang	205.150	Terlaksananya seminar ,sosialisasi,dialog tentang kerukunan wawasan Kebangsaan , FKUB , FKDM dan FPBI, di Kab.Semarang	223.800	Terlaksananya seminar ,sosialisasi,dialog tentang kerukunan wawasan Kebangsaan , FKUB , FKDM dan FPBI, di Kab.Semarang	246.180	Terlaksananya seminar ,sosialisasi,dialog tentang kerukunan wawasan Kebangsaan , FKUB , FKDM dan FPBI, di Kab.Semarang	1.128.876		1.128.876	KESBANGPOL	
1.19.02.03.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan***	Prosentase Kebijakan pengembangan wawasan kebangsaan yang berjalan dengan baik	100%	100%	318.967	100%	403.921	100%	439.472	100%	467.932	100%	498.463	100%	531.234	100	2.659.989		2.659.989	SETDA	
1.19.01.18	Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan***	terlaksananya diskusi,seminar,sosialisasi/talk show peningkatan wawasan kebangsaan dan pentas seni dan budaya .	terlaksananya diskusi,seminar,sosialisasi/talk show peningkatan wawasan kebangsaan dan pentas seni dan budaya .	terlaksananya diskusi,seminar,sosialisasi/talk show peningkatan wawasan kebangsaan dan pentas seni dan budaya .	55.456	terlaksananya diskusi,seminar,sosialisasi/talk show peningkatan wawasan kebangsaan dan pentas seni dan budaya .	40.000	terlaksananya diskusi,seminar,sosialisasi/talk show peningkatan wawasan kebangsaan dan pentas seni dan budaya .	71.500	terlaksananya diskusi,seminar,sosialisasi/talk show peningkatan wawasan kebangsaan dan pentas seni dan budaya .	78.650	terlaksananya diskusi,seminar,sosialisasi/talk show peningkatan wawasan kebangsaan dan pentas seni dan budaya .	85.800	terlaksananya diskusi,seminar,sosialisasi/talk show peningkatan wawasan kebangsaan dan pentas seni dan budaya .	94.380	terlaksananya diskusi,seminar,sosialisasi/talk show peningkatan wawasan kebangsaan dan pentas seni dan budaya .	425.786		425.786	KESBANGPOL	

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)	
				2015	TARGET	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					
1 19 1.19.01 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)***	Terlaksananya penyuluhan peningkatan pemahaman akan bahaya miras dan narkoba terhadap 500 org. generasi muda	Terlaksananya penyuluhan peningkatan pemahaman akan bahaya miras dan narkoba terhadap 500 org. generasi muda dan tes urine PNS	Terlaksananya penyuluhan peningkatan pemahaman akan bahaya miras dan narkoba terhadap 500 org. generasi muda dan tes urine PNS	55.656	135.000	150.000	165.000	180.000	198.000	883.656	883.656	KESBANGPOL							
1 19 1.19.01 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat**	Tercapainya pemahaman politik diberbagai lapisan masyarakat di kabupaten semarang sebanyak 750 org	Tercapainya pemahaman politik diberbagai lapisan masyarakat di kabupaten semarang sebanyak 750 org	Tercapainya pemahaman politik diberbagai lapisan masyarakat di kabupaten semarang sebanyak 750 org	142.901	283.000	379.750	417.725	455.700	501.270	2.180.346	1.000.000	1.180.346	KESBANGPOL						
1 19 1.19.01 23	Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan***	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan kepada Pengurus Ormas dan tersedianya data base Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten semarang Dalam 1 dokumen	Terlaksananya identifikasi / pendataan organisasi kemasyarakatan di 19 Kec.se Kabupaten Semarang	Terlaksananya identifikasi / pendataan organisasi kemasyarakatan di 19 Kec.se Kabupaten Semarang	38.388	37.000	49.500	54.450	59.400	65.340	304.078	304.078	KESBANGPOL							
1 13	1.1.6 URUSAN SOSIAL				1.644.620	3.051.152	3.132.821	3.038.519	3.470.429	3.778.311	18.115.852	-	18.115.852							
1 13 1.14.01 15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya***	Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya berkurang				19 Kec	190.355,000	19 Kec	210.355,000	19 Kec	86.078,000	19 Kec	106.633,000	19 Kec	112.487,000	19 Kec	705.908	705.908	DINSOSNAKER TRANS	
1 13 1.14.01 16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial***	Peningkatan SDM anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal, Wanita Tuna Susila (WTS) 2. Tersalurkannya bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk eks WTS				20 orang	470.585,000	90 orang	370.585,000	100 orang	246.929,000	140 orang	354.109,000	150 orang	376.350,000	190 orang	1.818.558	1.818.558	DINSOSNAKER TRANS	

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)			
				2015	TARGET	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)							
1	13	1.20.03	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial***	100%	100%	23.850	100%	28.900	100%	34.100	100%	37.510	100%	41.261	100%	45.387	100	211.008	211.008	SETDA	
1	13	1.14.01	18.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma***				20 orang	37.065,000	50 orang	37.065,000	60 orang	39.070,000	70 orang	44.000,000	80 orang	46.032,000	90 orang	203.232	203.232	DINSOSNAKER TRANS	
1	13	1.14.01	19.	Program pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo ***				40 panti	36.093,000	42 panti	36.093,000	44 panti	58.087,000	47 panti	79.216,000	55 panti	79.728,000	60 panti	289.217	289.217	DINSOSNAKER TRANS	
1	13	1.14.01	20.	Program pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana,PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya) ***								40 orang	41.024,000	60 orang	60.000,000	60 orang	59.458,000	80 orang	160.482	160.482	DINSOSNAKER TRANS	
1	13	1.14.01	21.	Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ***	133 orang/19 Kec.			133 orang/19 Kec.	153.188,000	133 orang/19 Kec.	187.388,000	133 orang/19 Kec.	72.419,000	133 orang/19 Kec.	81.556,000	133 orang/19 Kec.	86.033,000	133 orang/19 Kec.	580.584	580.584	DINSOSNAKER TRANS	
1	13	1.14.01	23.	Program pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan ***	100%	100%		100%	40.992,000	100%	40.992,000	100%	19.535,000	100%	22.000,000	100%	23.016,000	100%	146.535	146.535	DINSOSNAKER TRANS	
1	13	1.20.03	22	Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan***	88%	100%	1.620.770	100%	2.093.974	100%	2.216.243	100%	2.437.867	100%	2.681.654	100%	2.949.819	100	14.000.328	14.000.328	SETDA	
				1.2 URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.585.882		50.663.570		92.567.508		93.898.968		59.488.142		65.017.274		398.221.345	223.100.000	175.121.345	
1	14	1.14.01		1.2.1 URUSAN KETENAGAKERJAAN			1.278.841		1.293.827		868.827		496.313		553.199		582.243		5.073.250	3.600.000	1.473.250	
1	14	1.14.01	15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	268 orang	52,35 %	923.596	220 orang	923.596	20 alat, 300 orang	423.596	12 alat, 300 or	302.347	300 orang	329.148		341.613		3.243.896	3600000	(356104)	DINSOSNAKER TRANS
1	14	1.14.01	16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja***		76%	49.842	55%	49.842	60%	124.842	65%	31.256	70%	36.000	75%	38.360	80%	330.142		330.142	DINSOSNAKER TRANS
1	14	1.14.01	17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan***		2,44 %	305.403	100%	305.403	100%	305.403	100%	150.989	100%	172.051	100%	183.090	100%	1.422.339		1.422.339	DINSOSNAKER TRANS

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB
			2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)	
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyuluh Tenaga Kerja	1. 1 kl. 2. 4 desa, 3. 6 Kec	72%		55%	14.986	60%	14.986	65%	11.721	70%	16.000	75%	19.180	80%	76.873		76873	DINSOSNAKER TRANS
1	11	1.2.2 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			717.039		1.309.511		1.037.787		1.088.463		1.247.193		1.378.690		6.778.683		6.778.683	
1	11	1.20.03 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan***	Prosentase Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100%		100%	10.000	100%	15.000	100%	20.000	100%	25.000	100%	30.000	100	100.000		100.000	SETDA
1	11	1.11.01 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ***	Peningkatan peran perempuan dalam proses pembangunan yang dapat diukur dengan :		204.784		346.751		172.715		187.442		270.647		294.004		1.476.343		1.476.343	BKBPP
			Peningkatan Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	30,38%	39,50%	66,75%	70,13%	73,69%	77,42%	81,15%	81,15%									
			Peningkatan Persentase perempuan di lembaga pemerintah	7,48%	1,51%	1,53%	1,54%	1,55%	1,57%	1,59%	1,59%									
			Peningkatan Persentase Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif (dari kuota)	59,25%	75,00%	75,20%	76,00%	76,20%	77,00%	77,80%	77,80%									
			Peningkatan Persentase perempuan dalam jabatan eselon	5,60%	5,80%	6,00%	6,20%	6,40%	6,60%	6,80%	6,80%									
			Peningkatan Pesertentase kegiatan yang melibatkan peran FAKAS	25,00%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	100,00%	100,00%									
			Peningkatan Persentase Kerjasama dengan pihak ke 3	14,28%	71,42%	76,19%	80,95%	85,71%	90,47%	100,00%	100,00%									
			Peningkatan Persentase Perusahaan yang tergabung dalam APSAI yang berperan dalam pemenuhan hak anak	0,38%	2,31%	2,69%	3,08%	3,47%	3,85%	4,49%	4,49%									
1	11	1.20.03 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak***	Prosentase kualitas kelembagaan PUG yang meningkat	0%	0%	20%	80.000	20%	85.000	20%	90.000	20%	100.000	20%	115.000	20	470.000		470.000	SETDA

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB
			2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)	
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					
1 11 1.20.03 17	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan ***	Prosentase Kebijakan perlindungan terhadap perempuan yang terlaksana dengan baik	100%	100%	50.620	100%	50.000	100%	50.000	100%	60.000	100%	75.000	100%	90.000	100	375.620	375.620	SETDA	
1 11 1.11.01 18	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan***	Peningkatan Persentase kader GSI per dusun/RW		15,72%	15.643	26,77%	22.358	35,33%	13.035	47,84%	14.068	56,53%	20.235	66,68%	80.302	66,68%	165.641	165.641	BKBPP	
1 11 1.20.03 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan***	Prosentase peran serta dan kesetaraan gender	100%		35.000	100%	40.000	100%	50.000	100%	60.000	100%	65.000	100	250.000		250.000	250.000	SETDA	
1 11 1.22.01 18	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan***	Terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK dari Kabupaten sampai Dawis dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	235 TP PKK desa/kelurahan	235	280590	235	600000	235	600000	235	600000	235	600000	235	600000	235	3.280.590	3.280.590	BAPERMASDES	
1 21 1.20.03	1.2.3 URUSAN KETAHANAN PANGAN			100%	413.365		775.150		1.014.650		1.208.115		1.397.427		1.612.669	100	6.421.376	6.421.376		
1 21 1.21.01 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan***	Pola Pangan Harapan (PPH) (ekor)	83,40	85	347.500	86	697.500	88	930.000	90	1.115.000	91	1.295.000	92	1.500.000	92	5.885.000	5.885.000	KANTOR KETAHANAN PANGAN	
1 21 1.20.03 15	Program Peningkatan Ketahanan pangan***	Prosentase raskin yang terdistribusi	100%	100%	65.865	100%	77.650	100%	84.650	100%	93.115	100%	102.427	100%	112.669	100	536.376	536.376	SETDA	
1 9	1.2.4 URUSAN PERTANAHAN				843.326		900.851		51.023.589		51.127.798		1.240.978		1.365.976		106.502.518	100.000.000	6.502.518	
1 09 1.20.03 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah** dan ***	Prosentase kebijakan penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diimplementasikan dengan baik	100%	100%	556.475	100%	614.000	100%	676.500	100%	746.000	100%	821.000	100%	904.000	100	4.317.975	4.317.975	SETDA	
1 09 1.03.01 16		Pengadaan lahan untuk Pemindahan Pusat Pemerintahan **						100%	50.000.000	100%	50.000.000						100.000.000	100.000.000	-	DPU
1 09 1.20.03 16																				SETDA
1 09 1.20.05 16		Peningkatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah***	12 bulan	12 bulan	286.851	12 bulan	286.851	12 bulan	347.089	12 bulan	381.798	12 bulan	419.978	12 bulan	461.976		2.184.543	2.184.543		DPPKAD

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB		
			2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)							
1	08	1.03.01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	08	1.03.01	1.2.5 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			18.192.009		24.096.939		19.183.282		19.887.300		26.647.941		30.505.812		138.513.283		138.513.283		
1	08	1.03.01	15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan***	Terlaksananya penanganan sampah 21,49% pada tahun 2021	19,99%	20,24%	7.750.000	20,49%	10.000.000	20,74%	10.000.000	20,99%	10.000.000	21,24%	12.750.000	21,49%	11.750.000	21,49%	62.250.000		62.250.000	DPU
1	08	1.08.01	15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ***	Terwujudnya Lembaga pengelolaan sampah yang dikelola secara Swadaya oleh Masyarakat		35 Lembaga Bank Sampah	1.321.904	40 Lembaga Bank Sampah	700.000	40 Lembaga Bank Sampah	660.000	40 Lembaga Bank Sampah	810.000	40 Lembaga Bank Sampah	2.268.061	40 Lembaga Bank Sampah	1.900.000	235 Lembaga Bank Sampah	7.659.965		7.659.965	BLH
1	08	1.08.01	16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,79	54,79	2.040.000	58,24	3.124.750	61,69	2.495.416	65,14	2.720.000	68,59	4.476.060	68,6	5.010.523	19.866.749		19.866.749	BLH	
1	08	1.08.01	17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam***	Terwujudnya upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan		4 peserta Kalpataru, 665 unit Bor Biopori Manual, 42 Unit Sumur Resapan	993.688	2 kampung iklim, 48 Desa, 4 peserta Kalpataru, 665 unit Bor Biopori Manual, 100 Unit Sumur Resapan	837.354	2 kampung iklim, 32 Desa, 3 peserta Kalpataru, 40 unit Bor Biopori Manual, 15 Unit Sumur Resapan, bibit tanaman 1500 batang	604.531	2 kampung iklim, 32 Desa, 3 peserta Kalpataru, 115 unit Bor Biopori Manual, 25 Unit Sumur Resapan, bibit tanaman 10.000 batang	886.131	2 kampung iklim, 32 Desa, 3 peserta Kalpataru, 100 unit Bor Biopori Manual, 50 Unit Sumur Resapan, bibit tanaman 7500 batang	1.450.000	2 kampung iklim, 208 Desa, 19 peserta Kalpataru, 1070 unit Bor Biopori Manual, 302 Unit Sumur Resapan, bibit tanaman 43.320 batang	2.177.818	12 kampung iklim, 208 Desa, 19 peserta Kalpataru, 1070 unit Bor Biopori Manual, 302 Unit Sumur Resapan, bibit tanaman 43.320 batang	6.949.522		6.949.522	BLH
1	08	1.20.03	17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam***	Prosentase sumber daya alam yang dikelola dengan baik	100%	100%	-	100%	71.135	100%	78.335	100%	86.169	100%	94.785	100%	104.264	100	434.688		434.688	SETDA
1	08	1.08.01	19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam***	Tersedianya data untuk mendukung perencanaan program terkait lingkungan hidup		2 Dokumen (SLHD, GRK)	331.417	3 Dokumen (SLHD, MIH, GRK)	150.000	4 Dokumen (SLHD, MIH, GRK, Dok Lingkungan Lainnya)	175.000	4 Dokumen (SLHD, MIH, GRK, Dok Lingkungan Lainnya)	200.000	4 Dokumen (SLHD, MIH, GRK, Dok Lingkungan Lainnya)	325.000	4 Dokumen (SLHD, MIH, GRK, Dok Lingkungan Lainnya)	475.000	25 Dokumen (SLHD, MIH, GRK, Dok Lingkungan Lainnya)	1.656.417		1.656.417	BLH
1	08	1.08.01	20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi ***	Terwujudnya kondisi lingkungan yang sehat bebas polusi		26 kali pengujian udara emisi, penyuluhan LH kepada 225 orang	155.000	25 kali pengujian udara emisi, penyuluhan LH kepada 225 orang	213.700	25 kali pengujian udara emisi, penyuluhan LH kepada 150 orang	170.000	25 kali pengujian udara emisi, penyuluhan LH kepada 150 orang	185.000	25 kali pengujian udara emisi, penyuluhan LH kepada 150 orang	284.035	25 kali pengujian udara emisi, penyuluhan LH kepada 150 orang	338.207	177 kali pengujian udara emisi, penyuluhan LH kepada 1200 orang	1.345.942		1.345.942	BLH
1	08	1.03.01	23 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)***	Terpenuhiya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau seluas 533,25 Ha pada tahun 2021	529,52	529,65	5.600.000	530,05	9.000.000	532,25	5.000.000	532,75	5.000.000	533,25	5.000.000	533,25	8.750.000	533,25	38.350.000		38.350.000	DPU

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB											
			2015	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULIER Rp (000)												
																					2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	10				1.627.200			1.817.108			2.765.000			2.910.000			3.070.000			3.405.000			15.594.308	18.000.000	(2.405.692)						
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Tercapainya cakupan kepemilikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 th) dan Kepemilikan Akta Kematian	100% KK, 95% KTP, 75% Akta Kelahiran, 100% Akta Kematian	100%KK, 95% KTP, 77,5% Akta kelahiran	1.627.200	100%KK, 97% KTP, 80% Akta kelahiran	1.817.108	100%KK, 98% KTP, 82,5% Akta kelahiran	2.765.000	100%KK, 99% KTP, 85% Akta kelahiran	2.910.000	100%KK, 100% KTP, 87,5% Akta kelahiran	3.070.000	100%KK, 100% KTP, 90% Akta kelahiran	3.405.000	100%KK, 100% KTP, 90% Akta kelahiran	3.405.000	100%KK, 100% KTP, 90% Akta kelahiran	15.594.308	18.000.000	(2.405.692)		DISPENDUK CAPIL					
1	22			1.2.7 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				654.220																	100.000.000	(95198147)					
1	22	1.22.01	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan***	Peningkatan kinerja posyandu dalam pelayanan kesehatan, pemilihan pelaksanaan BBGRM terbaik, meningkatkan SDM tenaga teknis dan masyarakat melalui pelatihan P3MD, penanggulangan kemiskinan di 16 kec. melalui kegiatan dana bergulir	1656 posyandu	1656	97.338	1656	107.071	1656	117.778	1656	129.555	1656	142.510	1656	708.308	708.308	708.308	708.308	708.308	708.308	708.308	708.308	708.308	708.308	708.308	BAPERMASDES		
						19 kec		19 kec		19 kec		19 kec		19 kec		19 kec		19 kec		19 kec		19 kec		19 kec		19 kec		-			
						2779 perangkat desa, 6497 RT, 1572 RW		2779 perangkat desa, 6497 RT, 1572 RW		2779 perangkat desa, 6497 RT, 1572 RW		2779 perangkat desa, 6497 RT, 1572 RW		2779 perangkat desa, 6497 RT, 1572 RW		2779 perangkat desa, 6497 RT, 1572 RW		2779 perangkat desa, 6497 RT, 1572 RW		2779 perangkat desa, 6497 RT, 1572 RW		2779 perangkat desa, 6497 RT, 1572 RW		2779 perangkat desa, 6497 RT, 1572 RW		2779 perangkat desa, 6497 RT, 1572 RW		-			
						50 kader		50 kader		50 kader		50 kader		50 kader		50 kader		300 kader		300 kader		300 kader		300 kader		300 kader		-			
						16 kec		16 kec		16 kec		16 kec		16 kec		16 kec		1.049.373		1.049.373		1.049.373		1.049.373		1.049.373		1.049.373			
1	22	1.22.01	16	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan***	Pengembangan BUMDes / pembentukan BUMDes bersama	55 BUMDes	55 BUMDes	22.556	65 BUMDes	22.556	50 BUMDes	24.811	38 BUMDes	27.292	-	30.021	-	33.023	-	160.259	-	160.259	-	160.259	-	160.259	-	160.259	BAPERMASDES		
																	208 desa		208 desa		208 desa		208 desa		208 desa		208 desa		-		
						14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	-		
1	22	1.22.01	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa**	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kecamatan, tersusunnya perencanaan pembangunan desa, musyawarah pembangunan desa	2 desa	2 desa	166.500	2 desa	184.480	2 desa	202.928	2 desa	223.220	2 desa	245.542	2 desa	270.096	12 desa	1.292.766	100.000.000	(97.116.087)	12 desa	1.292.766	100.000.000	(97.116.087)	12 desa	1.292.766	100.000.000	(97.116.087)	BAPERMASDES
						19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	19 kec	-	
						1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	-	
						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	
						2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	10 lokasi kawasan perdesaan	10 lokasi kawasan perdesaan	10 lokasi kawasan perdesaan	10 lokasi kawasan perdesaan	10 lokasi kawasan perdesaan	10 lokasi kawasan perdesaan	10 lokasi kawasan perdesaan	10 lokasi kawasan perdesaan	10 lokasi kawasan perdesaan	10 lokasi kawasan perdesaan	10 lokasi kawasan perdesaan	10 lokasi kawasan perdesaan	-	
						2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	-	
						6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	-	
						4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	36 desa	-	
						208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	-	
						208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	208 desa	-	

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB
			2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)	
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan	19 kec	19 kec	217.500	19 kec	225.000	19 kec	247.500	19 kec	272.250	19 kec	299.475	19 kec	329.422	19 kec	1.591.147		1.591.147	
1	12	1.2.8 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			1.098.729		1.108.141		1.542.236		1.664.451		2.394.249		2.590.749	8	10.398.555	-	10.398.555	
1	12	1.11.01	15	Program Keluarga Berencana***	Perwujudan penduduk tumbuh seimbang yang antara lain diukur dengan :	850.670	859.735	1.300.767	1.403.847	2.019.380	2.188.651	8.623.051	8.623.051	BKBPP						
		Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Penurunan Rata-rata jumlah jiwa per keluarga	3,16	3,37	3,39	3,38	3,38	3,34	3,30	3,30	-	-							
				Peningkatan Rasio PUS ber KB yang ikut kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS	24,50%	24,50%	25,00%	27%	30,00%	35,00%	35,00%	35,00%	-	-						
				Peningkatan CFR	83,17%	83,00%	83,13%	83,12%	83,14%	83,15%	83,00%	83,00%	-	-						
				Penkonsistenan Angka TFR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-						
1	12	1.11.01	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	Penurunan Persentase Usia Kawin Perempuan PUS usia di bawah 20tahun	1,95%	1,90%	1,85%	1,80%	1,75%	1,70%	1,65%	1,65%	20.855	1,65%	97.573		97.573		BKBPP
1	12	1.11.01	17	Program Pelayanan Kontrasepsi***	Penurunan Persentase Unmetneed (Pasangan Usia Subur yang tidak ikut KB)	8,00%	8,00%	7,00%	6,80%	6,60%	6,40%	6,20%	6,20%	2.675	6,20%	13.103		13.103		BKBPP
1	12	1.11.01	18	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri***	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung program KB yang antar lain diukur dengan:	80.314	80.314	61.565	66.444	95.577	103.588	487.801	487.801	BKBPP						
				Fasilitasi pembinaan dan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Presentase kesertaan KB Pria	2,20%	2,20%	2,50%	2,70%	2,85%	3,00%	3,15%	3,15%	-	3,15%	-	-	-	-	

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB	
			2015	TARGET	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)		INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)
					Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Prosentase kesertaan KB MKJP	32,50%	32,50%		35,00%		37,50%		40,00%		42,50%	45,00%		45,00%						
1.12	1.11.01	20 Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR***	Peningkatan Persentase Jumlah PIK remaja terhadap jumlah desa	21,27%	25,00%	30,701	30,00%	30,701	36,00%	24,058	41,00%	25,964	46,00%	37,349	51,00%	40,479	51,00%	189,252	189,252	BKBPP	
1.12	1.11.01	22 Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan tumbuh Kembang Anak	Penurunan Persentase keluarga pra sejahtera	25,48%	23,63%	119,039	23,13%	119,039	22,64%	141,861	22,16%	153,103	21,70%	220,233	21,50%	234,500	21,50%	987,776	987,776	BKBPP	
1.07		1.2.9 URUSAN PERHUBUNGAN			2.082.405			2.220.834		2.882.450		2.560.200		3.815.800		3.551.900	4	17.113.589	600.000	16.513.589	
1.07	1.07.01	15 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan***	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan dan sosialisasi di bidang manajemen lalu lintas serta pengelolaan terminal		50%	391.000	60%	511.000	70%	530.450	80%	535.200	90%	635.800	100%	720.900	100%	3.324.350	3.324.350	DISHUB KOMINFO	
1.07	1.07.01	16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ***	Prosentase terlaksananya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi berupa sarana prasarana dibidang perhubungan		50%	430.000	60%	280.000	70%	775.000	80%	530.000	90%	1.085.000	100%	597.000	100%	3.697.000	3.697.000	DISHUB KOMINFO	
1.07	1.07.01	17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	Prosentase terlaksananya Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi berupa sarana prasarana dan fasilitas dibidang perhubungan		50%	624.000	60%	629.834	70%	781.000	80%	852.000	90%	915.000	100%	975.000	100%	4.776.834	600.000	4.176.834	DISHUB KOMINFO
1.07	1.07.01	19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas***	Prosentase terlaksananya ketertiban dan kepatuhan pengguna jasa transportasi, dan berkurangnya angka kemalectan dan kecelakaan		50%	637.405	60%	800.000	70%	796.000	80%	643.000	90%	1.180.000	100%	1.259.000	100%	5.315.405		5.315.405	DISHUB KOMINFO

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)		
				2015	TARGET	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	25		1.2.10 URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.267.204		3.875.605		4.426.662		4.870.817		5.505.737		5.967.919		27.913.944		27.913.944	
1	25	1.07.01	15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa***	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informasi		115.000		175.000		211.500		230.000		245.000		270.000	100	1.246.500		1.246.500	DISHUB KOMINFO
				Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	90 org/19 kec		45.000	100 org/19 kec	45.000	100 org/19 kec	60.000	100 org/19 kec	60.000	100 org/19 kec	75.000	100 org/19 kec	75.000	100 org/19 kec	360.000	360.000	
				Pengadaan alat studio dan komunikasi	6 jenis alat jaringan komputer dan internet	6 unit	20.000	1 paket	80.000	1 paket	50.000	1 lokasi, 1 kegiatan, 3 buah HT	50.000	1 paket	50.000	1 paket	75.000	100	325.000	325.000	
				Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi	SIM pengendalian menara telekomunikasi 1 paket, laptop 1 unit, alat pendeteksi sinyal GSM 1 unit, kamera digitakl 1 unit, audio recorder 1 unit	1 paket	50.000	1 dokumen	50.000	1 aplikasi	101.500	1 aplikasi	120.000	1 aplikasi	120.000	1 aplikasi	120.000	100	561.500	561.500	
1	25	1.20.03	15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa***	Prosentase implementasi kebijakan pengembangan teknologi informasi	100%	860.913	100%	1.165.000	100%	1.500.000	100%	1.690.000	100%	1.889.000	100%	2.097.900	100	9.202.813		9.202.813	SETDA
1	25	1.07.01	17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi***	Tersedianya SDM yang kompeten di bidang komunikasi dan informasi	281 orang	150 orang/3 kali	23.000	50 orang	15.000	45 orang/19 kec	50.000	50 orang	50.000	50 orang	50.000	50 orang	-	100	188.000	188.000	DISHUB KOMINFO
				Pelaksanaan pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi													100	-	-	-	
1	25	1.20.03	17 Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi***	Prosentase kapasitas SDM bidang Komunikasi yang meningkat	100%	132.488	100%	200.000	100%	250.000	100%	275.000	100%	300.000	100%	300.000	100	1.457.488		1.457.488	SETDA
				Jumlah penyiaran radio/TV Lokal	10	11		11		12		12		13		13		13		-	SETDA
				Jumlah surat kabar nasional/lokal	11	11		12		12		13		13		14		14		-	SETDA
1	25	1.07.01	18 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa***	Terselenggaranya kerjasama informasi dan media massa	140 orang	180 org , 19 kec	46.000	180 org , 19 kec	46.000	180 org , 19 kec	55.000	180 org , 19 kec	60.000	180 org , 19 kec	65.000	180 org , 19 kec	70.000	100	342.000	342.000	DISHUB KOMINFO
				Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat														-	-	-	

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB						
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)							
				2015	TARGET	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)											
1	25	1.20.03	18	Program Kerjasama Informasi & Media Massa***	Prosentase penyebaran informasi pembangunan daerah	100%	100%	1.469.923	100%	1.594.725	100%	1.830.588	100%	2.018.146	100%	2.214.461	100%	2.420.407	100	11.548.250	11.548.250	SETDA				
1	25	1.20.04	18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**	Penyebaran informasi kepada masyarakat	12 bulan	12 bulan	504.880	12 bulan	504.880	12 bulan	318.074	12 bulan	317.671	12 bulan	497.276	12 bulan	539.612	12 bulan	2.682.394	setwan	#VALUE!	SETWAN			
1	15			1.2.11 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				407.974				946.000				827.000				1.093.000			4.982.974	300.000	4.682.974	
1	15	1.15.01	8	Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif**	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro melalui kemudahan perijinan	19 Wilayah Kecamatan	19 Wilayah Kecamatan	33.575	19 Wilayah Kecamatan	540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	19 Wilayah Kecamatan	573.575			573.575			DINKOP, UMKM, PERINDAG
1	15	1.15.01	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah***	Terfasilitasinya pengembangan kewirausahaan dan daya saing Usaha Mikro di Kab Semarang	60 Usaha Mikro	60 Usaha Mikro	168.629	60 Usaha Mikro	168.000	200 Usaha Mikro	490.000	200 Usaha Mikro	465.000	200 Usaha Mikro	495.000	200 Usaha Mikro	472.000	1.000 Usaha Mikro	2.258.629			2.258.629			DINKOP, UMKM, PERINDAG
1	15	1.15.01	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM**	Terfasilitasinya pengembangan permodalan dan pemasaran produk Usaha Mikro	25 Usaha Mikro	25 Usaha Mikro	144.130	65 Usaha Mikro	168.000,00	90 Usaha Mikro	285.000	90 Usaha Mikro	287.000	90 Usaha Mikro	289.000	90 Usaha Mikro	541.000	450 Usaha Mikro	1.714.130	300.000		1.414.130			DINKOP, UMKM, PERINDAG
1	15	1.15.01	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi***	Terwujudnya koperasi berkualitas di Kab. Semarang	155 Koperasi	Penyuluhan pendirian koperasi berbadan hukum, movev kantor pusat koperasi di luar kab & pembuibaran 100 Kop	61.640	165 koperasi	70.000,00	165 kop	72.500	165 kop	75.000	165 kop	77.500	165 kop	80.000	825 Kop	436.640			436.640			DINKOP, UMKM, PERINDAG
1	16			1.2.12 URUSAN PENANAMAN MODAL				660.190				2.376.000				1.036.000				1.151.210			7.170.900	600.000	6.570.900	
1	16	1.16.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi***	Jumlah investor berskala nasional (PMDN, PMA & Non Fasilitas)	633	227	360.677	262	351.000	277	545.500	302	377.000	335	445.000	370	560.210	370	2.639.387			2.639.387			BPMPTSP
1	16	1.16.01	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN, PMA & Non Fasilitas) (Rp. Milyard)	404.612	330,00	274.821	361.812	2.000.000	396.690	500.000	439.931	300.000	476.359	391.000	572.826	391.000	572.826	3.856.821	600.000		3.256.821			BPMPTSP
1	16	1.16.01	17	Program Penyisipan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah***	Lama proses proses perijinan	3 s/d 14 hari	3 s/d 14 hari	24.692	3 s/d 14 hari	25.000	3 s/d 14 hari	200.000	3 s/d 14 hari	25.000	3 s/d 14 hari	200.000	3 s/d 14 hari	200.000	3 s/d 14 hari	674.692			674.692			BPMPTSP

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB	
			2015	TARGET	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)		INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)
					Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						
1	20	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	20	1.2.15 URUSAN PERSANDIAN			-		70.000		150.000		165.000		181.500		199.650		766.150	-	766.150		
1	20	1.20.03 39 Program Persandian*	prosentase jenis informasi sandi yang wajib diamankan				70.000	100%	150.000	100%	165.000	100%	181.500	100%	199.650	100	766.150		766.150	SETDA	
1	17	1.2.16 URUSAN KEBUDAYAAN			1.059.000		4.419.500		1.658.000		2.235.000		5.855.000		5.745.514		20.972.014	-	20.972.014	DISDIKBUD	
1	17	1.17.01 15 Program Pengembangan Nilai Budaya***	Rata-rata capaian SPM Kesenian	100	100,00	543.000	100,00	1.459.500	100,00	775.000	100,00	815.000	100,00	955.000	100,00	1.105.000	100,00	5.652.500		5.652.500	DISDIKBUD
			Jumlah group kesenian aktif (org)	2696	2.700,00		2.705,00		2.711,00		2.721,00		2.736,00		2.760,00		2.760,00		-		
1	17	1.17.01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya***	Cagar budaya yang dilestarikan (buah)	1.069	1.072	138.000	1.075	145.000	1.080	153.000	1.084	555.000	1.090	1.970.000	1.097	1.670.000	1.097	4.631.000		4.631.000	DISDIKBUD
			Museum yang sesuai standar (buah)	0	0		1		1		2		2		2		2		-		
1	17	1.17.01 17 Program Fasilitas Pengembangan Keragaman Budaya Daerah***	sarana gedung dan sanggar budaya yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	3	3	378.000	3	2.815.000	4	730.000	5	865.000	5	2.930.000	5	2.970.514	5	10.688.514		10.688.514	DISDIKBUD
1	26	1.2.17 URUSAN PERPUSTAKAAN			563.915		620.005		376.300		426.400		673.400		722.700		3.382.720	-	3.382.720		
1	26	1.26.01 26 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan**	meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat			563.915		620.005		376.300		426.400		673.400		722.700		3.382.720		3.382.720	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
			-Jumlah perpustakaan	1.115.	1.120.		1		1.130.		1		1.140.		1.145.				-		
			-Jumlah pengunjung	0,18	0,13		0,13		0,13		0,13		0,13		0,13		0,13		-		
			-Jumlah koleksi buku	0,53	0,52		0,52		0,52		0,50		0,51		0,52		0,52		-		
1	24	1.2.18 URUSAN KEARSIPAN			190.550		274.703		130.008		137.597		203.453		214.751		1.151.062	-	1.151.062		
1	24	1.26.01 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan***	Prosentase PD yang menerapkan arsip baku	58,90%	60,27%	-	61,64%	80.000	75,34%	18.550	89,04%	20.800	95,89%	33.300	100%	36.500	100%	189.150		189.150	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1	24	1.26.01 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah***	Jumlah dokumen/arsip foto dan film yang dilestarikan	100%	100%	27.478	100%	29.500	100%	16.695	100%	17.303	100%	26.085	100%	27.083	100%	144.144		144.144	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1	24	1.26.01 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan***	Prosentase dokumen arsip yang diolah	100%	100%	38.800	100%	44.149	100%	22.922	100%	27.660	100%	37.000	100%	40.150	100%	210.681		210.681	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB	
			2015	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)		
																					2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.24.1.26.01.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi***	Jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	3 kgtm	2 kgtm	87.130	2 kgtm	83.912	2 kgtm	48.442	2 kgtm	48.464	2 kgtm	70.485	2 kgtm	71.321	12 kgtm	409.754		409.754	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
1.24.1.20.04.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Tersedianya informasi	4315 buku/leaflet/keping	4315 buku/leaflet/keping	37.142	4315 buku/leaflet/keping	37.142	4315 buku/leaflet/keping	23.399	4315 buku/leaflet/keping	23.370	4315 buku/leaflet/keping	36.583	4315 buku/leaflet/keping	39.697	21575 buku/k	197.333	setwan	#VALUE!	SETWAN	
2	2. URUSAN PILIHAN		-		76.244.847		115.072.321		146.191.791		151.577.929		116.787.738		119.126.473		725.001.098	216.500.000	508.501.098		
	2.05	2.1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.295.895		2.800.146		1.386.646		1.539.000		2.289.848		3.146.841		13.458.376	-	13.458.376		
2.05.2.01.02.20	Program Pengembangan budidaya perikanan***	Produksi perikanan budidaya (ton)	3.921,86	4.319,00	1.234.848	4.430	2.120.146	4.572	568.646	4.707	569.000	4.800	1.234.848	4.909	2.091.841	4.909	7.819.329		7.819.329	DISNAKKAN	
2.05.2.01.02.21	Program Pengembangan perikanan tangkap***	Produksi perikanan Tangkap (ton)	1.250,30	1.272,00	615.091	1.275	370.000	1.277	370.000	1.278	370.000	1.280	400.000	1.280	400.000	1.280	2.525.091		2.525.091	DISNAKKAN	
2.05.2.01.02.22	Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan***	Pemenuhan konsumsi ikan(%)	19 kec, 1 kab	19 kec, 1 kab	32.745	19 kec, 1 kab	50.000	19 kec, 1 kab	50.000	19 kec, 1 kab	150.000	19 kec, 1 kab	155.000	19 kec, 1 kab	155.000	19 kec, 1 kab	592.745		592.745	DISNAKKAN	
2.05.2.01.02.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan***	Pemenuhan konsumsi ikan(%)		46,96	413.211	47,37	260.000	48,25	298.000	49,01	300.000	50,12	300.000	46,96	300.000	46,96	1.871.211		1.871.211	DISNAKKAN	
2.05.2.01.02.24	Program Pengembangan kawasan budidaya air tawar***	Terwujudnya kawasan budidaya perikanan (unit)	-	0	-	-	-	1	100.000	2	150.000	3	200.000	4	200.000	10	650.000		650.000	DISNAKKAN	
2.04.1.20.03	2.2 URUSAN PARIWISATA				3.574.528		4.997.937	-	50.024.000	-	47.649.000	-	8.258.000	-	4.867.000		119.370.465	120.000.000	(629535)		
2.04.1.17.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata***	peningkatan jumlah pengunjung wisata (orang)	2.161.803	2.183.420	606.854	2.205.255	683.937	2.227.310	710.000	2.244.950	741.000	2.469.445	776.000	2.716.389	802.000	2.716.389	4.319.791		4.319.791	DISPORAPAR	
2.04.1.17.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata	4 lokasi	4 lokasi	2.716.802	4 lokasi	3.739.000	4 lokasi	48.739.000	4 lokasi	46.275.000	4 lokasi	6.796.000	4 lokasi	3.327.000	24 lokasi	111.592.802	120.000.000	-	8.407.198	DISPORAPAR
2.04.1.20.03.16	Program pengembangan destinasi wisata***	Prosentase peningkatan destinasi wisata yang tertata			25.000	25%	100.000	50%	100.000	75%	100.000	100%	100.000	0%	100.000	100	525.000		525.000	SETDA	
2.04.1.17.01.18	Program Pengembangan Kemitraan***	peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata (desa)	33 desa	33 desa	225.872	33 desa	475.000	33 desa	475.000	33 desa	533.000	33 desa	586.000	33 desa	638.000	33 desa	2.932.872		2.932.872	DISPORAPAR	

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB			
			2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
2	01	2.3	URUSAN PERTANIAN			17.183.300		20.303.649		22.224.202		23.922.505		26.847.670		29.474.707		139.956.033		6.000.000		133.956.033	
2	01	2.01.01	15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani***	Cakupan bina kelompok tani	17,05	17,00	120.621	17,39	353.000	17,57	145.952	17,74	160.548	17,92	176.602	18,10	396.000	18,10	1.352.723			1.352.723	DISTANBUNHUT
2	01	2.01.02	15			38.964		90.000		50.000		55.000		60.000		60.000		353.964			353.964	DISNAKKAN	
2	01	1.20.03	16 Program Peningkatan Produksi Pangan***	Prosentase peningkatan produksi pangan	100%	5%	63.810	5%	86.640	5%	95.340	5%	104.874	5%	115.361	5%	126.898	0	592.923			592.923	SETDA
2	01	2.01.01	16 Program Peningkatan Produksi Pangan ***	Peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya perhektar	57,80	58,38	4655998	58,96	7.724.600,00	59,55	8.177.900,00	60,15	8.976.438,00	60,75	9.656.580,00	61,36	10.402.257,00	61,36	49.593.773			49.593.773	DISTANBUNHUT
2	01	2.01.01	17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ perkebunan*	Terwujudnya kegiatan agrobisnis pada kelompok tani	5 kelompok	5 kelompok	794483,0	5 kelompok	930.000,00	5 kelompok	1.023.619,00	5 kelompok	1.117.460,00	5 kelompok	1.232.422,00	5 kelompok	1.349.595,00	5 kelompok	6.447.579		6.000.000	447.579	
2	01	2.01.01	18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/ perkebunan**	Teraplikasi penerapan inovasi teknologi (embung)	40,00	45,00	3952368,0	50,00	4.347.604,00	55,00	4.782.365,00	60,00	5.260.602,00	65,00	5.786.662,00	70,00	6.365.328,00	70,00	30.494.929			30.494.929	DISTANBUNHUT
2	01	2.01.01	19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan***	Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan (sektor)	2 sektor (pertanian& perkebunan)	2 sektor	2.747.692	2 sektor	1.928.400	2 sektor	3.324.708	2 sektor	3.657.178	2 sektor	4.022.900	2 sektor	4.425.186	2 sektor	20.106.064			20.106.064	DISTANBUNHUT
2	01	2.01.01	20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan***	Meningkatkan kapasitas penyuluh (kecamatan)	19	19	157.790	19	304.000	19	190.925	19	210.019	19	229.610	19	254.123	19	1.346.467			1.346.467	DISTANBUNHUT
2	01	2.01.02	20			42.482		50.000		55.000		60.000		65.000		65.000		337.482			337.482	DISNAKKAN	
2	01	2.01.02	21 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	Terkendaliya penyakit hewan menular strategis (ekor)	103.471	216.835	846.017	214.800	499.762	215.025	499.762	215.150	500.000	215.400	850.000	215.400	1.200.000	215.400	4.395.541			4.395.541	DISNAKKAN
2	01	2.01.02	22 Program Peningkatan produksi hasil peternakan***	Peningkatan produksi ternak (%)	1,86	1,86	2.470.888	1,86	2.671.131	1,86	2.671.131	1,86	2.600.000	1,86	2.872.213	1,86	3.000.000	9	16.285.363			16.285.363	DISNAKKAN
2	01	2.01.02	23 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan***	Pemenuhan konsumsi daging	675,35	615,36	453.329	624	692.772	633	647.500	642	659.386	652	680.320	651	680.320	651	3.813.627			3.813.627	DISNAKKAN
2	01	2.01.02	25 Program Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner***	Peningkatan kualitas PAH (spl)	1.232	1.020	838.858	1.070	625.740	1.120	560.000	1.170	561.000	1.220	1.100.000	1.220	1.150.000	1.220	4.835.598			4.835.598	DISNAKKAN

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB							
			2015	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)								
																					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2	02	2.4			789.413			1.061.500			736.330			926.731			974.704			1.070.573			5.559.251			5.559.251	
		URUSAN KEHUTANAN																									
2	02	2.01.01	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Menurunnya lahan kritis (ha)	6.258,50	5.401	215.976	5.301	312.000	5.201	261.330	5.101	287.464	5.001	316.210	4.901	347.830	4.901	1.740.810			1.740.810			1.740.810	DISTANBUNHUT
2	02	2.01.01	16	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Meningkatnya luas hutan rakyat (ha)	15.813,10	15.613	377.361	15.813	674.500	16.013	400.000	16.213	554.267	16.413	558.494	16.613	607.743	16.613	3.172.365			3.172.365			3.172.365	DISTANBUNHUT
2	02	2.01.01	17	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Menurunnya lahan kritis (ha)	6.258,50	5.401	196.076	5.301	75.000	5.201	75.000	5.101	85.000	5.001	100.000	4.901	115.000	4.901	646.076			646.076			646.076	DISTANBUNHUT
2	03	1.03.01		2.5	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			42.027.285		44.000.000		45.000.000		45.500.000		46.500.000		47.535.000		270.562.285			270.562.285			270.562.285	
2	03	1.03.01	16	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan***	Terpenuhinya 32,88% panjang jalan terpasang PJU pada tahun 2021	22,09%	24,28%	42.027.285	26,00%	44.000.000	27,72%	45.000.000	29,44%	45.500.000	31,16%	46.500.000	32,88%	47.535.000	32,88%	270.562.285			270.562.285			270.562.285	DPU
2	06	1.20.03	16	2.6	URUSAN PERDAGANGAN		100%	9.691.409	1	40.879.910		24.070.862		30.812.505		31.116.246		32.188.034		168.758.965	90.500.000		78.258.965			78.258.965	SETDA
2	06	1.15.01	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan***	terwujudnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen	19 Wil Kecamatan	19 Wil Kecamatan	1.640.107	19 Wil Kecamatan	2.219.331	19 Wil Kecamatan	3.425.783	19 Wil Kecamatan	6.044.918	19 Wil Kecamatan	2.961.717	19 Wil Kecamatan	3.518.105	19 Wil Kecamatan	19.809.961			19.809.961			19.809.961	DINKOP, UMKM, PERINDAG
2	06	1.20.03	15		Presentase peredaran barang dan jasa yang terkendali	100%	100%	2.420.941	100%	154.579	100%	170.079	100%	187.087	100%	205.796	100%	226.375	100	3.364.857			3.364.857			3.364.857	SETDA
2	06	1.15.01	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor***	Meningkatnya ekspor bersih Kabupaten Semarang	283.379.891	283.379.891	11.729	288.480.729	165.000	293.529.142	92.000	297.753.961	151.500	302.666.903	111.000	307.660.608	23.000	307.660.608	554.229			554.229			554.229	DINKOP, UMKM, PERINDAG
2	06	1.15.01	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	Berkembangnya pasar untuk produk Usaha Mikro	2 Pasar Rakyat	2 Pasar Rakyat	5.151.386	2 Pasar Rakyat	37.022.000	Pengadaan Tanah Ps. Bandungan, 1 Pasar Rakyat dan Tomira	20.343.000	18.888.000	2 Pasar Rakyat dan Tomira	22.047.000	2 Pasar Rakyat dan Tomira	24.279.000	10 Pasar Rakyat/Ps. Grosir	127.730.386	90.500.000			37.230.386			37.230.386	DINKOP, UMKM, PERINDAG
2	06	1.15.01	19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan***	Terwujudnya PKL Kab. Semarang yang tertib, bersih dan kondusif	-	19 Wil Kecamatan	467.246	19 Wil Kecamatan	1.319.000	19 Wil Kecamatan	40.000	19 Wil Kecamatan	5.541.000	19 Wil Kecamatan	5.790.733	19 Wil Kecamatan	4.141.554	Fasilitasi 3 tempat berusaha bagi PKL	17.299.533			17.299.533			17.299.533	DINKOP, UMKM, PERINDAG
2	07			2.7	URUSAN PERINDUSTRIAN		100%	536.156		844.428		2.565.000		1.146.500		709.650		759.615		6.561.349			6.561.349			6.561.349	SETDA
2	07	1.15.01	15	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi***	Penerapan teknologi tepat guna bagi IKM	-	20 pelaku IKM	75.000	20 pelaku IKM	75.000	20 pelaku IKM	75.000	20 pelaku IKM	75.000	20 pelaku IKM	75.000	20 pelaku IKM	75.000	100 pelaku IKM	453.836			453.836			453.836	DINKOP, UMKM, PERINDAG
2	07	1.15.01	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah***	Pemanfaatan Sumberdaya local bagi Industri Kecil	-	20 pelaku Industri kecil	307.009	20 pelaku Industri kecil	185.000	40 Pelaku Industri Kecil	385.000	30 Pelaku Industri Kecil	235.000	25 Pelaku Industri Kecil	255.000	25 Pelaku Industri Kecil	235.000	140 Pelaku Usaha Industri Kecil	1.602.009			1.602.009			1.602.009	DINKOP, UMKM, PERINDAG

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB
			2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)	
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2 07 1.20.03 16	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah***	Prosentase fasilitasi pengembangan industri kecil menengah	100%	100%	73.136	100%	150.000	100%	165.000	100%	181.500	100%	199.650	100%	219.615	100	988.901		988.901	SETDA
2 07 1.15.01 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri***	Meningkatnya kualitas produk IKM melalui pemanfaatan teknologi Industri	3 Industri Kecil	3 Industri Kecil	43.128	4 Industri Kecil	400.000	3 Industri Kecil	450.000	3 Industri Kecil	600.000	3 Industri Kecil	125.000	3 Industri Kecil	175.000	16 Industri Kecil	1.793.128		1.793.128	DINKOP, UMKM, PERINDAG
2 07 1.15.01 18	Program Penataan Struktur Industri***	Kajian teknis Kawasan Industri dan Fasilitasi Badan Hukum Kelompok Industri Kecil	-	-		-		1 Kajian Kawasan Industri	200.000	Fasilitasi badan hukum 2 kel Industri Kecil	15.000	Fasilitasi badan hukum 2 kel Industri Kecil	15.000	Fasilitasi badan hukum 2 kel Industri Kecil	15.000	1 Kajian Kawasan Industri & 6 Badan Hukum Kel Industri	245.000		245.000	DINKOP, UMKM, PERINDAG
2 07 1.15.01 19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial***	Terbinanya Sentra Industri Potensial di Kab Semarang	-	-	34.047	1	34.428	2	1.290.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000	9	1.478.475		1.478.475	DINKOP, UMKM, PERINDAG
2 08 1.14.01	2.8 URUSAN TRANSMIGRASI				146.861		184.751		184.751		81.688		91.620		84.703		774.374		774.374	
2 08 1.14.01 15.	Program Pengembangan wilayah Transmigrasi***	Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	1. 3kali, 2.3 Propinsi 3. 3 kali	keg	108.971	2 Propinsi	146.861	3 Propinsi	146.861	3 Propinsi	66.611	3 Propinsi	76.020	3 Propinsi	69.612	3 Propinsi	614.936		614.936	DINSOSNAKER TRANS
2 08 1.14.01 16.	Program Transmigrasi Lokal***	Peningkatan SDM Calon Transmigrasi	19 Kec, 30 Orang	keg	37.890	45 Orang	37.890	10 Orang	37.890	40 orang	15.077		15.600	30 Orang	15.091	40 Orang	159.438		159.438	DINSOSNAKER TRANS
	3. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				242.762.958		316.325.961		293.024.055		320.062.150		384.857.986		394.620.879		1.951.653.987	162.925.000	1.788.728.987	
1 06	3.1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN		100%	100%	2.650.185		4.085.000		3.880.000		19.145.000		9.240.000		9.545.000		48.545.185	925.000	47.620.185	SETDA
1 06 1.06.01 15	Program Pengembangan Data/Informasi***	Terlaksananya pengembangan data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas		Pengelolaan website, 1 dok SIPD	90.000	Pengelolaan website, 1 dok SIPD, 1 Database Kemiskinan	330.000	Pengelolaan website, 1 dok SIPD, Updating Database kemiskinan, 1 SIM Penataan Ruang	800.000	Pengelolaan website, 1 dok SIPD, Updating Database kemiskinan, Updating SIM Penataan Ruang	430.000	Pengelolaan website, 1 dok SIPD, Updating Database kemiskinan, Updating SIM Penataan Ruang	480.000	Pengelolaan website, 1 dok SIPD, Updating Database kemiskinan, Updating SIM Penataan Ruang	530.000		2.660.000		2.660.000	BAPPEDA

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER (000) Rp			
				2015	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET						Rp. (000)	
1	06	1.06.01	16	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	06	1.06.01	16	Program Kerjasama Pembangunan***	Teraksananya kerjasama pembangunan yang bersinergi dan berkelanjutan		4 Keg FEDEP dan Agropolitan, 2 pameran produk klaster, fasilitasi pengembangan n 3 klaster, koordinasi 5 keg pengembangan n wilayah	215.000	4 Keg FEDEP dan Agropolitan, 4 pameran produk klaster, fasilitasi pengembangan n 3 klaster, koordinasi 5 keg pengembangan n wilayah	310.000	4 Keg FEDEP dan Agropolitan, 4 pameran produk klaster, fasilitasi pengembangan n 3 klaster, koordinasi 5 keg pengembangan n wilayah	400.000	4 Keg FEDEP dan Agropolitan, 4 pameran produk klaster, fasilitasi pengembangan n 3 klaster, koordinasi 5 keg pengembangan n wilayah	470.000	4 Keg FEDEP dan Agropolitan, 4 pameran produk klaster, fasilitasi pengembangan n 3 klaster, koordinasi 5 keg pengembangan n wilayah	540.000	610.000		2.545.000		2.545.000	BAPPEDA
1	06	1.20.03	16	Program Kerjasama Pembangunan***	Prosentase kebijakan kerjasama yang terfasilitasi dengan baik		100%	119.320	100%	250.000	100%	325.000	100%	400.000	100%	450.000	500.000	100	2.044.320		2.044.320	SETDA
1	06	1.06.01	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan strategis dan cepat tumbuh sebagai acuan pemanfaatan ruang terdiri dari Dok Rencana Penataan Kawasan Bandungan & Penataan Bawen Raya serta Kajian Pemindahan Pusat Pemerintahan		3 dokumen		525.000										525.000	675.000	150.000	BAPPEDA
																			250.000		250.000	
1	06	1.06.01	20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah***	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah		164 aparatur	75.000	82 aparatur	75.000		82 aparatur	85.000	82 aparatur	95.000		82 aparatur	330.000			330.000	BAPPEDA
1	06	1.20.03	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah***	Prosentase peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaporan daerah	100%	100%	69.485	100%	75.000	100%	80.000	100%	85.000	100%	180.000	95.000	100	584.485		584.485	SETDA

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)		
			2015	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET							
1 06 1.06.01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah***	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkesinambungan			1.150.000		1.210.000		850.000		790.000		975.000		1.035.000	17	6.010.000		6.010.000	BAPPEDA
1 06 1.06.01 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi***	Terwujudnya perencanaan pembangunan di bidang ekonomi			287.500		415.000		460.000		15.610.000		5.560.000		5.760.000		28.092.500		28.092.500	BAPPEDA
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi		1 Dok.Masterplan Penangulangan Kemiskinan					1 dokumen kajian pengembangan Techno-Park					1 Dok.Review Masterplan Penangulangan Kemiskinan		3 Dok				BAPPEDA
		Terbangunnya Techno-Park							60%				80%		100%					
		Terkoordinasinya perencanaan pembangunan ekonomi daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Turunnya angka kemiskinan sebesar 1,39%	7,89%	7,70%		7,50%		7,30%		7,10%		6,80%		6,50%		6,50%				
		Terkendalinya angka inflasi daerah	2,85%	3,12%		3,40%		3,67%		3,95%		4,22%		4,50%		4,50%				
1 06 1.06.01 23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya***	Terwujudnya perencanaan pembangunan sosial budaya		1 RAD-P PK, 4 laporan RAD PPK, 1 Lap Pendidikan untuk Semua, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosbud	573.880	1 RAD-P PK, 4 laporan RAD PPK, 1 Lap Pendidikan untuk Semua, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosbud	580.000	1 RAD-P PK, 4 laporan RAD PPK, 1 Lap Pendidikan untuk Semua, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosbud, 5 Dok Pola Tata Desa	825.000	1 RAD-P PK, 4 laporan RAD PPK, 1 Lap Pendidikan untuk Semua, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosbud, 5 Dok Pola Tata Desa	865.000	1 RAD-P PK, 4 laporan RAD PPK, 1 Lap Pendidikan untuk Semua, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosbud, 5 Dok Pola Tata Desa	910.000	1 RAD-P PK, 4 laporan RAD PPK, 1 Lap Pendidikan untuk Semua, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosbud, 5 Dok Pola Tata Desa	960.000	1 RAD-P PK, 4 laporan RAD PPK, 1 Lap Pendidikan untuk Semua, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosbud, 20 Dok Pola Tata Desa	4.713.880		4.713.880	BAPPEDA
1 06 1.06.01 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam***	Terwujudnya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang sinergis dan berkesinambungan	3 Dok	1 Dok.Jakstrad a SPAM , 2 Dok Monev Pembangunan Infrastruktur	70.000	1 Dok.Review MPS, 2 Dok Monev Pembangunan Infrastruktur, 1 Database air minum	315.000	1 Dok.Perencanaan Drainase, 2 Dok.Monev Pembangunan Infrastruktur	140.000	1 Dok.Perencanaan Drainase, 1 Dok Rencana Induk Pengelolaan Sampah, 2 Dok.Monev Pembangunan Infrastruktur	410.000	2 Monev Pembangunan Infrastruktur	50.000	2 Monev Pembangunan Infrastruktur	55.000	20 Dok	1.040.000		1.040.000	BAPPEDA

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB		
			2015	TARGET	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)		INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)	
					Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)							
1	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	20		3.2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			82.079.994		75.999.724		72.327.685		78.093.619		83.814.050		88.985.093		481.300.165	62.000.000	419.300.165		
1	20	1.20.04	15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah***	Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan rakyat daerah dan raperda terbahas	45 orang dan 21 raperda	45 orang dan 22 raperda	32.921.478	45 orang dan 22 raperda	30.969.755	45 orang dan 22 raperda	18.952.306	45 orang dan 22 raperda	19.484.090	45 orang dan 22 raperda	30.503.351	45 orang dan 22 raperda	33.100.258	45 orang dan 110 raperda	165.931.238	165.931.238	SETWAN	
1	20	1.20.03	16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah***	Jumlah kegiatan dialog dengan tokoh masyarakat, jumlah kunjungan kerja pejabat, jumlah kegiatan keprotokoleran, jumlah koordinasi pusat, jumlah rakor dalam, jumlah peserta dialog dengan tenaga kebersihan, jumlah PD	100%	100%	2.550.958	100%	2.827.500	100%	2.808.850	100%	3.088.735	100%	3.388.709	100%	3.748.079	100%	18.412.831	18.412.831	SETDA	
1	20	1.20.03	17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ***	Prosentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkembang	100%	100%	13.358.375	100%	12.284.745	100%	11.815.636	100%	11.347.200	100%	7.881.920	100%	7.420.112	100	64.107.988	64.107.988	SETDA	
1	20	1.20.05	08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 bulan	12 bulan	349.914	12 bulan	349.914	12 bulan	423.395	12 bulan	465.735	12 bulan	512.309	12 bulan	563.540		2.664.807	2.664.807	DPPKAD	
1	20	1.20.05	17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 bulan	12 bulan	3.510.579	12 bulan	2.974.220	12 bulan	3.625.564	12 bulan	3.660.817	12 bulan	4.000.097	12 bulan	4.348.306		22.119.583	22.119.583	DPPKAD	
1	20	1.20.05	18 Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	141.000	12 bulan	170.610	12 bulan	187.670	12 bulan	206.437	12 bulan	227.080		932.797	932.797	DPPKAD	
1	20	1.22.01	19 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Terwujudnya penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan tanah kas desa	445 eks., 208 desa, 19 kec.	208 desa, 19 kec.	48.835	208 desa, 19 kec.	73.835	445 eks., 208 desa	81.218	445 eks., 208 desa	89.339	445 eks., 208 desa	98.272	445 eks., 208 desa	108.099	1780 eks., 208 desa	499.598	499.598	BAPERMASDES	

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)		
				2015	TARGET	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						
1	20	1.20.07	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH***	Meningkatnya Keyakinan terbatas atas hasil kinerja APJP	100 entitas	96 entitas, 1kali koordinasi	2.862.178	100 entitas (100 LHP)	3.043.717	100 entitas (100 LHP)	3.043.717	100 entitas (100 LHP)	3.043.717	100 entitas (100 LHP)	3.043.717	100 entitas (100 LHP)	18.080.765	18.080.765	INSPEKTORAT	
1	20	1.20.07	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan***	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparaturnya Pengawasan	7 kali	5 kali/ 41 orang	27.166	5 kali/ 41 orang	30.000	5 kali/ 41 orang	30.000	5 kali/ 41 orang	30.000	5 kali/ 41 orang	30.000	30 kali/41 orang selama 6 tahun	177.166	177.166	INSPEKTORAT	
1	20	1.20.07	22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan***	Sistematisnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1 profil - SOP	1 SOP/ 150 lembar	2.980	1 SOP/ 300 lembar	3.000	1 SOP/ 300 lembar	3.000	1 SOP/ 300 lembar	3.000	1 SOP/ 300 lembar	3.000	6 SOP/ 1650 lembar	18.280	18.280	INSPEKTORAT	
1	20	1.20.03	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi ***	Prosentase pengadaan Barang dan Jasa yang Terlayani	100%	100%	414.100	100%	100.000	100%	200.000	100%	250.000	100%	300.000	100	1.614.100	1.614.100	SETDA	
					Sistem Informasi manajemen Pemda	27	27	37	47	57	67	73	73	73	73	-	-	-	-	SETDA	
1	20	1.20.07	24	Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat***	Penanganan pengaduan masyarakat yang semakin intensif	3 kali pelaksanaan/ 12 bulan	3 kali pelaksanaan/ 12 bulan	2.740	2 kali pelaksanaan/ 12 bulan	3.000	2 kali pelaksanaan/ 12 bulan	3.000	2 kali pelaksanaan/ 12 bulan	3.000	2 kali pelaksanaan/ 12 bulan	3.000	13 kali pelaksanaan/ 72 bulan	17.740	17.740	INSPEKTORAT	
1	20	1.20.03	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan **	Prosentase implementasi kinerja produk hukum daerah	100%	100%	949.383	100%	1.163.973	100%	1.338.569	100%	1.539.354	100%	1.770.257	100	8.797.332	3.000.000	5.797.332	SETDA

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB		
			2015	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)			
																					2016	2017
1 20		28			2.494.186			4.036.476		7.309.740		7.984.921		8.840.133		9.572.322		40.237.779	10.000.000	30.237.779		
1 20	1.20.08.01	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Cakupan pelayanan pelayan perijinan dan non perijinan tingkat kecamatan	100%	5 bidang pelayanan	176.724	5 bidang pelayanan	260.000	5 bidang pelayanan	385.000	5 bidang pelayanan	429.000	5 bidang pelayanan	463.000	5 bidang pelayanan	505.000	30 bidang pelayanan	2.218.724		2.218.724	Kec Getasan
1 20	1.20.08.02	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Cakupan pelayanan pelayan perijinan dan non perijinan tingkat kecamatan	99,92%	5 bidang pelayanan	118.209	5 bidang pelayanan	259.588	5 bidang pelayanan	350.547	5 bidang pelayanan	385.601	5 bidang pelayanan	424.162	5 bidang pelayanan	466.578	30 bidang pelayanan	2.004.685		2.004.685	Kecamatan Tenganan
1 20	1.20.08.03	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Cakupan pelayanan pelayan perijinan dan non perijinan tingkat kecamatan	100%	5 bidang pelayanan	117.996	5 bidang pelayanan	177.442	5 bidang pelayanan	195.196	5 bidang pelayanan	214.715	5 bidang pelayanan	236.175	5 bidang pelayanan	259.792	30 bidang pelayanan	1.201.315		1.201.315	Kecamatan Susukan
1 20	1.20.08.04	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Cakupan pelayanan pelayan perijinan dan non perijinan tingkat kecamatan	100%	5 bidang pelayanan	158.399	5 bidang pelayanan	235.824	5 bidang pelayanan	259.406	5 bidang pelayanan	285.347	5 bidang pelayanan	313.882	5 bidang pelayanan	345.270	30 bidang pelayanan	1.598.128		1.598.128	Kec Suruh
1 20	1.20.08.05	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada Camat **	52 Sub keg	50 Sub keg	113.650	72 Sub keg	259.773	117 Sub keg	298.000	112 Sub keg	335.000	116 Sub keg	372.500	111 Sub keg	410.000	578 Sub keg	1.788.923		1.788.923	Kecamatan Pebelan
1 20	1.20.08.06	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada Camat **	100%	5 bidang pelayanan	202.442	5 bidang pelayanan	188.324	5 bidang pelayanan	207.156	5 bidang pelayanan	227.872	5 bidang pelayanan	250.659	5 bidang pelayanan	275.725	30 bidang pelayanan	1.352.179		1.352.179	Kecamatan Tuntang
1 20	1.20.08.07	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada Camat **	99,88 %	5 bidang pelayanan	139.593	5 bidang pelayanan	226.589	5 bidang pelayanan	826.107	5 bidang pelayanan	796.689	5 bidang pelayanan	955.003	5 bidang pelayanan	1.022.865	30 bidang pelayanan	3.966.847		3.966.847	Kec banyubiru
1.20	1.20.08.08	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada Camat **		5 bidang pelayanan	137.635	5 bidang pelayanan	172.255	5 bidang pelayanan	518.428	5 bidang pelayanan	537.376	5 bidang pelayanan	558.218	5 bidang pelayanan	581.146	30 bidang pelayanan	2.505.057		2.505.057	Kec. Jambu
1.20	1.20.08.09	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada Camat **	1	5 bidang pelayanan	156.720	5 bidang pelayanan	232.346	5 bidang pelayanan	255.581	5 bidang pelayanan	281.139	5 bidang pelayanan	309.253	5 bidang pelayanan	340.178	30 bidang pelayanan	1.575.216		1.575.216	Kecamatan Sumowono
1 20	1.20.08.10	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada Camat **		5 bidang pelayanan	117.674	5 bidang pelayanan	185.000	5 bidang pelayanan	384.245	5 bidang pelayanan	456.821	5 bidang pelayanan	466.869	5 bidang pelayanan	514.556	30 bidang pelayanan	2.125.166		2.125.166	Kec. Amabarawa
1 20	1.20.08.11	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada Camat **		5 bidang pelayanan	143.000	5 bidang pelayanan	317.410	5 bidang pelayanan	697.448	5 bidang pelayanan	757.298	5 bidang pelayanan	821.533	5 bidang pelayanan	890.292	30 bidang pelayanan	3.626.981		3.626.981	Kecamatan Bawen

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)		
				2015	TARGET	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						
1	20	1.20.08.12	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada camat	5 bidang pelayanan	5 bidang pelayanan	130.227	180.401	5 bidang pelayanan	228.135	5 bidang pelayanan	265.856	5 bidang pelayanan	363.361	5 bidang pelayanan	332.312	30 bidang pelayanan	1.500.292	1.500.292	Kec Bringin
1	20	1.20.08.13	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada camat	100%	51 kegiatan	146.959	155.959	55 kegiatan	171.555	58 kegiatan	188.710	61 kegiatan	207.581	64 kegiatan	228.340	343 kegiatan	1.099	1.099	Kec. Bergas
1	20	1.20.08.14	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada camat	100%	5 bidang pelayanan	140.711	212.925	5 bidang pelayanan	607.747	5 bidang pelayanan	635.627	5 bidang pelayanan	666.295	5 bidang pelayanan	700.030	30 bidang pelayanan	2.963.335	2.963.335	Kec Pringapus
1	20	1.20.08.15	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada camat	5 bidang pelayanan	5 bidang pelayanan	112.000	265.500	5 bidang pelayanan	369.550	5 bidang pelayanan	469.755	5 bidang pelayanan	599.206	5 bidang pelayanan	722.349	30 bidang pelayanan	2.538.359	2.538.359	Kec Bancak
1	20	1.20.08.16	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada camat	5 bidang pelayanan	5 bidang pelayanan	178.477	220.453	5 bidang pelayanan	242.498	5 bidang pelayanan	266.748	5 bidang pelayanan	293.423	5 bidang pelayanan	322.765	30 bidang pelayanan	1.524.365	1.524.365	Kec. Kaliwungu
1	20	1.20.08.17	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada camat	5 bidang pelayanan	5 bidang pelayanan	124.550	162.270	5 bidang pelayanan	556.947	5 bidang pelayanan	646.947	5 bidang pelayanan	695.947	5 bidang pelayanan	764.947	30 bidang pelayanan	2.951.608	2.951.608	Kec. Ungaran Barat
1	20	1.20.08.18	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada camat	5 bidang pelayanan	5 bidang pelayanan	95.000	194.210	5 bidang pelayanan	213.631	5 bidang pelayanan	234.994	5 bidang pelayanan	258.494	5 bidang pelayanan	284.343	30 bidang pelayanan	1.280.671	1.280.671	Kec Ungaran Timur
1	20	1.20.08.19	28	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat **	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada camat	5 bidang pelayanan	5 bidang pelayanan	131.032	286.010	5 bidang pelayanan	713.947	5 bidang pelayanan	757.947	5 bidang pelayanan	791.947	5 bidang pelayanan	833.947	30 bidang pelayanan	3.514.830	3.514.830	Kec Bandungan
1	20	1.20.05	29	Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	12 bulan	12 bulan	1.293.755	1.769.572	12 bulan	2.100.200	12 bulan	2.304.228	12 bulan	2.521.149	12 bulan	2.668.938		9.988.904	9.988.904	DPPKAD
1	20	1.20.03	30	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Aparatur Daerah***	Presentase peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan pada PD	100%	100%	329.512	335.000	100%	375.000	100%	412.500	100%	453.750	100%	499.125	100	2.404.887	2.404.887	SETDA

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB				
			2016			2017			2018			2019			2020			2021						
			2015	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	20	1.22.01	31	Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**	Tertib administrasi dalam bidang pengelolaan keuangan desa	208 desa, 208 kades, 38 kasi, 416 pelatihan keuangan desa PTPKD, 50 orang Pelatihan SISKEUDES bagi SATGAS Kecamatan dan Kabupaten ; Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa dan PILKADES	208 desa, 208 kades, 38 kasi, 416 pelatihan keuangan desa PTPKD, 50 orang Pelatihan SISKEUDES bagi SATGAS Kecamatan dan Kabupaten, 92 BPD, 100 orang Perangkat Desa, 208 Profil Desa dan 24 Kepala Desa	1.384.981	208 desa, 208 kades, 38 kasi, 416 pelatihan keuangan desa PTPKD, 50 orang Pelatihan SISKEUDES bagi SATGAS Kecamatan dan Kabupaten, 92 BPD, 100 orang Perangkat Desa, 208 Profil Desa	676.000	208 desa, 208 kades, 38 kasi, 416 pelatihan keuangan desa PTPKD, 50 orang Pelatihan SISKEUDES bagi SATGAS Kecamatan dan Kabupaten, 92 BPD, 100 orang Perangkat Desa, 208 Profil Desa, 55 Kades	2.913.600	208 desa, 208 kades, 38 kasi, 416 pelatihan keuangan desa PTPKD, 50 orang Pelatihan SISKEUDES bagi SATGAS Kecamatan dan Kabupaten, 92 BPD, 100 orang Perangkat Desa, 208 Profil Desa, 129 Kades	5.954.960	208 desa, 208 kades, 38 kasi, 416 pelatihan keuangan desa PTPKD, 50 orang Pelatihan SISKEUDES bagi SATGAS Kecamatan dan Kabupaten, 92 BPD, 100 orang Perangkat Desa, 208 Profil Desa	800.426	208 desa, 208 kades, 38 kasi, 416 pelatihan keuangan desa PTPKD, 50 orang Pelatihan SISKEUDES bagi SATGAS Kecamatan dan Kabupaten, 92 BPD, 100 orang Perangkat Desa, 208 Profil Desa	850.468	208 desa, 208 kades, 38 kasi, 416 pelatihan keuangan desa PTPKD, 50 orang Pelatihan SISKEUDES bagi SATGAS Kecamatan dan Kabupaten	12.580.435	37.000.000	(24.419.565)	BAPERMASDES	
1	20	1.20.03	32	Program Fasilitas Penyelesaian Perkara Peradilan ***	Prosentase fasilitas penyelesaian perkara peradilan	100%	100%	21.723	100%	25.000	100%	28.750	100%	33.063	100%	38.022	100%	43.725	100	190.283	190.283	190.283	SETDA	
1	20	1.20.06	36	Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian)**	Meningkatnya kualitas SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Semarang	Diklat PIM 18 dan ujian dinas 9 ujian PI 206	Diklat PIM 19 dan ujian dinas 30 ujian PI 200 PNS	1.608.324	Diklat PIM 22 dan ujian dinas 25 ujian PI 210 PNS	829.911	Diklat PIM 21 dan ujian dinas 30 ujian PI 150 PNS	1.182.000	Diklat PIM 16 dan ujian dinas 30 ujian PI 150 PNS	1.212.800	Diklat PIM 20 dan ujian dinas 30 ujian PI 150 PNS	1.166.450	Diklat PIM 21 dan ujian dinas 30 ujian PI 150 PNS	1.197.900	Diklat PIM 138 dan ujian dinas 145 ujian PI 960 PNS	7.197.385	7.197.385	7.197.385	BKD	
1	20	1.20.06	37	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)***	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	240 org	160 org	842.480	140 org	322.026	260 org	2.002.800	265 org	1.930.800	270 org	1.978.600	275 org	2.025.030	1370 org	9.101.736		9.101.736	BKD	
1	20	1.20.06	38	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)* dan ***	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan karier aparatur	100%	100%	1.539.536	100%	1.485.832	100%	1.511.900	100%	1.563.500	100%	1.772.200	100%	1.731.782	100%	9.604.750		9.604.750	BKD	
1	20	1.20.09	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan**				4.223.071		5.087.768		5.605.579		6.397.909		6.846.650		7.336.829		35.497.806		35.497.806		
1	20	1.20.09.01	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan**	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	166.338	100%	182.984	100%	201.282	100%	221.411	100%	243.552	100%	257.907	100%	1.273.474		1.273.474	1.273.474	KELURAHAN GONDORIO
1	20	1.20.09.02	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan**	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	155.069	100%	164.524	100%	180.976	100%	199.074	100%	218.981	100%	240.880	100%	1.159.504		1.159.504	1.159.504	KELURAHAN NGAMPIN

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB		
				2015	TARGET	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)		INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER (000) Rp
						Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						
1	20	1.20.09.03	40	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	20	1.20.09.03	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat keurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	141.148	100%	171.590	100%	222.140	100%	340.016	100%	216.090	100%	235.425	100%	1.326.409	1.326.409	KELURAHAN POJOKSARI
1	20	1.20.09.04	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat keurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	167.978	100%	184.700	100%	203.170	100%	223.487	100%	245.833	100%	270.418	100%	1.295.586	1.295.586	KELURAHAN TAMBAKBOYO
1	20	1.20.09.05	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat keurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	155.343	100%	174.495	100%	183.220	100%	201.542	100%	221.696	100%	243.866	100%	1.180.162	1.180.162	KELURAHAN LODOYONG
1	20	1.20.09.06	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat keurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	189.755	100%	229.754	100%	247.600	100%	271.100	100%	292.800	100%	312.100	100%	1.543.109	1.543.109	KELURAHAN KUPANG
1	20	1.20.09.07	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat keurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	157.422	100%	178.414	100%	196.255	100%	215.880	100%	237.469	100%	261.215	100%	1.246.655	1.246.655	KELURAHAN KRANGGAN
1	20	1.20.09.08	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat keurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	143.091	100%	205.720	100%	220.292	100%	238.721	100%	254.093	100%	275.503	100%	1.337.420	1.337.420	KELURAHAN PANJANG
1	20	1.20.09.09	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat keurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	119.854	100%	164.000	100%	196.610	100%	226.102	100%	253.234	100%	283.622	100%	1.243.421	1.243.421	KELURAHAN BARAN

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB		
				2015	TARGET	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)		INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER (000) Rp
						Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						
1	20	1.20.09.10	40	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	20	1.20.09.10	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	125.091	100%	137.600	100%	151.360	100%	163.496	100%	183.146	100%	201.460	962.153		KELURAHAN BANDUNGAN	
1	20	1.20.09.11	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	191.998	100%	211.295	100%	221.000	100%	233.000	100%	244.000	100%	259.600	1.360.893		KELURAHAN BAWEN	
1	20	1.20.09.12	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	153.536	100%	173.700	100%	235.550	100%	287.900	100%	321.793	100%	369.500	1.541.979		KELURAHAN HARJOSARI	
1	20	1.20.09.13	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	173.862	100%	200.000	100%	220.000	100%	235.000	100%	245.000	100%	260.000	1.333.862		KELURAHAN NGEMPON	
1	20	1.20.09.14	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	192.157	100%	245.324	100%	260.500	100%	296.842	100%	326.526	100%	359.179	1.680.528		KELURAHAN KARANGJATI	
1	20	1.20.09.15	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	162.396	100%	178.882	100%	196.770	100%	216.447	100%	238.092	100%	261.901	1.254.488		KELURAHAN WUJIL	
1	20	1.20.09.16	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	133.655	100%	175.000	100%	190.000	100%	215.000	100%	240.000	100%	270.000	1.223.655		KELURAHAN BERGASLOR	

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB		
				2015	TARGET	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)		INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER (000) Rp
						Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						
1	20	1.20.09.17	40	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	20	1.20.09.17	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	134.185	100%	153.660	100%	169.069	100%	189.296	100%	209.428	100%	232.138	1.087.776	1.087.776	KELURAHAN PRINGAPUS	
1	20	1.20.09.18	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	127.900	100%	118.298	100%	139.000	100%	151.400	100%	165.000	100%	175.000	876.598	876.598	KELURAHAN CANDIREJO	
1	20	1.20.09.19	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	192.157	100%	245.324	100%	269.856	100%	296.842	100%	326.526	100%	359.179	1.689.884	1.689.884	KELURAHAN GENUK	
1	20	1.20.09.20	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	179.500	100%	174.036	100%	87.409	100%	206.039	100%	225.643	100%	246.208	1.118.835	1.118.835	KELURAHAN UNGARAN	
1	20	1.20.09.21	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	181.879	100%	216.200	100%	237.820	100%	261.602	100%	287.761	100%	316.538	1.501.800	1.501.800	KELURAHAN BANDARJO	
1	20	1.20.09.22	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	162.010	100%	175.700	100%	225.250	100%	279.700	100%	340.250	100%	408.500	1.591.410	1.591.410	KELURAHAN LANGENSARI	
1	20	1.20.09.23	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	132.660	100%	150.955	100%	165.300	100%	183.700	100%	200.013	100%	220.014	1.052.642	1.052.642	KELURAHAN SIDOMULYO	

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN Rp (000)			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.20.09.24	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	947.637	KELURAHAN KALIREJO
1.20.09.25	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.184.268	KELURAHAN SUSUKAN
1.20.09.26	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.171.372	KELURAHAN GEDANGAK
1.20.09.27	40	Program Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kelurahan***	Persentase pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.312.286	KELURAHAN BEJI
1.20.10	33	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana***	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana		9.109.600		6.153.480		5.458.450		5.389.480		5.919.820		5.859.940		37.890.770		37.890.770		BPBD
			jumlah desa dan sekolah yang dilatih pengurangan resiko bencana	1 keg	50 org, 2 Desa, 2 Sekolah	50.000	50 org, 2 Desa, 2 Sekolah	44.000	50 org, 2 Desa, 2 Sekolah	29.150	100 org, 4 Desa, 4 Sekolah	52.000	100 org, 4 Desa, 4 Sekolah	81.400	100 org, 4 Desa, 4 Sekolah	81.030	450 org, 18 Desa, 18 Sekolah	337.580	337.580		
			jumlah peta resiko bencana	--	--	--	1 dokumen peta resiko bencana	264.000	--	--	--	--	--	--	--	--	1 dokumen peta resiko bencana	264.000	264.000		
			jumlah Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan rencana kontigensi yang tersusun	--	--	--	1 dokumen RPB, 1 Dokumen Rencana Kontigensi	88.000	--	--	--	--	--	--	--	--	1 dokumen RPB, 1 Dokumen Rencana Kontigensi	88.000	88.000		
			jumlah kegiatan, dan jumlah desa tangguh dan sekolah aman	--	16 Desa, 8 Kecamatan	--	2 Desa tangguh bencana, dan 1 sekolah aman di 2 kecamatan	326.480	2 Desa tangguh bencana, dan 1 sekolah aman di 2 kecamatan	204.050	2 Desa tangguh bencana, dan 1 sekolah aman di 2 kecamatan	211.640	2 Desa tangguh bencana, dan 2 sekolah aman di 2 kecamatan	323.380	2 Desa tangguh bencana, dan 2 sekolah aman di 2 kecamatan	335.070	10 desa tangguh bencana, 8 sekolah aman, di 10 Kecamatan	1.400.620	1.400.620		

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)			
				2015	TARGET	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		jumlah pengadaan sarana prasarana peralatan penanggulangan bencana	7 macam peralatan	10 set peralatan, 1 unit mobil PMK, 4 unit Tanki Air, 1 mesin pompa, 4 unit tower	3.974.600	Peralatan kelangkaan pan Damkar, 40 HT dan 1 receiver, 1 drone	264.000	10 set peralatan SAR	29.150	10 set peralatan SAR,	31.200	1 Unit Alat berat	370.000	1 sumur, 1 tandon air	292.000	30 set peralatan, 1 unit mobil PMK, 4 unit Tanki Air, 1 mesin pompa, 4 unit tower	4.960.950		4.960.950			
		jumlah logistik, dan lokasi persebaran bantuan logistik	235 desa / Kelurahan	235 Desa / Kelurahan	50.000	235 Desa / Kelurahan	88.000	235 Desa / Kelurahan	58.300	235 Desa / Kelurahan	62.920	235 Desa / Kelurahan	98.420	235 Desa / Kelurahan	104.390	235 Desa / Kelurahan	462.030		462.030			
		Bintek dan Pelatihan SAR	jumlah SAR yang dilatih	52 org, 2 kegiatan	30 org	35.000	30 org	35.000	30 org	21.200	30 org	21.320	30 org	31.080	30 org	31.390	235 Desa / Kelurahan	174.990		174.990		
		jumlah lokasi untuk kegiatan simulasi penanganan darurat bencana.	-	1 sekolah	-	8 Desa, 8 Kecamatan	44.000	10Desa, 8 Kecamatan	116.600	1 Desa, 1 Kecamatan	10.400	1 Desa, 1 Kecamatan	15.540	1 Desa, 1 Kecamatan	16.060	16 Desa, 8 Kecamatan	202.600		202.600			
		jumlah lokasi pelaksanaan penanganan darurat bencana melalui dana tak terduga	19 Kecamatan (18 titik lokasi)	19 Kecamatan	5.000.000	19 Kecamatan	5.000.000	19 Kecamatan	5.000.000	19 Kecamatan	5.000.000	19 Kecamatan	5.000.000	19 Kecamatan	5.000.000	19 Kecamatan	30.000.000		30.000.000			
1	20	1.20.10	34	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana**	Jumlah penyelenggaraan bencana dan pasca bencana.	120 org, 2 keg, 2 buku, 6 lokasi, 365 hr, 1 kali rapat, 850 tanki air, 19 Kec, 27 jenis peralatan, 5 buku	135 org, 20 buku, 6 fasum, 19 kec, 365 hari, 10 posko, 1 keg, 27 jenis peralatan	294.000	95 org, 20 buku, 6 fasum, 19 kec, 365 hari, 10 posko, 1 keg, 27 jenis peralatan	323.500	135 org, 20 bk, 6 fasum, 19 kec, 1 dok, 365 hari, 10 posko, 1 keg, 27 jenis peralatan	360.800	135 org, 20 buku, 6 fasum, 19 kec, 1 dok, 365 hari, 10 posko, 1 keg, 27 jenis peralatan	379.780	135 org, 20 buku, 6 fasum, 19 kec, 1 dok, 365 hari, 10 posko, 1 keg, 27 jenis peralatan	418.047	785 org, 90 bk, 36 fasum, 19 kec, 5 dok, 365 hari, 10 posko, 6x900 tangki air, 27 jenis peralatan	3.410.267	12.000.000	-	8.589.733	BPBD
		jumlah personil yang dilatih DALA dan PDNA	120 org, 1 keg	80 Peserta	50.000	80 Peserta	50.000	40 Peserta	55.000	80 Peserta	65.000	80 Peserta	66.550	80 Peserta	73.204	480 Peserta	359.754		359.754			
		jumlah fasilitas umum yang di fasilitasi dengan Rehabilitasi dan rekonstruksi	9 kecamatan	15 buku, 6 fasilitas umum, 19 Kecamatan, Bantuan Sosial Rehab Rumah Terkena Bencana	1.449.491	15 buku, 6 fasilitas umum, 19 Kecamatan, Bantuan Sosial Rehab Rumah Terkena Bencana	100.000	15 buku, 6 fasilitas umum, 19 Kecamatan, Bantuan Sosial Rehab Rumah Terkena Bencana	110.000	15 buku, 6 fasilitas umum, 19 Kecamatan, Bantuan Sosial Rehab Rumah Terkena Bencana	121.000	15 buku, 6 fasilitas umum, 19 Kecamatan, Bantuan Sosial Rehab Rumah Terkena Bencana	121.000	15 buku, 6 fasilitas umum, 19 Kecamatan, Bantuan Sosial Rehab Rumah Terkena Bencana	133.100	90 buku, 36 fasilitas umum, 19 Kecamatan, Bantuan Sosial Rehab Rumah Terkena Bencana	2.034.591		2.034.591			
		jumlah lokasi penanganan infrastruktur pasca bencana	- 1 keg, 2 macam, 31 lokasi	19 Kecamatan, 1 dokumen	92.000	19 Kecamatan	100.000	19 Kecamatan	110.000	19 Kecamatan, 1 dokumen	121.000	19 Kecamatan, 1 dokumen	133.100	19 Kecamatan, 1 dokumen	146.410	19 Kecamatan, 5 dokumen	702.510		702.510			
		Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana	jumlah peralatan bencana yang terawat.	27 jenis peralatan/ mesin	19 alat / mesin	4.500	27 jenis peralatan/ mesin	5.000	27 jenis peralatan/ mesin	5.500	27 jenis peralatan/ mesin	6.500	27 jenis peralatan/ mesin	7.100	27 jenis peralatan/ mesin	8.100	27 jenis peralatan/ mesin	36.700		36.700		
		jumlah laporan monitoring dan evakuasi pelaksanaan penanggulangan bencana	19 Kecamatan an, 5 buku	19 Kecamatan, 5 buku	38.149	19 Kecamatan, 5 buku	39.000	19 Kecamatan, 5 buku	43.000	19 Kecamatan, 5 buku	47.300	19 Kecamatan, 5 buku	52.030	19 Kecamatan, 5 buku	57.233	19 Kecamatan, 30 buku	276.712		276.712			
5	1	1.20.10	5	Belanja Bantuan Sosial	Terbantunya keluarga terdampak bencana	19 Kecamatan an	600.000	19 Kecamatan an	1.020.000	19 Kecamatan an	1.020.000	19 Kecamatan an	1.356.000	19 Kecamatan an	1.356.000	19 Kecamatan an	1.800.000	19 Kecamatan an	7.152.000		7.152.000	

KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB
			2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)	
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	Terbantunya rumah individu terdampak bencana dan terbantunya keluarga korban meninggal akibat bencana				19 Kecamatan		19 Kecamatan		19 Kecamatan		19 Kecamatan		19 Kecamatan	19 kec					
	3.3 Program Lain Penunjang Urusan Pemerintahan				158.032.779		236.241.237		216.816.370		222.823.531		291.803.936		296.090.785		1.421.808.637	100.000.000	1.321.808.637	
1	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan ***	Terpenuhinya penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	100%	65.559.218		71.331.516		79.900.759		85.108.599		90.721.928		97.275.009	100%	489.897.028		489.897.028	73 PD
1	02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ** dan ***	Peningkatan sarana prasarana perkantoran termasuk rintisan konstruksi Pemindahan Pusat Pemerintahan	100%	100%	81.207.485		146.720.141		117.057.643		115.917.429		180.420.371		176.785.961		818.109.030	100000000	705.569.030	73 PD
1	03 Program peningkatan disiplin aparatur ***	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas dan pengelolaan administrasi kepegawaian	100%	100%	1.036.191		4.898.437		6.475.542		7.392.539		6.832.107		7.372.916	100%	34.007.731			73 PD
1	04 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas dan pengelolaan administrasi kepegawaian	100%	100%	43.000		37.000		45.000		48.300		51.930		51.930		277.160			73 PD
1	05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ***	Terlaksananya pelatihan, bimtek dan sosialisasi	100%	100%	3.206.475		3.761.766		4.160.247		4.501.949		4.891.775		5.290.658	100%	25.812.870			73 PD
1	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ***	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan	100%	100%	1.362.130		1.805.007		1.983.975		2.146.531		2.308.826		2.481.753	100%	12.088.222			73 PD
1	07 Program Perencanaan ***	Terpenuhinya rencana kerja tahun berikutnya Dinas Kesehatan secara menyeluruh	100%	100%	2.160.526		2.058.715		2.413.684		2.612.450		2.784.689		2.990.198	100%	15.020.262			73 PD
1	08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum ***	Prosentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang terpenuhi	100%	100%	471.755		508.655	100%	559.520	100%	665.735	100%	762.309	100%	812.360	100%	3.780.334			SETDA
1	10 Program Pendukung Pelayanan Pendidikan ***	Terdukungnya pelayanan pendidikan	100%	100%	2.986.000	1,00	5.120.000	-	4.220.000	-	4.430.000	-	3.030.000	-	3.030.000	-	22.816.000			DISDIKBUD

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD pada dasarnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan daerah tahun 2016-2021. Penetapan IKU RPJMD bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi - misi Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada akhir periode masa jabatannya. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *impact* pada tujuan dan indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah yang dijabarkan setiap tahunnya, sehingga capaian target yang diinginkan pada akhir periode RPJMD diharapkan akan dapat dengan mudah diukur kinerjanya.

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa pencapaian kinerja atas IKU yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang sekaligus juga menjadi tolok ukur gambaran kemajuan pembangunan daerah di Kabupaten Semarang selama kurun waktu 2016-2021.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka IKU dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 akan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai hasil pembangunan sosial dan ekonomi seperti Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan lain-lain.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial antara lain kondisi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan lain-lain.

Adapun **Aspek Daya Saing Daerah** merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam aspek ini, indikator yang diukur antara lain adalah : Indeks Nilai Tukar Petani, Indeks Pembangunan Desa, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan ketiga aspek tersebut dapat diuraikan secara rinci dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 9.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,62	5,81	5,98	6,15	6,33	6,50	6,50
1.2.	Angka harapan hidup	72,42	72,9	72,56	72,64	72,71	72,78	72,78
1.3.	Pendapatan per kapita (Juta Rp.)	6.383	6.539	6.695	6.851	7.007	7.161	7.161
1.4.	Nilai PDRB (Trilyun Rp.)	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	23,5
1.5.	Laju Inflasi (%)	3,12	3,40	3,67	3,95	4,22	4,5	4,5
1.6.	Kontribusi PAD terhadap Total APBD (%)	14,70	15,15	15,65	16,10	16,55	17	17
1.7.	Persentase penduduk miskin (%)	7,70	7,50	7,30	7,10	6,80	6,50	6,50

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1.	<u>Pendidikan</u>							
1.1.	Rata-rata lama sekolah	7,33	7,34	7,35	7,36	7,37	7,38	7,38
1.2.	Angka harapan lama sekolah	12,83	12,84	12,85	12,86	12,87	12,88	12,88
1.3.	Peningkatan penyaluran beasiswa miskin (%)	2,61	4,54	4,88	5,13	5,18	5,32	5,32
2.	<u>Kesehatan</u>							
2.1.	Prevalensi Gizi kurang pada balita (%)	5,18	5,13	5,08	5,03	4,98	4,95	4,95
	Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
1.	Kebudayaan							
1.1.	Jumlah peningkatan grup kesenian (grup)	4	5	6	10	15	24	24
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Fokus Layanan Urusan Wajib							
	Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.	<u>Pendidikan</u>							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka Partisipasi Sekolah :							
	Usia 7 - 12 Tahun	100	100	100	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Usia 13 - 15 Tahun	96,89	96,90	96,91	96,92	96,93	96,93	96,93
	Usia 16 -18 Tahun	61,35	61,36	61,37	61,38	61,39	61,40	61,40
2.	<u>Kesehatan</u>							
2.1.	Persalinan oleh tenaga yang berkompeten (%)	95	95	95	95	95	95	95
2.2.	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat pertahun (%)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
2.3.	Angka Kematian Bayi (AKB)	10,08	10,06	10,04	10,02	10	9,80	9,80
2.4.	Angka Kematian Balita (AKABA)	12,40	12,20	12,10	12	11,80	11,60	11,60
2.5.	Angka Kematian Ibu (AKI)	117	117	116	116	115	115	115
2.5.	Persentase rumah tangga yang ber PHBS strata sehat utama	35	40	45	50	55	60	60
2.5.	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan (%)	17,51	11,52	11,06	9,68	8,76	7,83	7,83
3.	<u>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>							
3.1.	Pekerjaan Umum							
3.1.1.	Persentase panjang jalan yang terpasang PJU (%)	24,28	26,00	27,72	29,44	31,16	32,88	32,88
3.1.2.	Luas Irigasi Pertanian dalam kondisi baik (%)	53,02	55,34	57,50	59,55	61,25	63,12	63,12
3.1.3.	Persentase Luas Irigasi dalam kondisi baik (%)	53	57	62	67	72	76	76
3.1.4.	Persentase penduduk berakses sanitasi sehat (%)	89,08	92,72	96,36	100	100	100	100
3.1.5.	Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik (%)	73	75	77	80	82	85	85

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.	Penataan Ruang							
3.2.1.	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (Ha)	529,65	530,05	532,25	532,75	533,25	533,75	533,75
3.2.2.	Persentase bangunan ber-IMB (%)	65	70	75	80	85	90	90
4.	<u>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</u>							
4.1.	Luas lingkungan permukiman kumuh (Ha)	248,41	187,65	90,63	0	0	0	0
4.2.	Rasio Rumah Layak Huni	0,756	0,756	0,756	0,756	0,756	0,757	0,757
5.	<u>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</u>							
5.1.	Persentase penurunan pelanggaran perda (%)	54	49	44	39	35	32	32
5.2.	Persentase penurunan pelanggaran trantibum	9,3	8,4	7,5	6,8	5,1	1	1
6.	<u>Sosial</u>							
6.1.	Jumlah Lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan bantuan (%)	0	20	40	60	80	100	100
6.2.	Persentase penurunan tingkat penyandang masalah sosial (%)	0,99	1,09	1,20	1,32	1,45	1,60	1,60

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.	<u>Tenaga Kerja</u>							
1.1.	Calon tenaga kerja yang Terampil (%)	2,86	3,15	3,47	3,81	4,19	4,61	4,61
1.2.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	22	13	16	19	20	22	22
1.3.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,25	4,1	3,95	3,8	3,65	3,50	3,50
1.4.	Keselamatan dan Perlindungan tenaga kerja (%)	72	78	79	81	83	84	84
2.	<u>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</u>							
2.1.	Persentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak (%)	7,69	9,61	10,57	11,63	12,79	14,07	14,07
3.	<u>Pangan</u>							
3.1.	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kap/Tahun)	176	177	178	179	180	182	182
3.2.	Pola pangan harapan (%)	86	88	90	91	92	92	92
4.	<u>Lingkungan Hidup</u>							
4.1.	Persentase penanganan sampah (%)	20,24	20,49	20,74	20,99	21,24	21,49	21,49
4.2.	Persentase penduduk berakses air minum aman (%)	87,54	91,69	95,85	100	100	100	100
4.3.	Persentase TPS persatuan penduduk (%)	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83	0,83
4.4.	Jumlah penerapan teknologi tepat guna yang mendapat fasilitasi dari pemerintah (unit)	3	10	19	19	28	38	38
5.	<u>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u>							
5.1.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	5	6	6,5	6,9	7,5	8	8

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100
6.	<u>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</u>							
6.1.	Persentase kesejahteraan dan ketahanan keluarga (%)	56,61	57,04	57,47	57,90	58,34	58,77	58,77
7.	<u>Perhubungan</u>							
7.1.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus (Buah)	Tipe A=0	Tipe A=0	Tipe A=0	Tipe A=0	Tipe A=0	Tipe A=0	Tipe A=0
		Tipe B=1	Tipe B=1	Tipe B=0	Tipe B=0	Tipe B=0	Tipe B=0	Tipe B=0
		Tipe C=7	Tipe C=7	Tipe C=7	Tipe C=8	Tipe C=9	Tipe C=9	Tipe C=9
7.2.	Angkutan darat (%)	0,015	0,026	0,024	0,023	0,022	0,021	0,021
8.	<u>Komunikasi dan Informatika</u>							
8.1.	Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik (%)	100	100	100	100	100	100	100
8.2.	Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal (%)	24,44	24,53	33,33	43,66	48,72	51,22	51,22
9.	<u>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</u>							
9.1.	Persentase Peningkatan jumlah unit UMKM yang Berijin (%)	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
9.2.	Jumlah Koperasi yang berkualitas (unit)	50	85	120	155	193	228	228
9.3.	Nilai volume usaha koperasi (Juta Rp.)	681240	694860	708760	722935	741008	741008	741008
9.4.	Jumlah Usaha Mikro Binaan (Unit)	10296	10406	10511	10666	10816	10816	10816
10.	<u>Penanaman Modal</u>							
10.1.	Jumlah investor (PMDN/PMA)	227	262	277	305	335	370	370
10.2.	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)	330	361,81	396,69	434,93	476,86	522,83	522,83

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.3.	Persentase Peningkatan Nilai investasi Daerah	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
11.	<u>Kepemudaan dan Olahraga</u>							
11.1.	Persentase organisasi Pemuda berprestasi (%)	20	20	40	40	40	40	40
11.2.	Indeks cabang olahraga yang berprestasi (%)	67	73	80	87	93	93	93
12.	<u>Kebudayaan</u>							
12.1.	Peningkatan jumlah Museum dan Kepurbakalaan (buah)	3	4	5	5	6	7	7
	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
1.	<u>Pariwisata</u>							
2.1.	Persentase peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata (%)	5,37	5,91	6,21	6,52	6,84	7,18	7,18
2.	<u>Pertanian</u>							
2.1.	Persentase kebijakan usaha tani yang terlaksana (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.2.	Produktivitas hasil pertanian pertahun (ton/Hektar)	58,38	58,96	59,55	60,15	60,75	61,36	61,36
3.	<u>Kehutanan</u>							
3.1.	Produktivitas Hasil Hutan Pertahun (m ³ /Hektar)	88,89	89,89	90,91	91,95	93,02	94,12	94,12
4.	<u>Perindustrian</u>							
4.1.	Persentase pembinaan kelompok industri (%)	18	18	18	20	20	20	20
4.2.	Persentase peningkatan jumlah industri kecil yang Berijin(%)	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan							
1.	<u>Perencanaan</u>							
1.1.	Persentase usulan kegiatan berbasis musrenbang yang tertuang dalam RKPD (%)	70	70	70	70	70	70	70
2.	<u>Keuangan</u>							
2.1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	<u>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</u>							
3.1.	Persentase Kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan struktural (%)	87,23	92,00	95,00	98,00	100	100	100
3.2.	Persentase peningkatan disiplin pegawai (%)	99,95	99,96	99,96	99,97	99,97	99,97	99,97
3.3.	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat PNS (%)	90,36	90,88	91,24	92	93	94	94
4.	<u>Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</u>							
4.1.	Sekretariat Daerah							
4.1.1.	Realisasi Indikator Kinerja yang tercapai sesuai target (%)	100	100	100	100	100	100	100
4.1.2.	Persentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah (%)	24,59	25,82	27,11	28,47	29,89	32,72	32,72
4.1.3.	Skor evaluasi SAKIP	CC	CC	CC	CC	B	B	B
4.1.4.	Persentase peningkatan kualitas penyusunan LPPD (%)	100	100	100	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1.	<u>Pertanian</u>							
1.1.	Indeks Nilai Tukar Petani	100,89	101,39	101,89	102,39	102,89	103,39	103,39
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1.	<u>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>							
1.1.	Tersedianya dokumen tata ruang yang disahkan (Jumlah)	1	4	5	5	5	4	4
1.2.	Rasio elektrifikasi (%)	99	99	100	100	100	100	100
1.3.	Persentase Kondisi infrastruktur dalam kondisi baik	55	73,9	77,6	81,5	85,6	89,8	89,8
2.	<u>Lingkungan Hidup</u>							
2.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,79	58,48	61,18	68,5	68,53	68,7	68,7
2.3.	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pertahun (%)	54,79	58,24	61,69	65,14	68,59	68,61	68,61
3.	<u>Perhubungan</u>							
3.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)	0,148	0,147	0,145	0,144	0,142	0,140	0,140
	Fokus Iklim Berinvestasi							
1.	<u>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u>							
1.1.	Indeks pembangunan Desa	29,5	36,8	43,5	49,6	55,3	60	60

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	<u>Penanaman Modal</u>							
1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Perijinan	84,31	88,53	89,41	90,30	91,21	92,12	92,12
	Fokus Sumber Daya Manusia							
1.	Indeks Pembangunan Gender	25,43	27,97	29,37	30,84	32,38	34	34

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dan APBD tahun 2016 dan tahun 2022 belum memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Semarang serta untuk memberikan payung hukum atau pedoman dalam penyusunan RKPD dan APBD Tahun 2016 dan 2022, maka sesuai amanat pasal 287 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan pembangunan Provinsi, maka RKPD Tahun 2016 yang telah disusun dan digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun 2016 tidak perlu diubah sepanjang tidak bertentangan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021.

Sedangkan untuk penyusunan RKPD tahun 2022, RPJMD 2016-2021 dapat diberlakukan sebagai pedoman sementara untuk menyusun RKPD Tahun 2022 sebelum tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2022-2027 yang memuat penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya. Sehingga dengan demikian untuk penyusunan RKPD Tahun 2022 selain berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 berpedoman juga pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai pedoman sementara sebelum tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2022-2027 yang memuat penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.

Mengingat dokumen RPJMD ini memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun, maka ditengah waktu pelaksanaannya dapat dilakukan evaluasi paruh waktu (*mid term evaluation*) untuk mengetahui sejauhmana terjadi ketidaksesuaian atau distorsi. Jika hal semacam ini terjadi maka perlu dilakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap dokumen RPJMD dimaksud untuk disesuaikan dengan hasil evaluasi paruh waktu tersebut. Oleh karena itu diperlukan tim monitoring untuk melaksanakan evaluasi secara reguler maupun periodik.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi-misi dan program pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dikampanyekan pada saat menjelang pemilihan Bupati secara langsung, yang telah diselaraskan dengan visi-misi daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Penyelarasan tersebut telah melalui berbagai forum diskusi dan konsultasi publik yaitu melalui forum musrenbang, dengan harapan program-program yang ada di dalam RPJMD ini sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam penyusunan RPJMD ini telah memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam sejumlah peraturan perundang - undangan antara lain yaitu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan dan perumusan program dan indikator kinerja dalam RPJMD ini mengacu pada sejumlah program yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan RPJPD Tahun 2005-2025 serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031.

Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 memuat seluruh program-program atau rencana kerja Bupati meliputi tugas-tugas desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas-tugas pemerintahan umum serta tugas dari provinsi yang sifatnya sektoral. Pelaksanaan program dalam rangka menjalankan tugas-tugas di luar tugas desentralisasi perlu sinkronisasi dengan program pembangunan tingkat nasional maupun provinsi, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat sejalan dengan pembangunan provinsi maupun nasional.

RPJMD ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan periode yang sama yaitu tahun 2016-2021, dan juga akan menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan RKPD dan APBD tahun 2016-2021, serta menjadi salah satu pedoman dalam menyusun RKPD Tahun 2022 sebagai RKPD transisi.

RPJMD ini nantinya juga akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan/*stakeholder* di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016 – 2021, dan sebagai dasar bagi Bupati - Wakil Bupati dalam menyusun LKPJ dan LKPJ-AMJ diakhir periode masa jabatan Bupati - Wakil Bupati serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan penilaian.

BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 adalah panduan bagi pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang terejawantahkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, tidak terlepas dari peran jajaran Pemerintah Kabupaten Semarang dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh unsur di Kabupaten Semarang. Keberhasilan perwujudan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Visi **“Peneguhan Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera”** juga memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 sebagai bagian dari pentahapan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, merupakan jalan bagi terwujudnya cita-cita RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, yaitu: **“Kabupaten Semarang yang Adil, Mandiri dan Sejahtera”**

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN